



LKJ-IP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr, Wb.



Alhamdulillah robbil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya Pemerintah Kota Dumai telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Dumai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun Ketiga. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016 - 2021, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. Besar harapan Kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek - aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Pemerintah Kota Dumai sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Dumai.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dumai, Maret 2020



WALIKOTA DUMAI

H. ZULKIFLI, AS. M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	2
1. Aspek Pemerintah Daerah.....	2
2. Aspek Geografi dan Demografi.....	5
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	5
b. Letak dan Kondisi Geografis.....	6
c. Topografi.....	6
d. Geologi	7
e. Hidrologi.....	7
f. Klimatologi.....	8
g. Wilayah Rawan Bencana.....	9
h. Demografi.....	10
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	12
a. Perkembangana PDRB.....	12
b. Pendapatan per Kapita.....	14
c. Tingkat Kemiskinan.....	16
d. Distribusi Pendapatan.....	19
e. Inflasi	20
f. Produktivitas Total Daerah.....	22
g. Kondisi IPM Kota Dumai.....	22
h. Inovasi Pemerintah Kota Dumai.....	24
D. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
A. VISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.....	26

B. MISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.....	27
C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
A. PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA DUMAI 2019	47
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	51
1. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja.....	51
Tujuan 1.....	51
Sasaran Strategis 1.1.....	54
Sasaran Strategis 1.2.....	56
Sasaran Strategis 1.3.....	67
Tujuan 2.....	71
Sasaran Strategis 2.1.....	76
Sasaran Strategis 2.2.....	82
Sasaran Strategis 2.3.....	86
Tujuan 3.....	89
Sasaran Strategis 3.1.....	92
Sasaran Strategis 3.2.....	106
Tujuan 4.....	111
Sasaran Strategis 4.1.....	113
Tujuan 5.....	116
Sasaran Strategis 5.1.....	119
Sasaran Strategis 5.2.....	121
Sasaran Strategis 5.3.....	124
Sasaran Strategis 5.4.....	126
Tujuan 6.....	129
Sasaran Strategis 6.1.....	132
Sasaran Strategis 6.2.....	134
Tujuan 7	138
Sasaran Strategis 7.1.....	140
Sasaran Strategis 7.2.....	142
Tujuan 8.....	145

Sasaran Strategis 8.1.....	147
Sasaran Strategis 8.2.....	150
Tujuan 9.....	152
Sasaran Strategis 9.1.....	155
Sasaran Strategis 9.2.....	157
C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	160
D. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019.....	166
E. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019	168
F. PENJABARAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	178
1. Sasaran 1.1. Meningkatnya Kapasitas Instalasi Pengolahan Sumber Air Bersih.....	178
2. Sasaran 1.2. Meningkatnya Insfrastruktur Perkotaan.....	180
3. Sasaran 1.3. Meningkatnya kualitas lingkungan.....	184
4. Sasaran 2.1. Meningkatnya partisipasi pendidikan.....	185
5. Sasaran 2.2. Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar.....	188
6. Sasaran 2.3. Meningkatnya fasilitas sarana prasarana pendidikan dasar.....	190
7. Sasaran 3.1. Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat.....	194
8. Sasaran 3.2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	199
9. Sasaran 4.1. Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.....	202
10. Sasaran 5.1. Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat.....	203
11. Sasaran 5.2. Menurunnya persentase penduduk miskin	204
12. Sasaran 5.3. Menurunnya laju pertumbuhan pendudukan.....	205
13. Sasaran 5.4. Meningkatnya Lapangan Kerja.....	206
14. Sasaran 6.1. Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik.....	207
15. Sasaran 6.2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintah daerah.....	229
16. Sasaran 7.1. Meningkatnya pendapatan petani.....	255
17. Sasaran 7.2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.....	259

18. Sasaran 8.1. Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah.....	261
19. Sasaran 8.2. Meningkatnya investasi di Kota Dumai.....	262
20. Sasaran 9.1 Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar.....	263
21. Sasaran 9.2. Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.....	264
BAB IV PENUTUP.....	267

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Realisasi Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019
3. Pernyataan Telah di Review Atas LKJ-IP tahun 2019 Oleh Inspektorat Kota Dumai

DAFTAR TABEL

BAB 1	PENDAHULUAN	
Tabel 1.1	Rekapitulasi PNS Kota Dumai Berdasarkan Golongan Dan Unit Kerja Desember 2019	I-4
Tabel 1.2	Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai	I-7
Tabel 1.3	Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2018	I-8
Tabel 1.4	Banyaknya curah Hujam di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2018	I-9
Tabel 1.5	Banyaknya Kejadian Kebakaran di Kota Dumai	I-10
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2002-2017	I-11
Tabel 1.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2011-2018	I-11
Tabel 1.8	PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018	I-13
Tabel 1.9	Laju Pertumbuhan Kota Dumai Tahun 2013-2017	I-14
Tabel 1.10	Hasil Analisis Tipologi Kawasan Kota Dumai Tahun 2013-2017	I-15
Tabel 1.11	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Di Kota Dumai Tahun 2013-2017	I-15
Tabel 1.12	Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2013-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau	I-16
Tabel 1.13	Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan kota Dumai Tahun 2010-2017	I-18
Tabel 1.14	Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2013-2018 Kota Dumai vs Provinsi Riau	I-20
Tabel 1.15	Perbandingan kondisi IPM kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2017	I-23
Tabel 1.16	Kondisi IPM kabupaten Kota/kota Di Provinsi Riau Tahun 2010-2018	I-23
BAB 2	PERENCANAAN KINERJA	
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	II-39
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja 2019 Pemerintah Kota Dumai	II-45
Tabel 2.3	Sasaran dan Program perubahan perjanjian kinerja 2019 pemerintah Kota Dumai	II-48
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA	
Tabel 3.1	Skala Penilaian Kinerja Kota Dumai Tahun 2019	III-49
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019	III-49
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 1	III-53
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1	III-57
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2	III-59
Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.3	III-71
Tabel 3.7	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 2	III-75
Tabel 3.8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Dumai Tahun 2019	III-76
Tabel 3.9	Angka harapan Lama Sekolah	III-78
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.2	III-87
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Kinerja sasaran Strategis 2.3	III-91
Tabel 3.12	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 3	III-95
Tabel 3.13	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai Dari Tahun 2010 sampai dengan 2019	III-96
Tabel 3.14	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1	III-98
Tabel 3.15	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2	III-114
Tabel 3.16	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 4	III-119
Tabel 3.17	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1	III-122
Tabel 3.18	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 5	III-124
Tabel 3.19	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.1	III-128
Tabel 3.20	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.2	III-131
Tabel 3.21	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.3	III-133
Tabel 3.22	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.4	III-135
Tabel 3.23	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 6	III-140
Tabel 3.24	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1	III-142
Tabel 3.25	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2	III-144
Tabel 3.26	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 7	III-149
Tabel 3.27	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.1	III-151

Tabel 3.28	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.2	III-154
Tabel 3.29	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 8	III-156
Tabel 3.30	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.1	III-159
Tabel 3.31	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.2	III-162
Tabel 3.32	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 9	III-165
Tabel 3.33	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.1	III-167
Tabel 3.34	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.2	III-170
Tabel 3.35	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-173
Tabel 3.36	Efisiensi Anggaran Tahun 2019 Pemerintah Kota Dumai	III-175
Tabel 3.37	Eliminasi Program Tahun 2019	III-175
Tabel 3.38	Realisasi Anggaran sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja 2019 Pemerintah Kota Dumai	III-182

DAFTAR GAMBAR

BAB 1	PENDAHULUAN	
Gambar 1.1	Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai	I-6
Gambar 1.2	Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2018	I-12
Gambar 1.3	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2012-2017	I-17
Gambar 1.4	Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2012-2017 Kota Dumai dan Provinsi	I-17
Gambar 1.5	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2012-2017	I-18
Gambar 1.6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2010-2017	I-19
Gambar 1.7	Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2011-2017	I-20
Gambar 1.8	Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau	I-21
Gambar 1.9	Perbandingan IPM kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2018	I-24
 BAB 3	 AKUNTABILITAS KINERJA	
Gambar 3.1	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	III-54
Gambar 3.2	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	III-56
Gambar 3.3	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	III-56
Gambar 3.4	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	III-57
Gambar 3.5	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	III-58
Gambar 3.6	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	III-59
Gambar 3.7	Jumlah Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di Kecamatan	III-60
Gambar 3.8	Persentase panjang jaringan Jalan dalam Kondisi baik	III-61
Gambar 3.9	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	III-62
Gambar 3.10	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	III-62
Gambar 3.11	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	III-63
Gambar 3.12	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	III-64
Gambar 3.13	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	III-64
Gambar 3.14	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	III-65
Gambar 3.15	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	III-66
Gambar 3.16	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	III-66
Gambar 3.17	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	III-67
Gambar 3.18	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	III-67
Gambar 3.19	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	III-68
Gambar 3.20	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	III-68
Gambar 3.21	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	III-69
Gambar 3.22	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	III-69
Gambar 3.23	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	III-70
Gambar 3.24	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	III-70
Gambar 3.25	Persentase Kualitas udara	III-71
Gambar 3.26	Persentase kualitas air	III-72
Gambar 3.27	Persentase Kualitas udara	III-73

Gambar 3.28	Persentase kualitas air	III-73
Gambar 3.29	Persentase Kualitas udara	III-74
Gambar 3.30	Persentase kualitas air	III-74
Gambar 3.31	Rata-rata lama Sekolah	III-75
Gambar 3.32	Harapan lama sekolah	III-77
Gambar 3.33	Rata-rata lama sekolah	III-79
Gambar 3.34	Harapan lama sekolah	III-79
Gambar 3.35	Rata-rata lama sekolah	III-80
Gambar 3.36	Harapan lama sekolah	III-80
Gambar 3.37	Angka Melek Huruf	III-81
Gambar 3.38	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	III-82
Gambar 3.39	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	III-83
Gambar 3.40	Angka melek huruf	III-84
Gambar 3.41	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	III-85
Gambar 3.42	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	III-85
Gambar 3.43	Angka melek huruf	III-86
Gambar 3.44	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	III-86
Gambar 3.45	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	III-87
Gambar 3.46	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	III-88
Gambar 3.47	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	III-89
Gambar 3.48	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	III-89
Gambar 3.49	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	III-90
Gambar 3.50	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	III-90
Gambar 3.51	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	III-91
Gambar 3.52	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	III-92
Gambar 3.53	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	III-93
Gambar 3.54	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	III-93
Gambar 3.55	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	III-94
Gambar 3.56	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	III-94
Gambar 3.57	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	III-95
Gambar 3.58	Angka Harapan Hidup	III-96
Gambar 3.59	Angka Harapan Hidup	III-97
Gambar 3.60	Angka Harapan Hidup	III-97
Gambar 3.61	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian	III-99
Gambar 3.62	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	III-100
Gambar 3.63	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	III-101
Gambar 3.64	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	III-101
Gambar 3.65	Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan 2019	III-102
Gambar 3.66	Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2019	III-102
Gambar 3.67	Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan 2019	III-103
Gambar 3.68	Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019	III-103
Gambar 3.69	Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan 2019	III-104
Gambar 3.70	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019	III-105
Gambar 3.71	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2019	III-105
Gambar 3.72	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	III-106
Gambar 3.73	Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2019	III-106
Gambar 3.74	Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2019	III-107
Gambar 3.75	Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2019	III-107

Gambar 3.76	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2019	III-108
Gambar 3.77	Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai Dari Tahun 2015 s/d 2019	III-109
Gambar 3.78	Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2019	III-110
Gambar 3.79	Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2019	III-110
Gambar 3.80	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	III-111
Gambar 3.81	Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2015 sampai dengan 2019	III-112
Gambar 3.82	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	III-113
Gambar 3.83	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	III-113
Gambar 3.84	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	III-114
Gambar 3.85	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	III-115
Gambar 3.86	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	III-116
Gambar 3.87	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	III-117
Gambar 3.88	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	III-117
Gambar 3.89	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	III-118
Gambar 3.90	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	III-118
Gambar 3.91	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	III-119
Gambar 3.92	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	III-120
Gambar 3.93	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	III-121
Gambar 3.94	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	III-121
Gambar 3.95	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	III-122
Gambar 3.96	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	III-123
Gambar 3.97	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	III-124
Gambar 3.98	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	III-125
Gambar 3.99	PDRB per kapita	III-125
Gambar 3.100	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	III-126
Gambar 3.101	PDRB per kapita	III-126
Gambar 3.102	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	III-127
Gambar 3.103	PDRB per kapita	III-127
Gambar 3.104	Indeks Gini	III-128
Gambar 3.105	Indeks Gini	III-129
Gambar 3.106	Indeks Gini	III-129
Gambar 3.107	Indeks Gini	III-130
Gambar 3.108	Tingkat Kemiskinan	III-131
Gambar 3.109	Tingkat Kemiskinan	III-132
Gambar 3.110	Tingkat Kemiskinan	III-132
Gambar 3.111	Tingkat Kemiskinan	III-133
Gambar 3.112	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	III-134
Gambar 3.113	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	III-134
Gambar 3.114	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	III-135
Gambar 3.115	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-136
Gambar 3.116	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-138
Gambar 3.117	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-138
Gambar 3.118	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-139
Gambar 3.119	Indeks Kepuasan Masyarakat	III-140

Gambar 3.120	Indeks Kepuasan Masyarakat	III-141
Gambar 3.121	Indeks Kepuasan Masyarakat	III-142
Gambar 3.122	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	III-143
Gambar 3.123	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	III-143
Gambar 3.124	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	III-144
Gambar 3.125	Opini BPK	III-145
Gambar 3.126	PersenNilai Akuntabilitas	III-145
Gambar 3.127	Opini BPK	III-146
Gambar 3.128	PersenNilai Akuntabilitas	III-146
Gambar 3.129	Opini BPK	III-147
Gambar 3.130	PersenNilai Akuntabilitas	III-147
Gambar 3.131	Opini BPK	III-148
Gambar 3.132	PersenNilai Akuntabilitas	III-148
Gambar 3.133	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	III-149
Gambar 3.134	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	III-150
Gambar 3.135	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	III-150
Gambar 3.136	Pendapatan perkapita petani	III-151
Gambar 3.137	Pendapatan perkapita petani	III-153
Gambar 3.138	Pendapatan perkapita petani	III-153
Gambar 3.139	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	III-154
Gambar 3.140	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	III-155
Gambar 3.141	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	III-156
Gambar 3.142	Laju pertumbuhan ekonomi	III-157
Gambar 3.143	Laju pertumbuhan ekonomi	III-158
Gambar 3.144	Laju pertumbuhan ekonomi	III-158
Gambar 3.145	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	III-159
Gambar 3.146	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	III-160
Gambar 3.147	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	III-160
Gambar 3.148	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	III-161
Gambar 3.149	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	III-161
Gambar 3.150	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	III-162
Gambar 3.151	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	III-163
Gambar 3.152	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	III-164
Gambar 3.153	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	III-164
Gambar 3.154	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	III-165
Gambar 3.155	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	III-166
Gambar 3.156	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	III-167
Gambar 3.157	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	III-168
Gambar 3.158	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	III-169
Gambar 3.159	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	III-169
Gambar 3.160	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	III-170
Gambar 3.161	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	III-171
Gambar 3.162	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	III-172



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai ini mendasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang- Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumau Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;

8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2016 - 2021. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

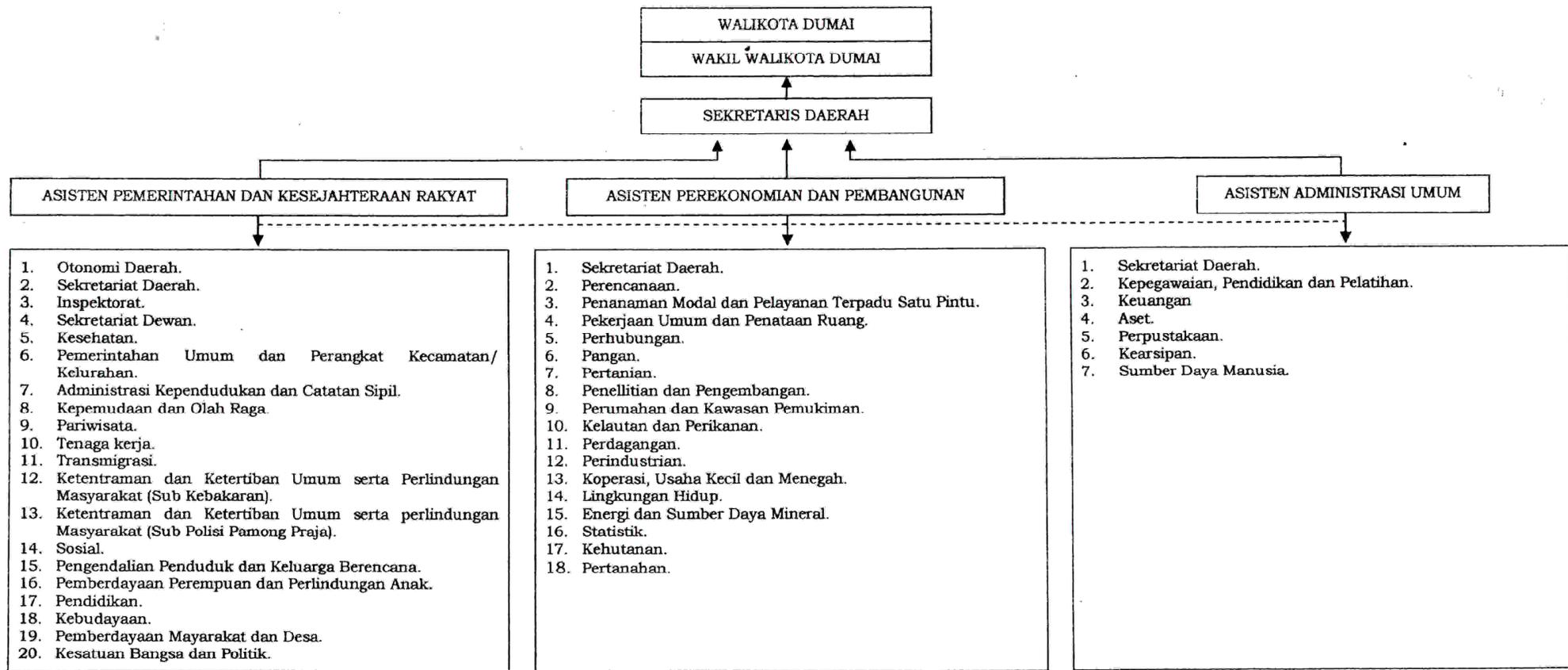
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Dumai selama Tahun Anggaran 2019;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2019;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Dumai di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Dumai dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Aspek Pemerintah Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 29/Org/2019 tentang Alur koordinasi berdasarkan urusan bidang pemerintahan dan pembentukan kelembagaan. Maka struktur organisasi Pemerintah kota Dumai sebagai berikut:

ALUR KOORDINASI BERDASARKAN URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN BENTUK KELEMBAGAAN



Keterangan :
 → Garis Koordinasi Vertikal dan Pengambilan Keputusan
 - - - - - Garis Koordinasi Horizontal
 ← Garis Koordinasi menurut bentuk serta tugas dan fungsi organisasi

Tabel 1.1 Rekapitulasi PNS Kota Dumai Berdasarkan Golongan Dan Unit Kerja
Desember 2019

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan						
No	OPD	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Total
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	7	19	3	29
2	Badan Narkotika Nasional Kota Dumai	0	1	3	2	6
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	24	8	2	34
4	Badan Pendapatan Daerah	1	33	31	5	70
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai	0	0	2	0	2
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	18	32	5	55
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	5	23	10	38
8	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0	4	26	3	33
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	7	21	2	30
10	Dinas Kesehatan (Tidak termasuk RSUD)	0	96	332	22	450
11	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai	0	33	248	20	301
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	3	55	9	67
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	7	24	2	34
14	Dinas Lingkungan Hidup	3	7	31	5	46
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	22	54	2	78
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	26	5	31
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	7	33	6	46
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	275	985	512	1777
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	2	20	5	27
20	Dinas Perdagangan	0	10	27	6	43
21	Dinas Perhubungan	1	32	42	3	78
22	Dinas Perikanan	0	5	19	6	30
23	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	8	24	7	40
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	4	22	1	27
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	6	17	3	26
26	Dinas Sosial	0	5	12	4	21
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	5	20	5	30
28	Inspektorat	0	5	24	18	47
29	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0	3	12	2	17
30	Kecamatan Bukit Kapur	1	15	38	0	54
31	Kecamatan Dumai Barat	0	6	36	1	43
32	Kecamatan Dumai Kota	0	13	40	1	54
33	Kecamatan Dumai Selatan	0	10	40	1	51
34	Kecamatan Dumai Timur	0	7	33	1	41
35	Kecamatan Medang Kampai	0	11	36	0	47
36	Kecamatan Sungai Sembilan	0	9	37	2	48
37	Satuan Polisi Pamong Praja	2	30	16	5	53
38	Sekretariat Daerah	0	35	70	28	133
39	Sekretariat DPRD	0	15	22	6	43
40	Sekretariat KPU	0	3	4	0	7
JUMLAH		15	788	2564	720	4087

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara administrasi Kota Dumai dikepalai oleh seorang Walikota dengan seorang Wakil Walikota. Didalam melaksanakan tugasnya, dibantu Sekretariat Daerah, Inspektorat dan 22 Dinas dan Badan serta 8 kantor pelayanan masyarakat, diantaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai. Sekretaris Daerah membawahi 3 (tiga) asisten dan 11 (sebelas) bagian yaitu :

a. Asisten I (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), yang membawahi:

1. Bagian Adm Pemerintahan Umum
2. Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Adm Pertanahan
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Komunikasi

b. Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) yang membawahi :

1. Bagian Adm Perekonomian
2. Bagian Adm Pembangunan
3. Bagian Adm Sumberdaya Alam

c. Asisten III (Administrasi Umum) yang membawahi :

1. Bagian Hukum dan HAM
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Umum

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2019 berjumlah 4.087 orang dengan rincian golongan I berjumlah 15 orang, golongan II berjumlah 788 orang, golongan III berjumlah 2.564 orang dan selebihnya sebanyak 720 orang adalah golongan IV. Sedang berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 1.403 laki-laki dan 2.684 Perempuan.

2. Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mempunyai luas wilayah 1.727,38 km². Kota Dumai memiliki 7 (Tujuh) kecamatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- Utara : Selat Rupa, Pulau Rupa dan selat Melaka .
- Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.

- Barat : Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

b. Letak dan Kondisi Geografis

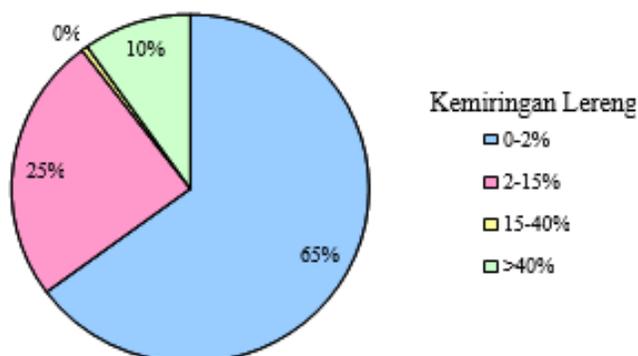
Kota Dumai merupakan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terletak di pesisir Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur transportasi perdagangan yang strategis. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101°23'37" -101°28'13" Bujur Timur dan 1°23'23" - 1°24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 1.727,38 km².

Kota Dumai memiliki 15 sungai besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Kota Dumai dengan total panjang keseluruhannya sepanjang 222 km, yang bermuara ke Selat Rupat dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Berikut gambar 2.1 Peta Kota Dumai.

c. Topografi

Jika dilihat dari segi topografi, Kota Dumai termasuk ke dalam kategori daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0 < 3 %, di mana sebelah utara Kota Dumai umumnya merupakan dataran yang landai dan ke selatan semakin bergelombang. Kota Dumai berada pada ketinggian antara 1–50 meter di atas permukaan laut, dan secara morfologis sebagian besar atau sekitar 41.032 Ha (64,90%) merupakan daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2%, sekitar 15.642 Ha (24,71%) merupakan daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15%, dan sekitar 364 Ha (0,58%) merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% serta sekitar 6.200 Ha (9,81%) merupakan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40%, yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur. Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 1.1 Diagram Pie Kemiringan Lereng Kota Dumai



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

d. Geologi

Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Formasi geologi Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari formasi Alluvium Muda dan Alluvium Tua yang berawa-rawa di wilayah pesisir Kota Dumai. Struktur geologi di Kota Dumai sebagian besar terbentuk dari endapan kuarter yang membentuk lahan bergambut.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu Typic Tropaquepts atau *Fluvisol Gleik* dan *Hydric Trophemis* atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0–3 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 5 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

e. Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat 51 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai seperti yang tersaji pada Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	-
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung

No	Kecamatan	Nama Sungai
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Nyirih 2. Sungai Siput 3. Sungai Bunian 4. Sungai Sepit 5. Sungai Perpat 6. Sungai Parit 7. Sungai Sepi 8. Sungai Tiram 9. Sungai Pauh 10. Sungai Bakau Tua 11. Sungai Teluk Dalam 12. Sungai Teluk Kijuk 13. Sungai Tengar Besar 14. Sungai Tengar Kecil 15. Sungai Tawar Kecil 16. Sungai Tawar Besar 17. Sungai Sempit Kecil 18. Sungai Sempit Besar 19. Sungai Tembuan 20. Sungai Tianjung 21. Sungai Santahalu 22. Sungai Penempul 23. Sungai Geniot 24. Sungai Geniot Kecil 25. Sungai Buluhala 26. Sungai Teras 27. Sungai Penyengat 28. Sungai Ilir 29. Sungai Danau 30. Sungai Hulu 31. Sungai Sembilan 32. Sungai Mampu 33. Sungai Mampu Kecil 34. Sungai Nerbit Kecil 35. Sungai Nerbit Besar 36. Sungai Paul 37. Sungai Mesjid 38. Sungai Banain 39. Sungai Saliyo 40. Sungai Bulu Ala 41. Sungai Tambuan 42. Sungai Teritib 43. Sungai Selat Mati
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	-
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	-

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2017

f. Klimatologi

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan kelembaban udara rata-rata di tahun 2017 berkisar antara 70-84%. Sedangkan suhu udara pada tahun 2017 berkisar antara 26,8°C-33,8°C. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan

terbanyak selama tahun 2017 terjadi pada bulan Februari sedangkan terkecil terjadi pada bulan Juni dengan nilai berturut-turut sebesar 418,0 mm³ dan 95,0 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari, April dan Mei yaitu sebanyak 21 hari dan terkecil pada bulan Juni yaitu sebanyak 6 hari. Berikut Tabel 1.3 Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2018. Dan Tabel 1.4 Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2011-2018 Kondisi klimatologi seperti ini sangat mendukung pengembangan perumahan maupun kegiatan pertanian, seperti persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Tabel 1.3 Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2010-2018

Bulan	Tahun							
	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016	2017	2018
Januari	19	13	13	13	13	16	20	14
Februari	6	11	11	11	11	11	21	5
Maret	15	11	11	11	11	9	12	12
April	16	11	11	11	11	17	21	11
Mei	5	14	14	14	14	15	21	19
Juni	9	7	7	7	7	15	6	4
Juli	9	14	14	14	14	13	9	10
Agustus	8	18	18	18	18	9	17	14
September	15	7	7	7	7	13	20	13
Oktober	22	17	17	17	17	15	20	22
Nopember	26	21	21	21	21	21	20	21

Bulan	Tahun							
	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016	2017	2018
Desember	14	24	24	24	24	20	19	18
Total	164	168	168	168	168	174	206	163

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 1.4 Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai
Selama Tahun 2011-2018

Bulan	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	182,3	130,0	130,0	200,0	200,0	121,6	411,7	96,6
Februari	29,3	132,0	132,0	150,0	150,0	59,3	418,0	44,3
Maret	45,0	198,0	198,0	201,0	201,0	94,0	182,6	90,7
April	403,4	261,0	261,0	226,0	226,0	194,2	181,0	166,3
Mei	23,3	157,0	157,0	190,0	190,0	358,3	145,0	187,4
Juni	77,4	49,0	49,0	160,0	160,0	64,6	95,0	48,6
Juli	162,1	203,0	203,0	160,0	160,0	122,4	106,7	157,4
Agustus	167,1	499,0	499,0	200,0	200,0	79,7	237,5	79,9
September	356,3	153,0	153,0	257,0	257,0	171,7	237,8	447,3
Oktober	260,8	121,0	121,0	290,0	290,0	82,3	179,4	447,3
Nopember	311,3	313,0	313,0	299,0	299,0	318,0	238,3	289,7
Desember	230,8	368,0	368,0	258,0	258,0	166,5	166,0	247,3
Total	2.249,1	2.584,0	2.584,0	2.591,0	2.591,0	1.832,6	2.599,0	2.302,8

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

g. Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan. Namun kebakaran hutan dan lahan ini dapat diantisipasi pada tahun 2017 dengan menumbuhkan kesadaran baik pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta masyarakat yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu terdapat juga potensi angin puting beliung yang disebabkan tingginya potensi dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam. Kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Jika dilihat dari banyaknya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan, maka selama periode 2016-2017 terjadi peningkatan kejadian bencana, dimana bencana kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi pada tahun 2016 dan 2017 berturut-turut sebanyak 10 kejadian dan 25 kejadian. Berikut tabel 1.5 Banyaknya Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai.

Tabel 1.5 Banyaknya Kejadian Kebakaran di Kota Dumai

Kabupaten/Kota	2016			2017		
	Hotspot	Luas Areal Terbakar	Jumlah Kejadian	Hotspot	Luas Areal Terbakar	Jumlah Kejadian
Kuantan Singingi	1017	0	0	2170	24.5	3
Indragiri Hulu	1188	36.5	5	1919	45.3	8
Indragiri Hilir	8063	75	2	1378	82	5
Pelalawan	11299	648.75	28	3296	162.16	41
Siak	12117	147.8	21	682	76.5	9
Kampar	3765	76.25	18	548	83.25	35
Rokan Hulu	7157	350	1	1869	68	10
Bengkalis	32248	115.8	24	1826	64	11
Rokan Hilir	26943	200.25	11	3198	392	16
Kepulauan Meranti	16162	487.5	20	515	236.11	19
Pekanbaru	0	54.3	10	0	12.7	6
Dumai	11782	156.5	10	395	122.75	25
RIAU	131741	2348.65	150	17796	1369.27	188

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018

h. Demografi

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai menunjukkan penurunan selama periode 2002-2017. Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 laju pertumbuhan penduduknya cenderung stagnan dengan besar pertumbuhan penduduk sebesar 4,83%. Mulai tahun 2005 sampai tahun 2008 terus mengalami penurunan dengan besaran pertumbuhan di tahun 2008 sebesar 2,45%. Namun di tahun 2008 dan 2009 pertumbuhan penduduk Kota Dumai kembali mengalami peningkatan menjadi 4,08%. Kemudian mengalami penurunan yang sangat tajam di tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 1,37%, namun pertumbuhannya kembali mengalami peningkatan di tahun 2011 dan 2012. Mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah penduduk Kota Dumai tidak mengalami pertumbuhan, atau dengan kata lain pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan dengan total pertumbuhan di tahun 2017 sebesar 1,96%. Selama periode 2002-2017, laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai tertinggi terjadi pada pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,74%, sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2010 dengan angka pertumbuhan sebesar 1,37%. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai tahun 2002-2017 adalah sebesar 3,29%. Selain kematian penduduk, kegiatan transmigrasi dan banyaknya minat menjadi tenaga kerja ke luar daerah maupun luar negeri menjadi salah satu indikator berkurangnya jumlah penduduk di beberapa kecamatan. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2002-2017 dapat dilihat pada table 1.6.

Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2002-2017

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2002	99.514	92.476	191.990	4,83
2003	106.696	94.567	201.263	4,83
2004	111.851	99.133	210.984	4,83
2005	112.924	106.427	219.351	3,97
2006	112.958	112.291	225.249	2,69
2007	115.902	115.219	231.121	2,61
2008	121.739	118.814	240.553	4,08
2009	129.992	120.375	250.367	4,08
2010	131.465	122.338	253.803	1,37
2011	133.645	126.268	259.913	2,41
2012	137.715	130.307	268.022	3,12
2013	140.776	133.313	274.089	2,26
2014	143.900	136.209	280.109	2,20
2015	146.792	139.175	285.967	2,09
2016	149.791	142.117	291.908	2,08
2017	152.731	144.907	297.638	1,96

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018

Jumlah penduduk paling banyak selama periode 2010-2017 terdapat di Kecamatan Dumai Timur dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata tertinggi selama periode 2010-2017 terjadi di Kecamatan Bukit Kapur yaitu sebesar 2,46%. Berikut ini tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahunan Rata-Rata Kota Dumai Selama Tahun 2010-2017.

Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2011-2018

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Luas Km2	Rata-rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018		
Bukit Kapur	42.399	43.403	44.447	45.479	46.522	200	2,35%
Medang Kampai	11.240	11.470	11.701	11.923	12.140	373	1,94%
Sungai Sembilan	30.475	31.158	31.860	32.546	33.231	975	2,19%
Dumai Barat	39.688	40.572	41.479	42.364	43.247	45	2,17%
Dumai Selatan	50.593	51.616	52.645	53.629	54.592	74	1,92%
Dumai Timur	60.450	61.685	62.932	64.127	65.299	48	1,95%
Dumai Kota	45.264	46.063	46.844	47.570	48.261	13	1,62%
	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	1.727	2,01%

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018

Jika melihat nilai rasio ketergantungan kota Dumai maka peluang kota Dumai untuk masuk dalam kondisi Bonus demografi sangat besar. Bonus demografi terjadi ketika komposisi penduduk masuk kedalam priode yang disebut dengan window of opportunity, yaitu suatu waktu dimana rasio ketergantungan berada pada titik terendah, biasa 50%, yang berarti bahwa jumlah penduduk usia kerja pada saat periode tersebut lebih dari dua kali lipat penduduk non usia kerja. Berikut ini gambar 2.3 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2017



Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2018

Sedangkan perbandingan jumlah penduduk non produktif antara usia anak-anak dengan usia tua (*child to old*) adalah 11, artinya penduduk usia non produktif didominasi oleh penduduk muda yakni 11 kali lipat penduduk tua. Kedua kondisi di atas menunjukkan bahwa Kota Dumai memiliki modal pembangunan (bonus demografi) yang besar berupa penduduk usia produktif yang siap menggerakkan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Disamping itu, angka kelahiran yang tinggi juga harus diantisipasi dan disikapi secara bijak melalui kebijakan-kebijakan pembangunan karena beberapa tahun ke depan beban pemerintah daerah akan semakin besar terkait penyediaan lapangan pekerjaan maupun penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya lainnya.

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

a. Perkembangan PDRB

Dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah harus memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Sebagai ukuran kuantitatif maka data-data PDRB tetap merupakan informasi yang berguna dan mendasar, walaupun belum bisa menggambarkan aspek pembangunan secara keseluruhan.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB. Selama tahun 2013-2018, PDRB Kota Dumai terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, PDRB ADHK Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 22,4

triliun rupiah, sedangkan PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas adalah sebesar 30,3 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang di Kota Dumai. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Dumai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 1.8

Tabel 1.8 PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2018

No	Sektor/Sub sektor	PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.290.663,15	1.437.574,71	1.551.170,34	1.687.641,38	1.807.090,00	1.878.453,07
B.	Pertambangan dan penggalian	93.218,95	108.904,95	120.471,72	121.859,63	116.790,00	120.202,29
C.	Industri pengolahan	10.909.915,76	12.499.495,37	13.521.271,09	15.058.108,05	16.591.040,00	18.636.090,68
D.	Pengadaan listrik dan gas.	7.555,57	11.694,09	18.026,24	24.522,43	27.100,00	28.102,77
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3.454,51	3.653,86	4.044,55	4.293,05	4.740,00	4.875,90
F.	Konstruksi	2.556.624,71	2.562.176,39	2.869.884,03	3.214.657,79	3.494.630,00	3.736.105,48
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.014.813,24	4.589.145,67	4.691.523,15	5.000.294,68	5.250.800,00	5.416.756,14
H.	Transportasi dan pergudangan	615.012,00	727.106,64	807.763,79	877.796,94	941.570,00	973.958,11
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	162.081,92	200.381,58	235.071,24	260.520,57	280.820,00	303.924,50
J.	Informasi dan komunikasi	198.535,24	234.989,02	270.710,40	294.246,73	333.680,00	366.566,48
K.	Jasa keuangan dan asuransi	578.397,53	366.129,13	355.025,11	365.887,32	374.030,00	390.061,62
L.	Real estate	100.011,55	113.119,61	127.215,13	134.709,46	143.280,00	153.245,96
M, N	Jasa perusahaan	1.070,51	1.223,74	1.419,08	1.554,95	1.660,00	1.844,96
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	474.552,02	494.473,40	524.615,72	541.616,22	552.870,00	568.681,02
P.	Jasa pendidikan	96.837,53	122.921,41	142.978,73	149.543,32	155.250,00	161.936,53
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	33.349,65	37.775,23	46.880,43	49.787,22	53.470,00	56.815,08
R, S, T, U	Jasa lainnya	95.672,32	117.702,05	142.498,86	158.356,28	175.540,00	196.640,11
PDRB		21.231.766,16	23.628.466,85	25.430.569,61	27.945.396,02	30.299.161,26	32.994.260,71

Sumber : Dumai Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan harga konstan (ADHK), selama kurun waktu tahun 2013-2017, PDRB Kota Dumai terus tumbuh. Pada Tahun 2017 PDRB ADHK Kota Dumai adalah sebesar 22,352 triliun Rupiah jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan sebesar 951,64 Miliar Rupiah.

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memberikan hasil yang positif jika diikuti pula oleh tingginya pertumbuhan penduduk, apalagi jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang produktif, maka yang terjadi adalah penurunan produktivitas yang akan menyebabkan

kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.9

Tabel 1.9 Laju Pertumbuhan Kota Dumai Tahun 2013-2017

No	Sektor/Sub sector	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%)					Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Tahun 2013-2017
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.03	1.62	0.10	1.14	3.34	1.54
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.07	0.90	0.18	-4.04	-4.96	-2.01
3.	Industri Pengolahan	3.78	6.19	2.92	5.71	5.34	5.03
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10.35	13.70	9.70	18.16	1.05	10.47
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.54	2.08	2.62	0.00	4.55	2.30
6.	Konstruksi	3.02	-4.59	1.85	3.03	4.19	1.06
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.26	0.95	0.13	2.16	2.84	1.51
8.	Transportasi dan Pergudangan	6.80	9.92	2.02	4.88	5.53	5.55
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.97	9.20	2.35	2.58	6.30	5.07
10.	Informasi dan Komunikasi	20.86	11.24	7.16	4.13	5.47	6.97
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.44	-39.50	-6.88	0.13	-0.75	-13.50
12.	Real Estate	4.74	3.75	5.01	1.41	3.43	3.39
13.	Jasa Perusahaan	5.81	9.09	7.29	3.88	6.54	6.69
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.75	0.42	2.02	0.16	0.04	0.66
15.	Jasa Pendidikan	5.51	8.97	5.24	0.69	2.70	4.35
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.99	2.55	9.97	0.87	5.49	4.66
17.	Jasa lainnya	11.39	11.86	7.81	4.39	8.06	8.00
Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai		3.68	2.69	2.03	4.18	4.45	3.33

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai Tahun 2018, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada 1 (satu) sektor ekonomi pun pada PDRB Kota Dumai yang terus menerus mengalami pertumbuhan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Bahkan sektor industri pengolahan yang menjadi sektor utama penggerak perekonomian Kota Dumai, mulai tahun 2014 (tahun dengan pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 2013-2017) dapat dikatakan mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama penggerak perekonomian tetapi laju pertumbuhannya masih dibawah beberapa sektor yang ada di Kota Dumai, dan sektor ini memiliki laju pertumbuhan rata-rata selama periode 2013-2017 sebesar 5,03%. Sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata tertinggi selama periode 2013-2017 adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 10,47%. Sama halnya dengan sektor industri pengolahan, sektor ini mengalami perlambatan yang signifikan di tahun 2017.

b. Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional dengan

jumlah penduduk pertengahan tahun. Secara umum, semakin tinggi PDRB/kapita maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah. Untuk Kota Dumai tahun 2013-2017 dimana Kota Dumai masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat** karena memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau

Tabel 1.10 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB perkapita Kota Dumai (juta Rp.)	77,463.01	84,354.52	89,008.77	95,836.36	101,816.17
PDRB ADHB perkapita Provinsi Riau (juta Rp.)	100.6914412	109.7846371	102.8878105	104.952091	105.9909922
Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai (%)	3,68	2,69	1,91	4,64	4,45
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (%)	2,48	2,71	0,22	2,23	2,71
Klasifikasi Wilayah	Wilayah berkembang cepat				

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada Tabel 1.11 berikut tersaji perkembangan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dan persentasenya menurut kelompok makanan dan bukan makanan di Kota Dumai tahun 2013-2017.

Tabel 1.11 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Perkapita Makanan					
Nominal (Rp)	492.336	479.722	511.316	574.717	602.559
Persentase (%)	53,10	50,96	45,46	48,32	50,64
Pengeluaran Perkapita Bukan Makanan					
Nominal (Rp)	434.894	461.705	613.344	614.756	587.256
Persentase (%)	46,90	49,04	54,54	51,68	49,36
Jumlah Pengeluaran Perkapita	927.230	941.427	1.124.660	1.189.473	1.189.815

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode 2013-2017 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 927.230,- menjadi Rp. 1.189.815,-. Bila dilihat dari persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan, dari 53,10% pada tahun 2013 menjadi 50,64% di tahun 2017. Sebaliknya, pengeluaran untuk bukan makanan mengalami peningkatan, dari 46,90% pada tahun 2012 menjadi 49,36% di tahun 2017. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan, artinya orientasi pengeluaran bukan lagi hanya untuk makanan namun sudah untuk konsumsi non makanan yang terdiri dari

perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain.

c. Tingkat Kemiskinan

Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan di Kota Dumai tahun 2013-2017 fluktuatif seperti tersaji pada Tabel 1.12

Tabel 1.12 Perbandingan Indikator Kemiskinan Tahun 2013-2017
Kota Dumai dan Provinsi Riau

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata r (% per tahun)
Kota Dumai						
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	328.158	341.525	353.079	369.624	403.244	5,29
Jumlah penduduk miskin(000 jiwa)	13,72	13,62	14,97	13,76	13,53	(0,35)
Persentase penduduk miskin (%)	4,98	4,83	5,26	4,74	4,57	(2,13)
Provinsi Riau						
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	350.129	379.223	399.211	426.001	456.493	6,86
Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	476,46	498,28	531,39	515,40	514.62	0,15
Persentase penduduk miskin (%)	8,42	7,99	8,42	7,98	7.78	(1,96)

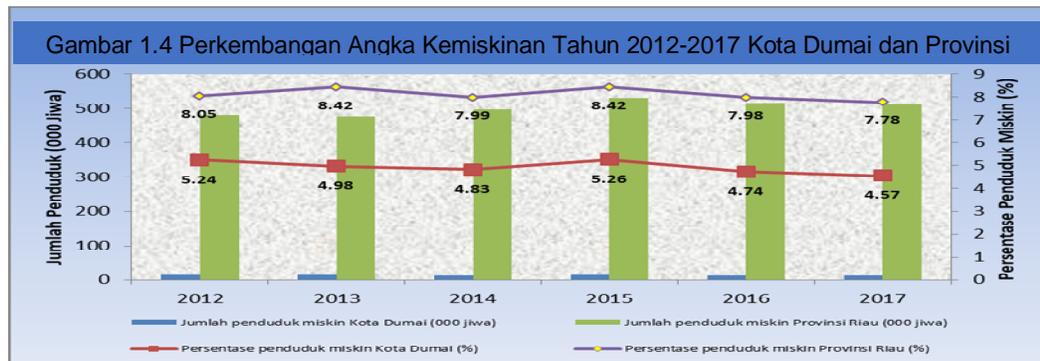
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin kota Dumai adalah 4,98%, kemudian mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 2,13% menjadi 4,57% di tahun 2017. Sedangkan untuk garis kemiskinadan, Kota Dumai selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan (r) tahunan sebesar 5,29%, dari Rp. 328.158/ kapita/bulan pada tahun 2013 menjadi Rp.403.244,00/kapita/bulan di tahun 2017. Selama periode 2013-2017 tersebut persentase penduduk miskin Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Riau



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Seperti yang terlihat pada Gambar 1.3 diatas dapat diasumsikan terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2017 pemerintah kota dumai berhasil menekan tingkat kemiskinan sebesar 0,17%, hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek salah satunya pertumbuhan ekonomi yang kondusif diberbagai sektor. Berikut Gambar 1.4 Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2012-2017 Kota Dumai dan Provinsi Riau.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Pada tahun 2012 persentase penduduk miskin Provinsi Riau adalah 8,05%, kemudian mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 0,68% menjadi 7,78% di tahun 2017. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin Kota Dumai yang mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 2,70%, 5,24% pada tahun 2012 menjadi 4,57% di tahun 2017. Berbeda dengan dua komponen kemiskinan sebelumnya, garis kemiskinan Kota Dumai selama periode 2012-2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan (r) tahunan sebesar 5,27%, Rp.311.891,00/ kapita/bulan pada tahun 2012 menjadi Rp.403.244,00/kapita/bulan di tahun 2017. Selama periode 2012-2017 tersebut persentase penduduk miskin Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Riau seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.5.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh World Bank yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk kategori *developing countries*. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahannya kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Tabel 1.13 dan Gambar 1.6 berikut tersaji perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2012-2017 (tanpa data tahun 2013).

Tabel 1.13 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2017

Uraian	2010	2011	2012	2014	2015	2016	2017
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,07	0,57	0,99	0,38	0,59	0,62	0,84
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,26	0,13	0,29	0,06	0,11	0,13	0,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kota Dumai cenderung berfluktuatif. Indeks kedalaman tertinggi terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 1,07, kemudian turun menjadi 0,57 di tahun 2011, tetapi kembali memburuk dengan angka indeks 0,99 di tahun 2012. Selama tiga tahun terakhir (2015-2017) angka indeks kedalaman kemiskinan Kota Dumai mengalami kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2012, hanya saja tetap perlu menjadi perhatian bersama khususnya Pemerintah Kota karena angka indeksnya cenderung mengalami peningkatan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, selama periode 2015-2017 angka indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,11 menjadi 0,25. Ini mengindikasikan bahwa selama periode tersebut ketimpangan pengeluaran penduduk miskin relatif meningkat.

d. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin. Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2011-2017, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi. Berikut ini Gambar 1.7 Kurva Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2011-2017.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

e. Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah.

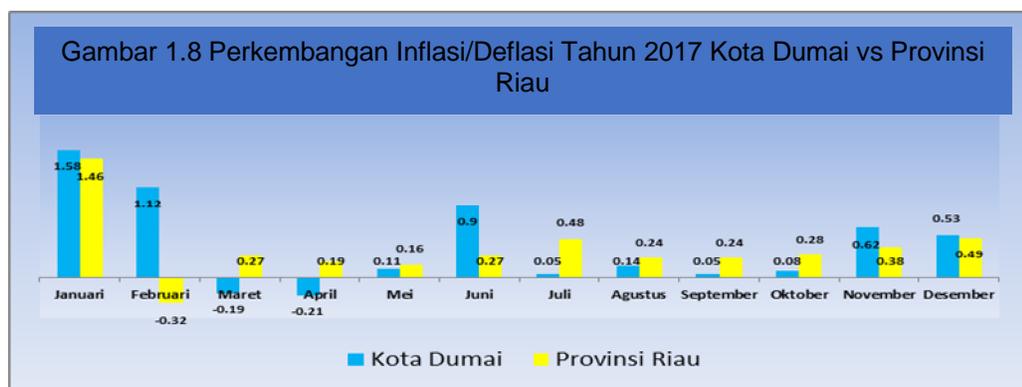
Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012 (2012 = 100). IHK dengan tahun dasar tersebut dihitung berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup 2012 untuk menggantikan IHK tahun 2007 = 100, yang berlaku sejak bulan Juni tahun 2008. Pergeseran tahun dasar ini dimaksudkan agar IHK yang baru mampu mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat di Indonesia, dan secara khusus diharapkan dapat menggambarkan tingkat inflasi. berikut tabel 1.14 menunjukkan perbandingan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2013-2018 dan Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi/Deflasi Tahun 2017 Kota Dumai vs Provinsi Riau.

Tabel 1.14 Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Tahun 2013-2018 Kota Dumai vs Provinsi Riau

Bulan	Inflasi (Persen)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	1,28	0,43	-0.33	0.65	1.58	0.36
Februari	0,41	0,3	-0.68	0.32	1.12	-0.24
Maret	-0,01	0,24	0.13	0.23	-0.19	0.05
April	0,17	0,4	0.38	-0.64	-0.21	0.14
Mei	0,4	0,14	0.98	0.06	0.11	0.16
Juni	1,39	0,66	0.59	0.79	0.90	0.65
Juli	1,91	0,83	0.78	0.46	0.05	-0.10

Bulan	Inflasi (Persen)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Agustus	0,61	0,65	0,55	0,05	0,14	-0,34
September	0,32	0,64	-0,23	0,64	0,05	-0,26
Oktober	1,17	0,42	0,11	0,47	0,08	0,50
November	0,45	1,86	-0,02	0,82	0,62	0,70
Desember	0,19	1,66	0,39	0,07	0,53	0,22
Dumai (yoy)	8,60	8,53	2,63	3,98	4,85	1,85
Riau (yoy)	8,83	8,65	2,65	4,04	4,20	2,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Dari Tabel 1.13 diatas terlihat bahwa inflasi tahunan Kota Dumai selama kurun waktu 2014-2017 cenderung tidak stabil. Pada tahun 2014 Kota Dumai mengalami inflasi tahunan tertinggi dibandingkan dengan tahun 2015, 2016 dan 2017. Pada tahun 2017 inflasi Kota Dumai mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,8% (dari 3,98% pada tahun 2016 menjadi 4,78% di tahun 2017). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan inflasi Provinsi Riau yang menunjukkan kenaikan juga dari 4,04% pada tahun 2016 menjadi 4,20% pada tahun 2017. Kinerja perekonomian yang sudah membaik ini kemudian mulai memburuk lagi di tahun 2017 dengan angka inflasi tahunan sebesar 4,78% (meningkat 0,8%). Hal ini sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara makro. Jika dilihat dari kondisi inflasi bulanan tahun 2017 seperti yang tersaji pada Gambar 2.9 diatas, terlihat bahwa inflasi bulanan tertinggi di Kota Dumai dan Provinsi Riau sama-sama terjadi di bulan Januari. Untuk Kota Dumai inflasi bulanan terendah terjadi di bulan April, sementara Provinsi Riau inflasi bulanan terendahnya terjadi di bulan februari. Secara umum tingkat inflasi bulanan yang terjadi di Kota Dumai dan Provinsi Riau sama, namun tingkat deflasinya sedikit berbeda antara Kota Dumai

dengan Provinsi Riau dimana Kota Dumai mengalami deflasi terendah pada bulan April sementara Provinsi Riau terjadi pada bulan Februari.

f. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah menunjukkan produktivitas suatu wilayah dalam memberikan kesejahteraan dan perbaikan perekonomian bagi para pekerja yang berada dalam sektor-sektor pembentuk PDRB. Produktivitas total daerah diperoleh dengan membagi total PDRB dengan Jumlah total Pekerja yang bekerja pada sektor-sektor pembentuk PDRB. Karena keterbatasan data ketenagakerjaan yang dimiliki, maka produktivitas total daerah Kota Dumai yang dapat diukur adalah produktivitas total daerah Kota Dumai tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Produktivitas Total Daerah} &= \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah pekerja}} \\ &= (25.430.569,61 \times 10^6) / 117.280 \\ &= 216.836.371,16 \end{aligned}$$

Produktivitas menunjukkan nilai rupiah yang diterima pekerja yang bekerja diseluruh sektor pembentuk PDRB. Analisis komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan nilai produktivitas total daerah dengan pendapatan perkapita dan perbandingan antar sektor. Semakin tinggi dan besar produktivitas suatu sektor, semakin besar perannya bagi pembangunan.

g. Kondisi IPM Kota Dumai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Sejak tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metodologi baru dengan perubahan pada beberapa indikatornya diantaranya angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Domestik Bruto (PNB) per kapita. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka ini didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk dapat mengetahui kondisi pembangunan sitem pendidikan di berbagai jenjang. Rata rata lama sekolah didefinisikan sebagai banyaknya tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Keempat indikator IPM tersebut cenderung meningkat selama tahun 2010-2017.

Selama periode 2010-2017 IPM Kota Dumai terus meningkat. Sejak tahun 2011 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2017 adalah sebesar 70,43 ; 71,07 ; 71,59 ; 71,86 ; 72,20 ; 72,96 ; 73,46. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai semakin membaik dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Meskipun demikian, angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi. Berikut table 2.22 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2017.

Tabel 1.15 Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2017

Cakupan Wilayah	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46
Provinsi Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79
Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2010-2017, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2.23 dibawah. Pada tahun 2017, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada Tabel 2.22 di atas. Pada tahun 2017 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau, maupun IPM nasional berada pada kategori tinggi dengan angka IPM berturut-turut sebesar 73,46 ; 71,79 ; 70,81. Berikut tabel 2.23 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017 dan Gambar Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2017.

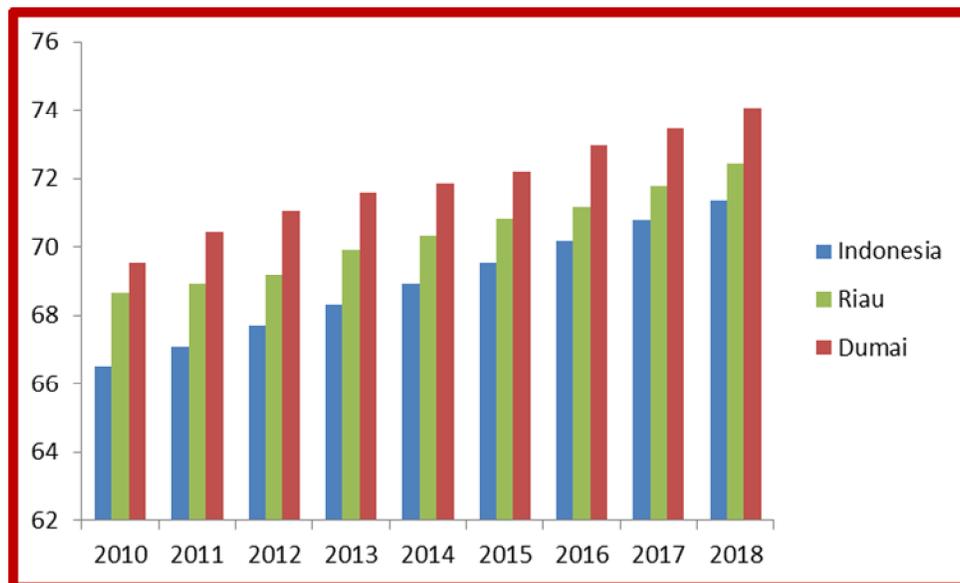
Tabel 1.16 Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kuantan Singingi	65,07	65,72	66,31	66,65	67,47	68,32	68,66	69,53	69,96
Indragiri Hulu	65,10	65,93	66,50	66,68	67,11	68,00	68,67	68,97	69,66
Indragiri Hilir	61,98	62,82	63,04	63,44	63,80	64,80	65,35	66,17	66,51
Pelalawan	65,95	66,58	67,25	68,29	68,67	69,82	70,21	70,59	71,44
Siak	69,78	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18	73,73
Kampar	68,62	69,64	70,08	70,46	70,72	71,28	71,39	72,19	72,50
Rokan Hulu	63,59	64,20	64,99	66,07	67,02	67,29	67,68	68,67	69,36
Bengkalis	69,29	69,72	70,26	70,60	70,84	71,29	71,98	72,27	72,94
Rokan Hilir	64,13	64,76	65,09	65,46	66,22	66,81	67,52	67,84	68,73
Kepulauan Meranti	59,71	60,38	61,49	62,53	62,91	63,25	63,90	64,70	65,23

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pekanbaru	77,34	77,71	77,94	78,16	78,42	79,32	79,69	79,97	80,66
Dumai	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019)

Gambar 1.9 Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2010-2018



(Sumber: BPS, 2018)

h. Inovasi Pemerintah Kota Dumai

Untuk tahun 2019 pemerintah kota Dumai melalui dinas kesehatan kota Dumai telah meluncurkan program Sistem Informasi Daerah Binaan Berbasis Android (SIDARBIN) dengan dasar Peraturan Walikota Dumai nomor 34 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Sistem Informasi Daerah Binaan Kota Dumai. Program ini merupakan perkembangan Globalisasi dan keberhasilan Pembangunan Terhadap Kualitas SDM Terhadap kualitas kesehatan masyarakat Intervensi kesehatan masyarakat Terhadap Database Kesehatan masyarakat yang *Handal* terdiri dari Tim UKM puskesmas, Tim IT puskesmas, Tim Monev Dinas Kesehatan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Umum Kota Dumai serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan target pada Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam rangka peningkatan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Prencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya

Perjanjian Kinerja yaitu Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

“Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah”

Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021, Peraturan Walikota nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kota Dumai untuk mencapainya dalam Tahun 2019. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (PAN & RB RI) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. VISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen

seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Dalam penetapan Visi dan Misi rancangan teknokratik Pembangunan Kota Dumai mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 13 Tahun 2014 tentang RPJPD Kota Dumai, Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Peraturan presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019. Adapun Visi RPJMN adalah *Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*. Adapun Visi Pembangunan Propinsi Riau adalah *Terwujudnya provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur*.

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Propinsi Riau serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”

B. MISI PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, Perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah.
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu

C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 7 (Tujuh) misi

sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (Lima) tahun mendatang. Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah:

1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih;
 - b) Meningkatnya infrastruktur perkotaan;
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan sasaran :
 - a) meningkatnya partisipasi pendidikan;
 - b) meningkatnya angka kelulusan pendidikan dasar;
 - c) meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran:
 - a) Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat;
 - b) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
4. Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga dengan sasaran meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat;
 - b) Menurunnya persentase penduduk miskin;
 - c) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
 - d) Meningkatnya lapangan kerja.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik;
 - b) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya pendapatan petani;
 - b) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industry sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah;
 - b) Meningkatnya investasi di Kota Dumai;
9. Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar;
 - b) Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2017	2018	2019	2020	2021		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
Visi Terwujudnya masyarakat damai yang makmur dan madani pada Tahun 2021												
	Misi 1	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar										
		Tujuan 1	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	28,6	42,8	42,8	57,1	57,1	100	100
		Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	400	600	800	4300	10015	16230	16230
		Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	2,00	3,42	3,44	3,48	3,50	3,55	3,55
				Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	55,57	56,24	56,92	57,59	58,26	58,94	58,94
				Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,00	2,79	2,80	2,83	2,85	2,9	2,9
				Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	2,04	5,92	6	6	7	7	7

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2017	2018	2019	2020	2021		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
			Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	12	28	40	52	60	72	72	
			Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	356	369	395	416	437	457	457	
		Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	Persentase Kualitas udara	%	60	65	70	75	80	85	
				Persentase kualitas air	%	60	65	70	75	80	85	
	Misi 2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing										
		Tujuan 2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,58	9,62	9,65	9,69	9,73	9,77	9,77
				Harapan lama sekolah	Tahun	12,68	12,87	13,06	13,25	13,45	13,68	13,68
		Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Angka melek huruf	%	99,43	99,44	99,45	99,46	99,47	99,48	99,48
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,25	99,25	99,5	99,75	99,92	100	100
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85,26	88,76	92,26	95,76	99,26	100	100
		Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
		Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk	per 1.000 siswa	1 : 339	1 : 339	1 : 339	1 : 339	1 : 339	1 : 339	1 : 339

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			usia sekolah SD/MI								
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	1 : 473	1 : 473	1 : 473	1 : 473	1 : 473	1 : 473	1 : 473
		Tujuan 3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,06	70,08	71,00	71,02	71,04	71,04
		Sasaran 3.1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	86,84	100	100	100	100	100
				Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100	100	100	100
		Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31	31	31	31	31	31
				Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	126.672	126.363	127.366	146.887	169.887	192.887
		Tujuan 4	Meningkatkan prestasi daerah dalam	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi	Peringkat	6	-	5	-	3	-

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		kepemudaan dan olahraga	(Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)								
		Sasaran 4.1 Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	6	-	5	-	3	-	3
Misi 3		Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan									
		Tujuan 5 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	11.531	11.652	12.016	12.391	12.777	13.176	13.176
			PDRB per kapita	Rp. 000	95.733,57	100.332,3	105.151,92	110.203,07	115.496,86	121.044,95	121.044,95
		Sasaran 5.1 Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Indeks	0,450	0,438	0,426	0,415	0,403	0,400	0,400
		Sasaran 5.2 Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4,74	4,66	4,58	4,50	4,42	4,34	4,34
		Sasaran 5.3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,078	2,076	2,074	2,072	2,070	2,068	2,068
		Sasaran 5.4 Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,51	8,97	8,40	7,90	7,42	6,98	6,98
Misi 4		Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan									
		Tujuan 6 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	72	74	76	78	80	81.5	81,5
		Sasaran 6.1 Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	9	8	7	6	5	4	4

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2017	2018	2019	2020	2021		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	
		Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Akuntabilitas	Nilai	CC	CC	B	B	B	B	B	B
	Misi 5	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan										
		Tujuan 7	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutan an/perikanan	Rp. Milyar	1.687,64	1.791,53	1.901,83	2.018,91	2.143,19	2.275,14	2.275,14
		Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	165,60	175,79	186,61	198,10	210,30	223,24	223,24
		Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	79,68	80,48	81,28	82,09	82,91	83,74	83,74
	Misi 6	Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah										
		Tujuan 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,64	4,13	4,22	4,32	4,37	4,42	4,42
		Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.42	21.43	21.44	21.45	21.46	21.47	21.47
				Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	53.88	54.07	54.27	54.46	54.65	54.85	54.85
		Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Rupiah	5.563.502.258.070	5.674.772.303.231	5.788.267.749.296	5.904.033.104.282	6.022.113.766.368	6.142.556.041.695	6.142.556.041.695

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			(PMDN/PMA)								
	Misi 7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu									
		Tujuan 9 Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	74	79,5	85	90,5	96	100	100
		Sasaran 9.1. Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	71	77	83	89	95	100	100
		Sasaran 9.2. Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	77	82	87	92	97	100	100

Tabel 2. 2 Perubahan Perjanjian Kinerja 2019 Pemerintah Kota Dumai

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Target 2019
1	2	3		4	5
Misi 1 :Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar					
1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	1	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	4300
2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	2	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,48
		3	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	57,59
		4	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,83
		5	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	6
		6	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	52
		7	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	416
3	Meningkatnya kualitas lingkungan	8	Persentase Kualitas udara	%	75
		9	Persentase kualitas air	%	75
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing					
4	Meningkatnya partisipasi pendidikan	10	Angka melek huruf	%	99,46
		11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,75
		12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	95,76
5	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
6	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	15	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0,277083333
		16	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0,370138889

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Target 2019
1	2	3		4	5
7	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	17	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
		18	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
		19	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
8	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	20	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
		21	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	146.887
9	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	22	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan					
10	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	23	Indeks Gini	Indeks	0,415
11	Menurunnya persentase penduduk miskin	24	Tingkat Kemiskinan	%	4,5
12	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	25	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,072
13	Meningkatnya lapangan kerja	26	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,9
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan					
14	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	27	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	6
15	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	28	Opini BPK	Opini BPK	WTP
		29	Nilai Akuntabilitas	Nilai	B
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan					
16	Meningkatnya pendapatan petani	30	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	198,1

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Target 2019
1	2	3		4	5
17	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	31	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,09
Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah					
18	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	32	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.45
		33	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.46
19	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	34	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	5.904.033.10 4.282
Misi 7 :Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu					
20	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	35	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	89
21	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	36	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	92

Tabel 2.3 Sasaran dan Program Perubahan Perjanjian Kinerja 2019 Pemerintah Kota Dumai

SASARAN		NO	PROGRAM	ANGGARAN
1		2	3	4
Sasaran 1:	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	20.724.363.802
		2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	119.301.000
Sasaran 2:	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	3	Program Pengembangan Perumahan	542.876.000
		4	Program lingkungan sehat perumahan	3.364.627.300
		5	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8.395.082.840

SASARAN		NO	PROGRAM	ANGGARAN
1		2	3	4
		6	Program pembangunan jalan dan jembatan	73.796.687.937
		7	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	7.448.309.150
		8	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	391.923.850
		9	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	5.270.629.050
		10	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	392.684.200
		11	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1.408.028.410
		12	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.670.643.000
		13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	507.000.000
		14	Program pengelolaan areal pemakaman	540.050.200
		15	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.147.217.200
		16	Program Perencanaan Tata Ruang	799.247.500
		17	Program Pemanfaatan Ruang	269.928.600
		18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	108.296.100
Sasaran 3:	Meningkatnya kualitas lingkungan	19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.064.655.100
		20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	236.200.152
		21	Program peningkatan pengendalian polusi	85.000.000
Sasaran 4:	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan	22	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.464.316.980
		23	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.668.255.400

SASARAN		NO	PROGRAM	ANGGARAN
1		2	3	4
		24	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	36.037.000.000
		25	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	528.780.250
Sasaran 5:	Meningkatnya Angka Kelulusan Pendidikan Dasar	26	Program Pendidikan Non Formal	227.233.230
		27	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.322.451.100
Sasaran 6:	Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	28	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	63.253.448.839
Sasaran 7:	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	29	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	386.380.000
		30	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	131.912.250
		31	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	84.210.000
		32	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.647.898.979
		33	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	19.593.399.691
		34	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	453.173.700
		35	Program Pengawasan Obat dan Makanan	72.005.000
		36	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	952.184.750
		37	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.589.638.536
Sasaran 8:	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	38	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	33.871.283.014
		39	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.055.000.000
		40	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	423.914.000

SASARAN		NO	PROGRAM	ANGGARAN
1		2	3	4
		41	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	53.181.650.000
		42	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	3.666.600.000
		43	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	10.080.830.000
		44	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
Sasaran 9:	Meningkatnya Prestasi Daerah Dalam Kepemudaan dan Olah Raga	45	Program peningkatan peran serta kepemudaan	687.176.150
		46	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	477.993.200
Sasaran 10:	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan masyarakat	47	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	646.264.000
Sasaran 11:	Menurunnya persentase penduduk miskin	48	Program Pembinaan Anak Terlantar	-
		49	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	199.276.205
		50	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	140.658.054
		51	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	181.375.500
		52	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	297.457.100
		53	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah	560.233.000

SASARAN		NO	PROGRAM	ANGGARAN
1		2	3	4
			Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
		54	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.033.872.120
		55	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	272.379.207
Sasaran 12:	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	56	Program Keluarga Berencana	2.093.553.750
		57	Program pelayanan kontrasepsi	1.606.190.300
		58	Program Pengendalian Penduduk	2.070.260.000
Sasaran 13:	Meningkatnya Lapangan kerja	59	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	101.045.000
		60	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	179.846.000
		61	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	791.561.000
Sasaran 14:	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	62	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	162.939.000
		63	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	1.000.298.010
		64	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	458.584.700
		65	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	219.980.000
		66	Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	197.750.000
		67	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.091.433.936

SASARAN		NO	PROGRAM	ANGGARAN
1		2	3	4
		68	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	593.682.000
		69	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	103.000.000
		70	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	826.460.000
		71	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	115.625.000
		72	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.231.330.729
		73	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.260.400.000
		74	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	313.479.000
		75	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	201.480.000
		76	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	369.510.119
		77	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	724.273.559
		78	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	41.035.470
		79	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.314.744.225
		80	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	496.358.500
		81	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	521.146.330
		82	Program mengintensifkan penanganan	393.840.000

SASARAN		NO	PROGRAM	ANGGARAN
1		2	3	4
			pengaduan masyarakat	
		83	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	711.724.750
		84	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	73.130.000
		85	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	653.290.000
		86	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	895.500.000
		87	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	190.884.109
		88	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	436.925.000
		89	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	885.900.000
		90	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.000.000
		91	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	361.422.000
		92	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	401.793.000
		93	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.413.000
		94	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	443.280.000
		95	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	870.300.000
		96	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.000.000
		97	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	580.850.000
		98	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	953.982.000

SASARAN		NO	PROGRAM	ANGGARAN
1		2	3	4
		99	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.000.000
		100	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	529.830.000
		101	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	969.870.000
		102	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	99.070.548
Sasaran 15:	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	103	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	5.148.158.000
		104	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3.865.366.034
		105	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	390.000.000
		106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	623.693.080
		107	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	8.612.193.540
		108	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	80.780.200
		109	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	204.618.000
		110	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	30.865.000
		111	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.172.642.500
		112	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	232.351.438
		113	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	2.769.737.000

SASARAN		NO	PROGRAM	ANGGARAN
1		2	3	4
		114	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	11.489.447.272
		115	Program perencanaan pembangunan daerah	1.791.033.600
		116	Program perencanaan pembangunan ekonomi	289.411.955
		117	Program perencanaan sosial dan budaya	793.706.000
		118	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.340.508.950
		119	Program pengembangan wawasan kebangsaan	94.000.000
Sasaran 16:	Meningkatnya pendapatan petani	120	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	795.483.400
		121	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.217.932.650
		122	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	325.000.000
		123	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	237.470.000
		124	Program peningkatan produksi hasil peternakan	799.190.600
		125	Program pengembangan budidaya perikanan	739.800.737
		126	Program pengembangan perikanan tangkap	700.272.280
Sasaran 17:	Meningkatnya Ketahanan pangan masyarakat	127	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1.216.859.000
		128	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	92.700.000
		129	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	518.300.000

SASARAN		NO	PROGRAM	ANGGARAN
1		2	3	4
Sasaran 18:	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan Industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	130	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	186.583.048
		131	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.942.000.000
		132	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	-
		133	Program pengembangan industri kecil dan menengah	76.148.185
		134	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	306.062.314
Sasaran 19:	Meningkatnya investasi di kota Dumai	135	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	314.879.500
Sasaran 20:	Meningkatnya Implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	136	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	726.132.000
		137	Program pengembangan Kemitraan	1.039.253.500
Sasaran 21:	Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Pendidikan Dasar	138	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.050.000.000
		140	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	4.361.217.540
			JUMLAH	485.782.770.004



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2019 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Dumai sebagai alat ukur untuk melihat pencapaian Visi RPJMD Kota Dumai tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Makmur dan Madani pada Tahun 2021.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Dumai tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel TC.17 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

A. PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA DUMAI 2019

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak- pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, sangat disadari bahwa kedua metode yang digunakan tersebut membutuhkan perumusan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi hasil.

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi

Tabel. 3.1. Skala Penilaian Kinerja Kota Dumai Tahun 2019

No	Interval Kinerja Tahun 2019	Kriteria Kinerja Tahun 2019	Kode
1	91 <	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Capaian realisasi capaian kinerja sasaran strategis kurun tahun 2016 – 2021 yang merupakan target dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai terlihat pada Tabel 3.2 dokumen Laporan Kinerja ini, sedangkan pencapaian realisasi kinerja yang tertuang dalam misi pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel. 3.2. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			2019	2019	(%)
1	2	3	4	5	6
Misi 1 :Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar					
Tujuan 1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1. Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	57,1	57,58	100,83
	% Pencapaian Tujuan				100,83
Sasaran 1.1 : Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	2. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	4300	4310,00	100,23
	% Pencapaian sasaran				100,23
Sasaran 1.2 : Meningkatkan infrastruktur perkotaan	3. Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,48	3,95	113,51
	4. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	57,59	37,45	65,03
	5. Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,83	13,75	485,87
	6. Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	6	28,93	482,17
	7. Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	52	52,00	100,00
	8. Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	416	412,00	99,04
	% Pencapaian sasaran				225,15
Sasaran 1.3 : Meningkatkan kualitas lingkungan	9. Persentase Kualitas udara	%	75	75,00	100,00
	10. Persentase kualitas air	%	75	75,00	100,00
	% Pencapaian sasaran				100,00
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing					
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	11. Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,69	10,04	103,61
	12. Harapan lama sekolah	Tahun	13,25	12,40	93,58
	% Pencapaian Tujuan				98,60

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			2019	2019	(%)
1	2	3	4	5	6
Sasaran 2.1 : Meningkatkan partisipasi pendidikan	13. Angka melek huruf	%	99,46	95,70	96,22
	14. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,75	98,93	99,18
	15. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	95,76	84,19	87,92
	% Pencapaian sasaran				96,52
Sasaran 2.2 : Meningkatkan angka kelulusan Pendidikan dasar	16. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100,00	100,00
	17. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100,00	100,00
	% Pencapaian sasaran				100,00
Sasaran 2.3 : Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	18. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0,277083333	0,353380	127,54
	19. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0,370138889	0,358449	96,86
	% Pencapaian sasaran				112,19
Tujuan 3 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20. Angka Harapan Hidup	Tahun	71,02	71,20	100,25
	% Pencapaian Tujuan				99,34
Sasaran 3.1 : Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	21. Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100	100,00	100,00
	22. Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100	100,00	100,00
	23. Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100,00	100,00
	% Pencapaian sasaran				99,74
Sasaran 3.2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	24. GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31	36,88	81,03
	25. Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	146.887	147.659	100,53
	% Pencapaian sasaran				90,78
Tujuan 4 : Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	26. Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	0,00	0,00	100
	% Pencapaian Tujuan				100
Sasaran 4.1 : Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	27. Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-	0,00	100
	% Pencapaian sasaran				100
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan					
Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	28. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	12.391	12.453	100,50
	29. PDRB per kapita	Rp. 000	110.203,07	117.198,83	106,35
	% Pencapaian Tujuan				103,42

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			2019	2019	(%)
1	2	3	4	5	6
Sasaran 5.1 : Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	30. Indeks Gini	Indeks	0,415	0,34	118,07
% Pencapaian sasaran					118,07
Sasaran 5.2 : Menurunnya persentase penduduk miskin	31. Tingkat Kemiskinan	%	4,5	3,56	120,89
% Pencapaian sasaran					120,89
Sasaran 5.3 : Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	32. Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,072	1,19	142,57
% Pencapaian sasaran					142,57
Sasaran 5.4 : Meningkatnya lapangan kerja	33. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,9	6,47	118,10
% Pencapaian sasaran					118,10
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan					
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	34. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78	83,82	107,46
% Pencapaian Tujuan					107,46
Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	35. Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	6	5,00	116,67
% Pencapaian sasaran					116,67
Sasaran 6.2 : Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	36. Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	100,00
	37. Nilai Akuntabilitas	Nilai	B	B	100,00
% Pencapaian sasaran					100,00
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan					
Tujuan 7 : Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	38. Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	2.018,91	1.929,04	95,55
% Pencapaian Tujuan					95,55
Sasaran 7.1 : Meningkatnya pendapatan petani	39. Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	198,1	252,31	127,36
% Pencapaian sasaran					127,36
Sasaran 7.2 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	40. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,09	82,00	99,89
% Pencapaian sasaran					99,89
Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah					
Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	41. Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,32	5,61	129,86
% Pencapaian Tujuan					129,86
Sasaran 8.1 : Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	42. Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21,45	15,87	73,99
	43. Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54,46	57,74	106,02
% Pencapaian sasaran					90,00
Sasaran 8.2 : Meningkatnya investasi di Kota Dumai	44. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	5.904.033.104.282	5.937.390.800.000	100,56
% Pencapaian sasaran					100,56

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
			2019	2019	(%)	
1	2	3	4	5	6	
Misi 7 :Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu						
Tujuan 9 : Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	45.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	90,5	100,00	110,50
% Pencapaian Tujuan					110,50	
Sasaran 9.1 : Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	46.	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	89	100,00	112,36
% Pencapaian sasaran					112,36	
Sasaran 9.2 : Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	47.	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	92	83,80	91,09
% Pencapaian sasaran					91,09	

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan Analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang sudah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. Sehingga pada tahun 2019 yang merupakan tahun kedua implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, yang secara bertahap dan konsisten telah diupayakan untuk mewujudkan misi dan 9 tujuan melalui 21 (dua puluh satu) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja Tujuan serta 36 (tiga puluh enam) Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pemerintah Kota Dumai.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Misi 1. Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pencapaian misi pertama ini melalui 1 (satu) Tujuan dan 3 (Tiga) sasaran strategis, 1 (satu) indikator Tujuan, 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dengan penjelasan berikut :

Tujuan 1

Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Tujuan 1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 “**Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar**”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Pekerjaan**

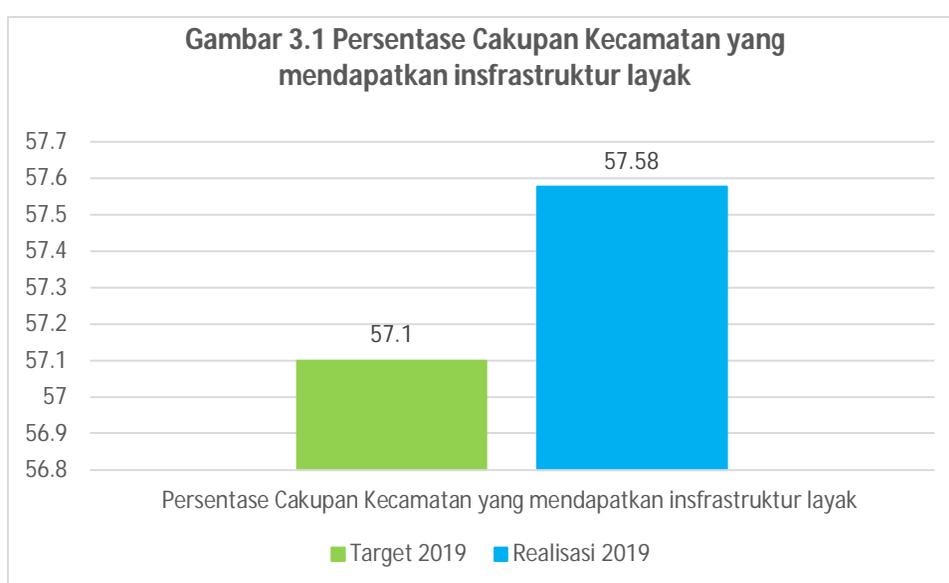
Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengukur Tujuan 1 ini terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.3 berikut di bawah ini:

Tabel. 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 1.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	48,48	48,48	48,48	57,1	57,58	100,83	100	57,58
	Rata-rata Capaian Kinerja							100,83		

Terlihat dari tabel 3.3 diatas pada Misi Pertama tujuan 1 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : **Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak**
Target tahun 2019 **Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur** adalah 57,1% dan realisasi tahun 2019 sebesar 57,58% dengan tingkat capaian sebesar 100,83%.



Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 Terdapat 19 kelurahan dengan cakupan infrastruktur layak dari 33 kelurahan atau sebesar 48,48%. Adapun Cakupan 7 Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak dapat dijabarkan pada 33 kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Dumai Kota, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Dumai Kota (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Sukajadi (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Bintan (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Rimba Sekampung (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Laksamana (Infrastruktur Layak)

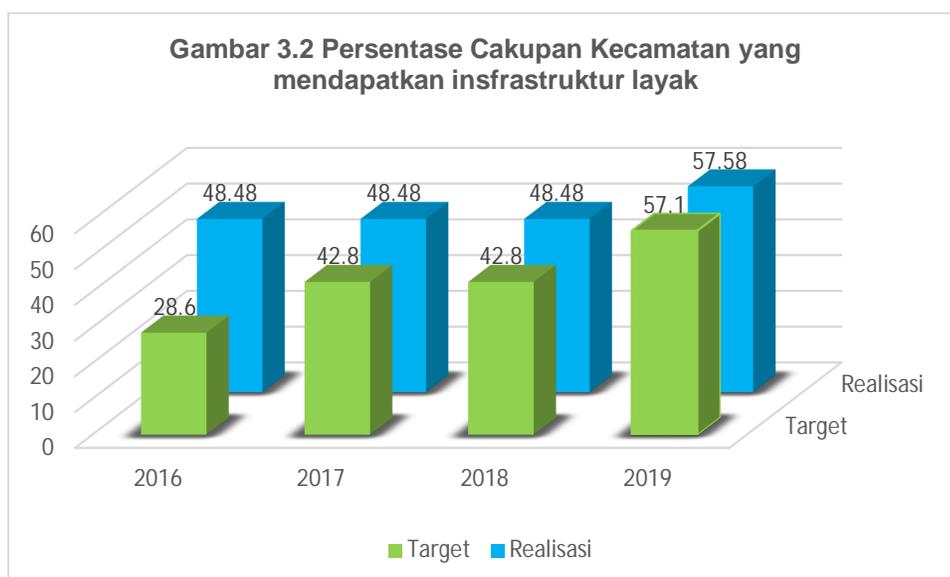
2. Kecamatan Medang Kampai, yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Pelintung
 - Kelurahan Guntung
 - Kelurahan Teluk Makmur
 - Kelurahan Mundam
3. Kecamatan Dumai Timur, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Tanjung Palas (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Jaya Mukti (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Bukit Batrem (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Teluk Binjai (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Buluh Kasap (Infrastruktur Layak, tanah konsesi)
4. Kecamatan Dumai Barat, yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Pangkalan Sesai (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Purnama (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Bagan Keladi (Infrastruktur Layak)
5. Kecamatan Dumai Selatan, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Bumi Ayu (Infrastruktur Layak, tanah konsesi)
 - Kelurahan Bukit Datuk (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Bukit Timah (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Ratu Sima (Infrastruktur Layak)
 - Kelurahan Mekar Sari (Infrastruktur Layak)
6. Kecamatan Bukit Kapur, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Bagan Besar
 - Kelurahan Kayu Kapur
 - Kelurahan Bukit Nenas
 - Kelurahan Kampung Baru
 - Kelurahan Gurun Panjang
7. Kecamatan Sungai Sembilan, yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Bangsal Aceh
 - Kelurahan Lubuk Gaung
 - Kelurahan Tanjung Penyembal
 - Kelurahan Basilam Baru
 - Kelurahan Batu Teritip

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : **Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan insfrastruktur layak**

Realisasi Pada tahun 2018 Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan insfrastruktur layak adalah sebesar 48,48%, sedangkan realisasi pada tahun

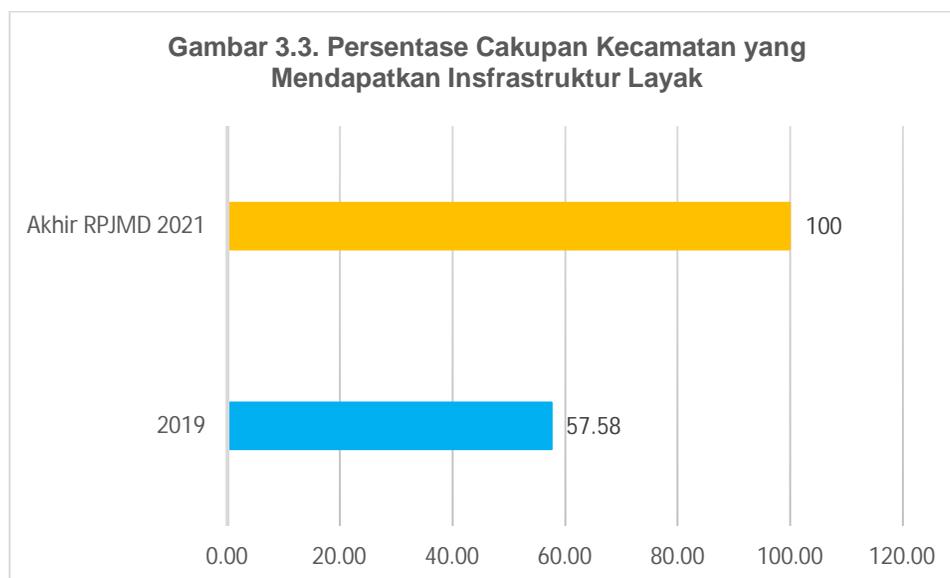
2019 Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan insfrastruktur layak meningkat menjadi 57,58%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : **Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan insfrastruktur**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 57,58% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2018 terhadap RPJMD 2021** sebesar 57,58%.



Sasaran Strategis 1.1

Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih

Sasaran strategis 1.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**. Untuk mengukur sasaran 1.1 ini terdapat 1 (Satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.4 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1

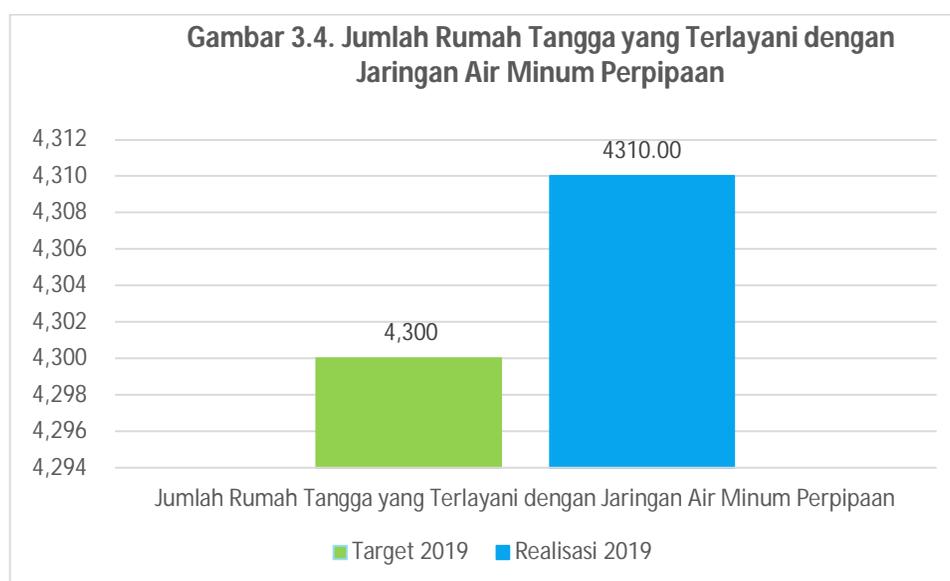
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	1300	600	888	4300	4310	100,23	16230	43,73
	Rata-rata Capaian Kinerja							100,23		

Terlihat dari tabel 3.4 diatas pada Tujuan pertama ini sasaran strategis 1.1 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan

Target tahun 2019 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan adalah 4.300 SR dan realisasi tahun 2019 sebesar 4310 SR dengan tingkat capaian sebesar 100,23%.



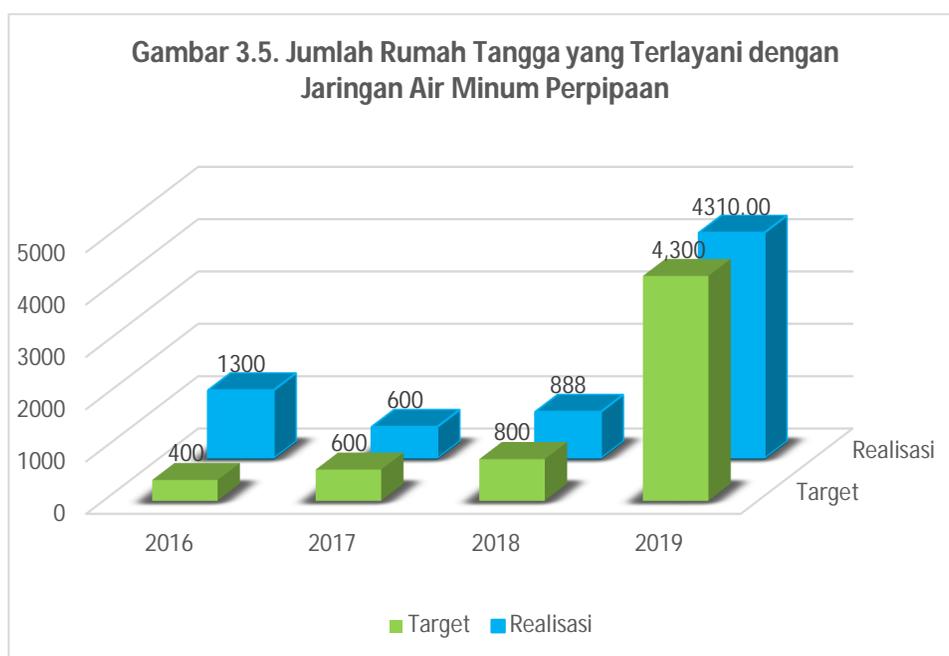
Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi, Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air, Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai, Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum, dan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Sasaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan

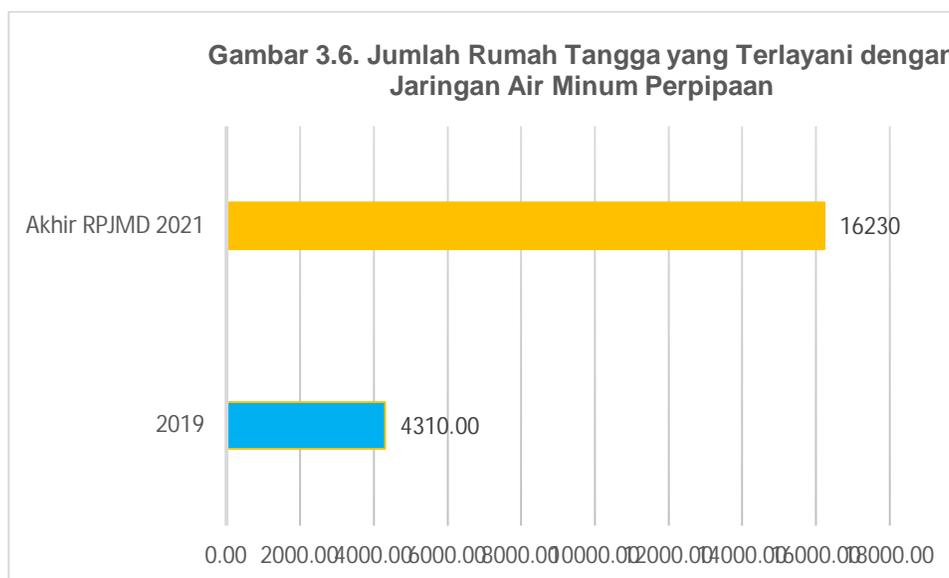
Realisasi Pada tahun 2018 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan adalah sebesar 888 SR, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air

Minum Perpipaan meningkat menjadi sebesar 4310 SR termasuk dalam indeks kategori “BAIK”.



3. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 16.230 SR, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 (realisasi tahun 2016 sebesar 1300 SR + tahun 2017 sebesar 600 SR + tahun 2018 sebesar 391 SR + tahun 2019 sebesar 4.310 SR) sebesar 7.098 SR dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 43,73%.



Sasaran Strategis 1.2

Meningkatnya infrastruktur perkotaan

Sasaran strategis 1.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan 1 “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar”. Sasaran ini didukung OPD

secara terpadu yaitu **Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup.** Untuk mengukur sasaran 1.2 misi pertama ini terdapat 6 (enam) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.5 berikut dibawah ini :

Tabel. 3.5. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.2

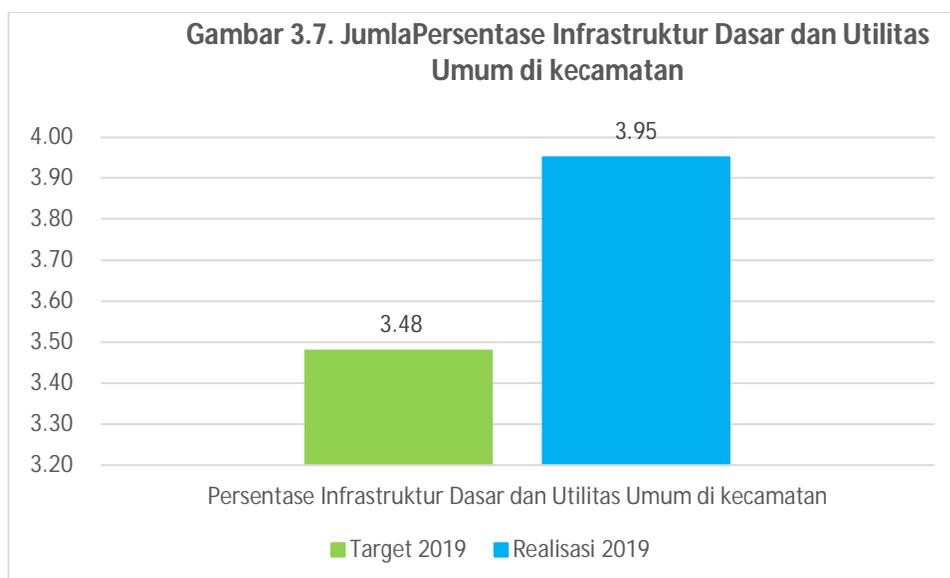
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2019 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	1,07	2,73	3,85	3,48	3,95	113,51	3,55	111,27
2	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	55,6	52,35	51,82	57,59	37,45	65,03	58,94	63,54
3	Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	1,49	7,5	17,5	2,83	13,75	485,87	2,9	474,14
4	Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	2,04	1,86	23,84	6,00	28,93	482,17	7	413,29
5	Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	17,76	28	40	52,00	52	100	72	72,22
6	Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	356	369	392	416	412	99,04	457	90,15
Rata-rata Capaian Kinerja								224,27		

Terlihat dari tabel 3.5 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 1.2 terdapat 6 (enam) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan

Target tahun 2019 Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan adalah 3,48% dan realisasi tahun 2019 sebesar 3,95% dengan tingkat capaian sebesar 113,51%.

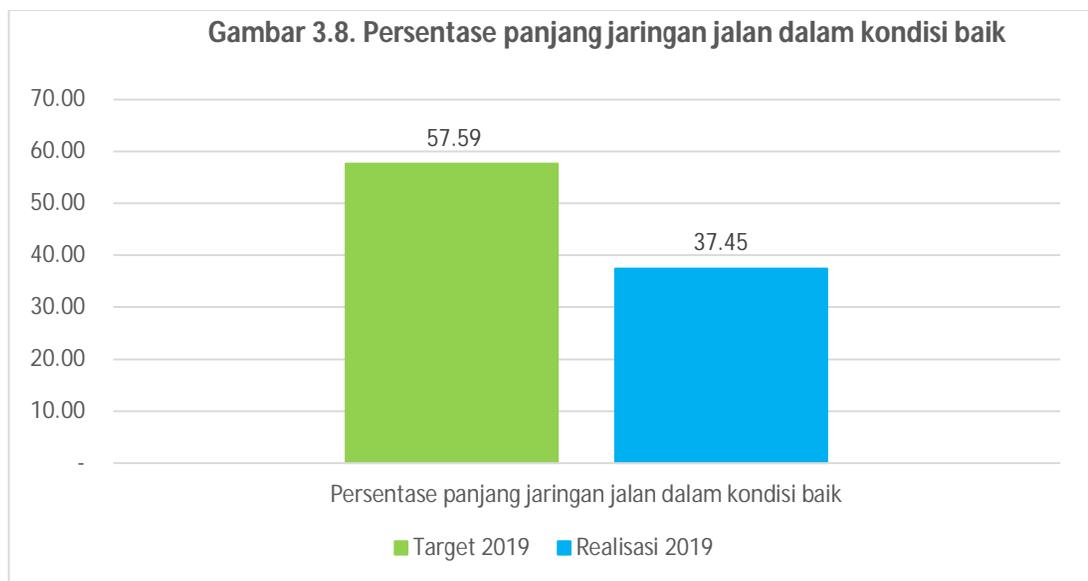


Untuk melaksanakan indikator sasaran maka dilaksanakan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program ini bertujuan untuk membangun jalan lingkungan dan drainase. (semenisasi dan infrastruktur lainnya).

Jumlah Ruas jalan sesuai dengan Keputusan Walikota nomor 613/DPUPR/2017 berjumlah 2569 ruas jalan (gang dan jalan), dan ruas yang memiliki lebar lebih kecil atau sama dengan 3 meter yang diasumsikan merupakan kewenangan OPD DPRKP dan UPT DPUPR berjumlah 1542 ruas jalan (60% dari 2569 ruas jalan). Tahun 2019 jumlah kegiatan infrastruktur yang terlaksana berjumlah 61 paket dengan pekerjaan :

- 1) semenisasi/*block pavement* terlaksana sebanyak 48 paket dengan lebar jalan / gang lebih kecil dari atau sama dengan 3 meter dengan realisasi 97 %, 1 paket kegiatan tidak terlaksana (putus kontrak karena kontraktor tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak).
- 2) Drainase terlaksana sebanyak 13 paket dengan realisasi 100 %. Total kegiatan fisik yang terlaksana sejumlah 60 paket dengan realisasi 3,95 dan realisasi capaian >100 %

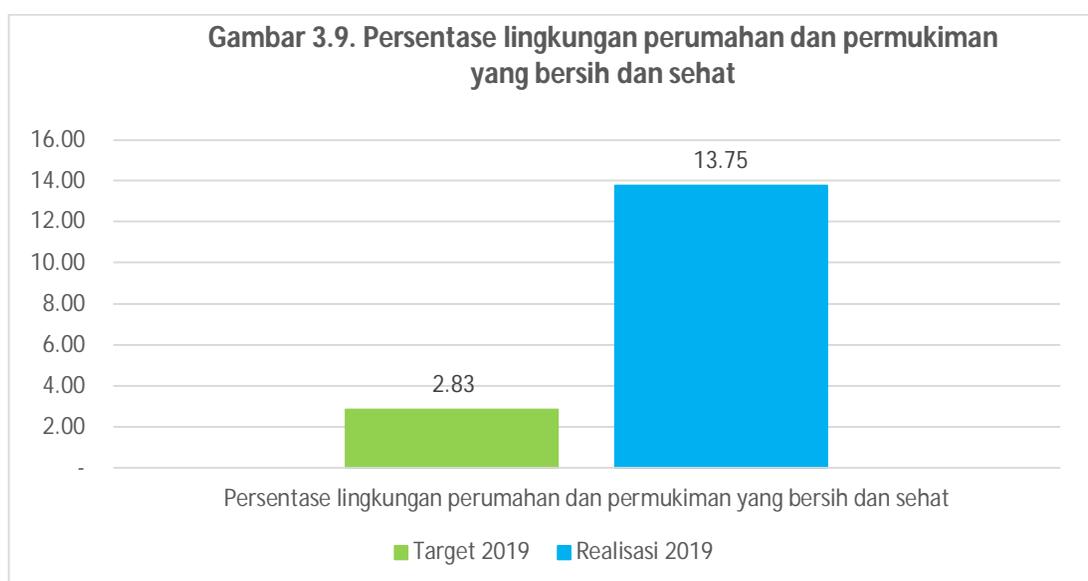
- b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Target tahun 2019 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 57,59% dan realisasi tahun 2019 sebesar 37,45% dengan tingkat capaian sebesar 65,03 %.



Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 57,59 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2019 yaitu 37,45 atau 65,03 %. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur, Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan.

- c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat.

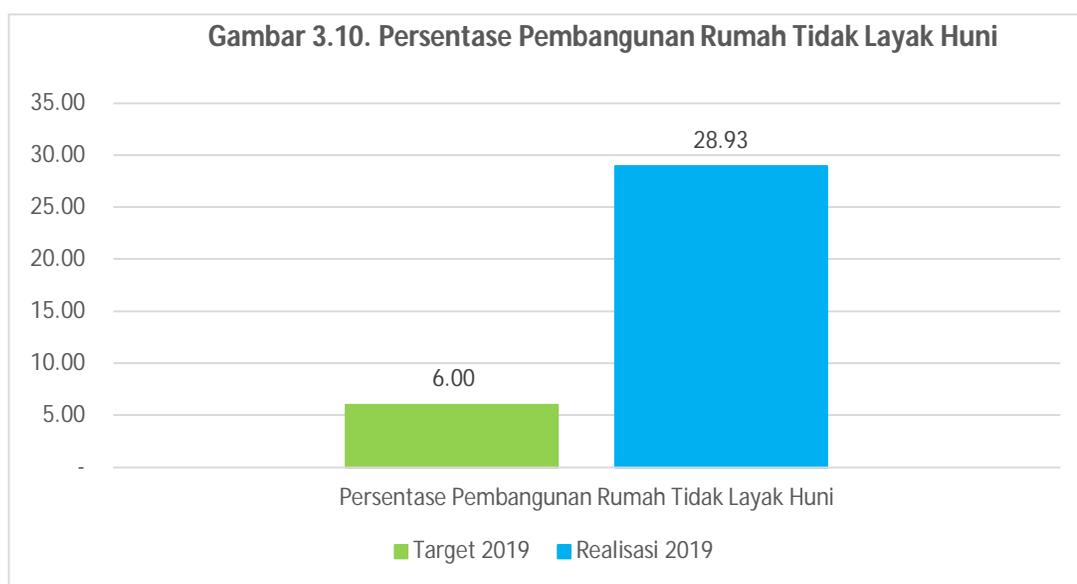
Target tahun 2019 Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat adalah 2,83% dan realisasi tahun 2019 sebesar 13,75% dengan tingkat capaian sebesar 485,87%.



Sesuai dengan buku MPS kota Dumai tahun 2015-2019 bahwa jumlah yang direncanakan untuk pembangunan sanitasi selama 5 (tahun) berjumlah 40 unit yaitu IPAL, Tangki septic komunal dan MCK ++.

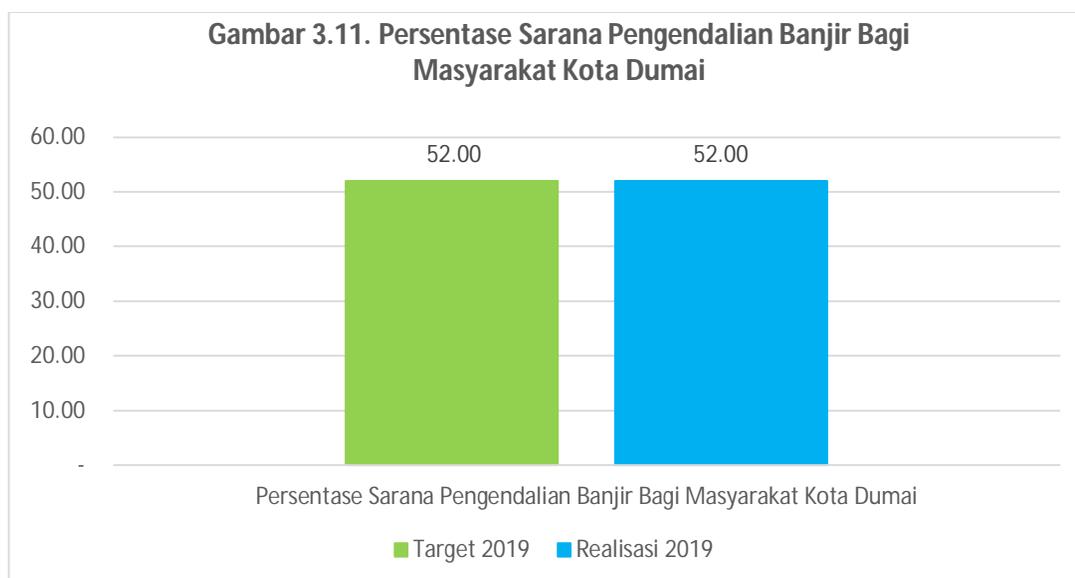
Berdasarkan realisasi tahun 2019 telah terbangun 6 Kegiatan unit, dengan rincian 5 kegiatan terlaksana 100% dan 1 kegiatan terlaksana 60 %, dengan realisasi IKU nya 13,75 %. Adapun capaian realisasinya berjumlah >100 %

- d. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
Target tahun 2019 Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni adalah 6% dan realisasi tahun 2019 sebesar 28,93% dengan tingkat capaian sebesar 482,17 %.



Berdasarkan data yang bersumber Bidang Perumahan OPD DPRKP, jumlah rumah tidak layak huni berjumlah 1987 RTLH. Yang dilaksanakan pada tahun 2019 lebih kurang 575 unit, yang bersumber dari DAK, Dana Dekonsentrasi (reguler) dan APBD provinsi. Adapun realisasi IKU nya 28,93 % dengan capaian realisasinya >100 %

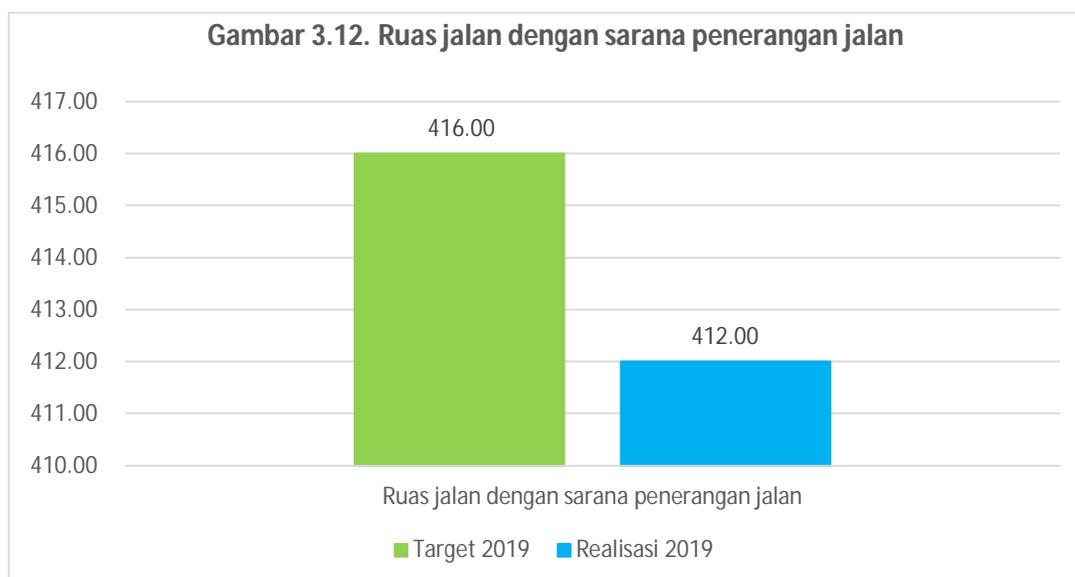
- e. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai
Target tahun 2019 Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai adalah 52% dan realisasi tahun 2019 sebesar 52% dengan tingkat capaian sebesar 100%.



Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 40 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2018 yaitu 40 % atau 100%. Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan Perencanaan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai, Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai, Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir.

f. Indikator Kinerja Sasaran : Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan

Target tahun 2019 Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan adalah 416 ruas jalan dan realisasi tahun 2019 sebesar 412 ruas jalan dengan tingkat capaian sebesar 99,04 %.

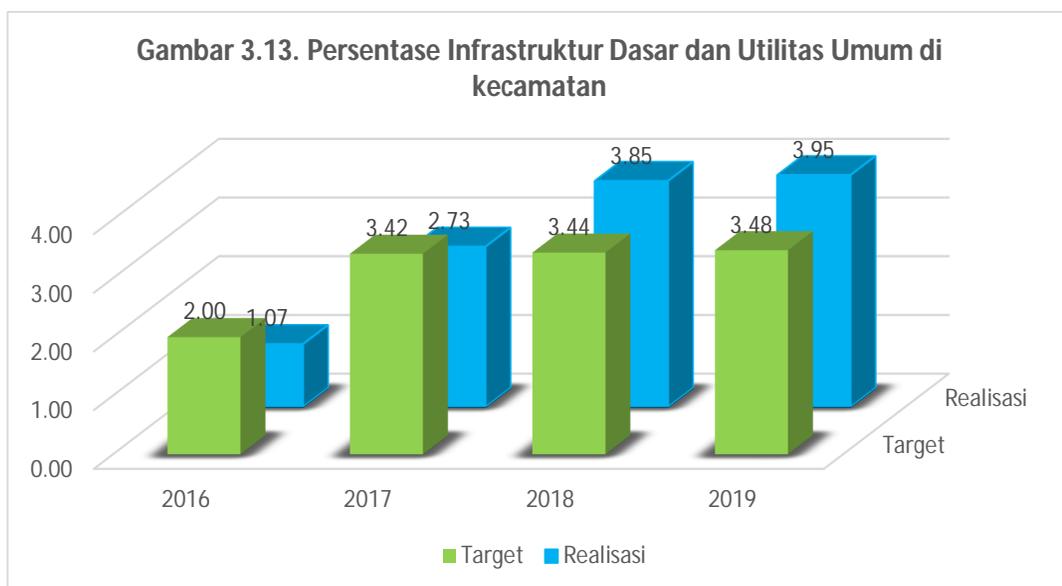


Indikator ini dilaksanakan dengan satu program, yaitu Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan 2 kegiatan yang bertujuan melakukan pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan di Kota Dumai. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan 20 paket (Ruas Jalan). Adapun capaian realisasinya 99 %

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

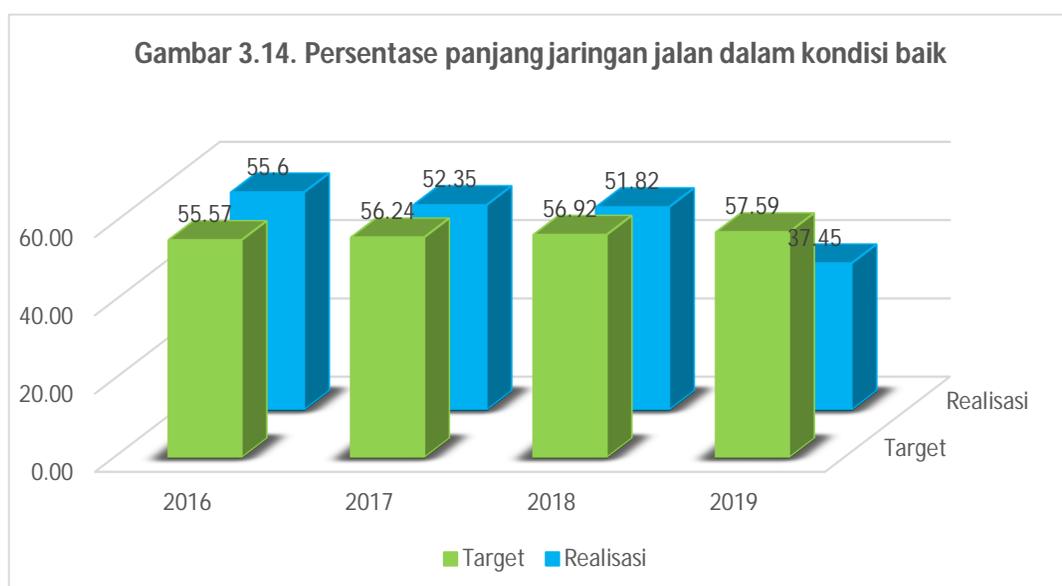
a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan

Realisasi Pada tahun 2018 Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan adalah sebesar 3,85%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan meningkat menjadi sebesar 3,95%.



- b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Realisasi Pada tahun 2018 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah sebesar 51,82%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menurun menjadi 37,45%. Termasuk dalam indeks kategori “BAIK”. Menurunnya tingkat kondisi jalan disebabkan adanya kesalahan dalam pengolahan data survey datda dasar jalan.

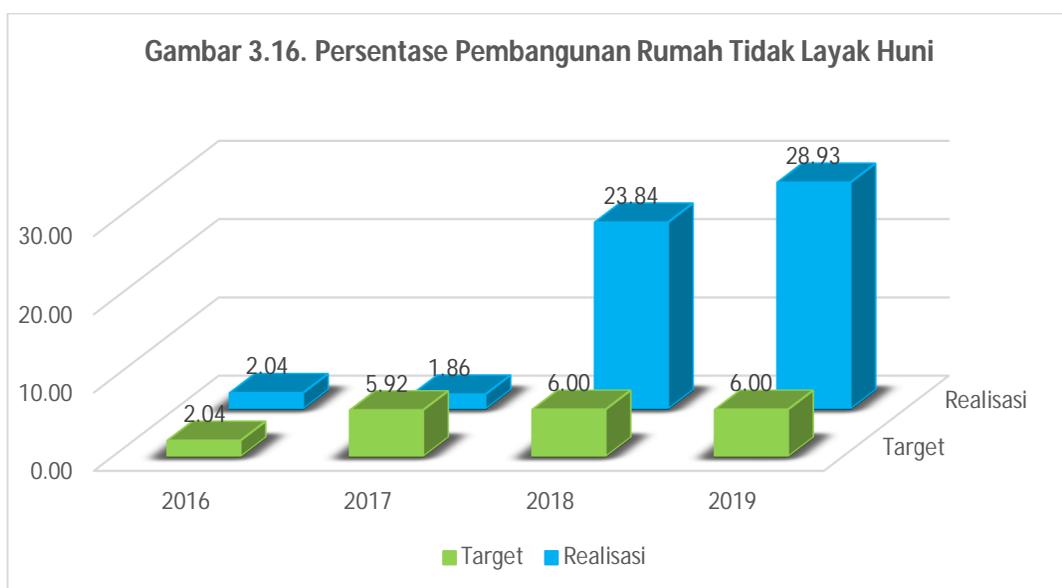


- c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat

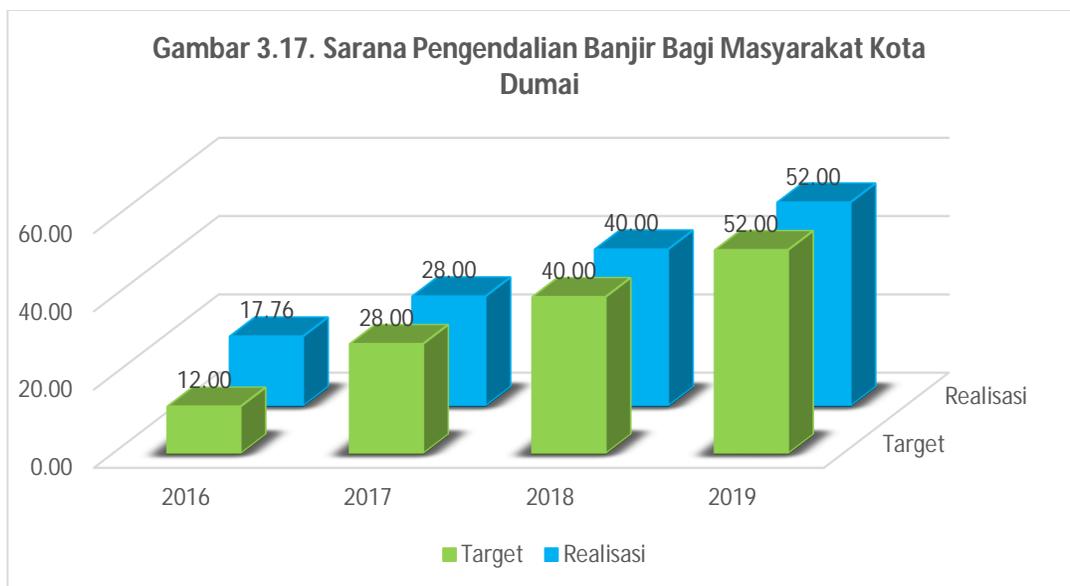
Realisasi Pada tahun 2018 Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat adalah sebesar 17,5%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat menurun menjadi 13,75%.



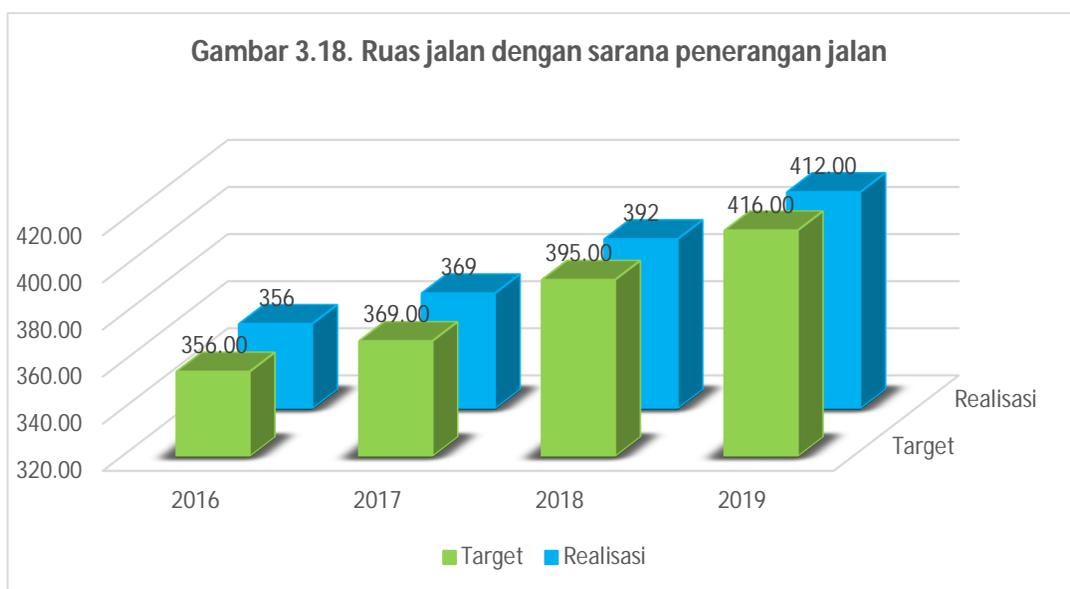
- d. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Realisasi Pada tahun 2018 Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni adalah sebesar 23,84%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni meningkat menjadi 28,93%.



- e. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai Realisasi Pada tahun 2018 Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai adalah sebesar 40%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai meningkat menjadi 52%. Ini termasuk dalam indeks kategori "BAIK".



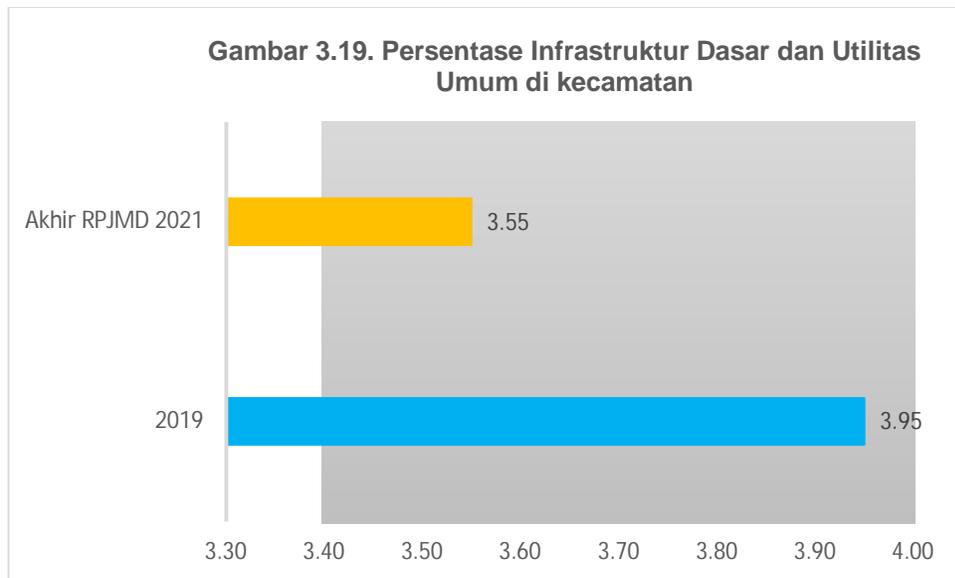
- f. Indikator Kinerja Sasaran : Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan
 Realisasi Pada tahun 2018 Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan adalah sebesar 392 ruas jalan, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan meningkat menjadi 412 ruas jalan.



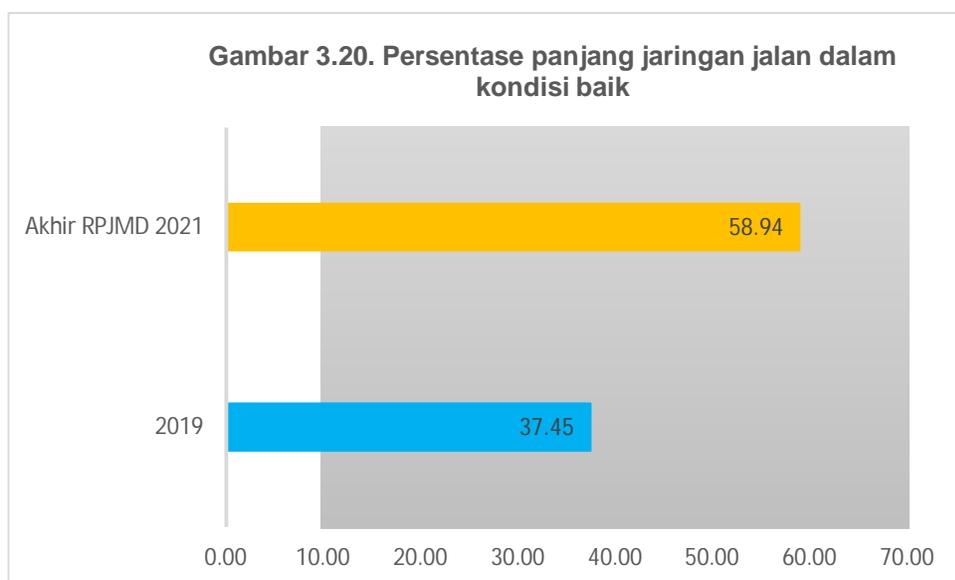
3. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan

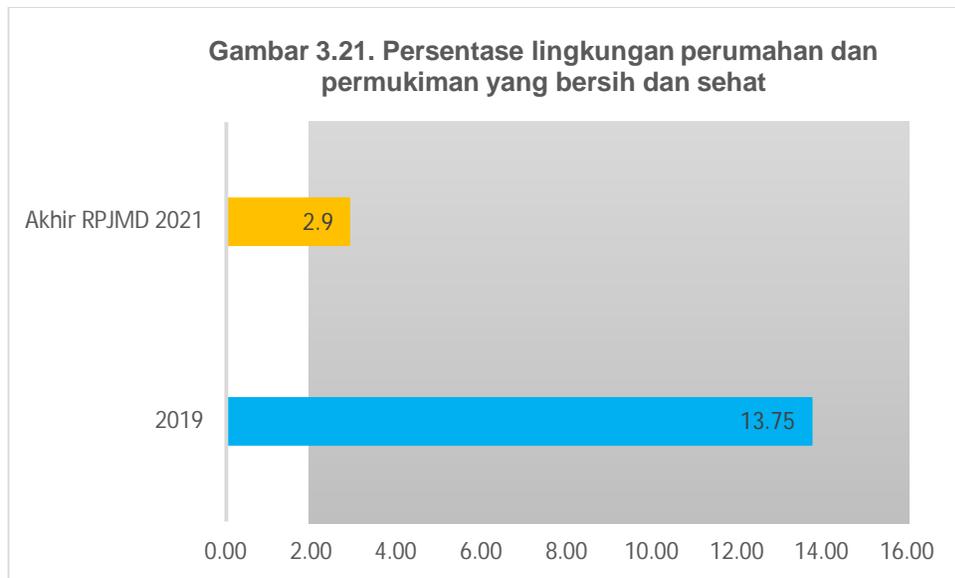
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 3,55%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sebesar 3,95% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 111,27 %.



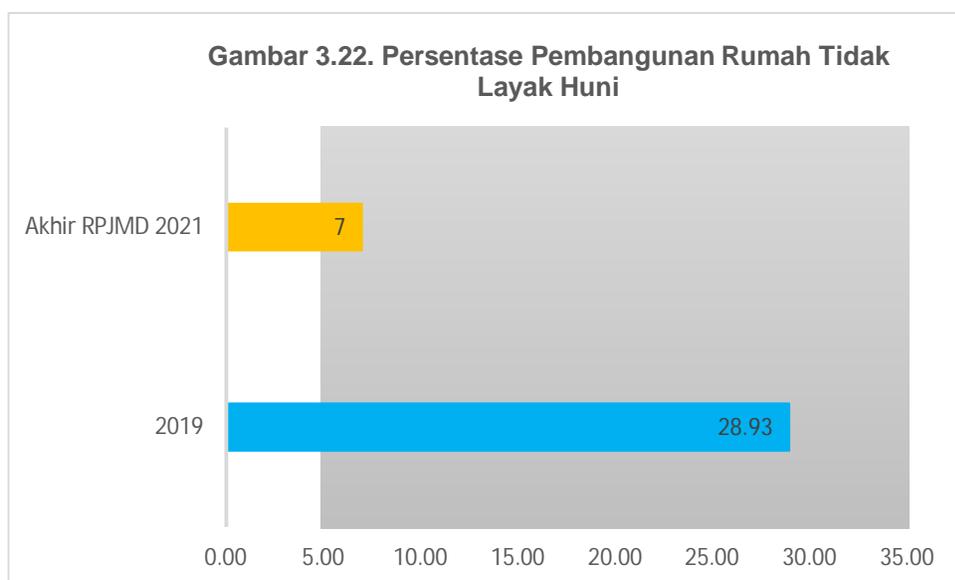
- b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 58,94%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sebesar 37,45% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 63,54%.



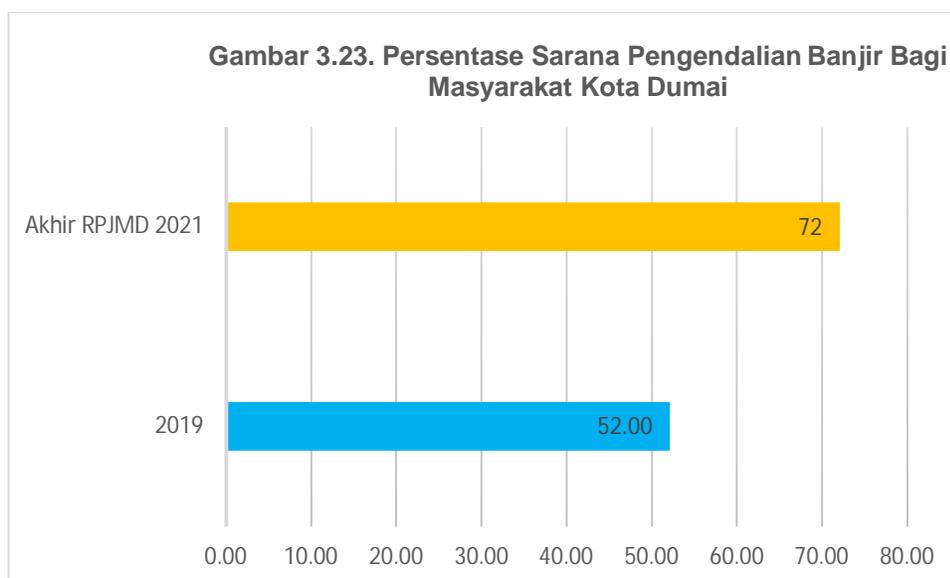
- c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 2,9%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 13,75% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 474,14%.



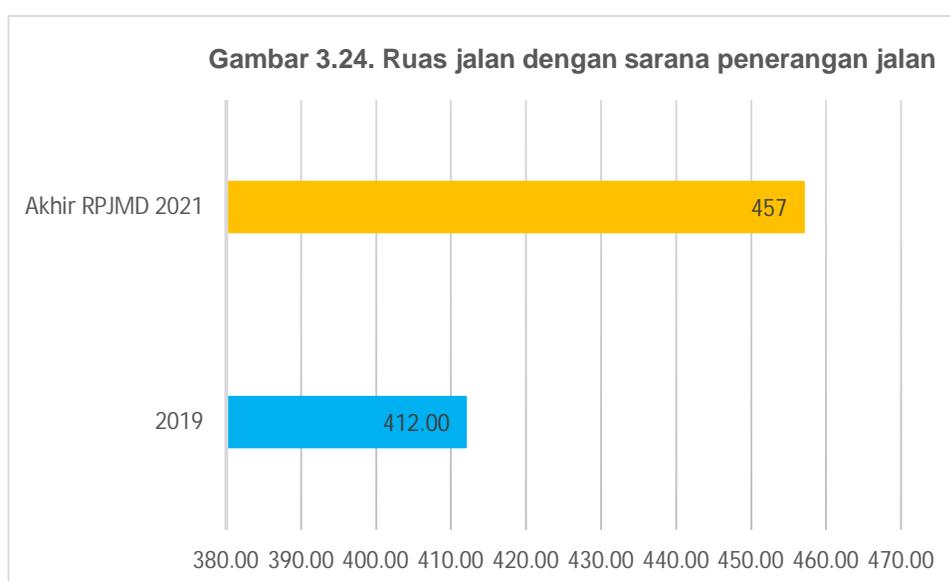
- d. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 7%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sebesar 28,93% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 413,29%.



- e. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 72%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sebesar 52% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 72,22%.



- f. Indikator Kinerja Sasaran : Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 457 ruas jalan, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2018 sebesar 412 ruas jalan dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 90,12%.



Sasaran Strategis 1.3

Meningkatnya kualitas lingkungan

Sasaran strategis 1.3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengukur sasaran misi pertama ini terdapat 2 (Dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.6 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.3

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	

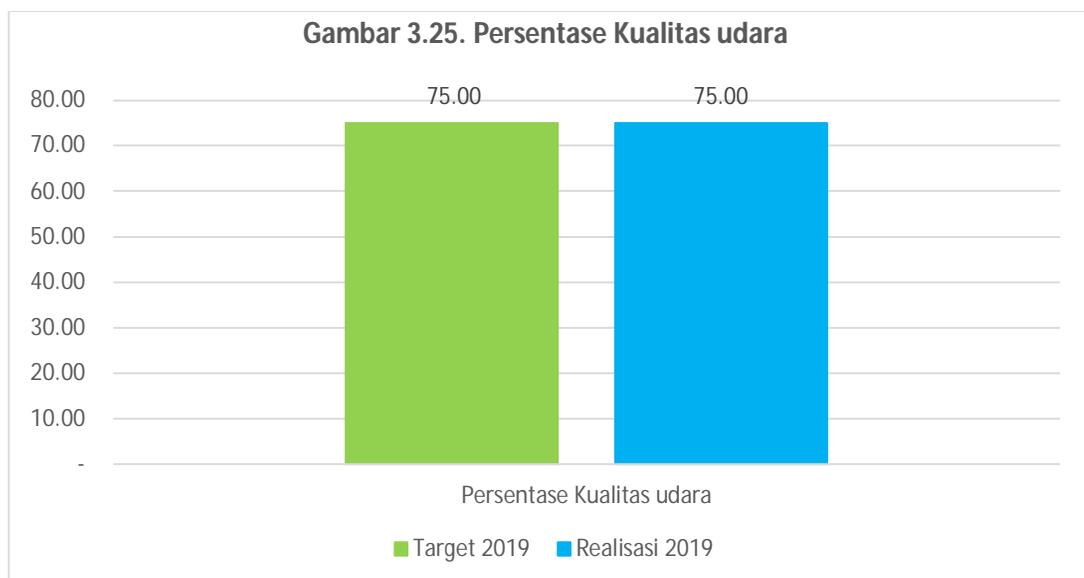
1	Persentase Kualitas udara	%	70	65	70	75	75	100	85	88,24
2	Persentase kualitas air	%	70	65	70	75	75	100	85	82,35
	Rata-rata Capaian Kinerja							100		

Terlihat dari tabel 3.6 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 1.3 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kualitas udara

Target tahun 2019 Persentase Kualitas udara adalah 75% dan realisasi tahun 2019 sebesar 75% dengan tingkat capaian sebesar 100, %.

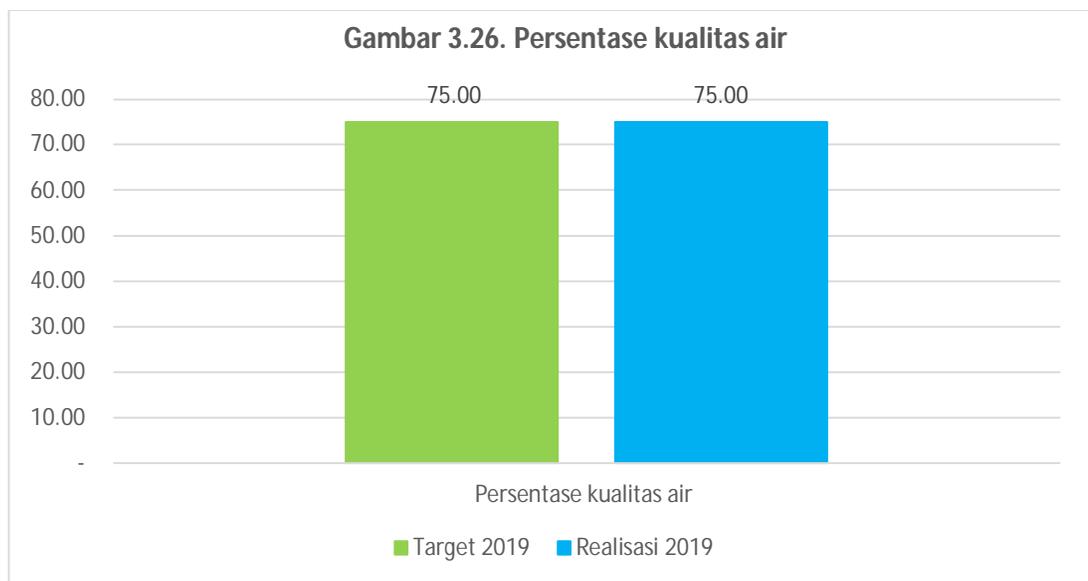


Program dan kegiatan pendukung indikator sasaran ini adalah Program **Peningkatan Pengendalian Polusi** kegiatan **Pengujian Polusi Udara Ambien**.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat polutan bagi lingkungan udara Kota Dumai target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan pengujian kualitas udara dengan perlakuan pengambilan analisa sampel sebanyak 7 titik di Kota Dumai. Dengan anggaran sebesar 85.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar 84.720.000,- atau 100%. Hasil analisa sample terhadap uji parameter didapat kualitas udara di Kota Dumai tidak ada yang melebihi ambang batas sesuai Kep No. 50/MENLH/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan, dan Baku tentang Tingkat Kebisingan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kualitas Air

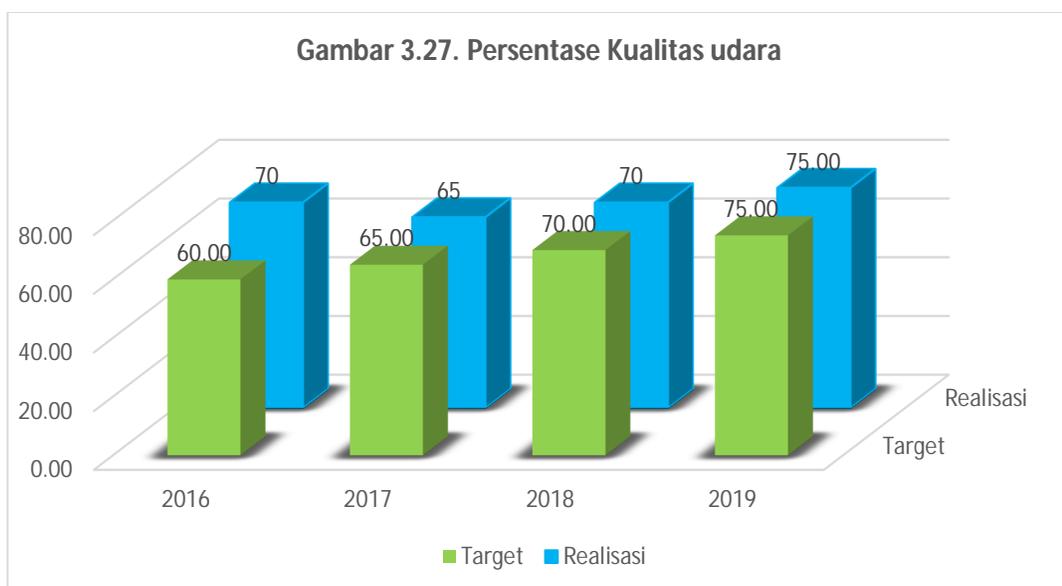
Target tahun 2019 Persentase kualitas air adalah 75% dan realisasi tahun 2019 sebesar 75% dengan tingkat capaian sebesar 100 %.



Program dan kegiatan pendukung indikator sasaran ini adalah Program **Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup** Kegiatan **Pengendalian Pencemaran Air** Target dari indikator sasaran ini yaitu Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan pengujian kualitas air dengan perlakuan pengambilan sampel air sumur sebanyak 2 sampel, air sungai sebanyak 10 sampel, air laut sebanyak 6 sampel, air drainase sebanyak 2 sampel, air hujan sebanyak 2 sampel di Kota Dumai. Dengan realisasi 2 sumur di Kecamatan Kota Dumai air sungai Kota Dumai sebanyak 10 sample, air laut sebanyak 6 sample dan drainase sample sebanyak 2 sample. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 142.533.452,- dan realisasi keuangan sebesar 136.752.380,- atau 100 %. Artinya alokasi anggaran yang disediakan telah dapat menguji beberapa parameter sample dari hasil pengujian parameter tidak ditemukannya sample yang melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

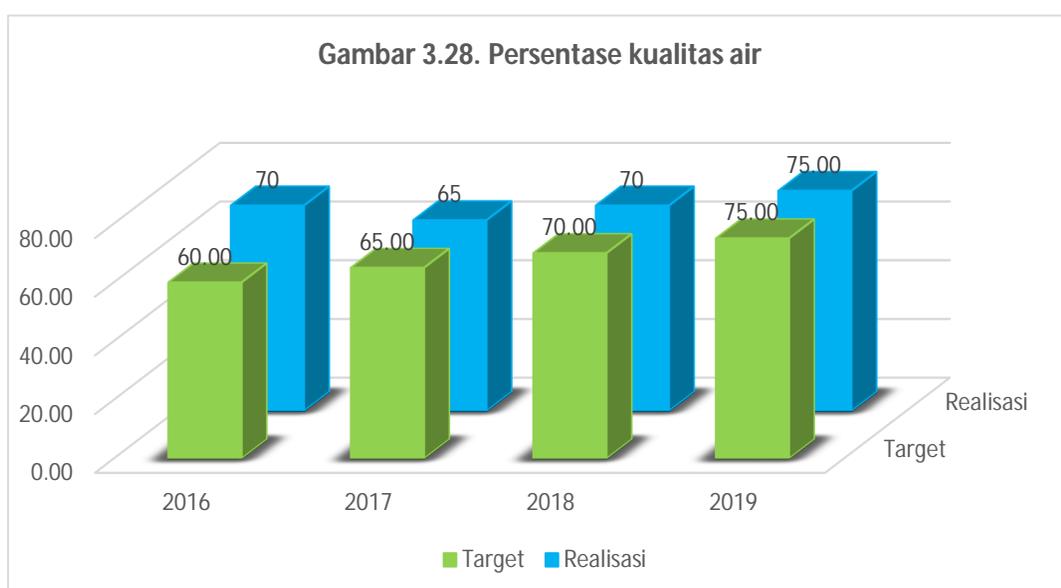
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kualitas udara

Realisasi Pada tahun 2019 Persentase Kualitas udara adalah sebesar 75%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase Kualitas udara meningkat menjadi sebesar 75%.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kualitas air

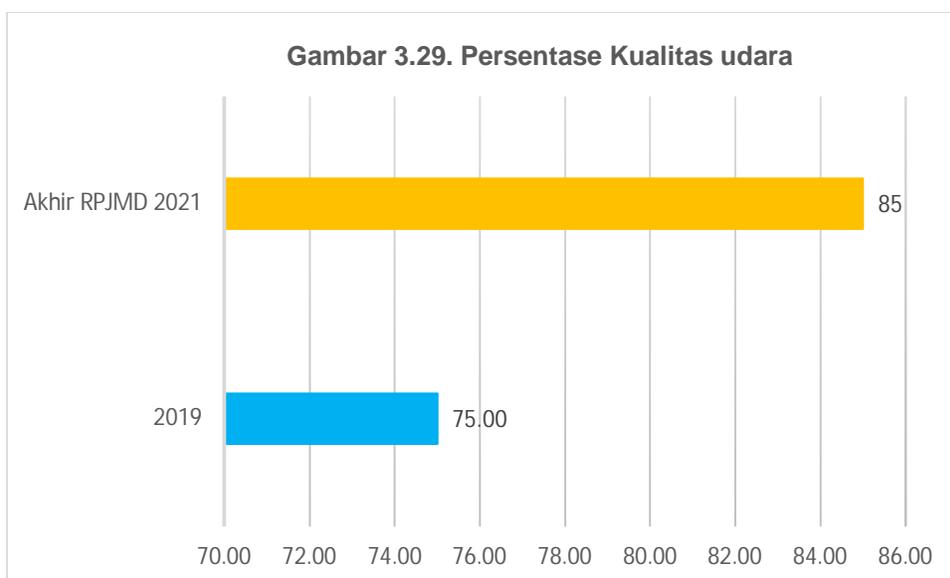
Realisasi Pada tahun 2019 Persentase kualitas air adalah sebesar 75%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase kualitas air meningkat menjadi 75%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

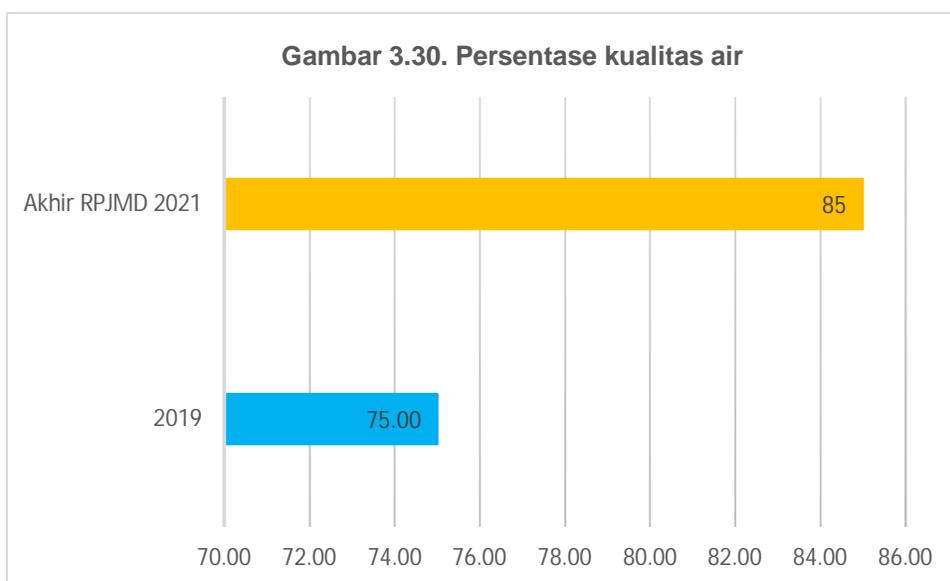
a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kualitas udara

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 85%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sebesar 75% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 88,24 %.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase kualitas air

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 85%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sebesar 75% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 88,24%.



Misi 2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing

Pencapaian misi Kedua ini melalui 3 (tiga) Tujuan dan 6 (enam) sasaran strategis, 4 (empat) indikator Tujuan, 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 2

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

Tujuan2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip,. Untuk mengukur Tujuan 2 ini terdapat 2 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel. 3.7. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 2.

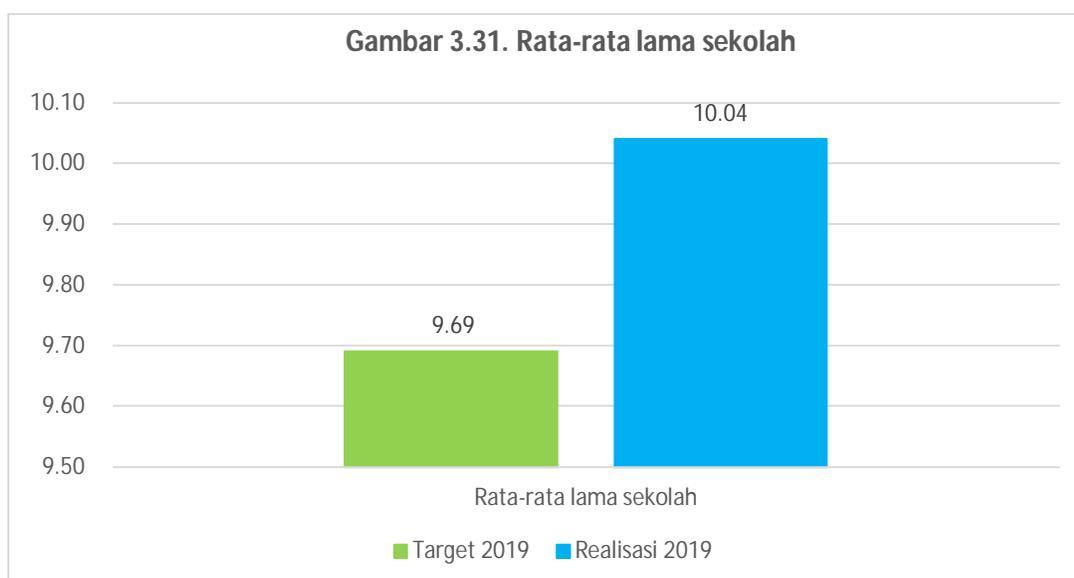
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021		
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,57	9,58	9,67	9,69	9,84	101,55	9,77	100,72	
2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,46	12,75	12,97	13,25	12,98	97,96	13,68	94,88	
Rata-rata Capaian Kinerja									99,76		

Terlihat dari tabel 3.7 diatas pada Misi Kedua tujuan 2 ini 2 (dua) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : **Rata-rata lama sekolah**

Target tahun 2019 Rata-rata lama sekolah adalah 9,69 tahun dan realisasi tahun 2019 sebesar 9,84 tahun dengan tingkat capaian sebesar 101,55%.



Salah satu variabel dari komponen IPM yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kota Dumai.

Tabel. 3.8. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Dumai Tahun 2019

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)				Keterangan
Jumlah Penduduk	Tamatan Terakhir	Konversi Tamatan (Tahun)	Jumlah Tahun	Rata Rata Lama Sekolah = 10,04 Tahun
46,503	TAMAT SD	6	279,018	
34,202	SLTP	9	307,818	
66,743	SLTA	12	800,916	
1,698	DIP II	14	23,772	
5,407	DIP III	15	81,105	
9,535	STR I	16	152,560	
389	STR II	17	6,613	

Tabel. 3.8. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Dumai Tahun 2019

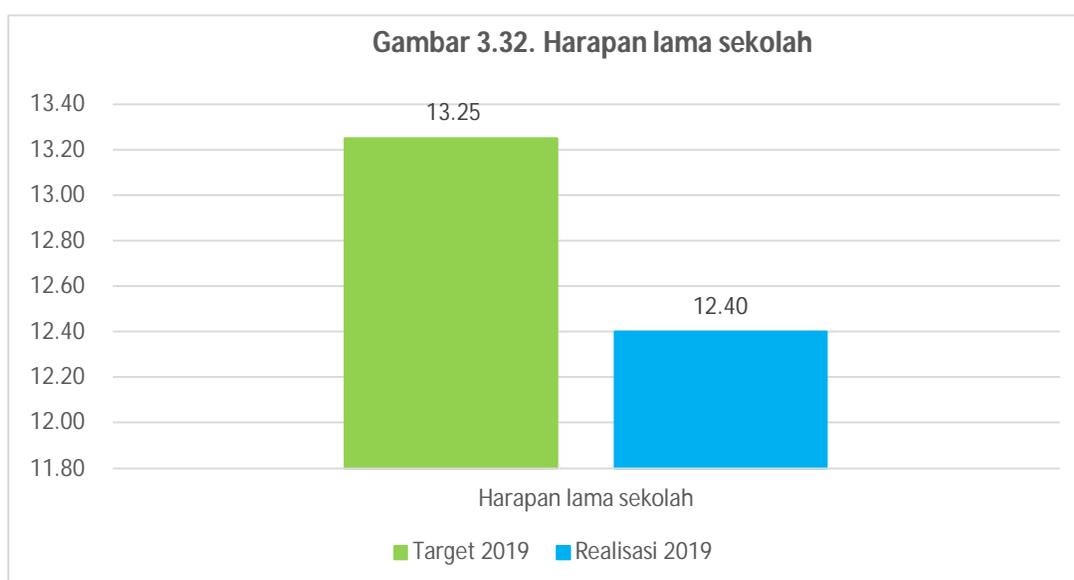
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)				Keterangan
9	STR III	18	162	
164,486			1,651,964	
Rata-rata lama sekolah			10.04	

Rata-rata lama sekolah Kota Dumai pada tahun 2019 adalah sebesar 10,04 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kota Dumai dapat menyelesaikan sekolah sampai kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas/SMA. Sehingga untuk mencapai target rata-rata lama bersekolah 9 tahun sudah terpenuhi. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai masih akan melakukan upaya agar penduduk kota Dumai dimasa yang akan datang dapat menyelesaikan Pendidikan sampai dengan SMA.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Program BOS. Dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak meningkatkan rata-rata lama sekolah.

b. Indikator Kinerja Tujuan : **Harapan lama sekolah**

Target tahun 2019 Harapan lama sekolah adalah 13,25 tahun dan realisasi tahun 2019 sebesar 12,98 tahun dengan tingkat capaian sebesar 97,96 %.



Belum tercapainya target angka HLS Kota Dumai terjadi karena dua faktor diantaranya adalah permasalahan ekonomi dan motivasi keluarga. Masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah cenderung memiliki minat terhadap pendidikan yang rendah. Biaya transportasi dan biaya peralatan sekolah dianggap masih terlalu tinggi untuk diwujudkan. Selain itu tingkat kepercayaan terhadap lembaga pendidikan juga mempengaruhi motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya, terutama untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dua hal tersebut berkolaborasi menjadi sebuah siklus, perekonomian yang masih rendah ditambah dengan kurangnya motivasi

belajar dari keluarga sehingga orang tua menginginkan anaknya bekerja lebih dini, inilah yang mengakibatkan menurunnya angka HLS.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program Pendidikan anak usia dini. Program tersebut harus lebih dioptimalkan lagi. Untuk mencapai target angka harapan lama sekolah perlu dilakukan sosialisasi dan motivasi pendidikan serta aktifitas pemberdayaan masyarakat sehingga harapan lama sekolah di Kota Dumai meningkat, Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi Harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Tujuan Harapan Lama Sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

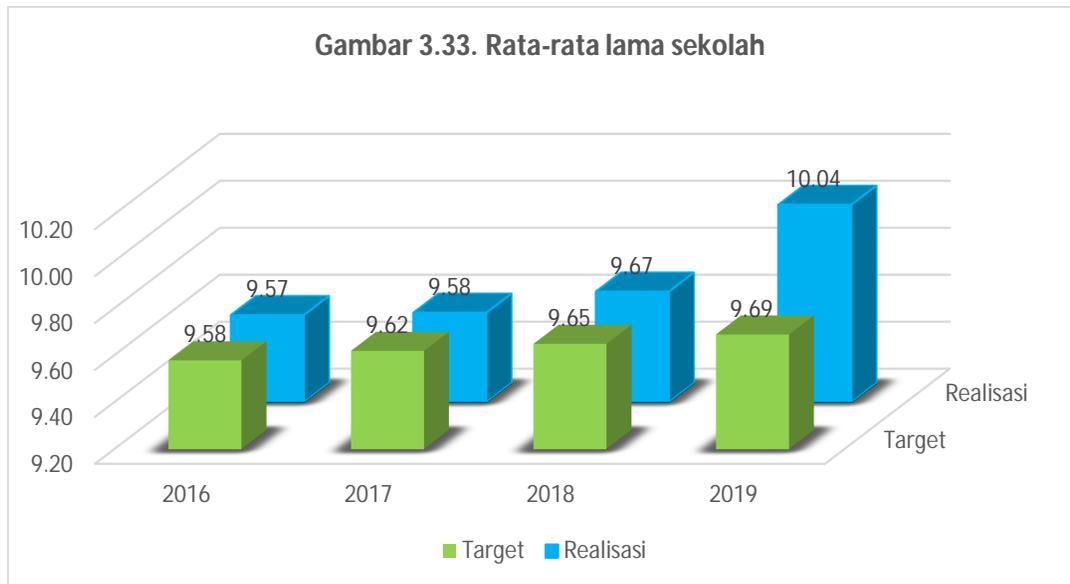
Tabel. 3.9. Angka harapan lama sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS)				Keterangan	
Umur (th)	Jumlah Penduduk (Pi)	Jumlah Penduduk yang bersekolah (Ei)	Rasio (Ei/Pi)		
7	5393	6379	1.18	Harapan Lama Sekolah = 12,40 tahun	
8	5373	6251	1.16		
9	5298	6384	1.21		
10	5174	6565	1.27		
11	5011	6033	1.20		
12	4856	5064	1.04		
13	4734	4651	0.98		
14	4643	4540	0.98		
15	4534	4586	1.01		
16	4399	4548	1.03		
17	4368	3898	0.89		
18	4496	1561	0.35		
19	4721	404	0.09		
20	4895		0.00		
21	5006		0.00		
22	5156		0.00		
23	5366		0.00		
24	5566		0.00		
25	5744		0.00		
Harapan lama sekolah			12.40		

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

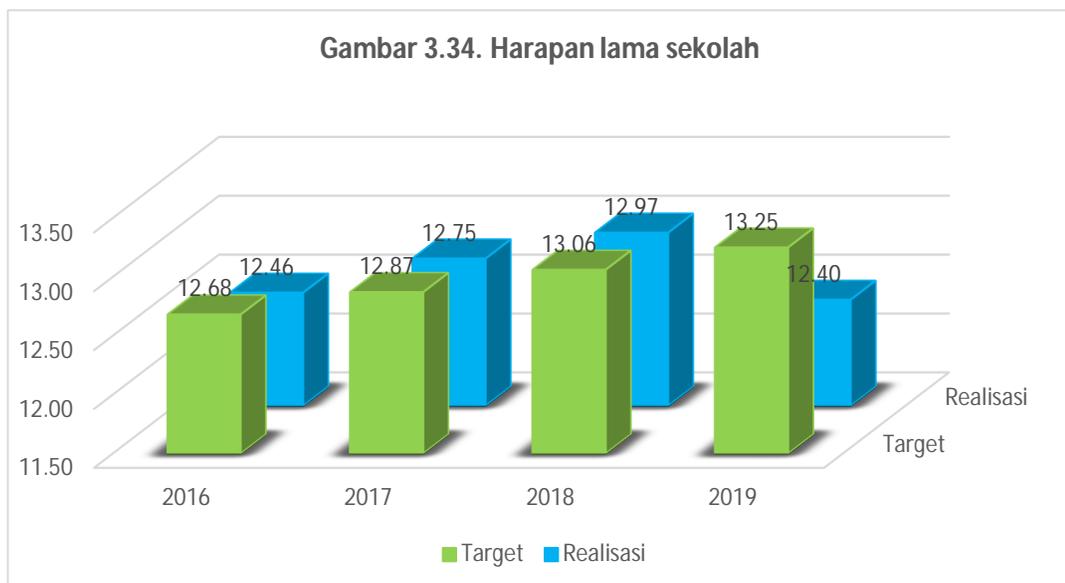
a. Indikator Kinerja Tujuan : **Rata-rata lama sekolah**

Realisasi Pada tahun 2018 Rata-rata lama sekolah adalah sebesar 9,67 tahun, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Rata-rata lama sekolah naik menjadi 9,84 tahun.



b. Indikator Kinerja Tujuan : **Harapan lama sekolah**

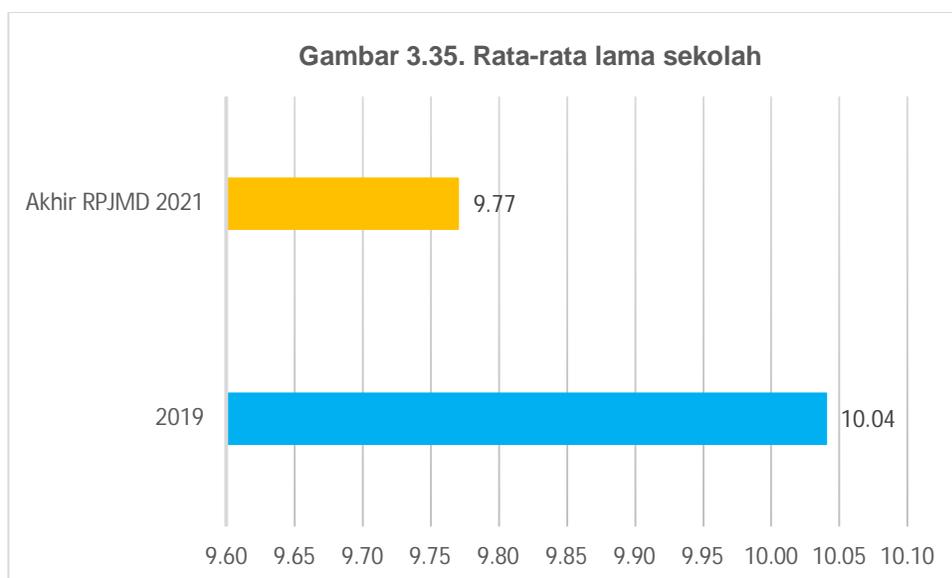
Realisasi Pada tahun 2018 Harapan lama sekolah adalah sebesar 12,97 tahun, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 12,98 tahun.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

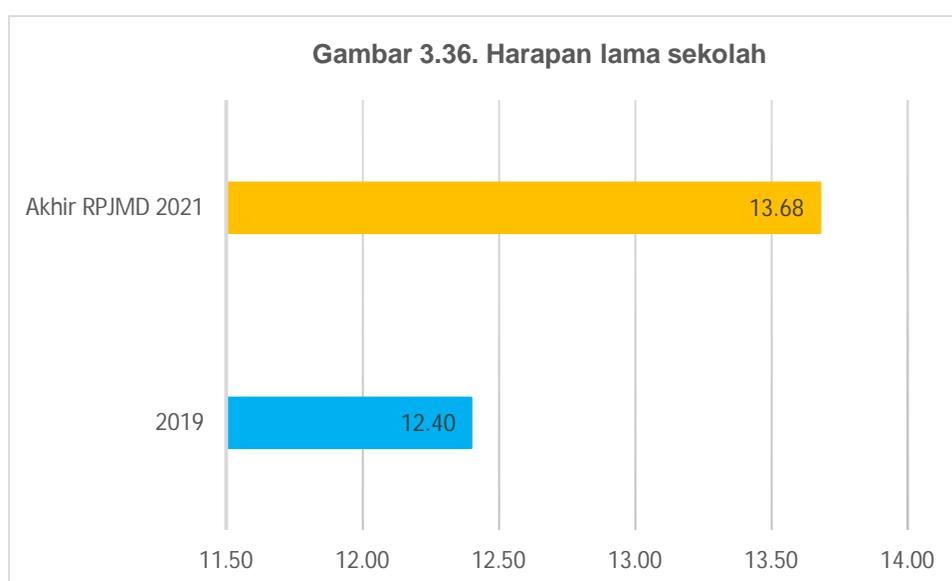
a. Indikator Kinerja Tujuan : **Rata-rata Lama Sekolah**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 9,77 tahun, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 9,84 tahun dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100,72 %.



b. Indikator Kinerja Tujuan : **Harapan Lama Sekolah**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 13,68 tahun, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 12,98 tahun dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 94,88 %.



Sasaran Strategis 2.1

Meningkatnya partisipasi pendidikan

Sasaran strategis 2.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan**”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**.

Untuk mengukur sasaran misi Kedua ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.10. berikut dibawah ini :

Tabel. 3.10. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	

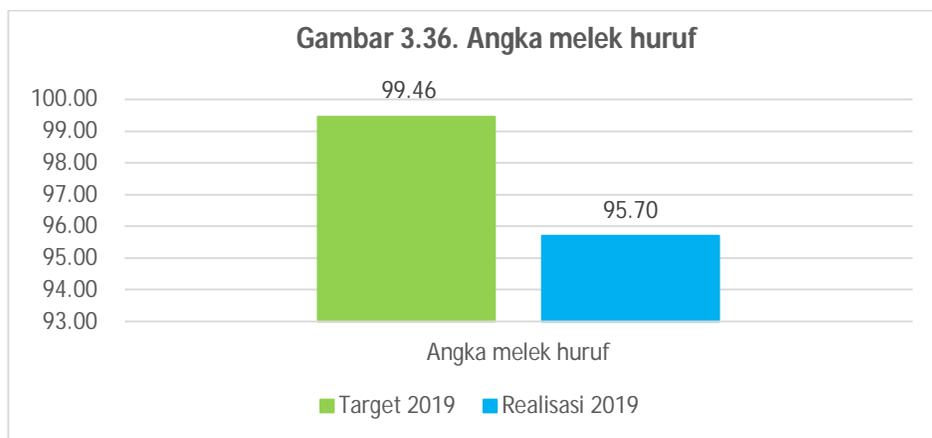
1	Angka melek huruf	%	99,52	99,53	99,46	99,46	95,7	96,22	99,48	96,20
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,54	107,33	99,74	99,75	98,93	99,18	100	98,93
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80,46	100,89	93,19	95,76	84,19	87,92	100	84,19
	Rata-rata Capaian Kinerja							96,52		

Terlihat dari tabel 3.10 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 2.1 terdapat 3 (tiga) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka melek huruf**

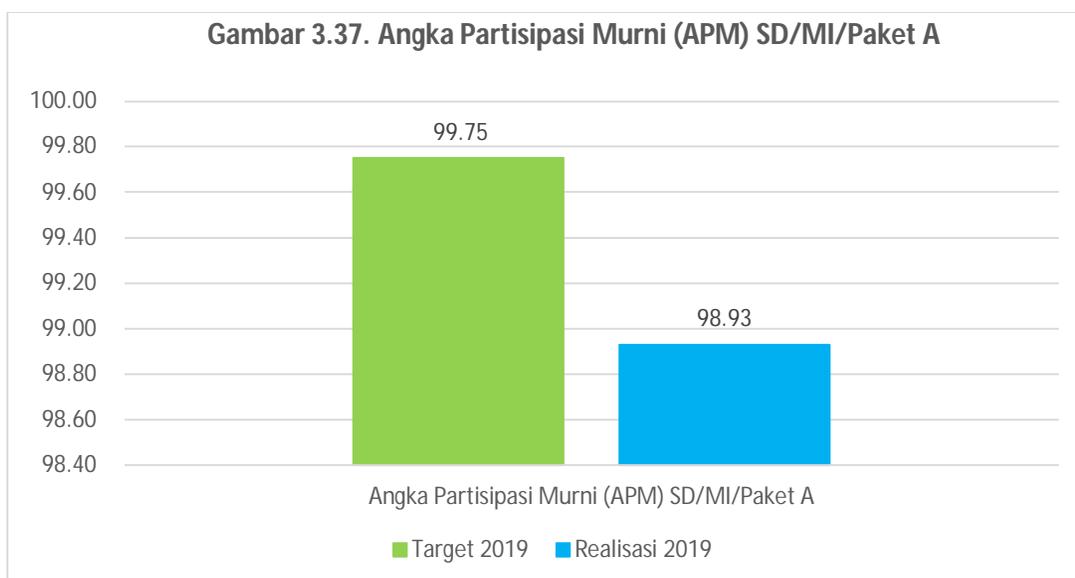
Target tahun 2019 Angka melek huruf adalah 99,46% dan realisasi tahun 2019 sebesar 95,70% dengan tingkat capaian sebesar 96,22%.



Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dalam program wajib belajar sembilan tahun terdapat kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak meningkatkan angka melek huruf yaitu penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SD dan jenjang SMP. Selain itu untuk penduduk yang putus sekolah, pada program ini terdapat kegiatan penyelenggaraan Paket A dan Paket B untuk menekan angka buta huruf.

b. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**

Target tahun 2019 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A adalah 99,75% dan realisasi tahun 2019 sebesar 98,93% dengan tingkat capaian sebesar 98,18%.



Target Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SD/MI/Paket A yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 7-12 Tahun. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pencapaian target tersebut dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi dan pengetatan aturan usia masuk sekolah. Sebagaimana diketahui dari tahun ke tahun usia masuk sekolah pendidikan dasar cenderung semakin cepat. Menurut data tahun 2016 siswa baru yang memasuki sekolah SD di tingkat pertama atau calon siswa yang mendaftar masuk SD atau sederajat lebih hampir 15% belum mencukupi umur 7 tahun. Bahkan masih ada yang belum mencapai umur 6 tahun.

Hal ini pada dasarnya diharapkan peserta didik dapat mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu sesuai dengan kematangan psikologi perkembangan anak dan sesuai juga dengan lingkungan pendidikan yang diterimanya. Namun di sisi lain dapat dikatakan bahwa jika banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya meskipun secara usia belum cukup, yang seringkali diasumsikan seiring dengan perkembangan tingkat ekonomi sebuah keluarga atau masyarakat.

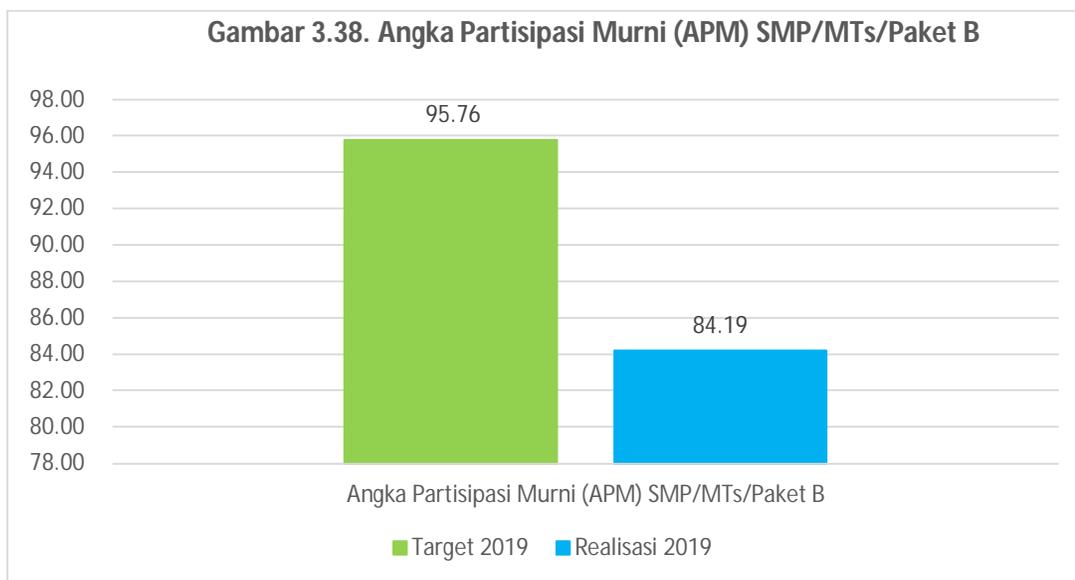
Namun tentu saja selain berpengaruh terhadap kesiapan siswa tersebut dalam mengikuti pendidikan secara mental dan emosional, hal ini juga mempengaruhi angka partisipasi murni, dimana indikator ini membandingkan siswa SD/ sederajat yang berumur 7-12 tahun (bukan seluruh siswa SD/ sederajat) dengan penduduk usia sekolah 7-12 tahun.

Hal ini didukung oleh surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan umur calon peserta didik bagi sekolah pada saat penerimaan siswa baru.

Dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Hal ini dipandang penting karena jika aturan umur tidak secara ketat dilakukan pada tingkat SD/ sederajat akan mempengaruhi APM di tingkat pendidikan selanjutnya.

c. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**

Target tahun 2019 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B adalah 95,76% dan realisasi tahun 2019 sebesar 84,19% dengan tingkat capaian sebesar 87,92 %.



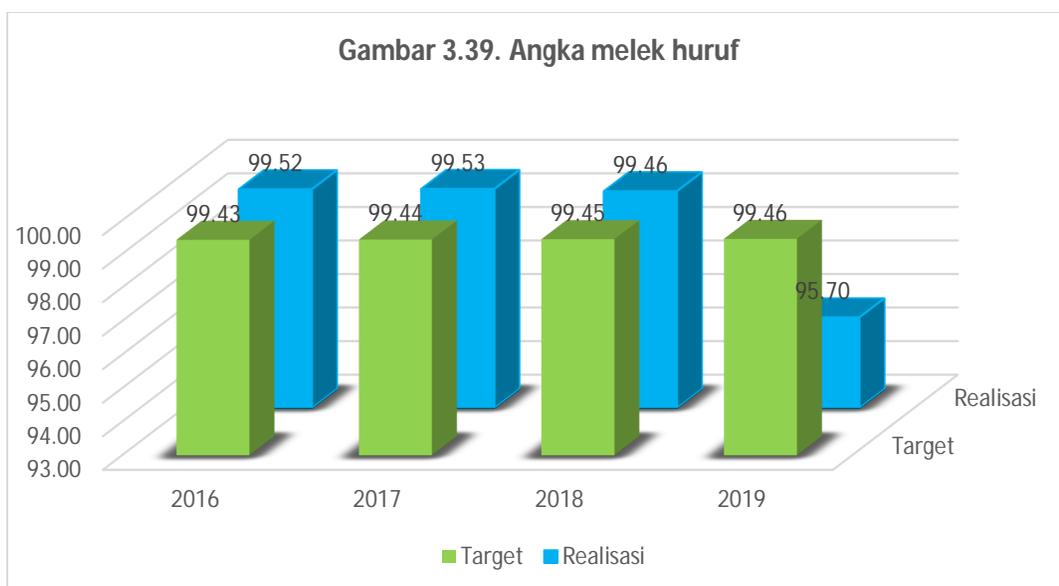
Target dari indikator sasaran ini yaitu angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yang menunjukkan persentase jumlah anak pada kelompok usia SMP/MTs/Paket B yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 13-15 Tahun. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sama seperti APM SD/MI/SDLB/ Paket A, pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan beberapa tahun terakhir pemerintah semakin gencar melakukan sosialisasi dan pengetatan aturan usia masuk sekolah yang dimulai dari pendidikan anak usia dini. Hal ini tentu saja selain berpengaruh terhadap APM di tingkat pendidikan selanjutnya. Diharapkan upaya sosialisasi dan pengetatan usia sekolah ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

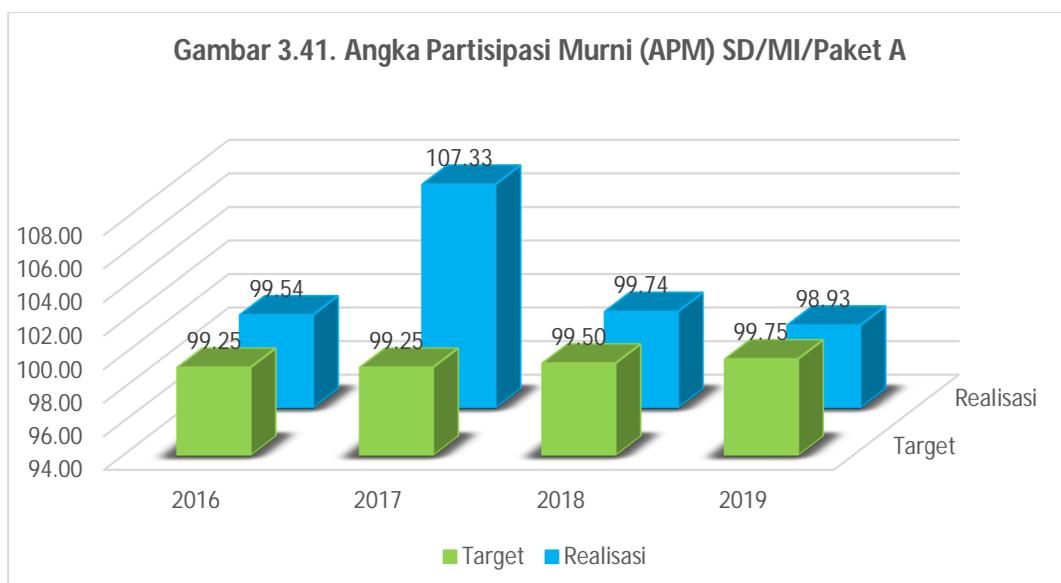
a. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka melek huruf**

Realisasi Pada tahun 2018 Angka melek huruf adalah sebesar 99,46%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Angka melek huruf menurun menjadi sebesar 95,70%.



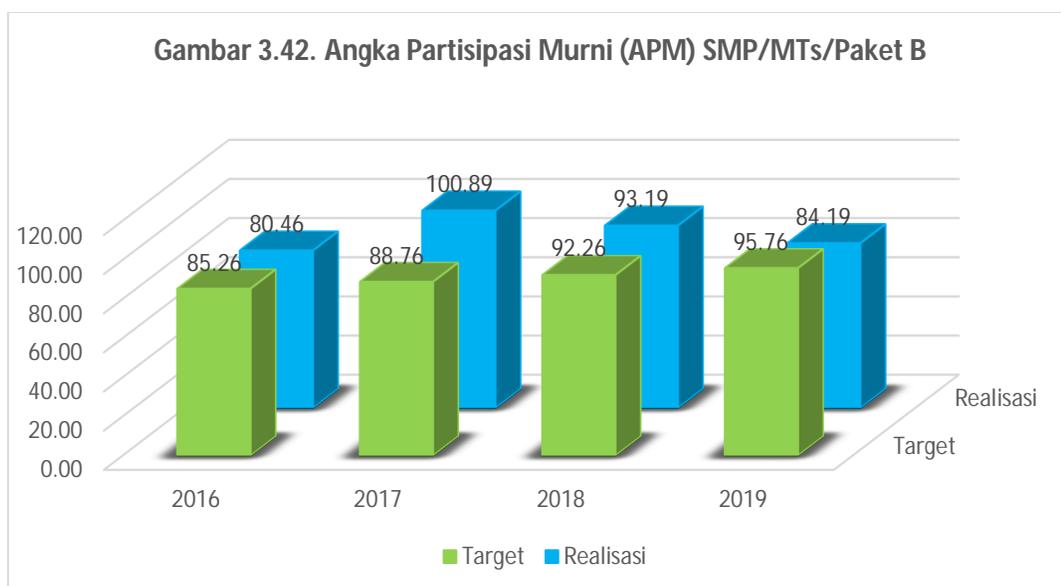
b. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**

Realisasi Pada tahun 2018 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A adalah sebesar 99,74%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A menurun menjadi 98,93%.



c. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**

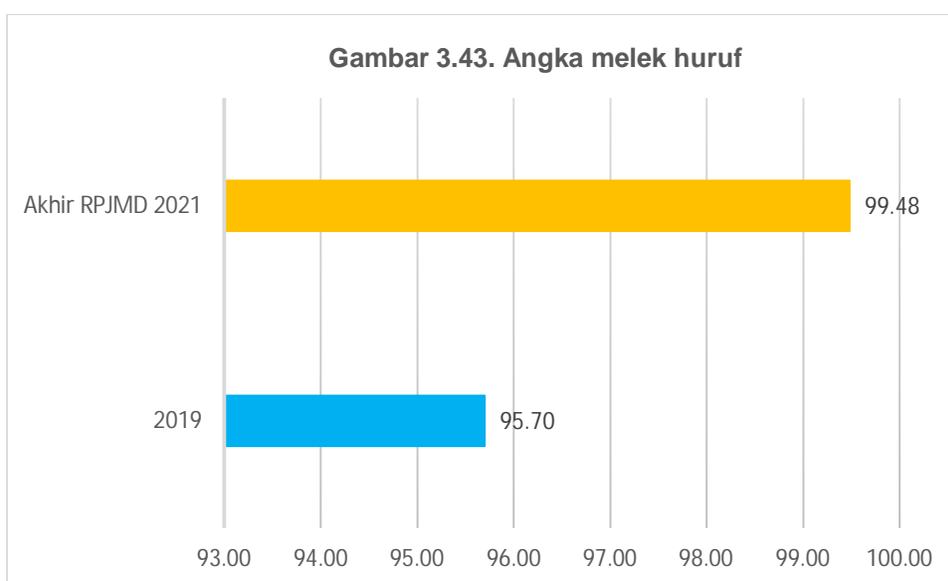
Realisasi Pada tahun 2018 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B adalah sebesar 93,19%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B menurun menjadi 84,19%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

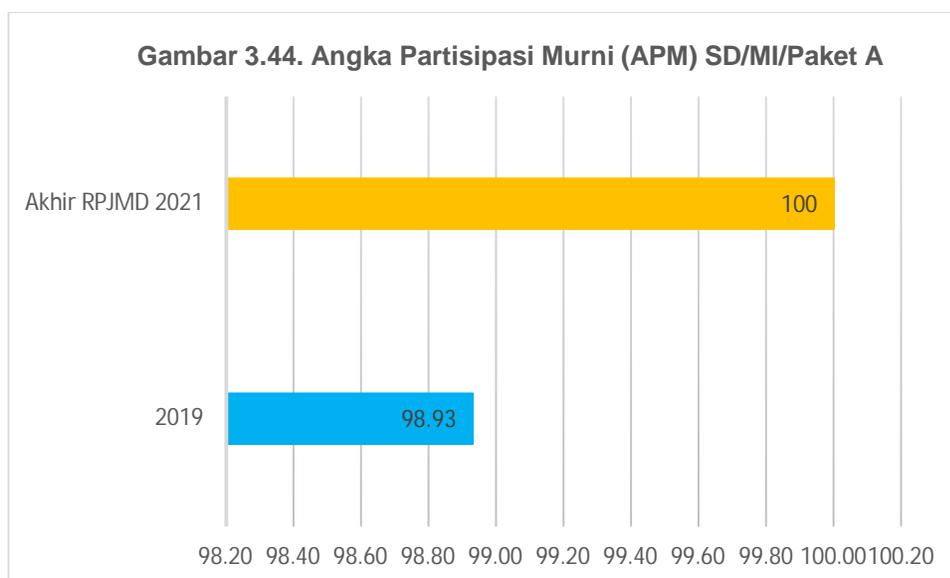
a. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka melek huruf**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 99,48%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sebesar 95,70% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 96,20 %.



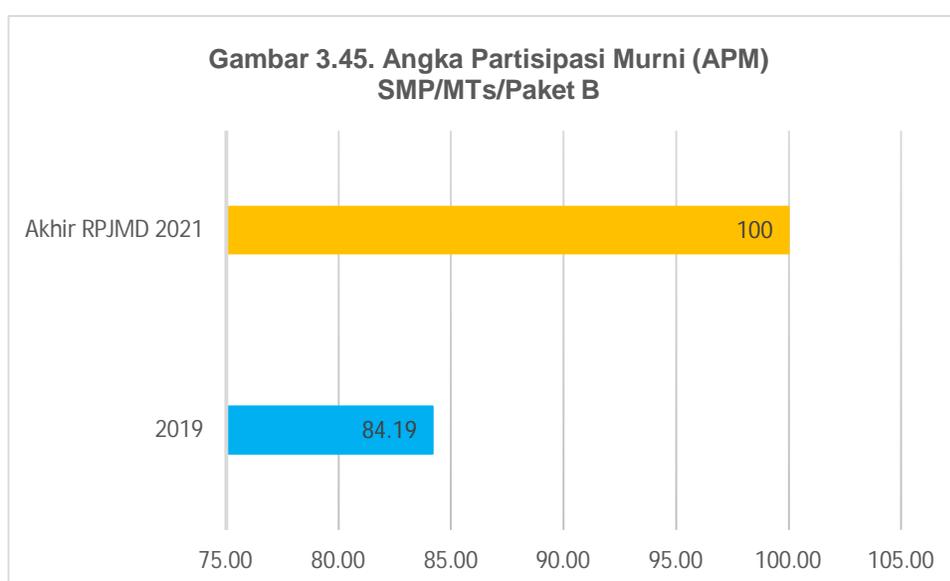
b. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sebesar 98,93% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 98,93%.



c. Indikator Kinerja Sasaran : **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sebesar 84,19% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 84,19 %.



Sasaran Strategis 2.2

Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar

Sasaran strategis 2.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan**”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mengukur sasaran 2.2 ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.11 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.11. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.2

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	

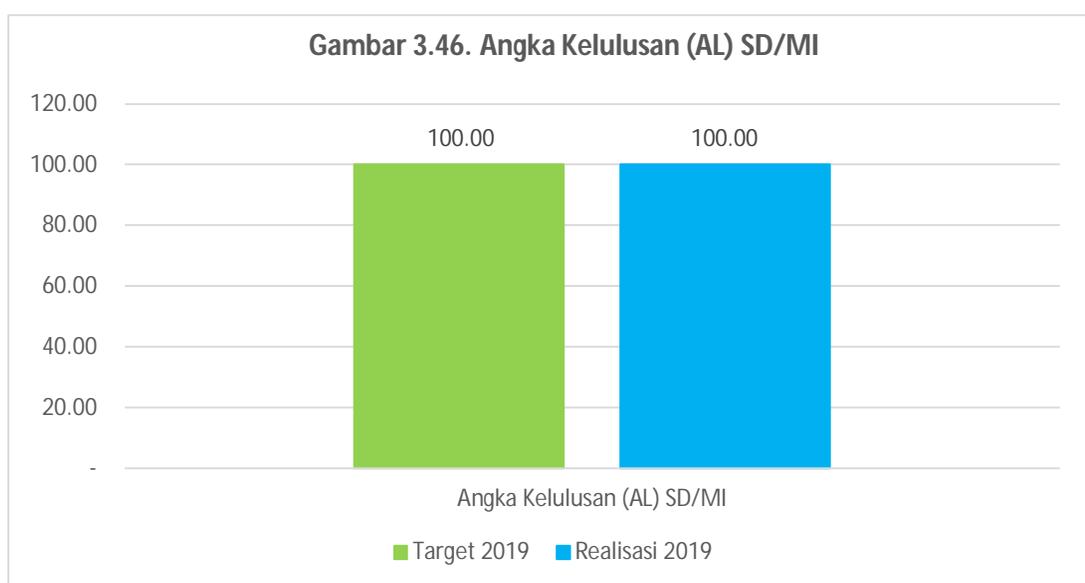
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,96	100	99,98	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja							100		

Terlihat dari tabel 3.11 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 2.2 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Target tahun 2019 Angka Kelulusan (AL) SD/MI adalah 100% dan realisasi tahun 2019 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100, %.

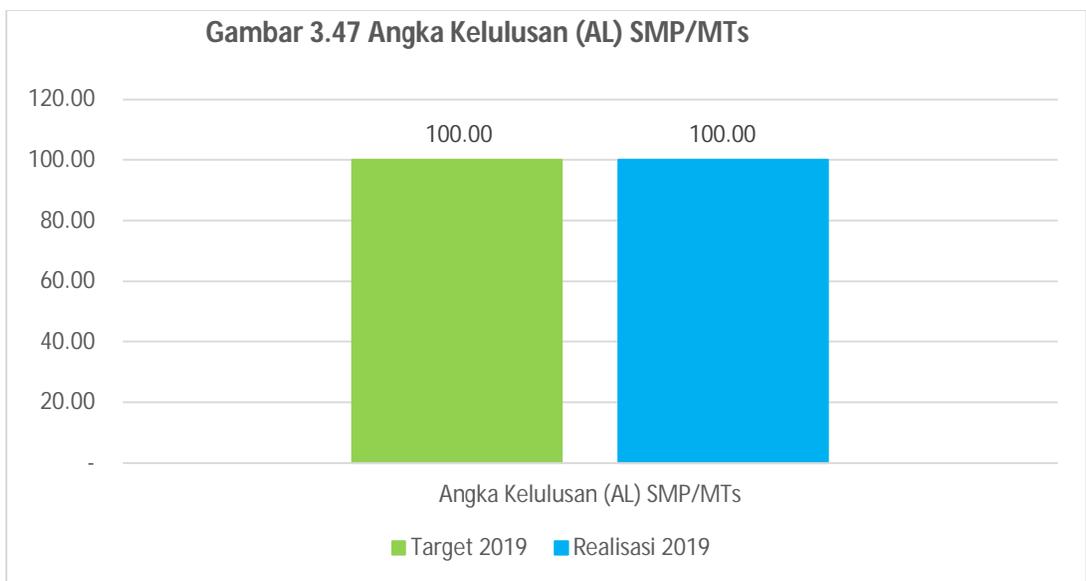


Indikator sasaran Tingkat kelulusan Pendidikan dasar menunjukkan persentase jumlah peserta didik pada jenjang Pendidikan dasar yang lulus pada tahun ajaran 2018/2019. Capaian indikator ini pada tahun 2018 adalah 100%, target tahun 2019 adalah sebesar 100% adapun realisasi tahun 2019 sebesar 100% yang berarti capaian sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%. Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian untuk tingkat SD dan SMP pada tahun pelajaran 2018/2019 berjumlah 10.360 orang dengan tingkat kelulusan mencapai 100%.

Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang mendukung peningkatan kompetensi peserta didik. Diharapkan upaya-upaya ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Target tahun 2019 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs adalah 100% dan realisasi tahun 2019 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

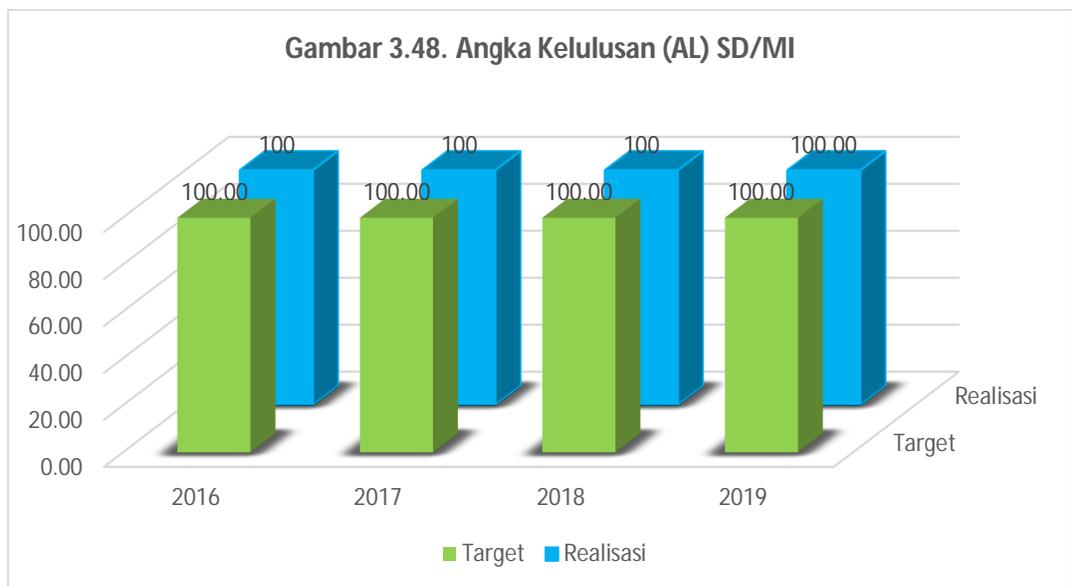


Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pencapaian target tersebut dapat berhasil dikarenakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang mendukung peningkatan kompetensi peserta didik. Diharapkan upaya-upaya ini dapat tetap dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

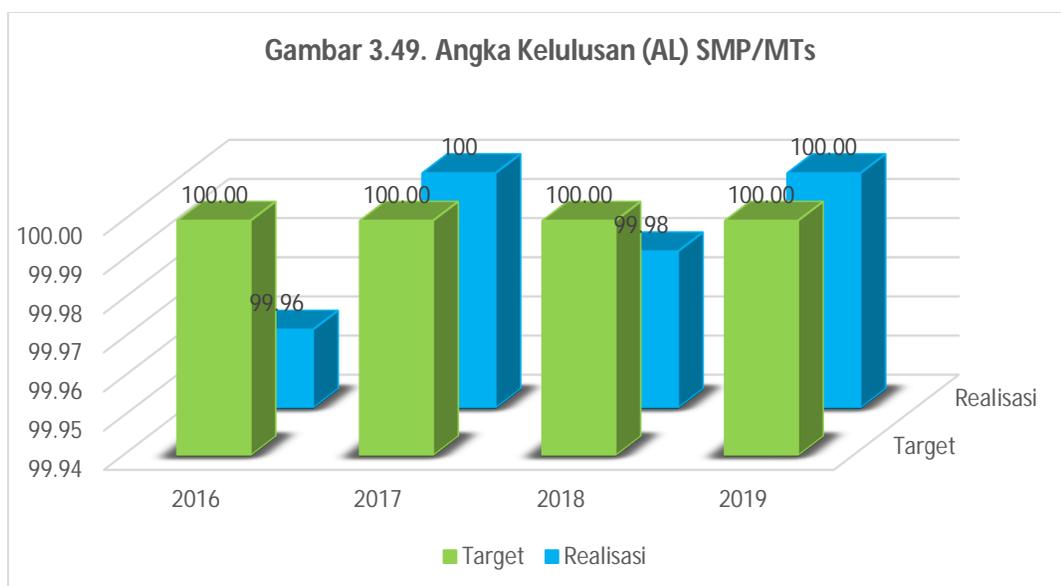
a. Indikator Kinerja Sasaran : Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Realisasi Pada tahun 2018 Angka Kelulusan (AL) SD/MI adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Angka Kelulusan (AL) SD/MI tetap sebesar 100%.



b. Indikator Kinerja Tujuan : Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

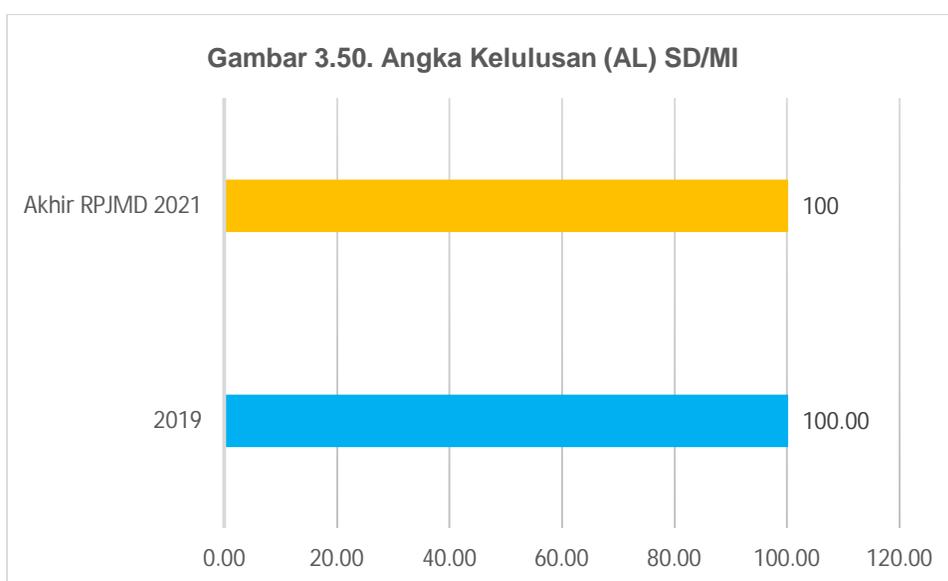
Realisasi Pada tahun 2018 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs adalah sebesar 99,98%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs menurun menjadi 100%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

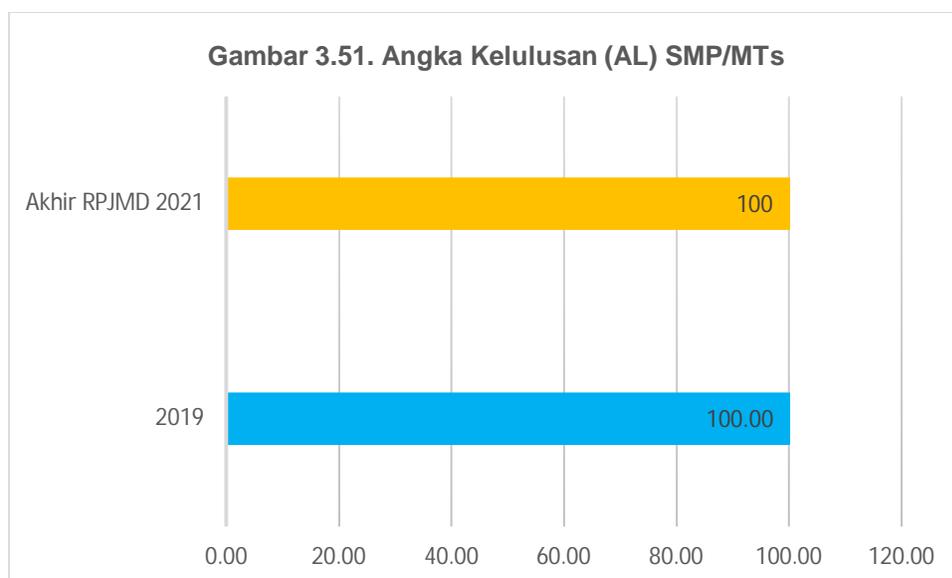
a. Indikator Kinerja Tujuan : Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100 %.



b. Indikator Kinerja Tujuan : Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100%.



Sasaran Strategis 2.3

Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar

Sasaran strategis 2.3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan”.

Sasaran ini didukung OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 2 (Dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.12 di bawah ini :

Tabel. 3.12. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.3

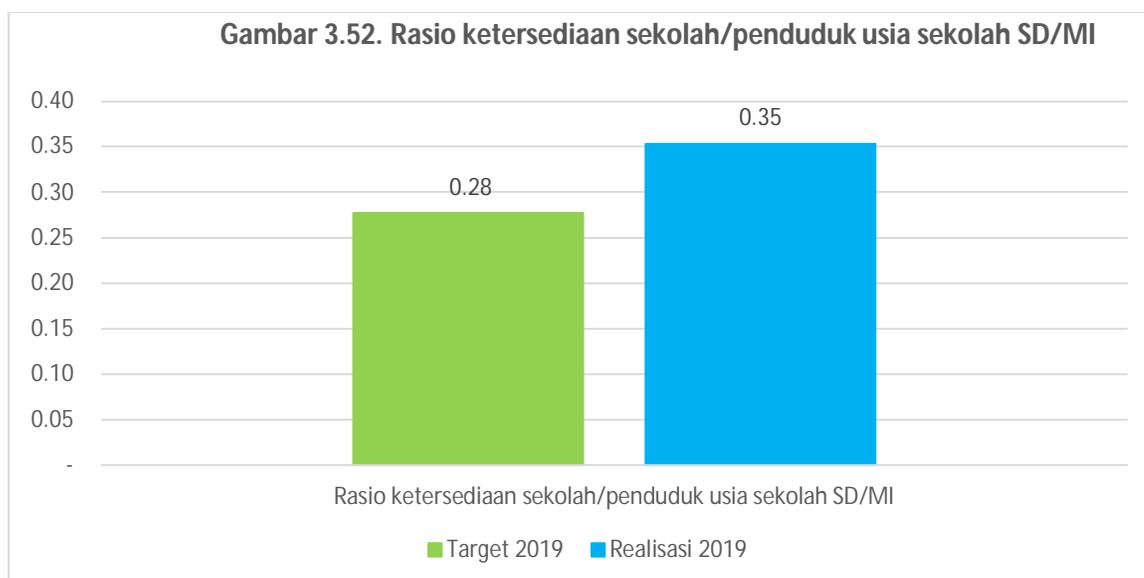
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0,1167	0,403264	0,4062500	0,27708333	0,353380	127,54	0,2770833	127,54
2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0,0799	0,334456	0,5166898	0,3701388	0,358449	96,84	0,3701389	96,86
Rata-rata Capaian Kinerja								112,19		

Terlihat dari tabel 3.12 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 2.3 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI

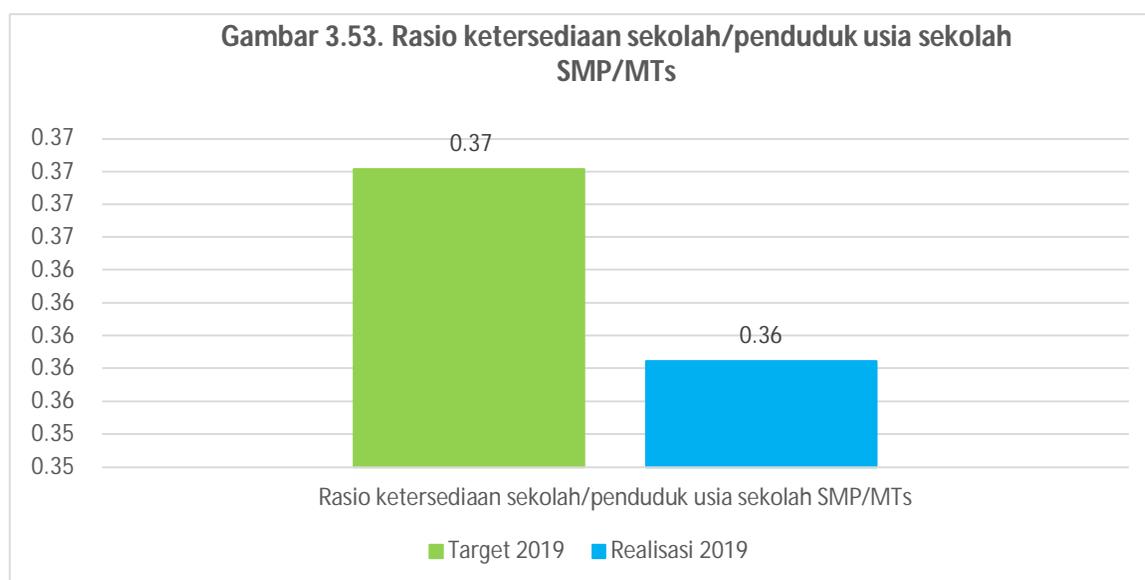
Target tahun 2019 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 0,40625 dan realisasi tahun 2019 sebesar 0,353380 dengan tingkat capaian sebesar 127,54%.



Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan penambahan unit sekolah baru dengan memperhatikan kebutuhan sekolah pada wilayah yang jauh dari sekolah untuk memenuhi rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah ini.

- b. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs

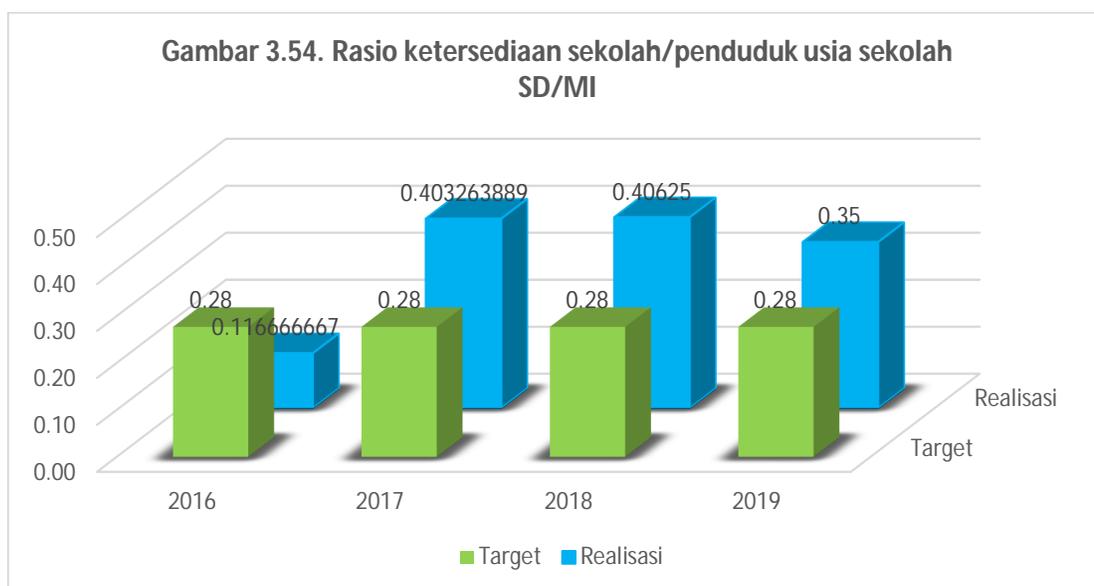
Target tahun 2019 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs adalah 0,51669 dan realisasi tahun 2018 sebesar 1:386,42 dengan tingkat capaian sebesar 96,84 %.



Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Diharapkan pada tahun berikutnya dapat dilakukan penambahan unit sekolah baru dengan memperhatikan kebutuhan sekolah pada wilayah yang jauh dari sekolah untuk memenuhi rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah.

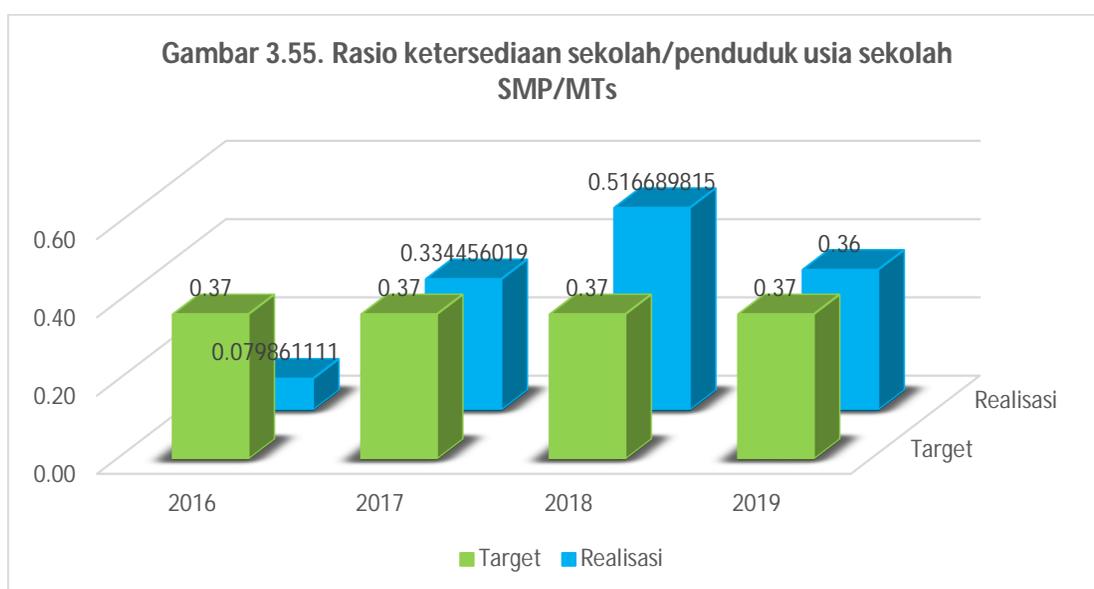
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI

Realisasi Pada tahun 2018 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah sebesar 0,40625 sedangkan realisasi pada tahun 2019 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menurun sebesar 0,35338



- b. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs

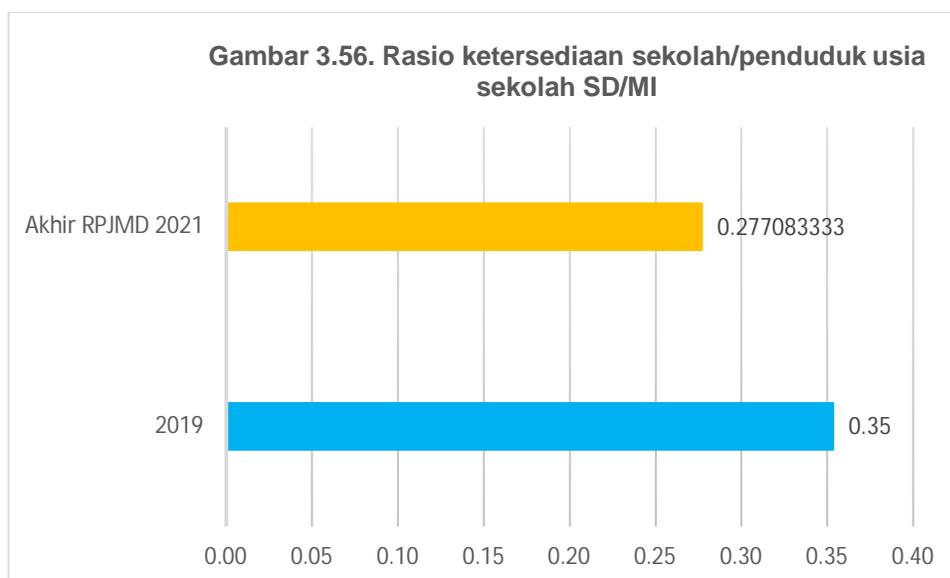
Realisasi Pada tahun 2018 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs adalah sebesar 0,51669 sedangkan realisasi pada tahun 2019 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs menurun menjadi 0,3584.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

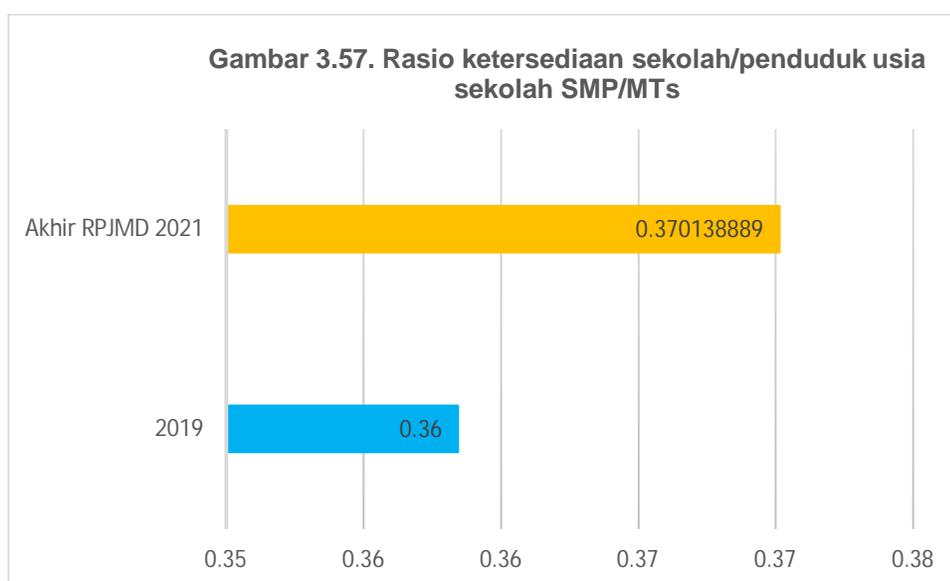
- a. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 0,27708, realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sebesar 0,35338 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2018 terhadap RPJMD 2021** sebesar 127,54 %.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 0,37014 realisasi kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2019 sebesar 0,3584 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2018 terhadap RPJMD 2021** sebesar 96,84%.



Tujuan 3

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Tujuan 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk mengukur Tujuan 3 ini terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.13 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.13. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 3.

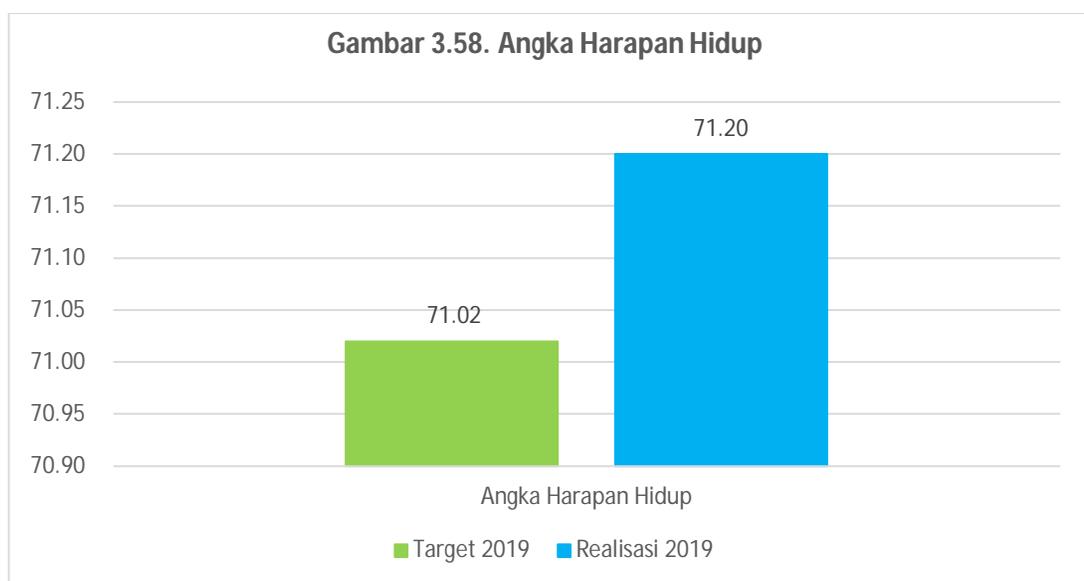
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	

1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,25	70,31	70,37	71,02	71,2	100,25	71,04	100,23
	Rata-rata Capaian Kinerja							100,25		

Terlihat dari tabel 3.13 diatas pada Misi Kedua tujuan 3 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan :Angka Harapan Hidup

Target tahun 2019 Angka Harapan Hidup adalah 71,02 tahun dan realisasi tahun 2019 sebesar 71,2 tahun dengan tingkat capaian sebesar 100,25%.



Mulai tahun 2017 karena ada perubahan metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang salah salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), maka Badan Pusat Statistik Pusat telah merilis data IPM dengan menggunakan metode baru. Dengan diterapkannya metode baru dalam menghitung IPM menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibandingkan dengan IPM metode lama termasuk Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH).

Pada tahun 2019 angka harapan hidup waktu lahir (umur harapan hidup) di Kota Dumai sebesar 71,2 tahun. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 yakni sebesar 70,37 tahun terlihat ada sedikit peningkatan angka harapan hidup waktu lahir. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian.

Tabel. 3.14. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Dengan Metode Baru Di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai Dari Tahun 2010 sampai dengan 2019

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2010	70,7	70,15	69,93
2.	2011	69,8	70,32	69,95
3.	2012	70,0	70,49	70,02
4.	2013	70,2	70,67	70,04
5.	2014	70,4	70,76	70,05

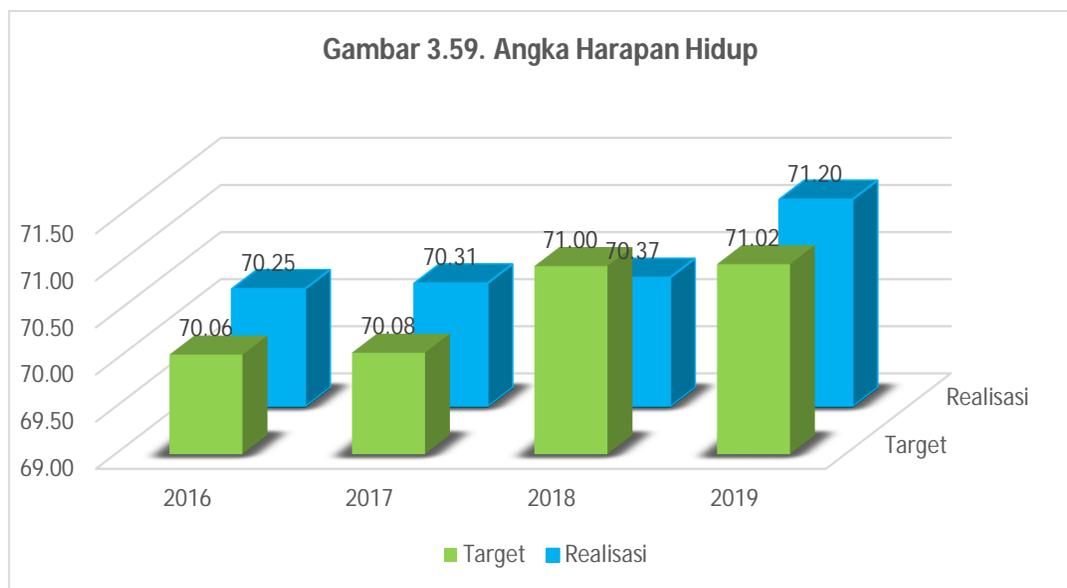
No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
6.	2015	70,6	70,93	70,25
7.	2016	70,8	70,93	70,25
8.	2017	70,9	70,97	70,31
9.	2018	71,1	70,99	70,37
10.	2019	71,20	71,19	71,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2019

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Angka Harapan Hidup

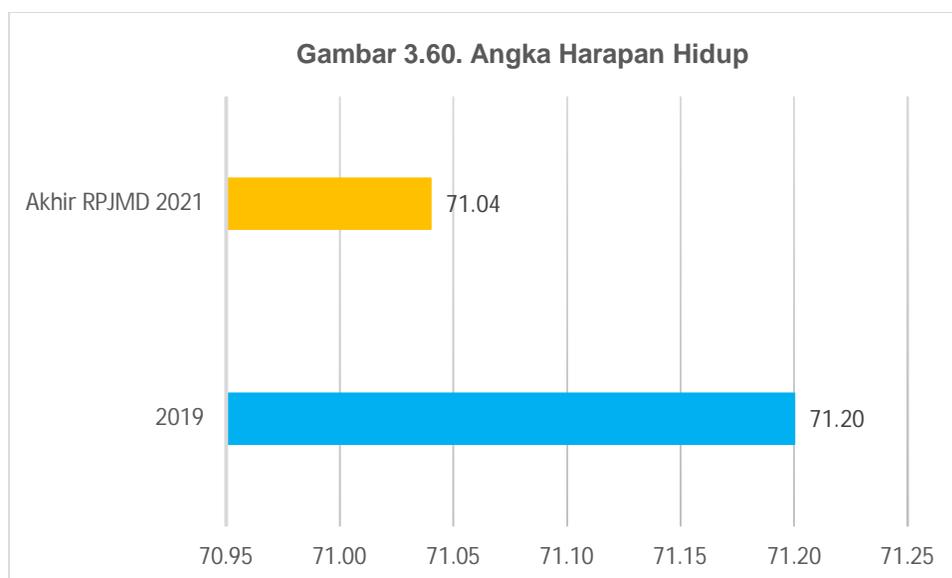
Realisasi Pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup adalah sebesar 70,37 tahun, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 71,2 tahun.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Angka Harapan Hidup

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 71,04 tahun, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 71,2 tahun dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100,23 %.



Sasaran Strategis 3.1

Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Sasaran strategis 3.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**. Sasaran ini didukung OPD Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 3 (Tiga) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.15 berikut ini :

Tabel. 3.15. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1

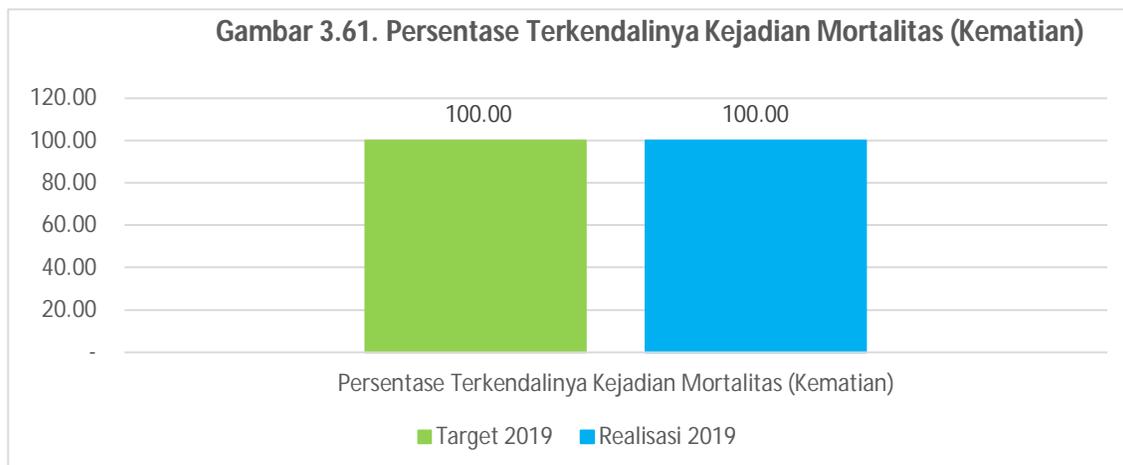
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas	%	100	95,28	99,77	100	100	100	100	100
2	Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas	%	86,84	99,68	99,26	100	100	100	100	100
3	Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja								100		

Terlihat dari tabel 3.15 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 3.1 terdapat 3 (tiga) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)

Target tahun 2019 Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian) adalah 100% dan realisasi tahun 2019 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.



Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran menurunnya Mortalitas (angka kematian) pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, dimana angka mortalitas terdiri dari:

1) Angka Kematian Bayi

Target kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2019 adalah sebesar 21 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi pencapaian kinerja angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup adalah sebesar 7,22 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%.

2) Angka kematian Balita

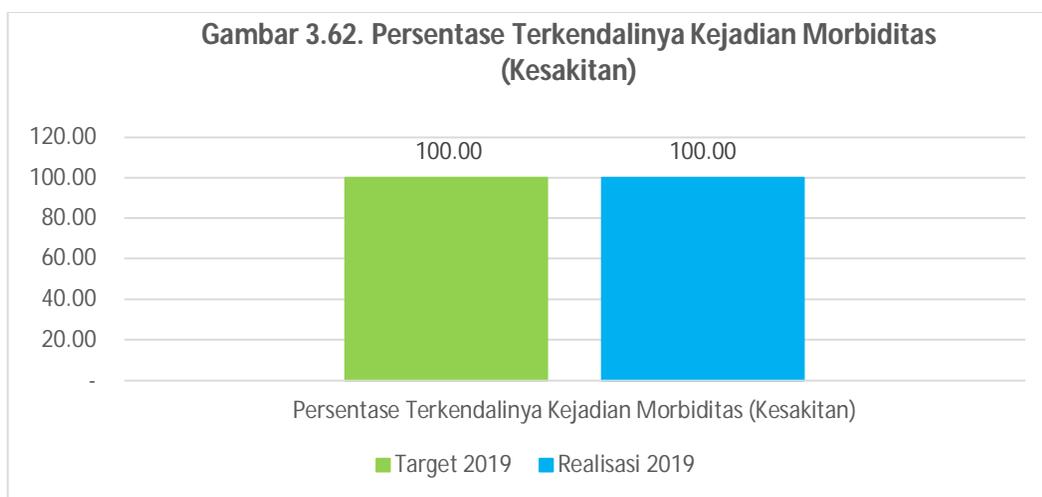
Target kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2019 adalah sebesar 28 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi pencapaian kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup adalah sebesar 9,22 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%.

3) Angka Kematian Ibu

Target kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2019 adalah sebesar 110 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan realisasi pencapaian kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah sebesar 124,55 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 86,77%.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)

Target tahun 2019 Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan) adalah 100% dan realisasi tahun 2019 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.



Terkendalinya kejadian morbiditas (Kesakitan) terdiri dari:

1) Angka Kesakitan Malaria

Target kinerja Angka Kesakitan Malaria atau API (Annual Parasite Incidence) Kota Dumai pada tahun 2019 adalah sebesar 1 per 1.000 penduduk, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Angka Kesakitan Malaria atau API (Annual Parasite Incidence) adalah sebesar 0,01 per 1.000 penduduk. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%.

2) Angka kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Target kinerja Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai pada tahun 2019 adalah sebesar 88%, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + adalah sebesar 83,20%. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 94,55%.

3) Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

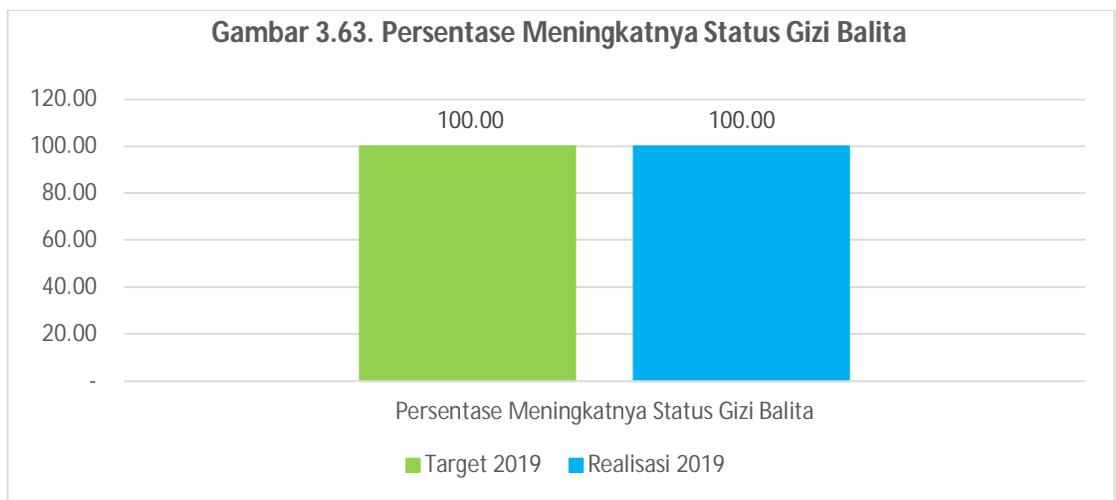
Target kinerja Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai pada tahun 2019 adalah sebesar <1%, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Angka Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko adalah sebesar 1,27%. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 73%.

4) Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Target kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Dumai pada tahun 2019 adalah sebesar 56 per 100.000 penduduk, sedangkan realisasi pencapaian kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah sebesar 321,23 per 100.000 penduduk. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar -373,63%.

c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita

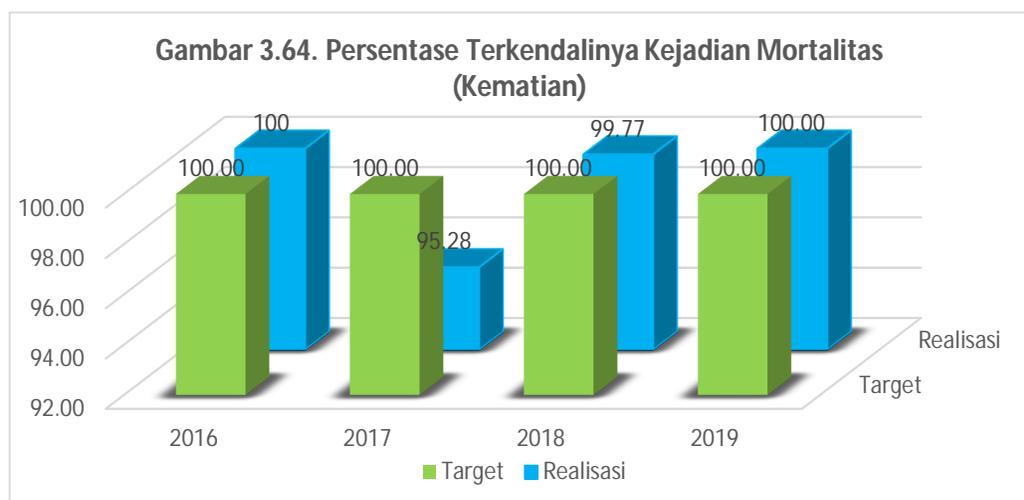
Target tahun 2019 Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita adalah 100% dan realisasi tahun 2019 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100 %.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)

Realisasi Pada tahun 2018 Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian) adalah sebesar 9,77%, realisasi pada tahun 2019 Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian) naik menjadi sebesar 100%.



Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran menurunnya Mortalitas (angka kematian) pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, dimana angka mortalitas terdiri dari:

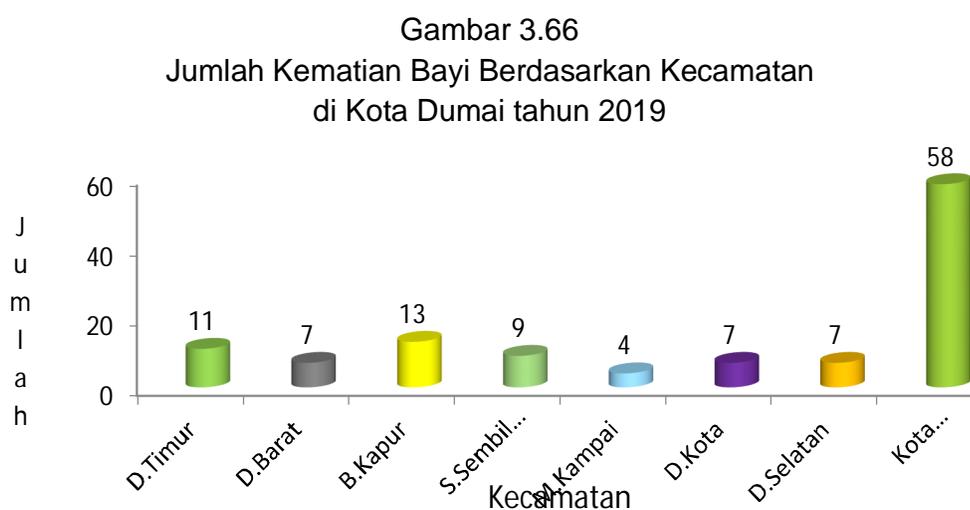
1) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2019 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 58 kasus dari 8.029 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 7,22 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 dimana angka kematian bayi sebesar 7,10 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2019 yakni 23 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal masih baik.

Pencapaian Angka Kematian Bayi Tahun 2015 sampai dengan 2019 Kota Dumai dapat di lihat pada Gambar 3.65 berikut ini :



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Bukit Kapur yakni sebanyak 13 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Timur sebanyak 11 kasus, seperti terlihat pada Gambar 3.66 berikut ini :

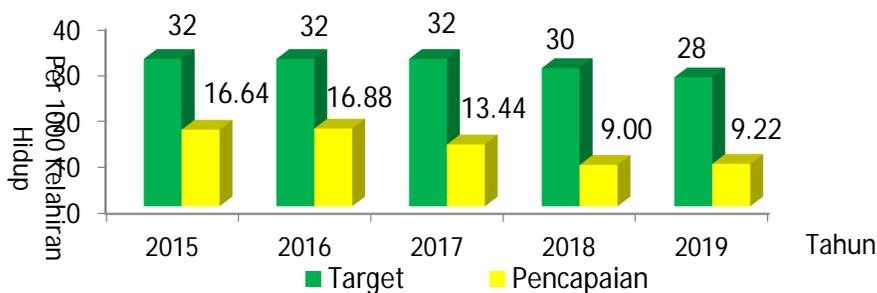


Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Asfiksia dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

2) Angka Kematian Balita

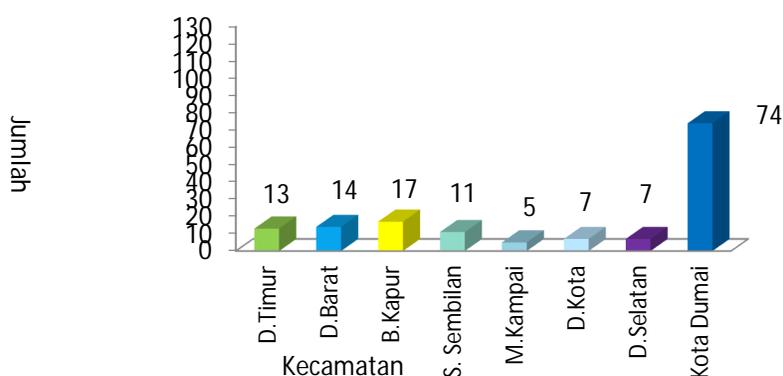
Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2019 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 74 kasus. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2019 di Kota Dumai sebesar 9,22 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 dimana angka kematian bayi sebesar 9,00 per 1000 kelahiran hidup, maka angka tersebut mengalami sedikit kenaikan. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2019 yakni 32 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita dan Tahun 2015 sampai dengan 2019 Kota Dumai dapat di lihat pada Gambar 3.67 berikut ini :

Gambar 3.67
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai
dari Tahun 2015 sampai dengan 2019



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Bukit Kapur yakni sebanyak 17 kasus disusul dengan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 14 kasus, seperti terlihat pada Gambar 3.4 berikut ini :

Gambar 3.68
Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2019

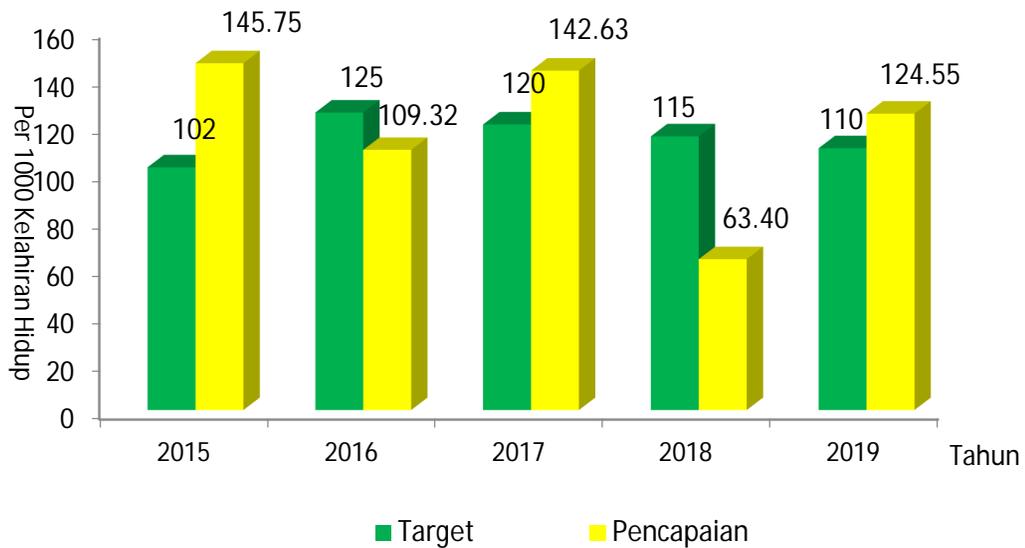


Penyebab kematian balita masih didominasi oleh Asfiksia dan BBLR.

3) Angka Kematian Ibu

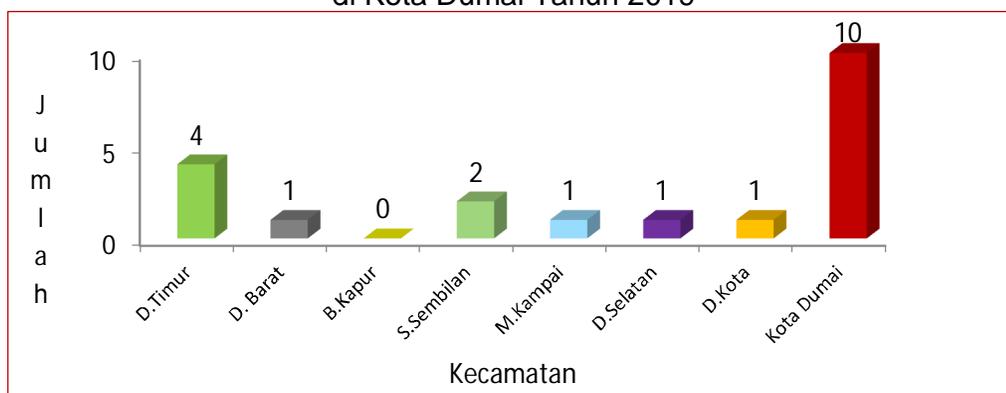
Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2019 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 10 kasus dari 8.029 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2019 di Kota Dumai sebesar 124,55 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017, di mana angka kematian ibu sebesar 63,40 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat adanya kenaikan jumlah kematian ibu pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2019 yakni 120 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini di atas target (yang berarti tingkat pencapaiannya kurang baik). Pencapaian Angka Kematian Ibu dari tahun 2015 sampai dengan 2019 Kota Dumai dapat di lihat pada Gambar 3.5 berikut ini :

Gambar 3.69
Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai
dari Tahun 2015 sampai dengan 2019



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 4 kasus kemudian disusul dengan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 2 kasus, seperti terlihat pada Gambar 3.6 berikut ini :

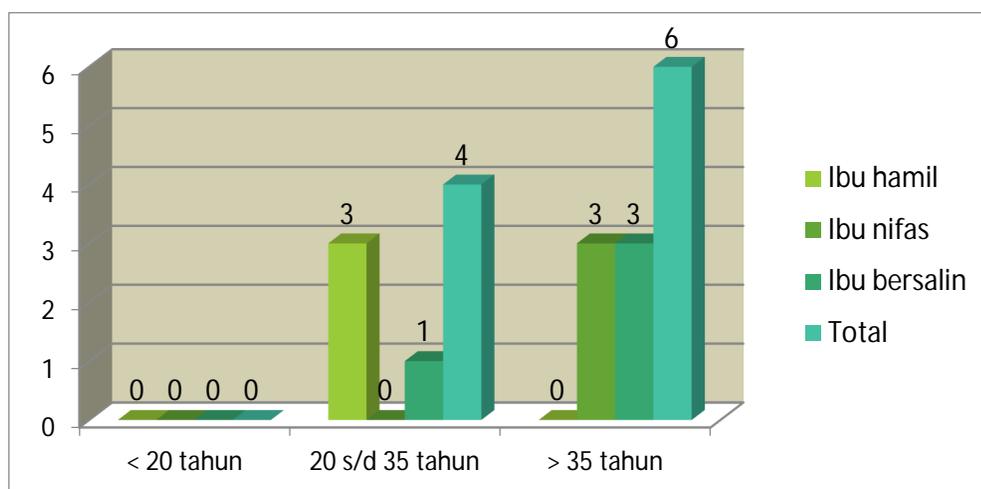
Gambar 3.70
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2019



Penyebab kematian ibu adalah karena perdarahan sebanyak 7 kasus disusul dengan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1 kasus dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 1 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur >35 tahun yakni sebanyak 6 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, kasus kematian terbanyak pada kelompok ibu bersalin sebanyak 4 kasus seperti terlihat pada Gambar berikut ini :

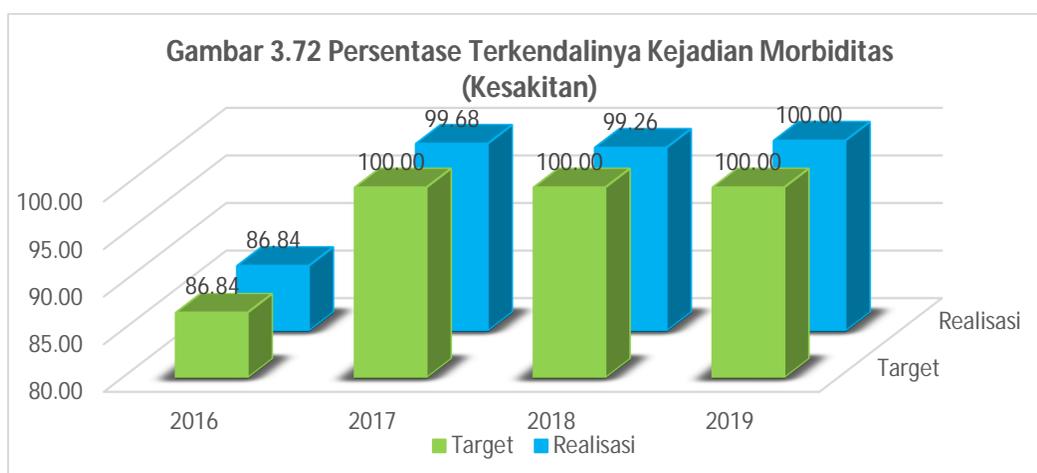
Gambar 3.71.

Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2019



b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)

Realisasi Pada tahun 2018 Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan) adalah sebesar 99,26%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan) meningkat menjadi 100%.



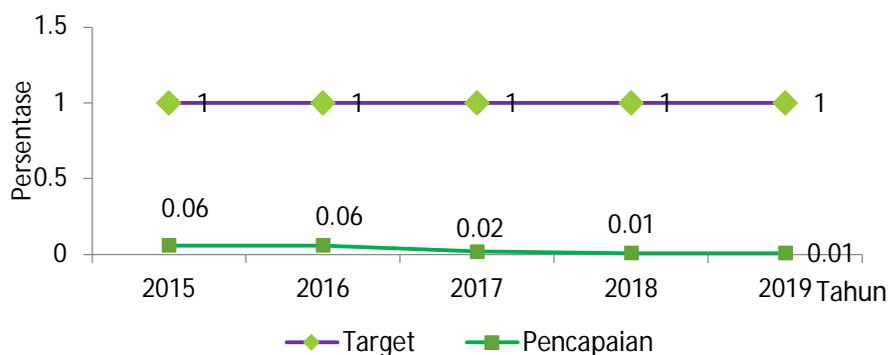
Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran menurunnya Morbiditas (angka kesakitan) pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, dimana angka morbiditas terdiri dari:

1) Angka Kesakitan Malaria

Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2019 ditemukan sebanyak 584 kasus kesakitan. Dari 584 kasus yang ada terdapat 3 kasus penderita malaria positif sehingga di dapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,01 per 1.000 penduduk. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 di mana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,01 per 1.000 penduduk, maka angka *Annual Parasite Incidence* (API) tersebut statis. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2019 yakni 1 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%)

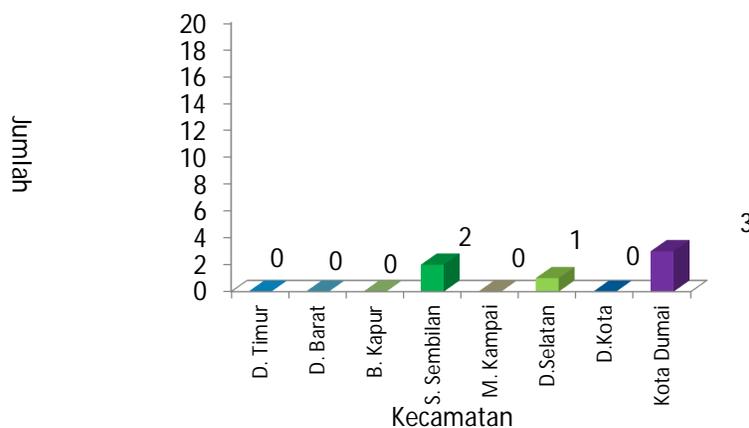
telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari Gambar 3.73 dibawah ini :

Gambar 3.73
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria
Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2019



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif terbanyak ditemukan di Kecamatan Sungai Sembilan yakni sebanyak 2 kasus (66.67%). Hal tersebut disebabkan tingginya mobilitas penduduk baik warga lokal maupun warga pendatang dari luar Kota Dumai dan pembukaan lahan perkebunan yang berpotensi berkembangnya nyamuk malaria. Hal ini cukup mengejutkan mengingat daerah yang selama ini dikenal dengan daerah high endemis Malaria adalah Kecamatan Sungai Sembilan, seperti terlihat pada Gambar 3.74 berikut ini :

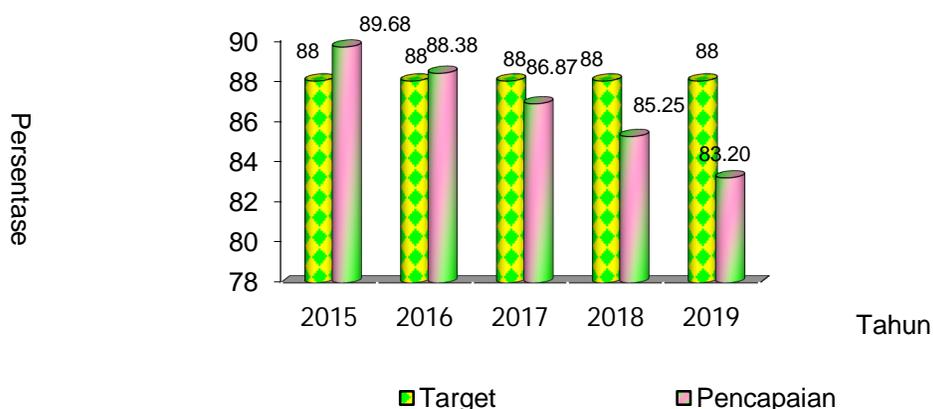
Gambar 3.74
Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2019



2) Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2019 dari total 310 penderita TB Paru BTA+ yang ditemukan dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, sebanyak 258 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ adalah sebesar 83,20%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 85,25%, maka terlihat ada penurunan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+. Namun bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ tahun 2019 belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ dari tahun 2015 sampai dengan dapat dilihat dari Gambar 3.77 berikut ini :

Gambar 3.75
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2019



3) Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

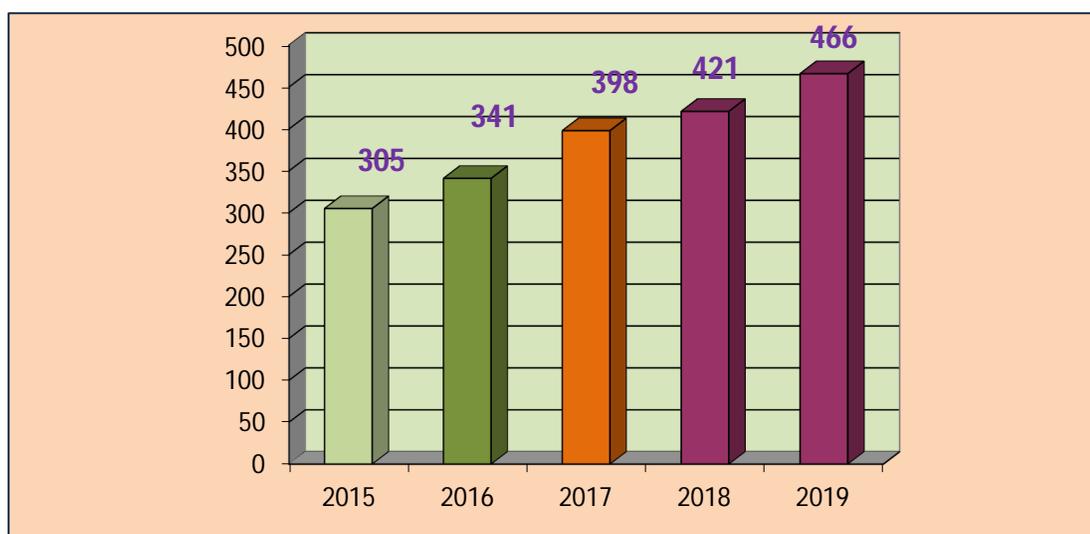
Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 466 kasus yang terdiri dari 421 kasus lama dan 45 kasus baru yang ditemukan tahun 2019. Dari 466 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 168 orang sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 298 orang, Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2019 adalah sebesar 1,27% (jumlah penduduk beresiko HIV sebanyak 23.433 orang).

Gambar 3.76
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2019



Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0,79%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2019 sebesar <1%, maka pencapaian tersebut melebihi target. Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai.

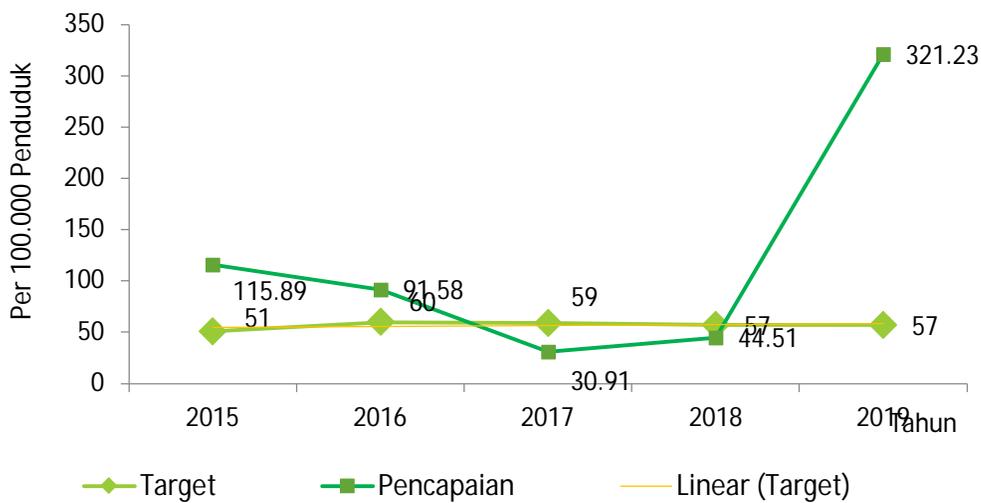
Gambar 3.77
Data Kasus HIV/AIDS Kota Dumai
Dari Tahun 2015 s/d 2019



4) Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

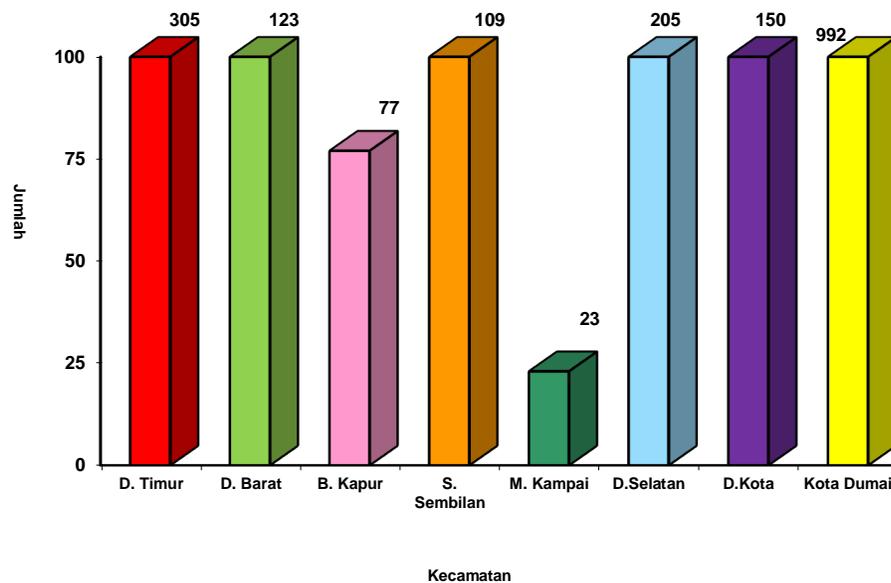
Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2019 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 992 kasus atau IR = 321,23 per 100.000 penduduk dengan angka kematian 3 orang atau CFR = 0,3%. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 135 kasus atau IR= 44,51 per 100.000 penduduk dengan kematian sebanyak 1 kasus atau CFR = 1,48%, maka ada peningkatan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai yaitu 56 per 100.000 penduduk, maka angka tersebut diatas target indikator Kota Dumai (yang berarti tingkat pencapaiannya buruk). Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti ±80% penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan Gambar naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Gambar 3.78
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue
Kota Dumai dari tahun 2015 sampai dengan 2019



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur yakni sebanyak 305 kasus, disusul dengan Kecamatan Dumai Kota sebanyak 150 kasus dan Dumai Barat 123 kasus, seperti terlihat pada Gambar 3.79 berikut ini :

Gambar 3.79
Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2019

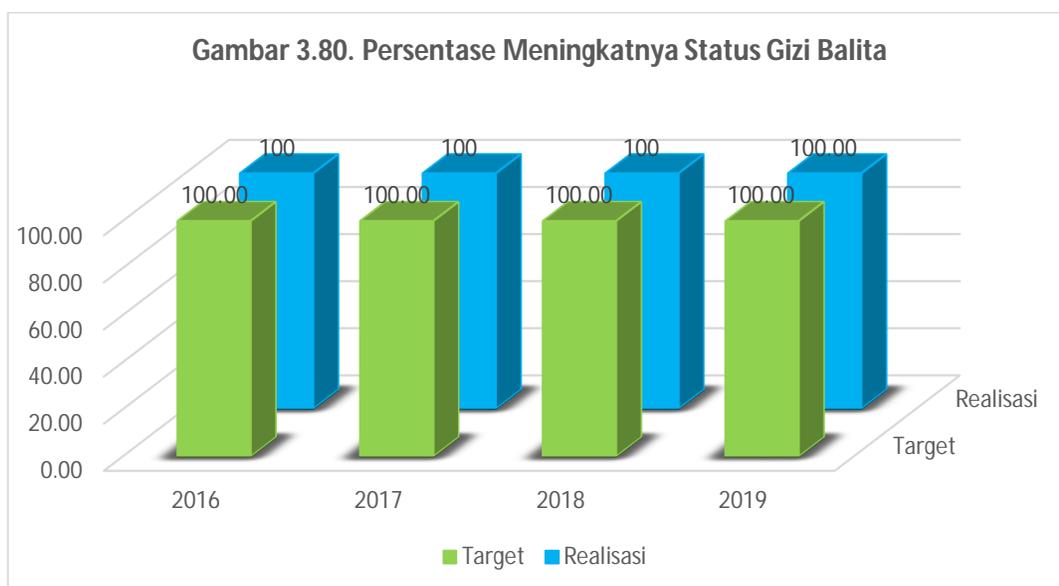


Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektif dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M2 dan dilakukan di 250 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif

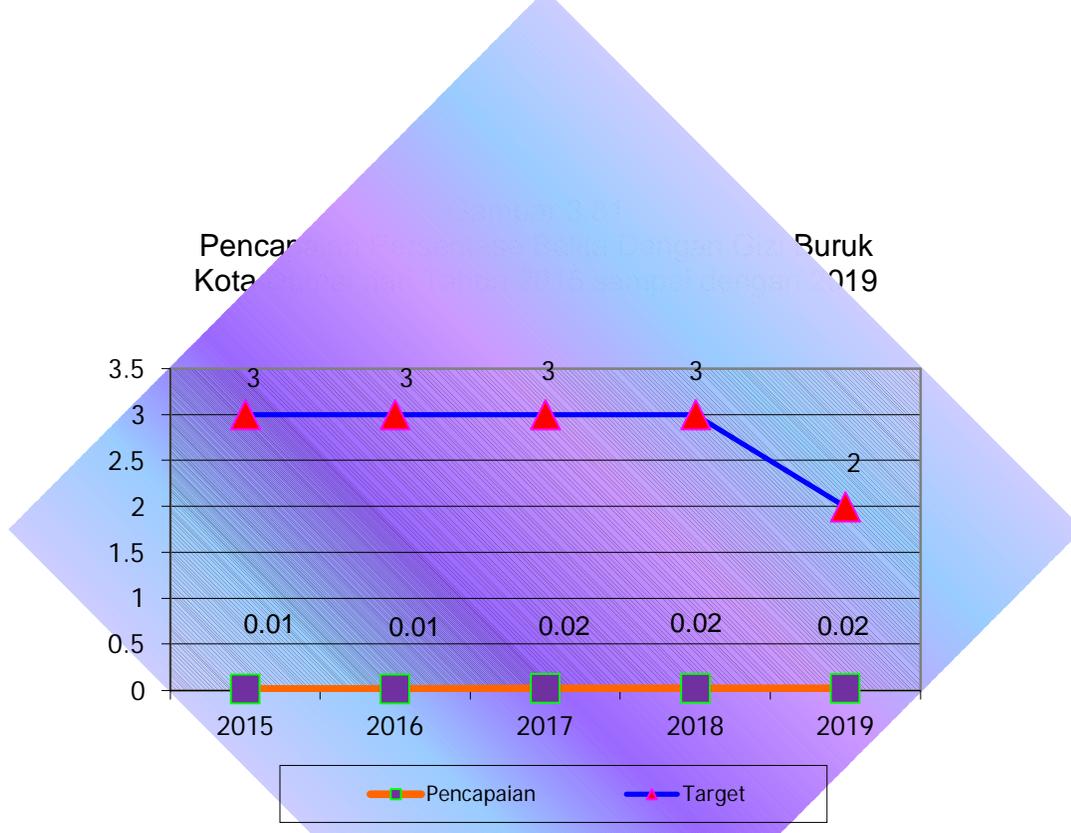
adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita

Realisasi Pada tahun 2018 Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita tetap 100%.



Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan ($BB/TB \leq 3$ standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%. Namun mulai tahun 2016, sudah ditemukan kasus balita dengan gizi buruk. Hal ini berkat optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) yang mulai diaktifkan kembali sejak tahun 2016, salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2019 ditemukan 7 kasus balita dengan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Jaya Mukti, Bukit Timah, Dumai Barat, Purnama, Sungai Sembilan dan Bukit Kayu Kapur. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2019 adalah 0,02%. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 6 kasus, maka ada peningkatan kasus gizi buruk pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2019 yakni sebesar 2%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

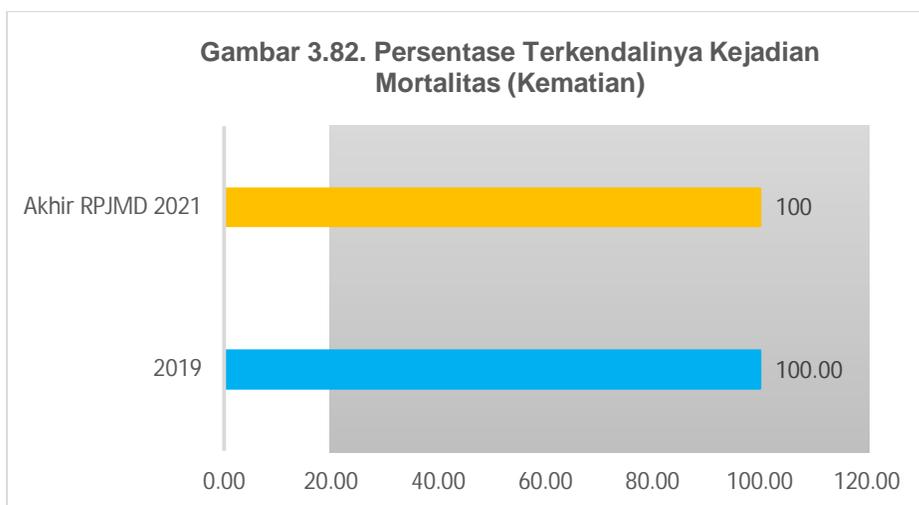


Keseluruhan kasus gizi buruk yang telah diintervasi dengan pemberian makanan tambahan pemulihan berupa susu formula bayi, sudah dilakukan pemantauan oleh TPG dengan melakukan pengukuran antropometri meliputi penimbangan BB setiap minggu, pengukuran TB setiap bulannya, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling dan penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)

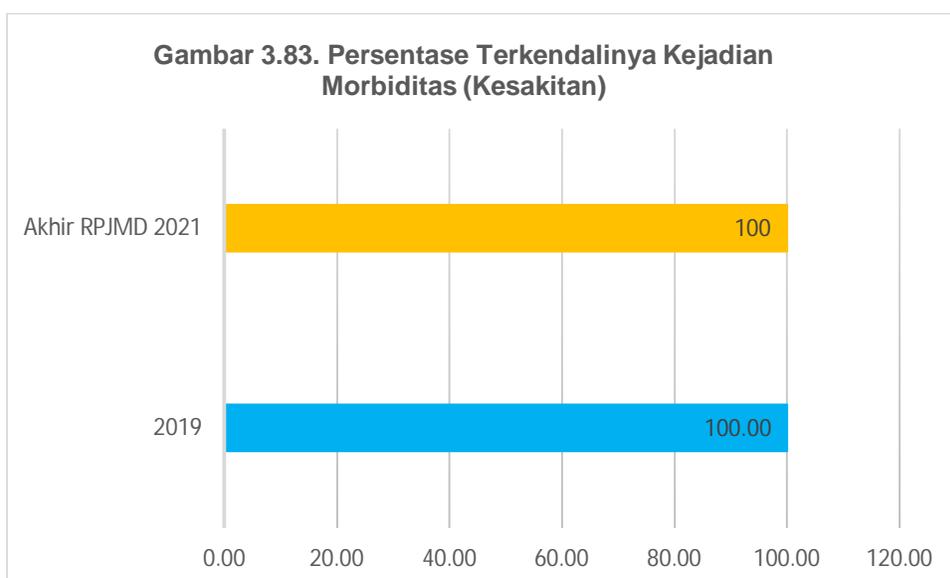
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100 %.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)

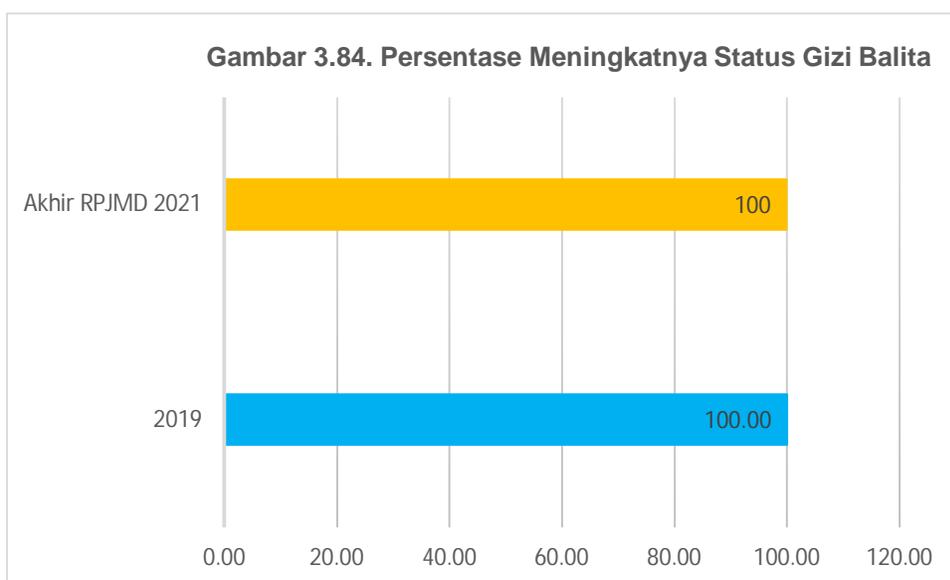
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100% dari

target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100%.



c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100%.



Sasaran Strategis 3.2

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Sasaran strategis 3.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 2 (Dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.16 berikut ini :

Tabel. 3.16. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2

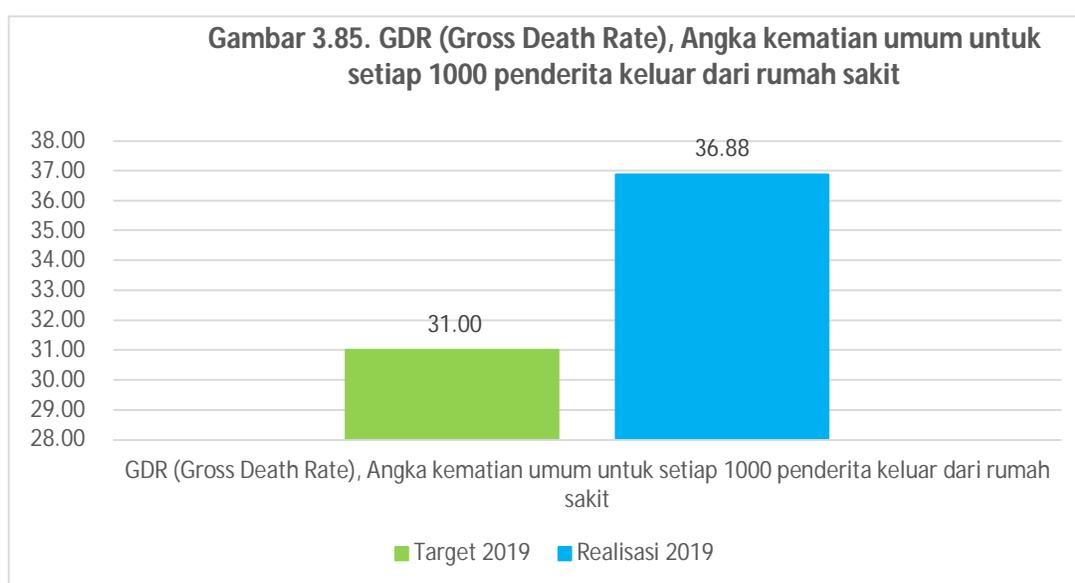
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021		
1	GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	37,06	34,31	31,55	31	36,88	81,03	31	81,03	
2	Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	65.696	65.146	65.960	146.887	147.659	100,53	192.887	76,55	
Rata-rata Capaian Kinerja									90,78		

Terlihat dari tabel 3.16 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 3.12 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

- a. Indikator Kinerja Tujuan : GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita

Target tahun 2019 GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita adalah 31% dan realisasi tahun 2019 sebesar 36,88% dengan tingkat capaian sebesar 81,03%.



GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksannya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Dimana angka kematian umum untuk setiap penderita keluar Rumah sakit Umum Daerah Kota Dumai sebesar 36,88 0/00 dengan capaian 122% dari yang keluar Rumah Sakit Umum daerah Kota Dumai setiap 1000 pasien melebihi ambang batas yg RSUD tetapkan. Tapi apabila dilihat dari ketentuna DEPKES 2005 kasus tersebut masi dapat di tolerasi dengan standar ideal GDR adalah kurang dari 45 kasus dari 1000 pasien keluar.

- b. Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis

Target tahun 2019 Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis adalah 146.887 orang dan realisasi tahun 2019 sebesar 147.659 orang dengan tingkat capaian sebesar 100,53 %.



Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu.

Program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi Penduduk Kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di Kelas III selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Dumai Bagi Masyarakat Kota Dumai Tahun 2019.

Saat ini Pemerintah Kota Dumai telah melaksanakan program integrasi kepesertaan Jamkesko menjadi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini juga merupakan kesepakatan bersama antara seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Pemerintah Pusat yang menjadi regulator BPJS Kesehatan. Untuk itu masih diperlukan Program Jaminan Kesehatan yang dapat menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

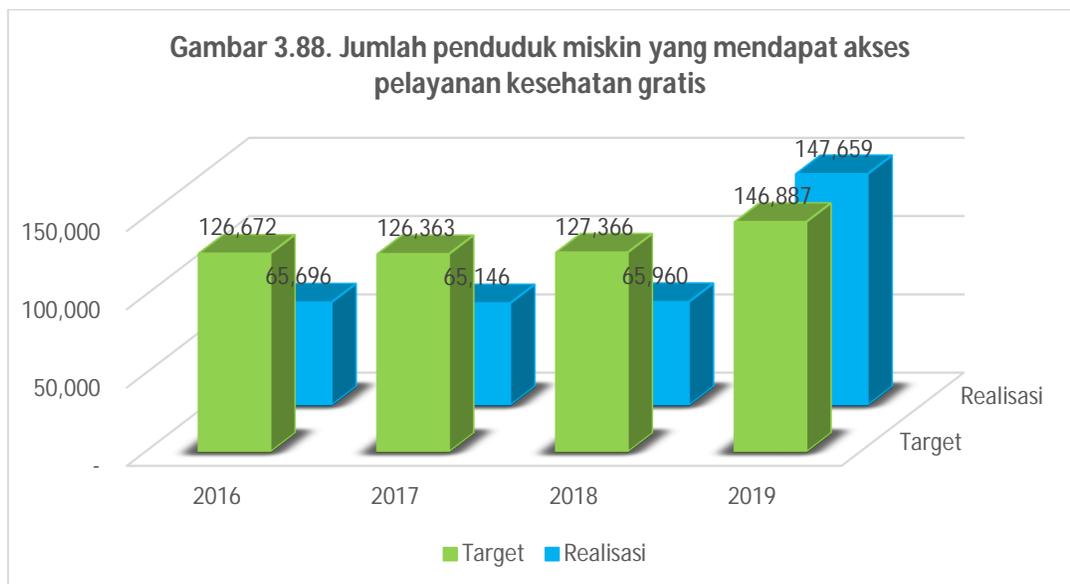
- a. Indikator Kinerja Tujuan : GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita

Realisasi Pada tahun 2018 GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita adalah sebesar 1,55%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita dapat ditekan menjadi sebesar 30,88%.



- b. Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis

Realisasi Pada tahun 2018 Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis adalah sebesar 65.960 orang sedangkan realisasi pada tahun 2019 Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis menurun menjadi 147.659 orang.

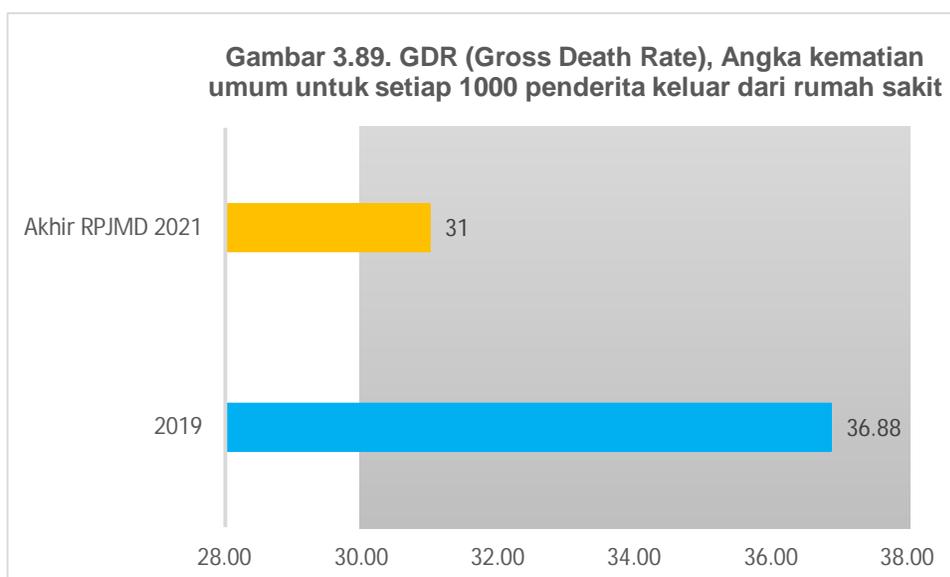


3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita

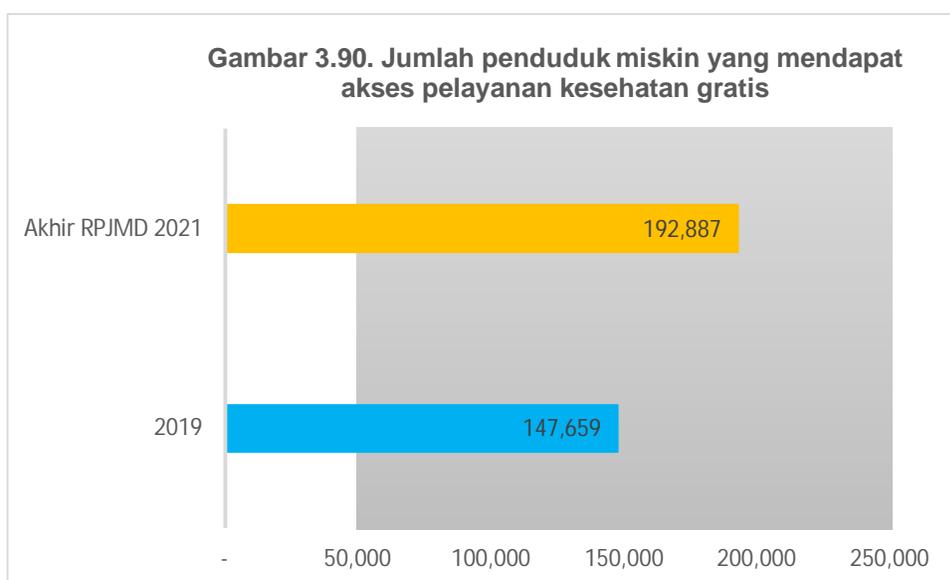
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 31%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 30,88% dari target

yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2018 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100,39 %.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis

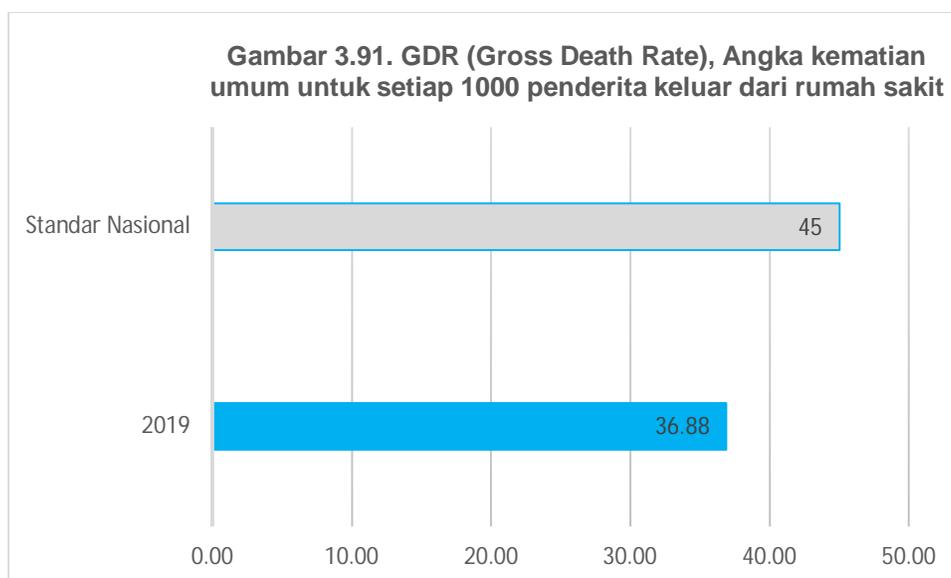
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 192.887 orang, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 147.659 orang dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2018 terhadap RPJMD 2021** sebesar 76,55%.



4. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);

a. Indikator Kinerja Sasaran : GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita

Realisasi GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita sebesar 30,88% dan Standar Nasional adalah sebesar 45%. Berdasarkan ketentuan DEPKES 2005 kasus tersebut masi dapat di tolerasi dengan standar ideal GDR adalah kurang dari 45 kasus dari 1000 pasien keluar.



Tujuan 4

Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga

Tujuan 4 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Untuk mengukur Tujuan 2 ini terdapat 2 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.17 berikut di bawah ini :

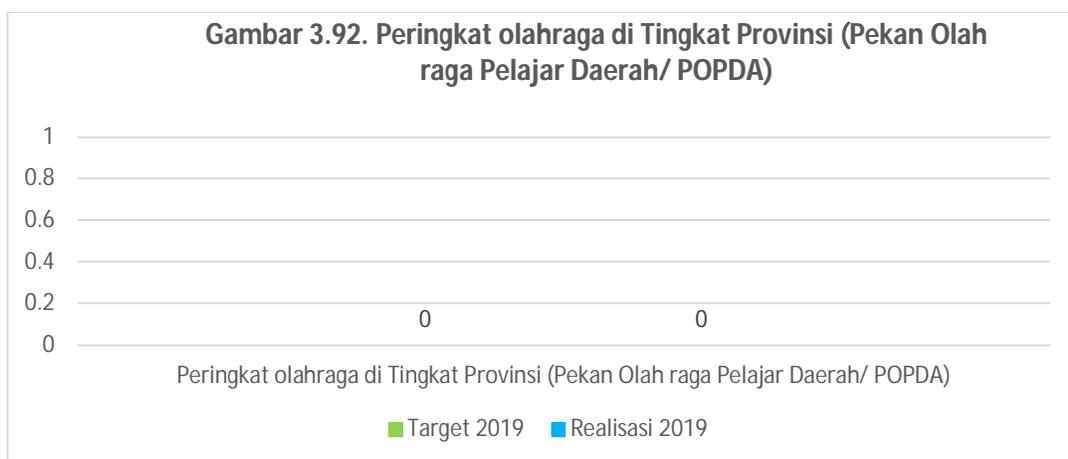
Tabel. 3.17. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 4.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	6	-	10	-	-	-	3	-133,33
	Rata-rata Capaian Kinerja							-		133,33

Terlihat dari tabel 3.17 diatas pada Misi Kedua tujuan 4 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)

Target tahun 2019 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) adalah tidak ada peringkat dan realisasi tahun 2019 tidak ada peringkat dengan tingkat capaian sebesar 0%.



Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata untuk tahun 2018 Kota Dumai yaitu menduduki peringkat ke 5. Diskopar Kota Dumai dalam pelaksanaan POPDA hanya mengirimkan 6 Cabang (Volly, silat, bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw dan bola kaki) dari 12 cabang yang dipertandingkan. Peserta terdiri dari 12 kab/kota se-propinsi Riau yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

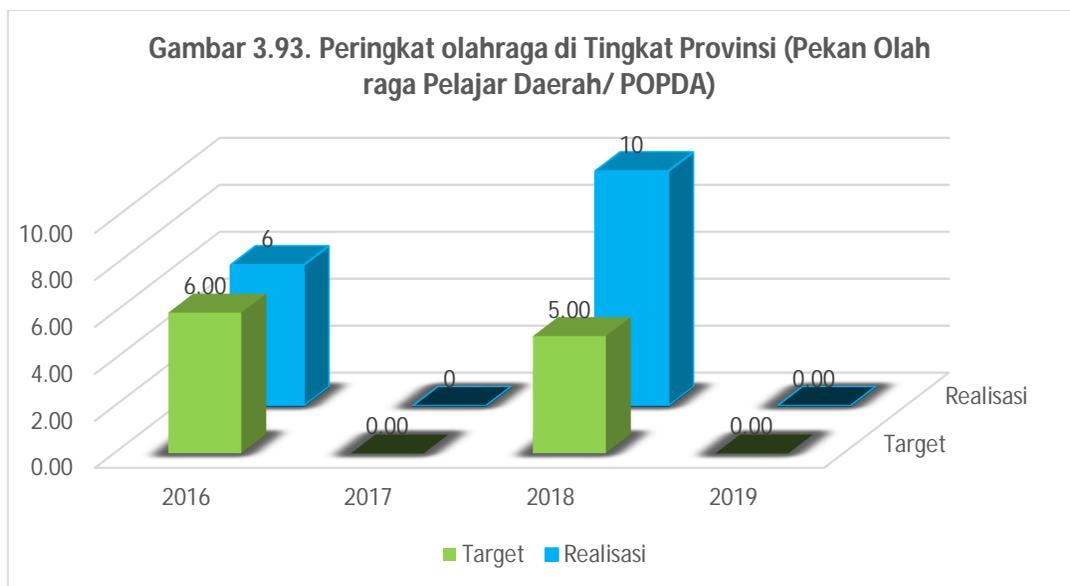
Kota Dumai mendapat peringkat ke-10 dari 12 Kabupaten/Kota yang mengikuti POPDA tersebut, hal ini sangat jauh dari target yang diinginkan pada Tahun 2018 yaitu peringkat ke-5 dan terjadi penurunan pada 2 tahun sebelumnya dimana Dumai mendapatkan peringkat 7. Hal ini disebabkan sangat sedikitnya cabang yang dikirim dari cabang yang diperlombakan karena terbatasnya anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pekan Olahraga Pelajar Daerah tersebut hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)

Realisasi pada tahun 2018 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) adalah peringkat 10.

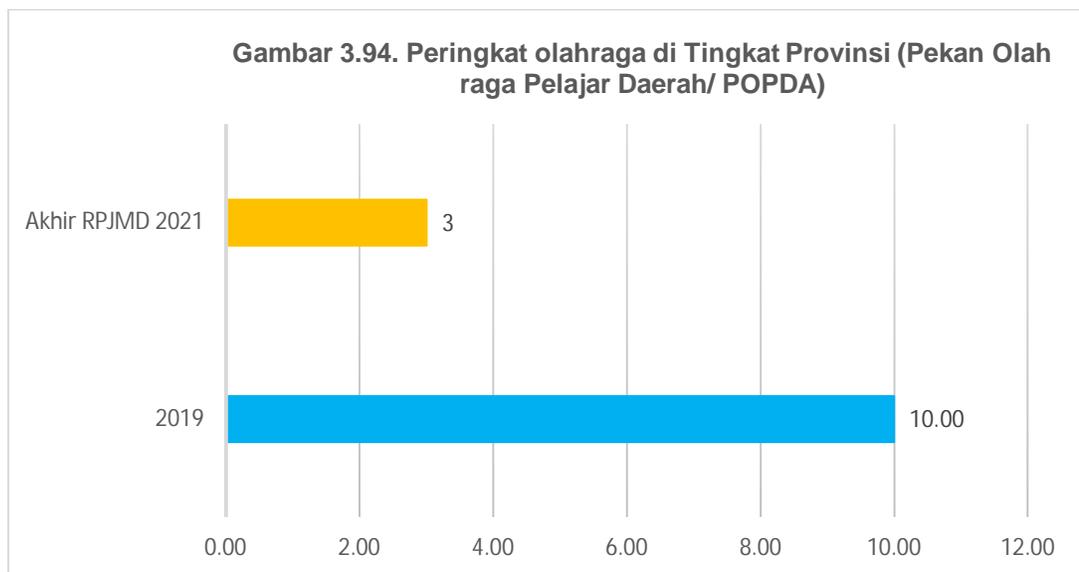
Dan Realisasi Pada tahun 2019 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) tidak ada diselenggarakannya Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA dikarenakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, sedangkan realisasi pada tahun 2019 tanpa ada peringkat.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 adalah peringkat 3, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 adalah peringkat 10 (pada tahun 2018), didapat **Capaian sampai dengan 2018 terhadap RPJMD 2021** sebesar -133,33 %.



Sasaran Strategis 4.1

Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga

Sasaran strategis 4.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga”**.

Sasaran ini didukung OPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata. Untuk mengukur misi kedua ini terdapat 1 (Satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.18 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.18. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.1

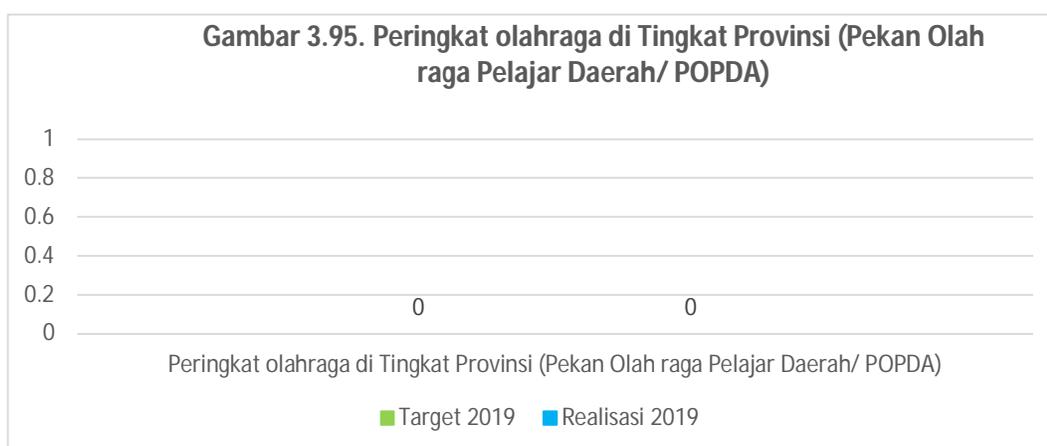
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	6	-	10	-	-	-	3	-133,33
	Rata-rata Capaian Kinerja							-		-133,33

Terlihat dari tabel 3.18 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 4.1 terdapat 1 (Satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)

Target tahun 2019 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) adalah tanpa peringkat dan realisasi tahun 2019 adalah tanpa peringkat dengan tingkat capaian sebesar 0%.



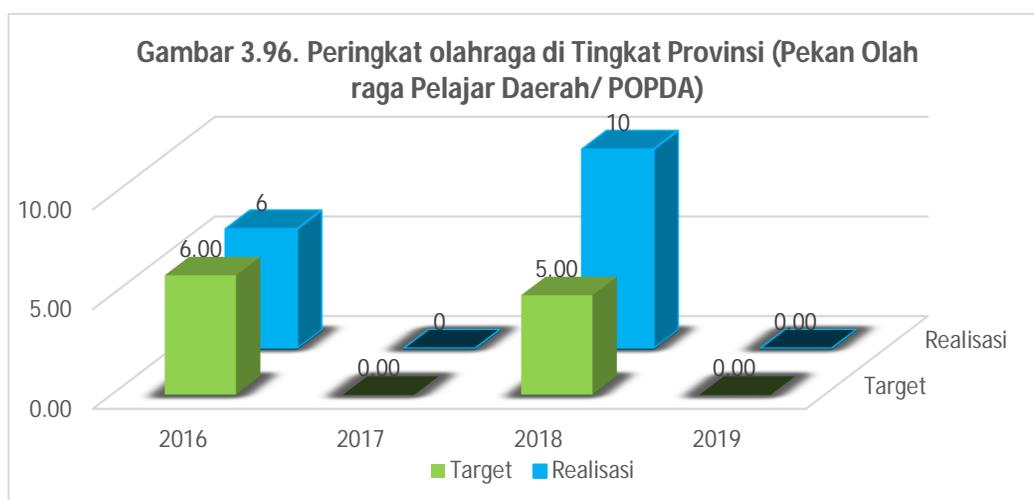
Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata untuk tahun 2018 Kota Dumai yaitu menduduki peringkat ke 5. Diskopar Kota Dumai dalam pelaksanaan POPDA hanya mengirimkan 6 Cabor (Volly, silat, bulu tangkis, tenis meja, sepak takraw dan bola kaki) dari 12 cabor yang dipertandingkan. Peserta terdiri dari 12 kab/kota se-propinsi Riau yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Kota Dumai mendapat peringkat ke-10 dari 12 Kabupaten/Kota yang mengikuti POPDA tersebut, hal ini sangat jauh dari target yang diinginkan pada Tahun 2018 yaitu peringkat ke-5 dan terjadi penurunan pada 2 tahun sebelumnya dimana Dumai mendapatkan peringkat 7. Hal ini disebabkan sangat sedikitnya cabor yang dikirim dari cabor yang diperlombakan karena terbatasnya anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pekan Olahraga Pelajar Daerah tersebut hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)

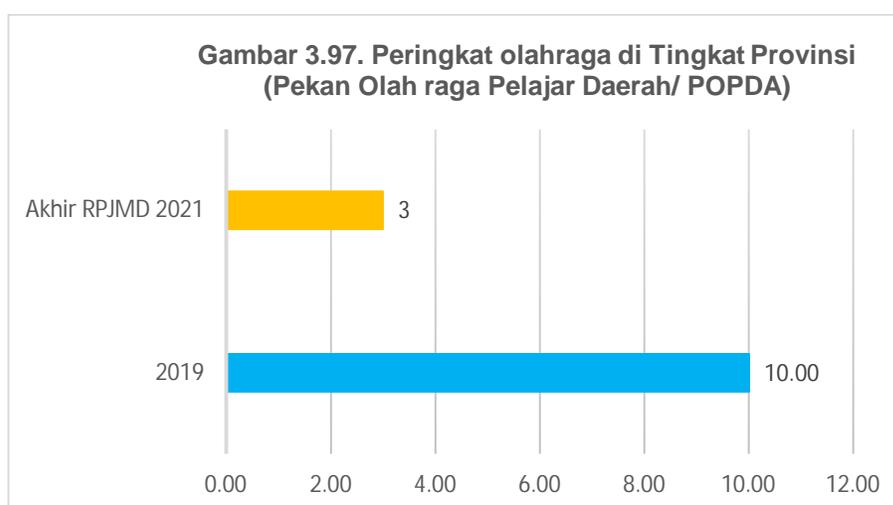
Realisasi pada tahun 2018 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) adalah peringkat 10. Sedangkan Realisasi Pada tahun 2019 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA) tidak ada diselenggarakannya Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA dikarenakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA diselenggarakan setiap 2 tahun sekali,



3. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 adalah peringkat 3, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 adalah peringkat 10 (pada tahun 2018) didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar -133,33 %.



Misi 3. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Pencapaian misi ketiga ini melalui 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis, 2 (dua) indikator Tujuan, 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 5

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 5 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 3 “Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mengukur Tujuan 5 ini terdapat 2 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.19 berikut di bawah ini

Tabel. 3.19. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 5.

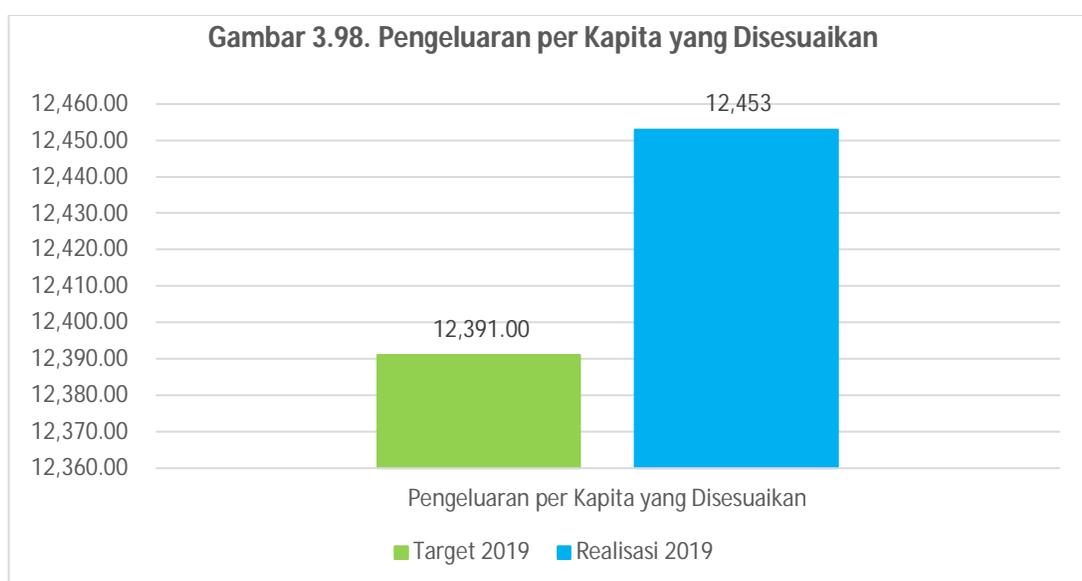
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	11.058	11.531	11.699	12.391	12.453	100,50	13.176	94,51
2	PDRB per kapita	Rp. 000	71.832,39	73.314,21	75.100,09	110.203,07	117.198,83	106,35	121.044,95	96,82
Rata-rata Capaian Kinerja								103,42		

Terlihat dari tabel 3.19 diatas pada Misi Ketiga, tujuan 5 ini 2 (dua) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

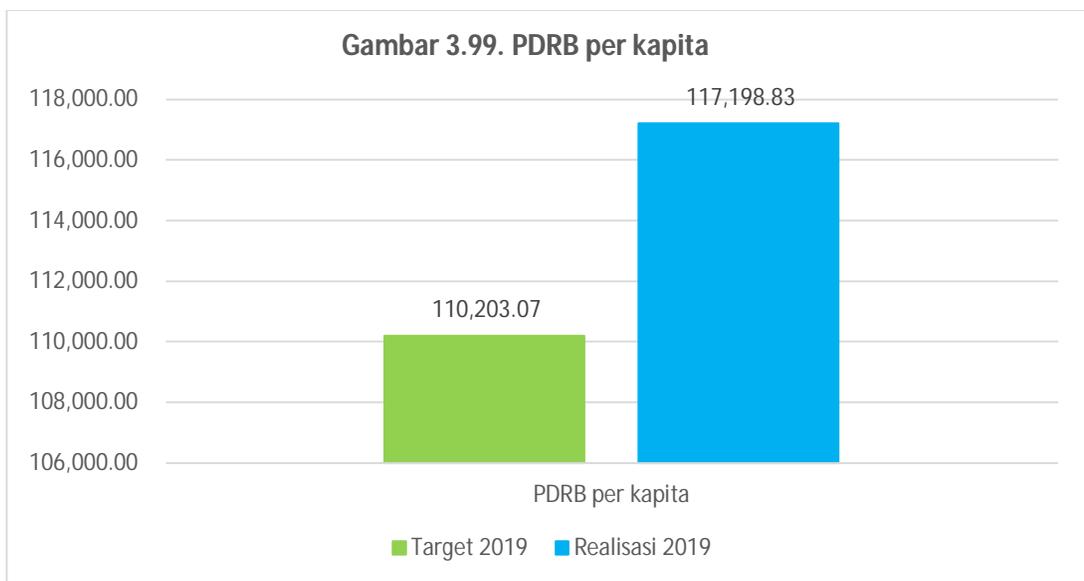
a. Indikator Kinerja Tujuan : Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan

Target tahun 2019 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan adalah Rp. 12.391.000 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 12.453.000 dengan tingkat capaian sebesar 100,50 %.



b. Indikator Kinerja Tujuan : PDRB per kapita

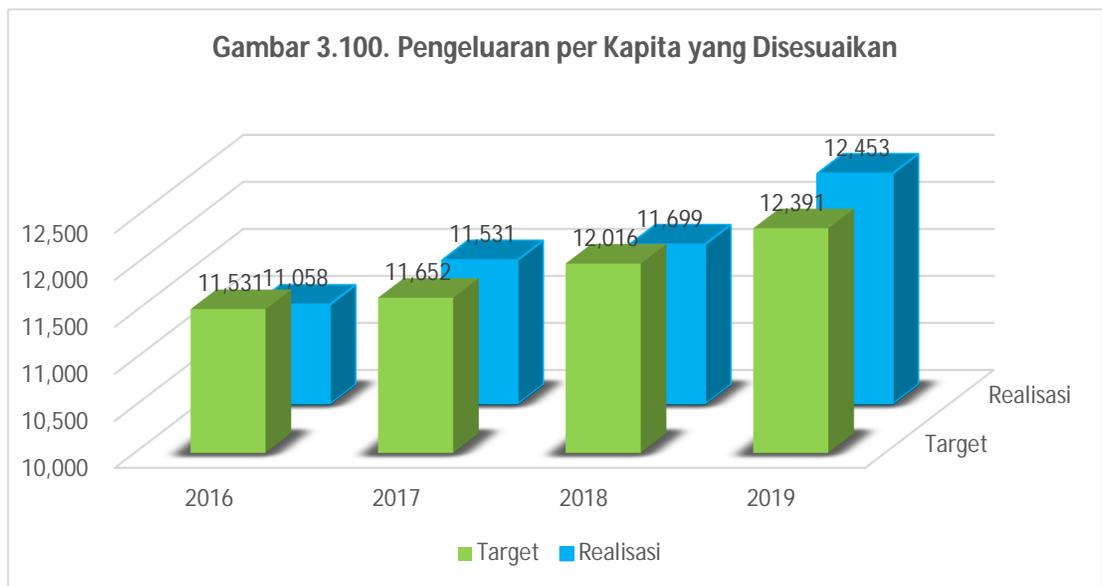
Target tahun 2019 PDRB per kapita adalah Rp. 110.203.070 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp117.198.830 dengan tingkat capaian sebesar 106,35 %.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

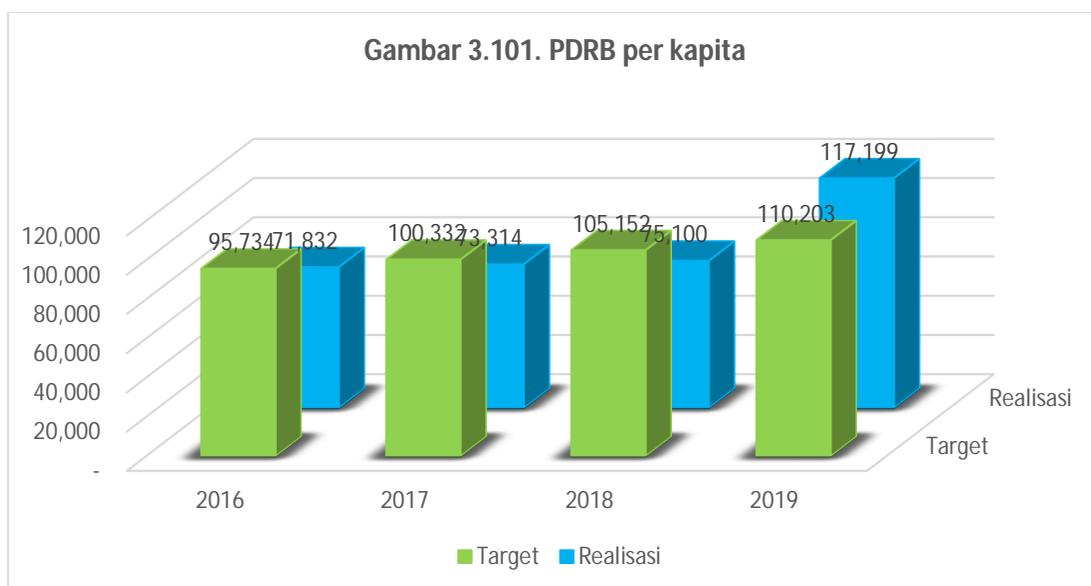
a. Indikator Kinerja Tujuan : Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan

Realisasi Pada tahun 2018 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan adalah sebesar Rp. 11.699.000,00, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan meningkat menjadi Rp. 12.453.000,00



b. Indikator Kinerja Tujuan : PDRB per kapita

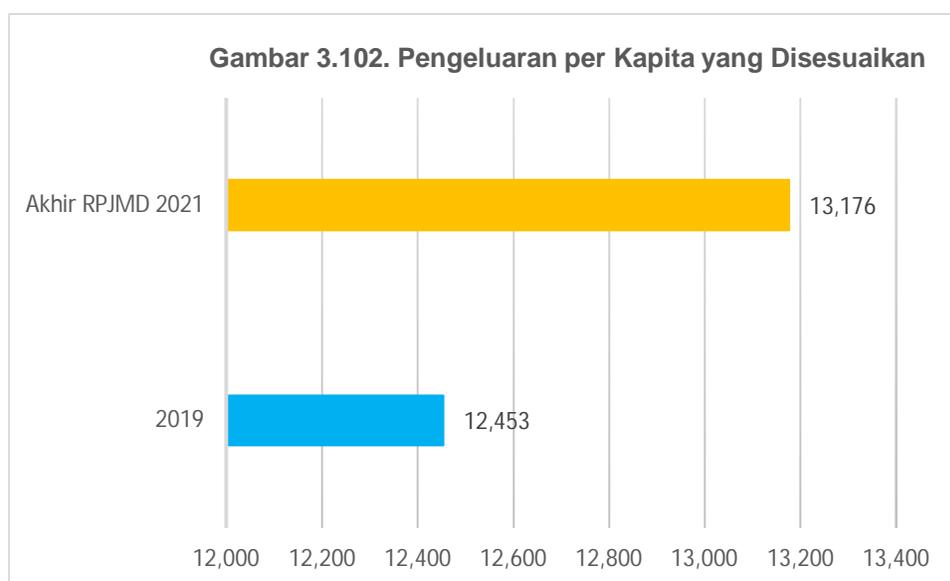
Realisasi Pada tahun 2018 PDRB per kapita adalah sebesar Rp. 75.100.000,00, sedangkan realisasi pada tahun 2019 PDRB per kapita naik menjadi Rp.117.199.000,00.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

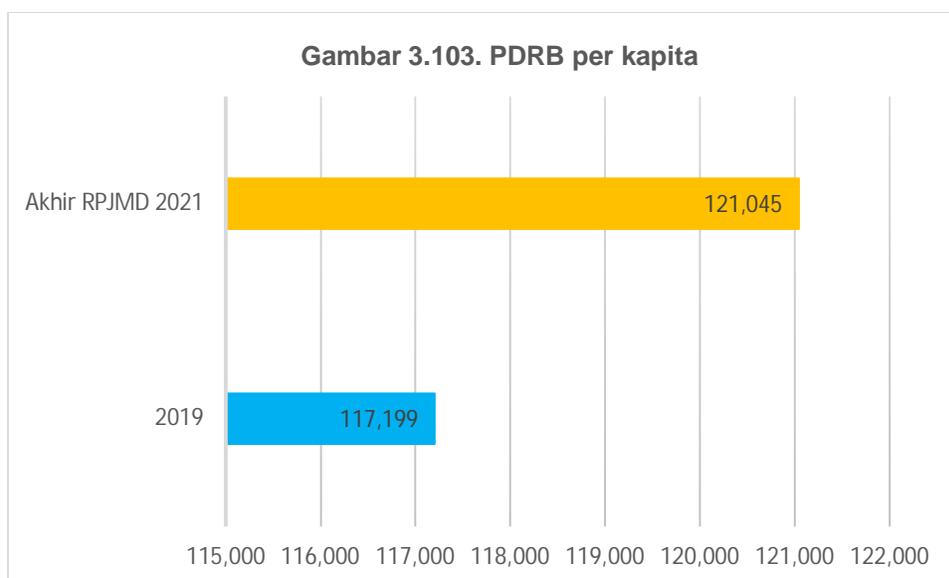
a. Indikator Kinerja Tujuan : Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar Rp. 13.176.000, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 12.453.000 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 94,51%.



b. Indikator Kinerja Tujuan : PDRB per kapita

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar Rp. 121.044.950, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 117.198.830 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 96,82%.



Sasaran Strategis 5.1

Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat

Sasaran strategis 5.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk mengukur sasaran misi ketiga ini terdapat 1 (Satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.20 berikut di bawah ini

Tabel. 3.20. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.1

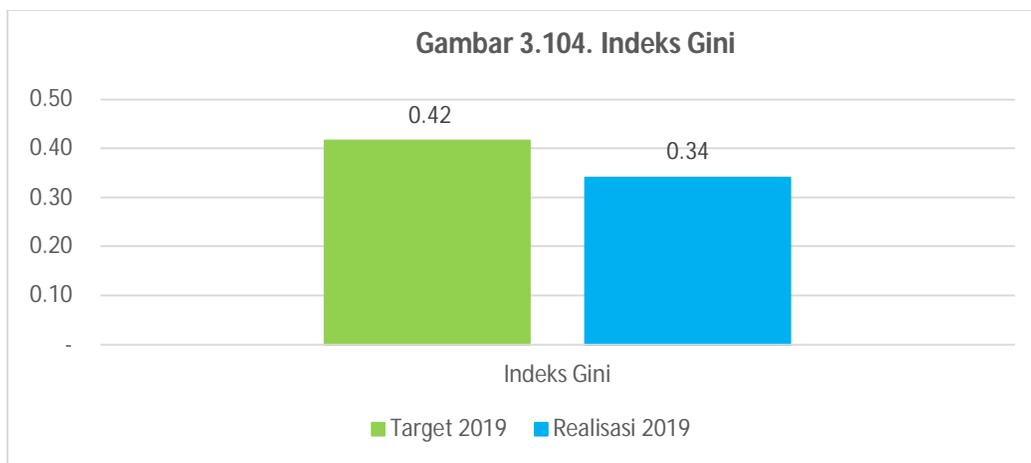
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Indeks Gini	Indeks	0,54	0,45	0,39	0,42	0,34	118,07	0,4	115
	Rata-rata Capaian Kinerja							118,07		

Terlihat dari tabel 3.20 diatas pada Tujuan lima ini sasaran Strategis 5.1 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Gini

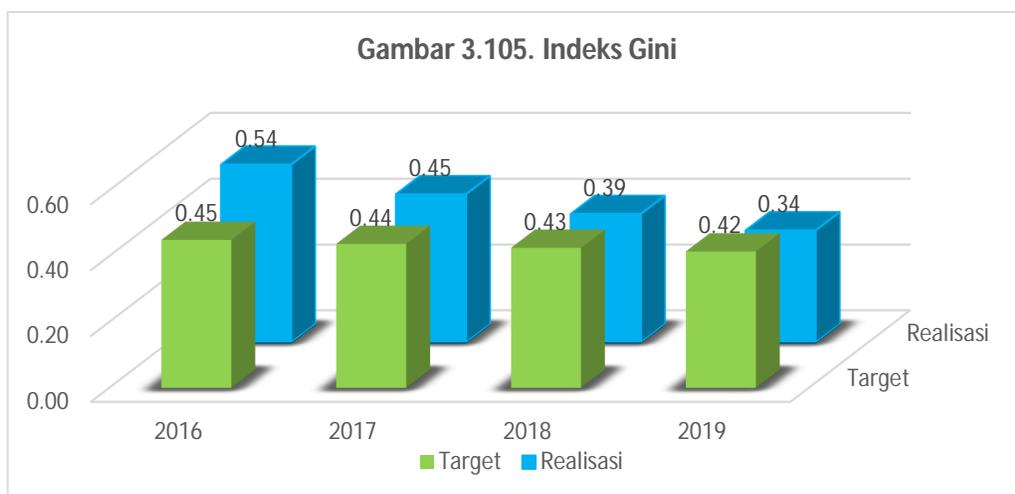
Target tahun 2019 Indeks Gini adalah 0,42 dan realisasi tahun 2019 sebesar 0,34 dengan tingkat capaian sebesar 118,07%.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Gini

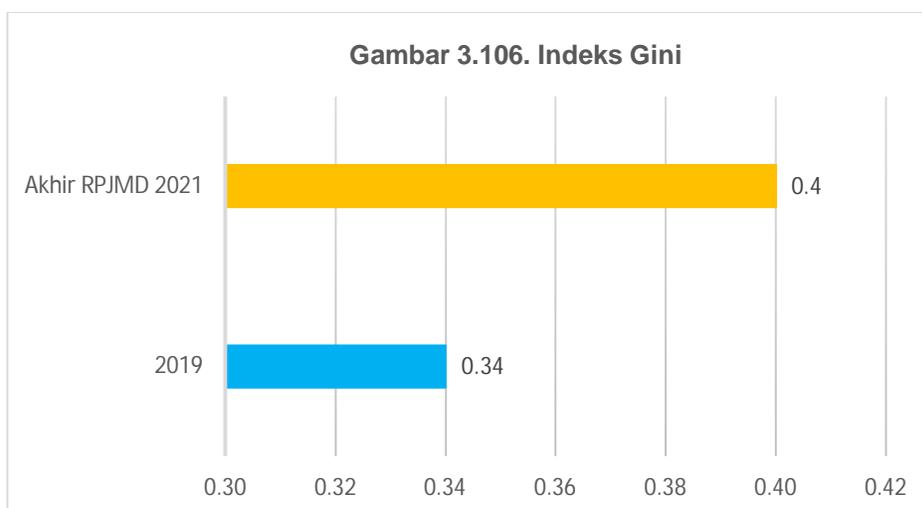
Realisasi Pada tahun 2019 Indeks Gini adalah sebesar 0,39, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Indeks Gini dapat ditekan menjadi sebesar 0,34.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

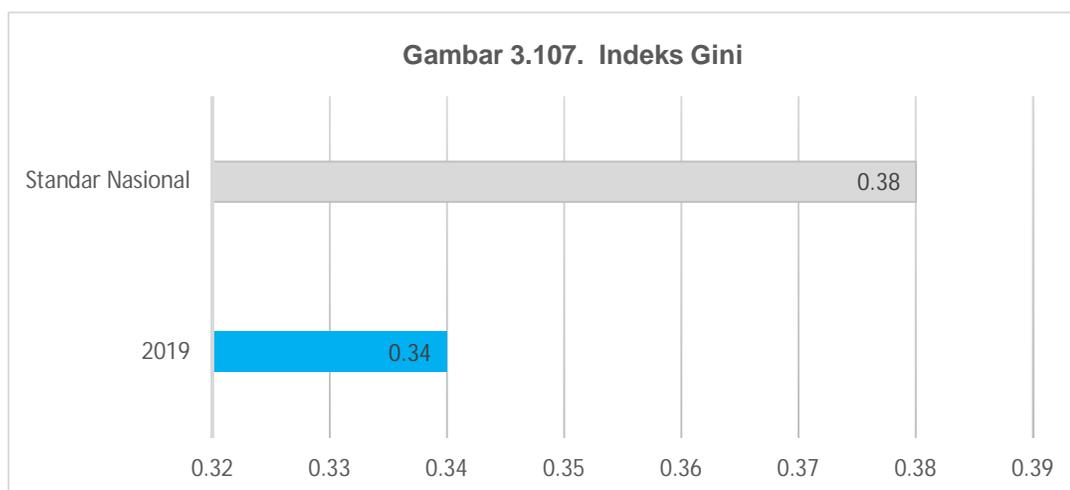
a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Gini

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 0,4 realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 0,34 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2018 terhadap RPJMD 2021** sebesar 115%.



4. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);
- a. Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Gini

Realisasi Indeks Gini sebesar 0,34 dan Standar Nasional adalah 0,38 adalah ketimpangan rendah. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, pasal 46 Ayat c, berbunyi “penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,375 - 0,380 (nol koma tiga tujuh lima sampai dengan nol koma tiga delapan nol);”.



Koefisien Gini (Gini Ratio) atau Indeks Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya, *Variabilità e mutabilità*. Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini (Susanti et al 2007) adalah sebagai berikut:

- a. Lebih kecil dari 0. 4: tingkat ketimpangan rendah
- b. Antara 0.4-0.5: tingkat ketimpangan moderat
- c. Lebih tinggi dari 0.5: tingkat ketimpangan tinggi

Sasaran Strategis 5.2

Menurunnya persentase penduduk miskin

Sasaran strategis 5.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu **Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**. Untuk

mengukur sasaran misi ketiga ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.21 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.21. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.2

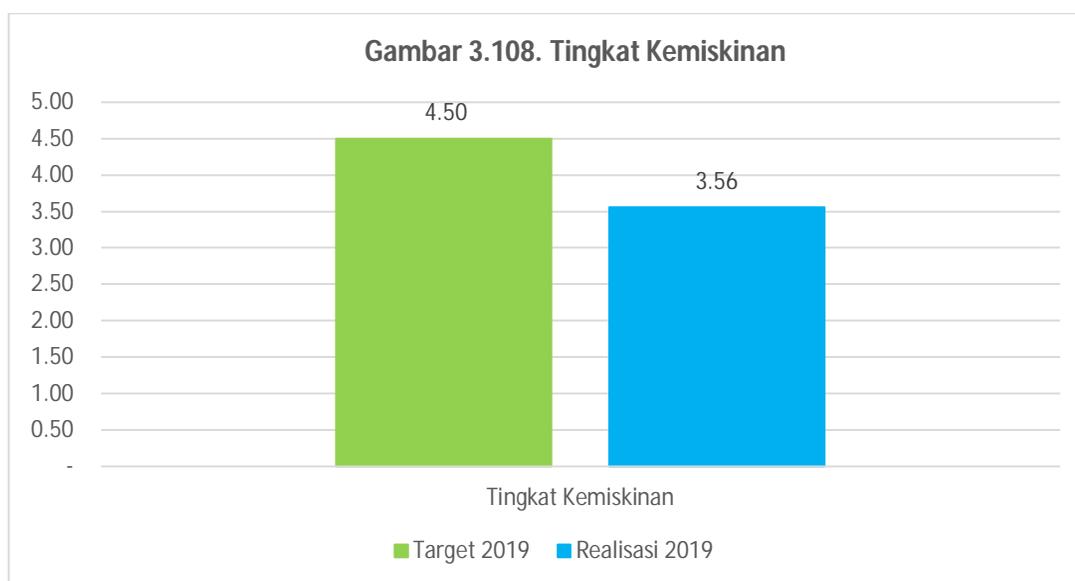
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Tingkat Kemiskinan	%	4,74	4,74	3,71	4,50	3,56	120,89	4,34	117,97
	Rata-rata Capaian Kinerja							120,89		

Terlihat dari tabel 3.21 diatas pada Tujuan Kelima ini sasaran Strategis 5.2 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Kemiskinan

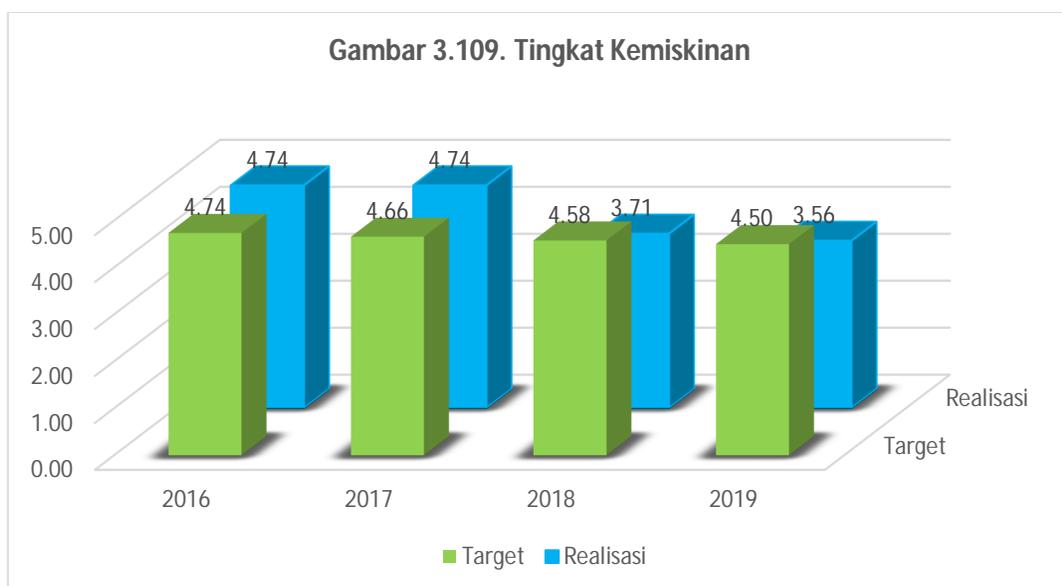
Target tahun 2019 Tingkat Kemiskinan adalah 5,50% dan realisasi tahun 2019 sebesar 3,56% dengan tingkat capaian sebesar 120,89%.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Kemiskinan

Realisasi Pada tahun 2018 Tingkat Kemiskinan adalah sebesar 4,57%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Tingkat Kemiskinan dapat ditekan menjadi 3,56%.

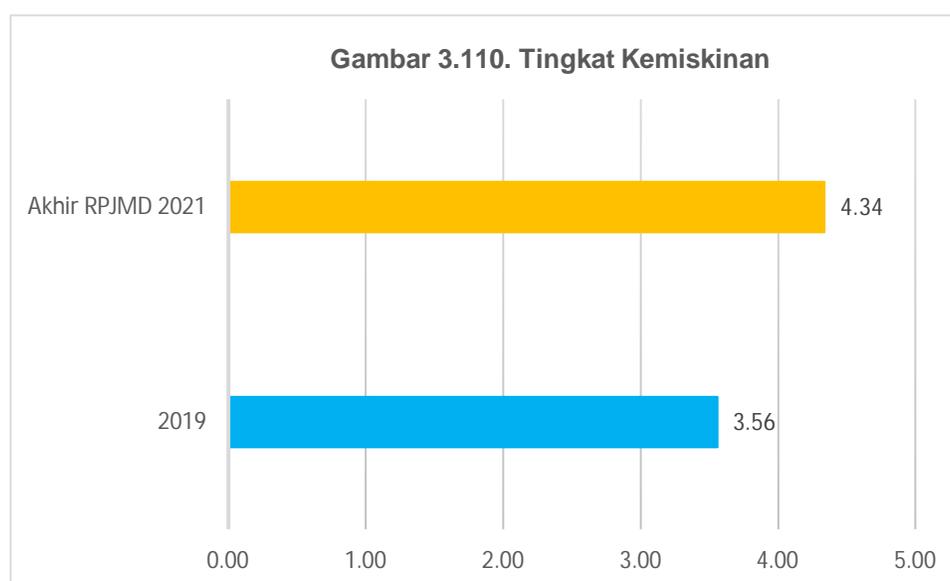


walaupun garis kemiskinan pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari Rp 418.597 menjadi Rp 439.152, persentase penduduk miskin di Kota Dumai mengalami penurunan dari 3,71 persen menjadi 3,56 persen.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Kemiskinan

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 4,34%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 3,56% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 117,97%.

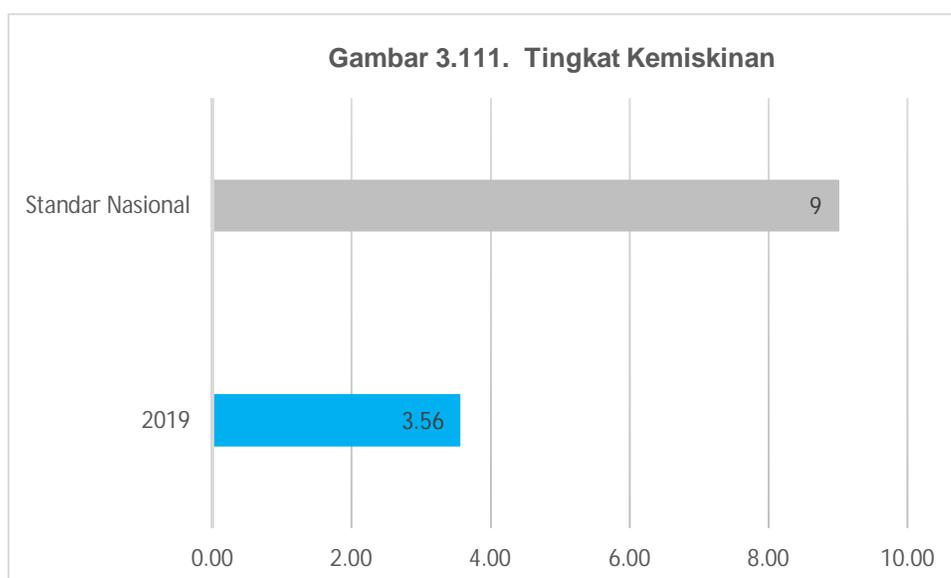


4. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Tingkat Kemiskinan

Realisasi Tingkat kemiskinan sebesar Kota Dumai sebesar 3,56 (garis kemiskinan Rp 439.152) dan Standar Nasional adalah 1 digit atau < 9%. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, pasal 46 Ayat a, berbunyi “penurunan

kemiskinan menjadi 8,5% -9,0% (delapan koma lima persen sampai dengan sembilan koma nol persen)”.



Sasaran Strategis 5.3

Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

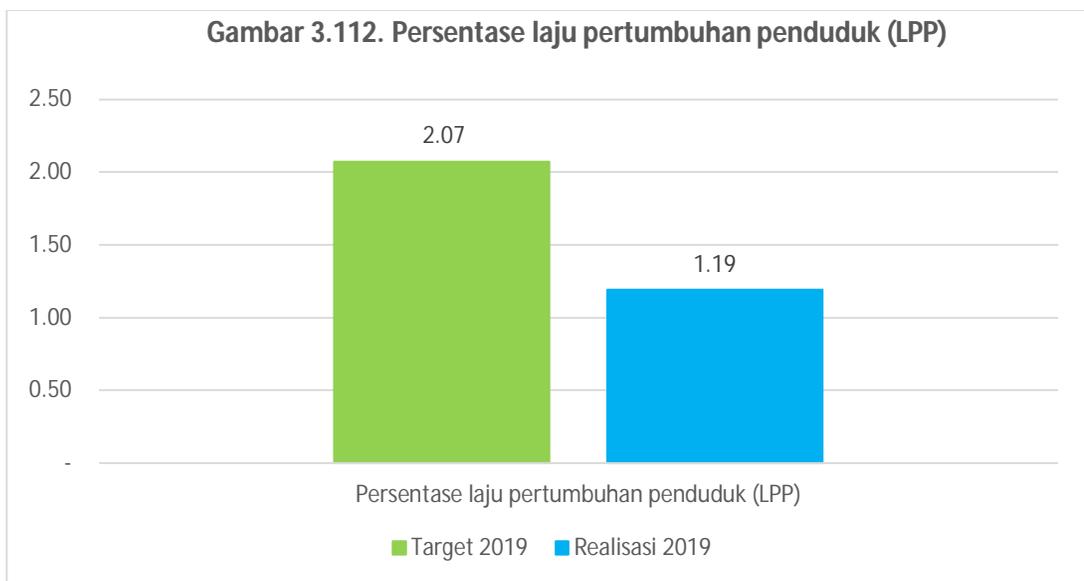
Sasaran strategis 5.3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk mengukur sasaran misi kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.22 berikut dibawah ini :

Tabel. 3.22. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.3

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021		
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,08	1,96	1,08	2,07	1,19	142,57	2,068	142,46	
Rata-rata Capaian Kinerja									142,57		

Terlihat dari tabel 3.22 diatas pada Tujuan Kelima ini sasaran Strategis 5.3 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

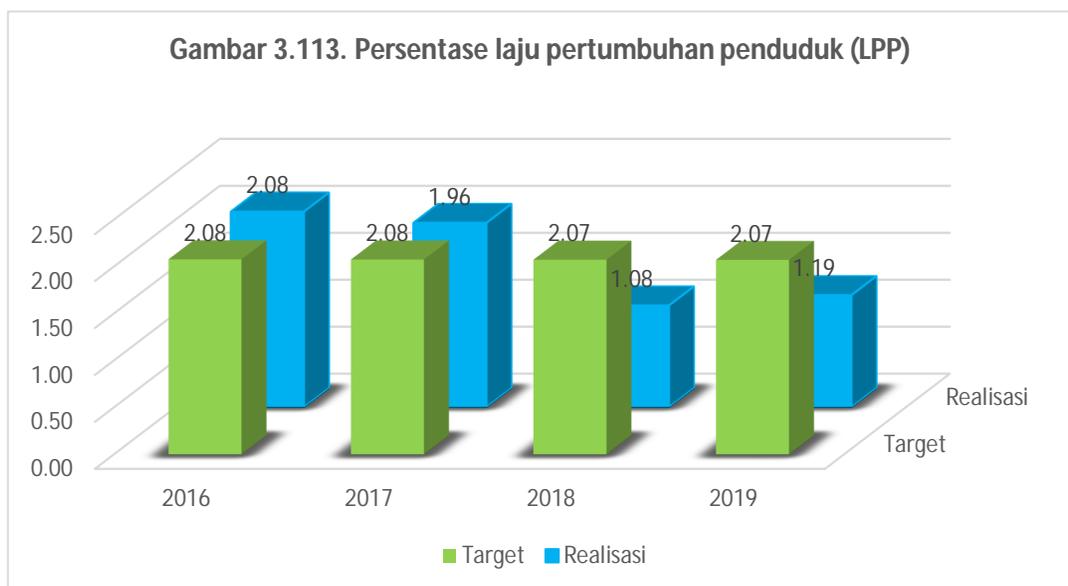
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)
Target tahun 2019 Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah 2,07% dan realisasi tahun 2019 sebesar 1,19% dengan tingkat capaian sebesar 142,57%.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)

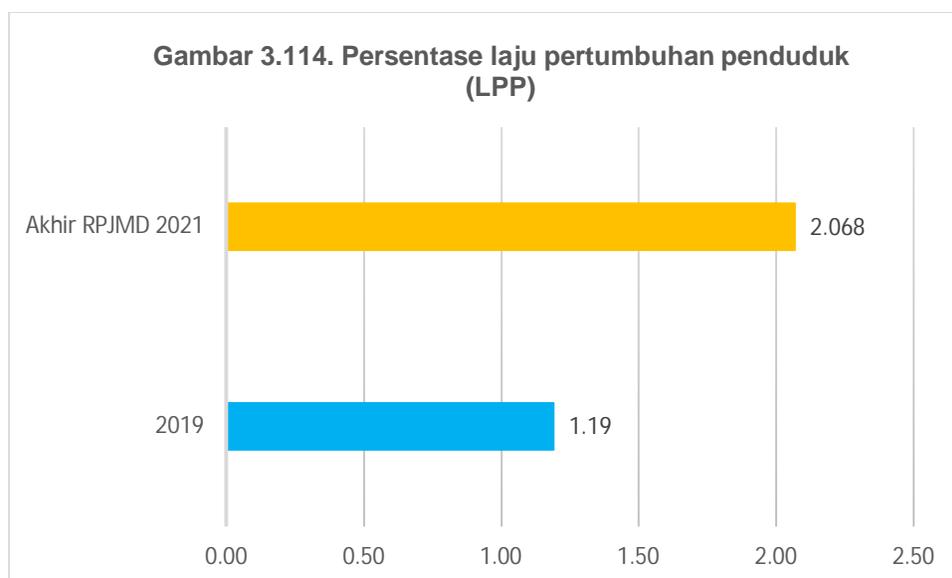
Realisasi Pada tahun 2018 Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah sebesar 1,08%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) menjadi 1,19%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 2,068%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 1,19% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2018 terhadap RPJMD 2021** sebesar 142,46%.



Sasaran Strategis 5.4

Meningkatnya lapangan kerja.

Sasaran strategis 5.4 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk mengukur sasaran misi ketiga ini terdapat 1 (Satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.23 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.23. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.4

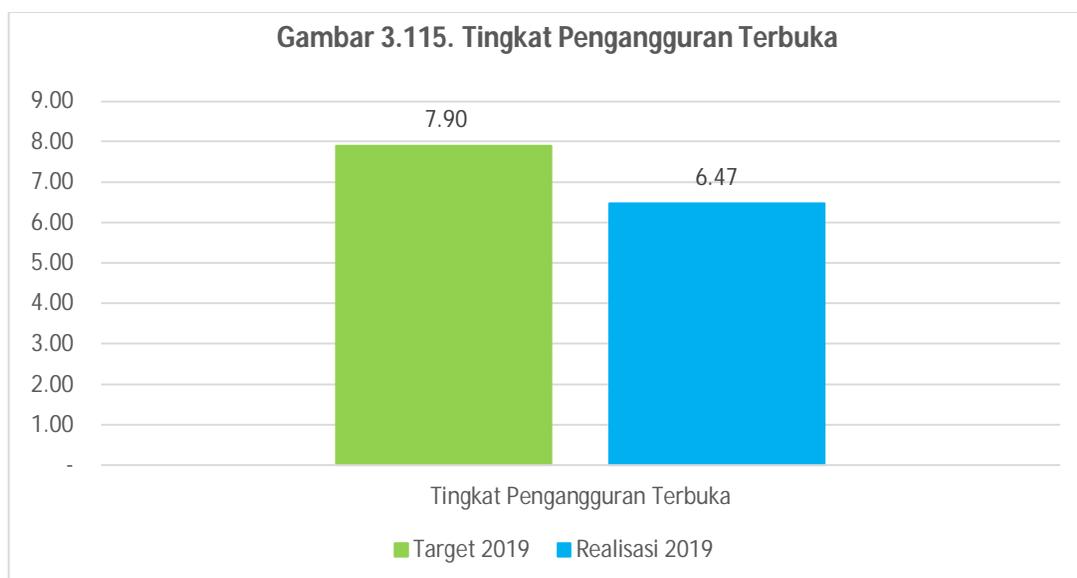
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,23	11,23	8,94	7,90	6,47	118,10	6,98	107,31
	Rata-rata Capaian Kinerja							118,10		

Terlihat dari tabel 3.23 diatas pada Tujuan Kedua ini sasaran Strategis 5.4 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka

Target tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 7,90% dan realisasi tahun 2019 sebesar 6,47% dengan tingkat capaian sebesar 118,10%.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk pelaksanaan Program ini pada Tahun 2019 di Anggaran Rp. 791.561.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.768.204.400,- atau sebesar 87,05% adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja

Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah Tenaga Kerja yang terampil dan memiliki keahlian serta bersertifikasi dengan target 48 orang Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 791.561.000,- terealisasi sebesar Rp. 768.204.400,- dan atau sebesar 87,05%, kegiatan merupakan salah satu mengurangi pengangguran serta diberikan sertifikasi pelatihan.

b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Untuk pelaksanaan program ini pada Tahun 2019 di Anggaran sebesar Rp. 263.465.180,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 262.380.982,- atau sebesar 99,59% adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program Peningkatan Kesempatan kerja adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja

Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Sektor Formal Sesuai Kepres RI No. 04 Tahun 1980 dengan target 50 Perusahaan, Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 54.490.000,- terealisasi sebesar Rp. 53.520.000,- atau sebesar 98,22%, kegiatan ini merupakan sesuai Perda 10 tahun 2004 tentang Tenaga kerja dan Permen 39 Tahun 2016 tentang penempatan Tenaga Kerja.

2) Kegiatan Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja

Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar ditempatkan, Data Informasi pasar Kerja dan Implementasi ISO 9001-2015 dengan target 12 bulan, anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 98.975.180,-

teralisasi sebesar Rp. 98.880.984,- atau sebesar 99,90%, kegiatan ini merupakan kegiatan Job Cavasing (pencarian Lowongan Pekerjaan) di Perusahaan.

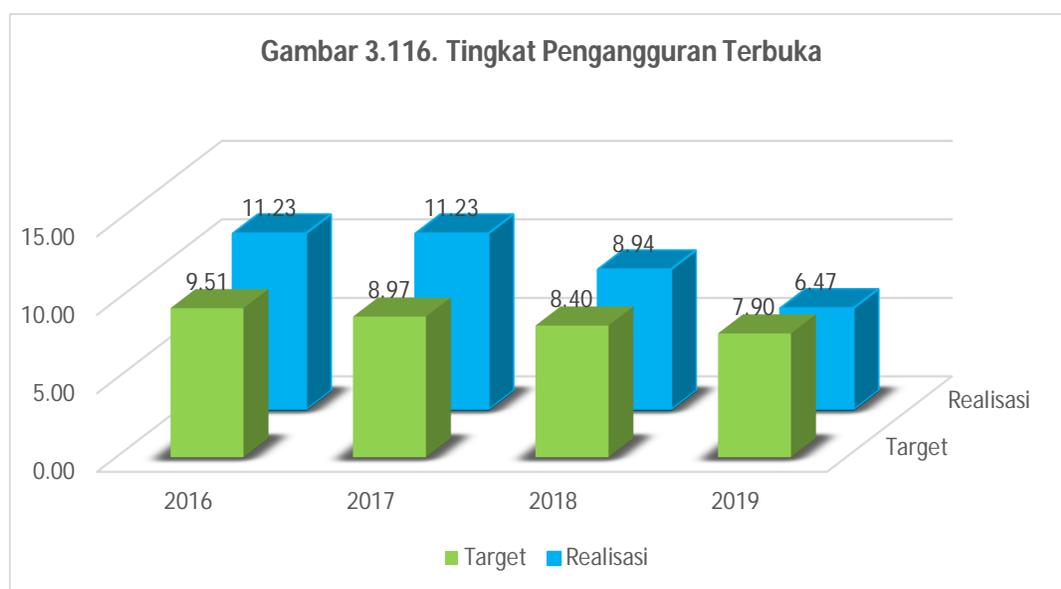
3) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Wirausaha Baru dengan Target 150 orang, anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 110.000.000,- teralisasi sebesar Rp. 110.000.000,- atau sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka

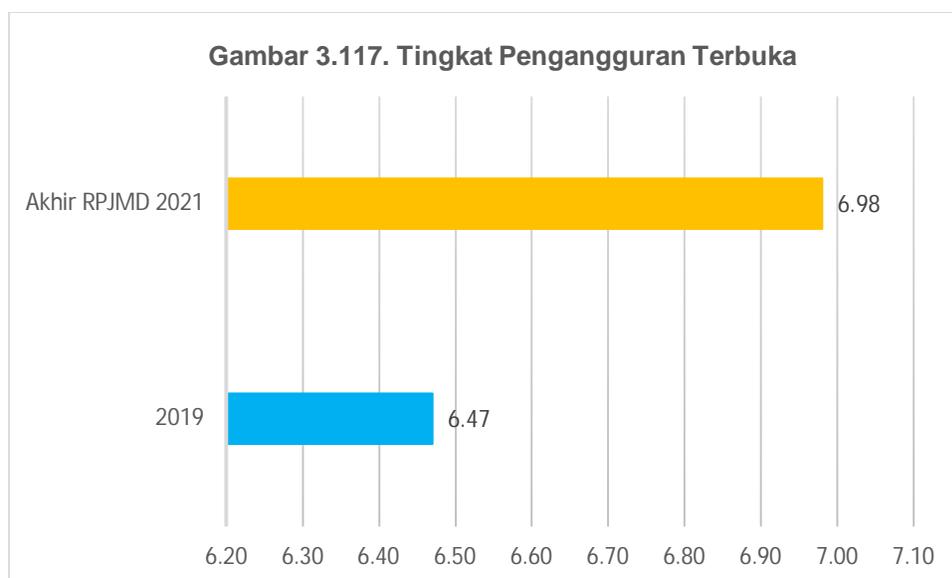
Realisasi Pada tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 8,94%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka tetap dapat ditekan menjadi 6,47%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

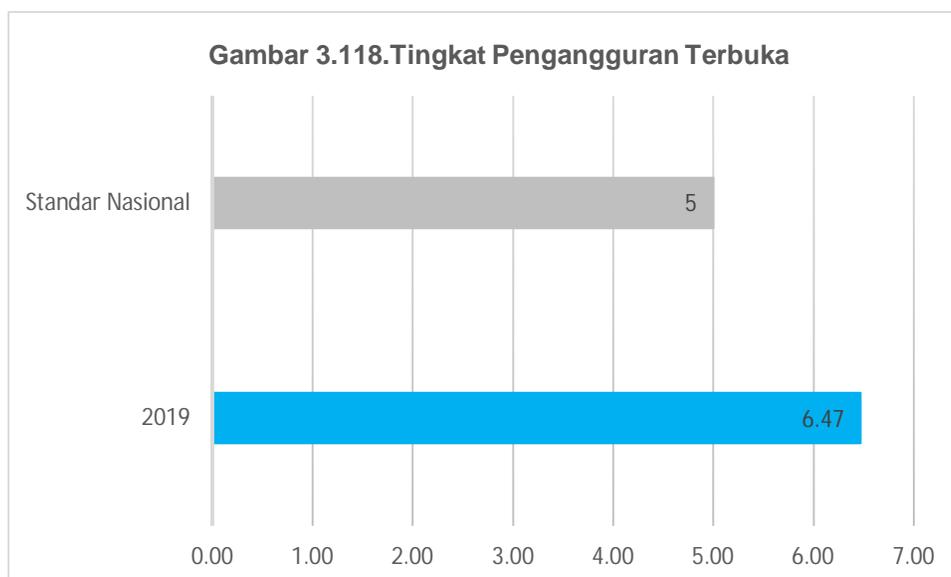
a. Indikator Kinerja Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 6,98%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 6,47% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 107,31 %.



4. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);
- a. Indikator Kinerja Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar Kota Dumai sebesar 6,47 dan Standar Nasional adalah 4,8% - 5%. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, pasal 46 Ayat b, berbunyi “tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,8% - 5,0% (empat koma delapan persen sampai dengan lima koma nol persen);”.



Misi 4. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan

Pencapaian misi keempat ini melalui 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, 1 (satu) indikator Tujuan, 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 6

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Tujuan 6 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 4 “Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan”.Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kec. Dumai Barat, Kec. Dumai Timur, Kec. Bukit Kapur, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Dumai Kota, Kec. Dumai Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah. Untuk mengukur Tujuan 6 ini , terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.24 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.24. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 6.

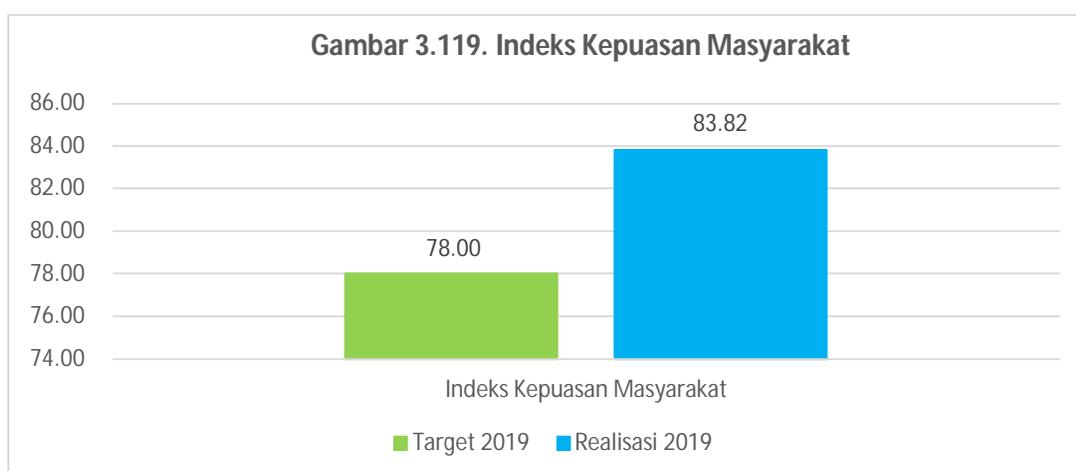
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75,59	75,59	84,57	76	83,82	107,46	81,5	103,77
	Rata-rata Capaian Kinerja							107,46		

Terlihat dari tabel 3.24 diatas pada Misi Keempat tujuan 6 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

Target tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 76 dan realisasi tahun 2019 sebesar 83,82 dengan tingkat capaian sebesar 107,46%.



Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan prima yang menunjang percepatan investasi dan penanaman modal. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran adalah “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan” dengan 1 (satu) indikator kinerja “*Indeks Kepuasan Masyarakat*” dimana target dari indikator sasaran ini pada tahun 2019

yaitu dengan angka indeks 78 dan capaian kinerja sasaran sebesar 107,42% pada angka indeks 83,82.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu.

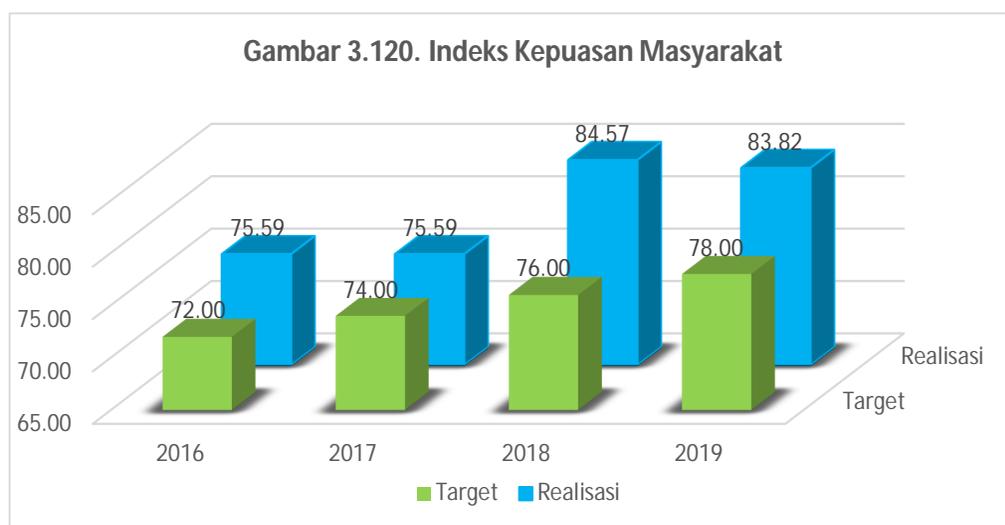
Capaian indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” diperoleh dari hasil pengukuran berdasarkan 9 Unsur Prinsip Pelayanan Publik. Angka Indeks sebesar 83,82 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan “A” dengan kategori penilaian SANGAT BAIK, karena berada pada nilai interval Indeks Kepuasan Masyarakat dalam nilai 81,26 – 100,00. Hasil yang ingin dicapai pada kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini bertujuan agar tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Keberhasilan / Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sangat signifikan terhadap pelayanan publik yang merupakan implementasi dari upaya peningkatan pelayanan publik melalui One Stop Service (OSS) pengelolaan pelayanan 74 jenis izin dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas/Intansi terkait melalui pembentukan Tim Teknis pelayanan perizinan dan non perizinan serta adanya kerjasama dari masing-masing individu di lingkungan Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka peningkatan pelayanan yang optimal.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

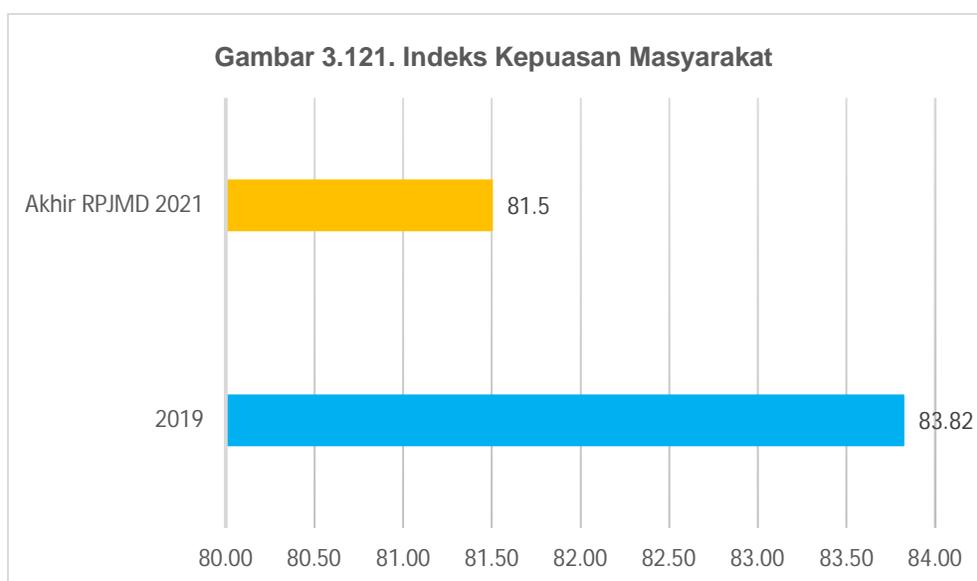
- a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Pada tahun 2018 Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 84,57 sedangkan realisasi pada tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat menurun menjadi 83,82.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 81,5, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 83,82 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2018 terhadap RPJMD 2021** sebesar 103,77%.



Sasaran Strategis 6.1

Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik

Sasaran strategis 6.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kec. Dumai Barat, Kec. Dumai Timur, Kec. Bukit Kapur, Kec. Medang Kampai, Kec. Sungai Sembilan, Kec. Dumai Kota, Kec. Dumai Selatan. Untuk mengukur misi keempat ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.25 berikut di bawah ini :

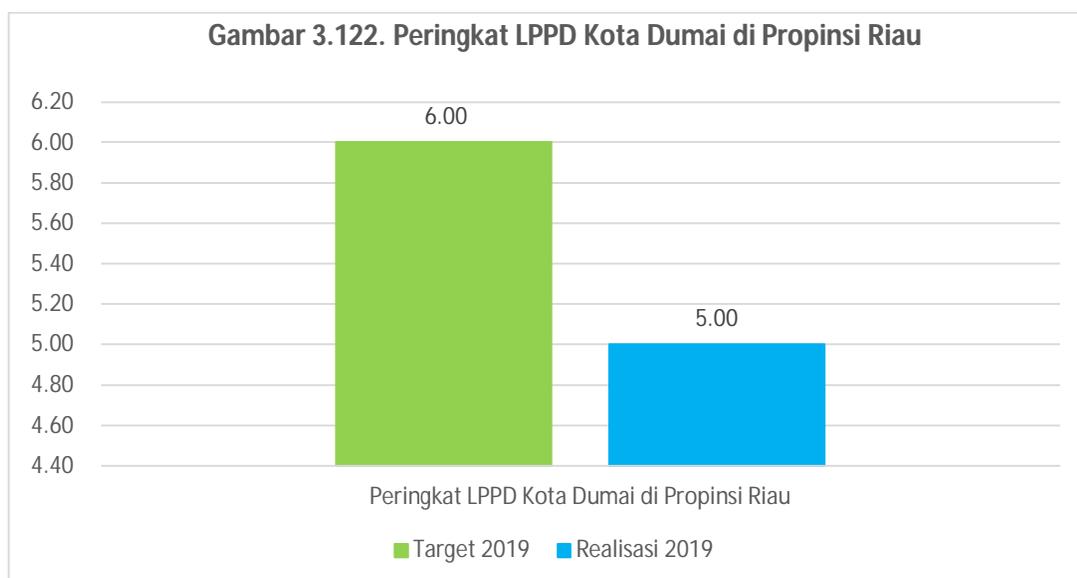
Tabel. 3.25. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	8	8	8	6	5	116,67	4	75%
	Rata-rata Capaian Kinerja							116,67		

Terlihat dari tabel 3.25 diatas pada Tujuan Keenam ini sasaran Strategis 6.1 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau

Target tahun 2019 Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau adalah peringkat 6 dan realisasi tahun 2019 adalah peringkat 5 dengan tingkat capaian sebesar 116,67%.

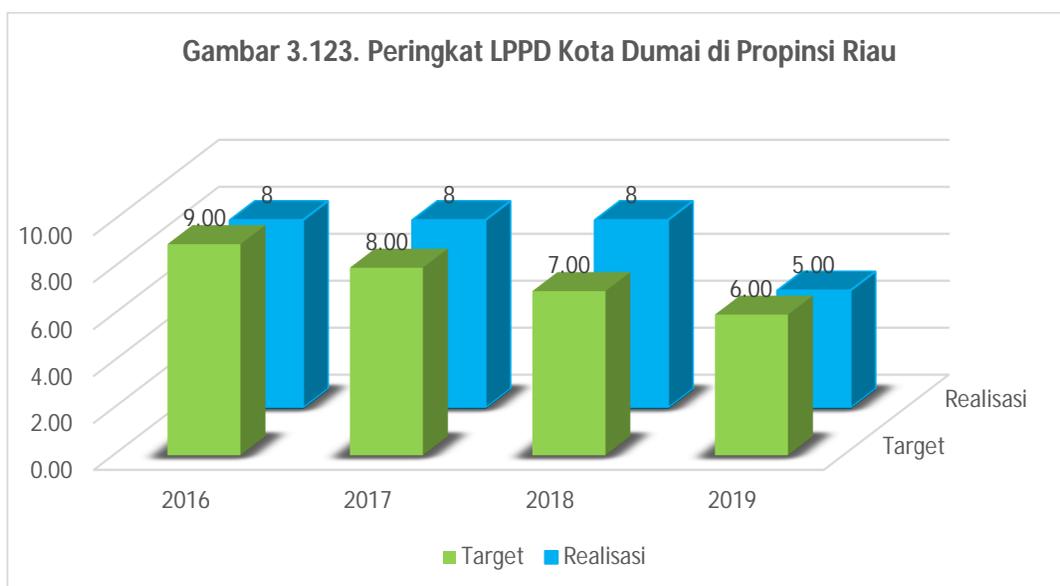


Kegiatan pendukung sasaran ini adalah Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD);

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau

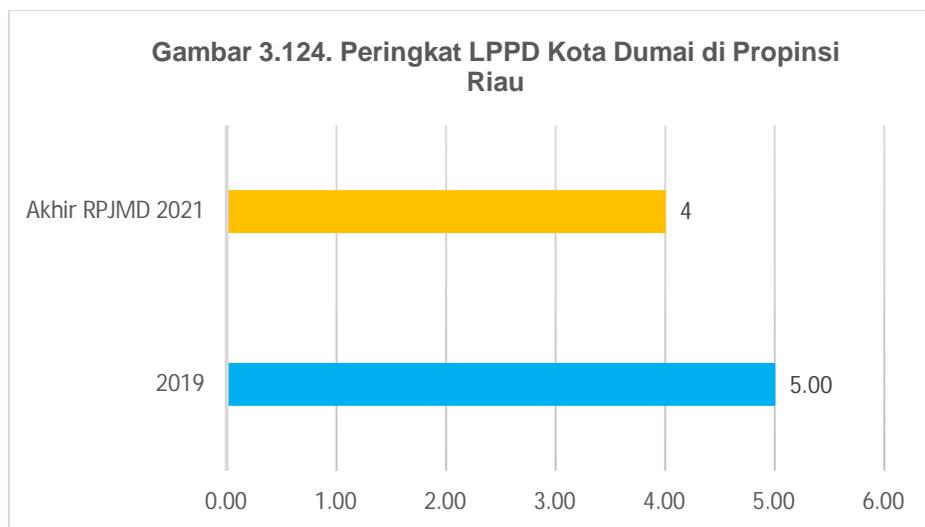
Realisasi Pada tahun 2018 Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau adalah peringkat 8, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau tetap peringkat 5.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Sasaran : Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 peringkat 4, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 adalah peringkat 5 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 75 %.



Sasaran Strategis 6.2

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran strategis 6.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik”.

Sasaran ini didukung OPD secara terpadu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengukur misi keempat ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.26 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.26. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.2

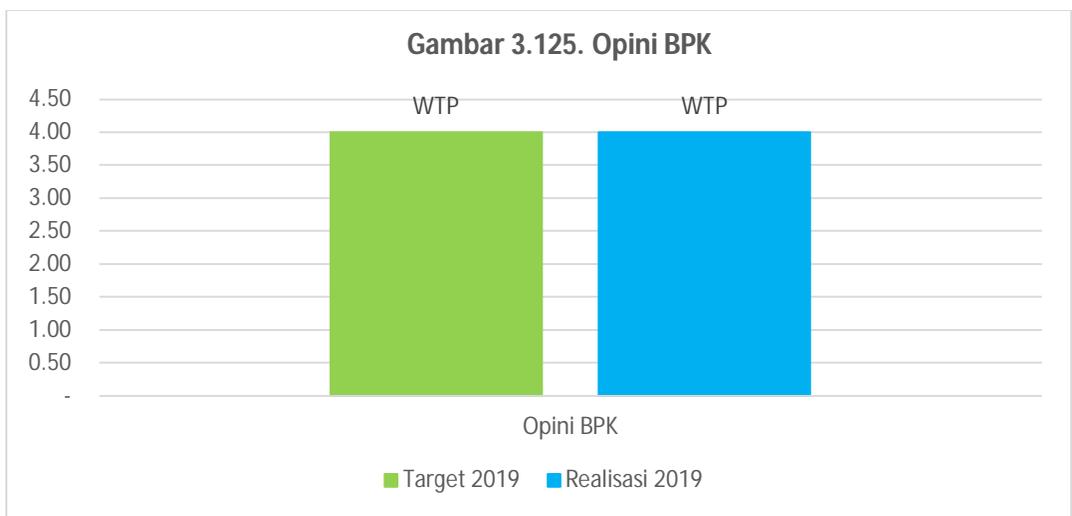
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Opini BPK	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
2	Nilai Akuntabilitas	Nilai	CC	CC	CC	B	B	100	B	100
Rata-rata Capaian Kinerja								100		

Terlihat dari tabel 3.26 diatas pada Tujuan Ke enam ini sasaran Strategis 6.2 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Opini BPK

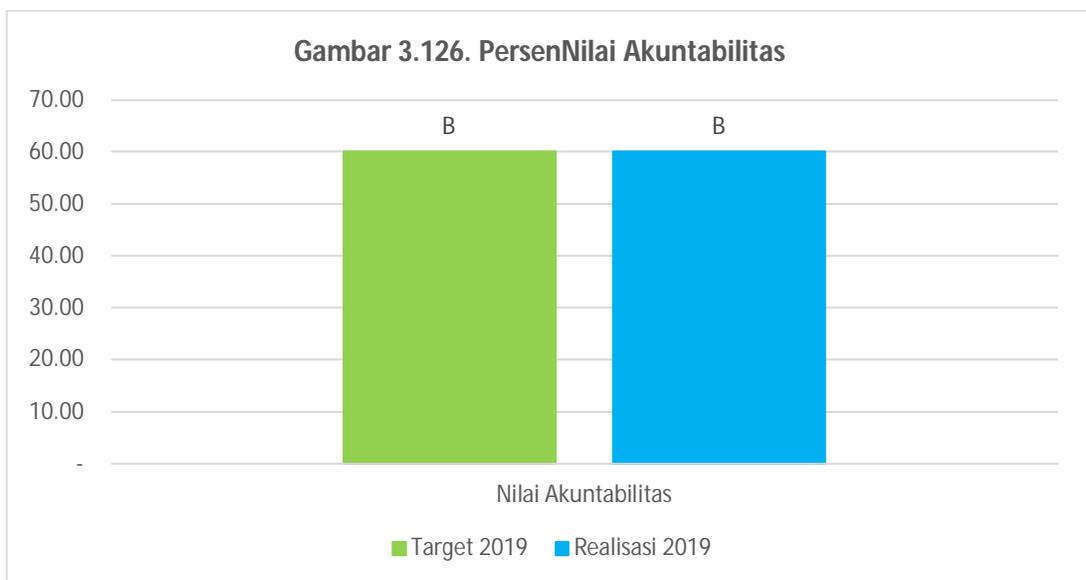
Target tahun 2019 Opini BPK adalah WTP atau 4 dan realisasi tahun 2019 adalah WTP atau 4 dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hasil ini melebihi dari target yang ditetapkan. Untuk skor nilai Opini BPK sebagai berikut: Opini WTP Nilai 4; Opini WDP Nilai 3; Opini TMP Nilai 2 dan Opini Tidak Wajar Nilai 1.



b. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai Akuntabilitas

Target tahun 2019 Nilai Akuntabilitas adalah B atau >60 dan realisasi tahun 2019 adalah B atau >60 dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

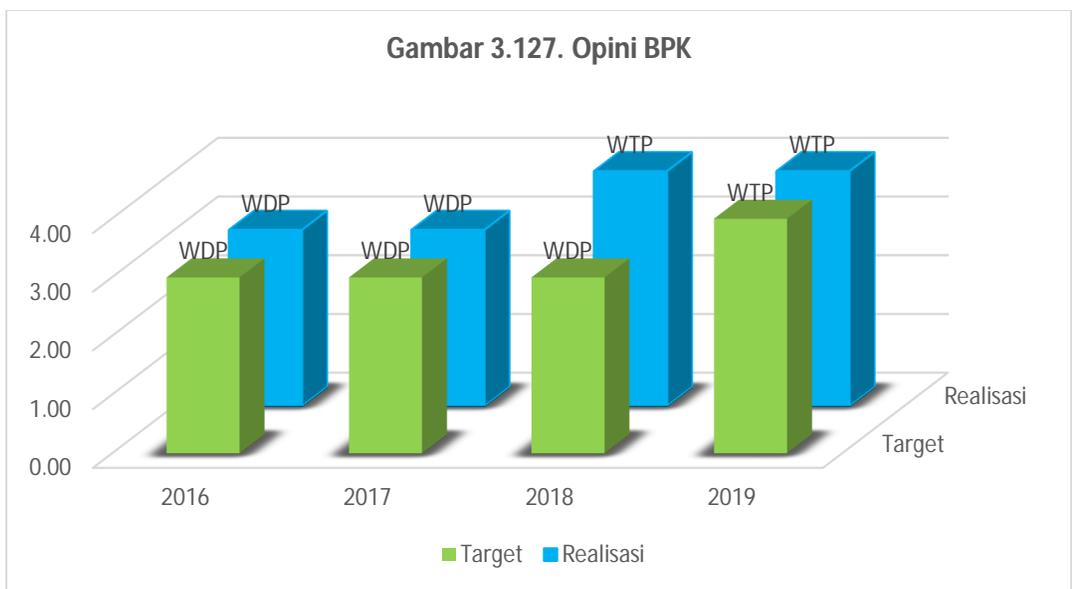
Untuk standar penilaian kategori SAKIP dan Range Nilai : Kategori AA dengan rang nilai 90-100, Kategori A dengan rang nilai 80-90, Kategori BB dengan rang nilai 70-80, Kategori B dengan rang nilai 60-70, Kategori CC dengan rang nilai 50-60, Kategori C dengan rang nilai 30-50 dan Kategori D dengan rang nilai 0-30



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

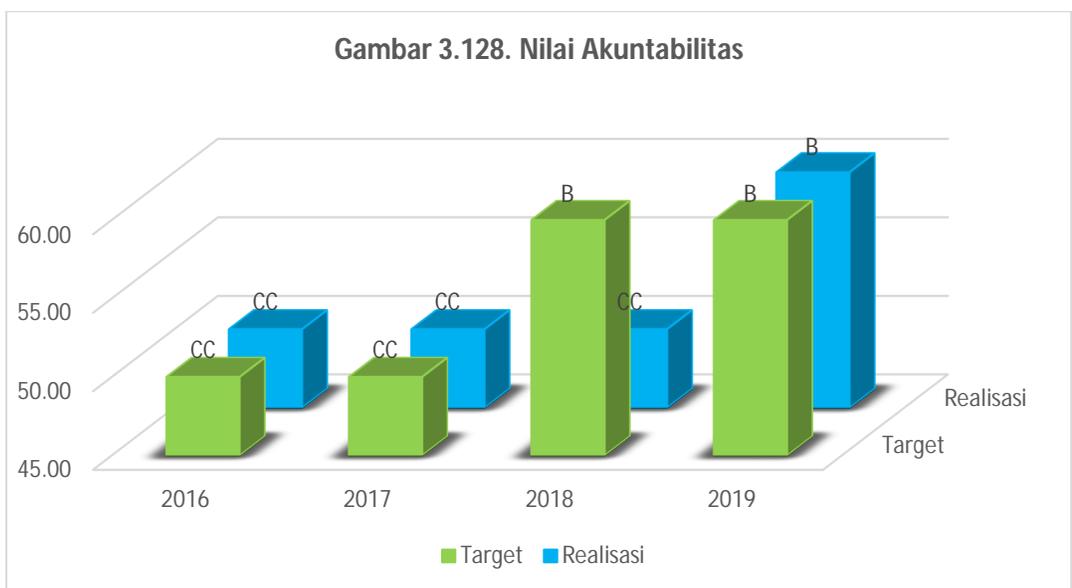
a. Indikator Kinerja Tujuan : Opini BPK

Realisasi Pada tahun 2018 Opini BPK adalah WTP atau 3, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Opini BPK meningkat menjadi WTP atau 3.



b. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai Akuntabilitas

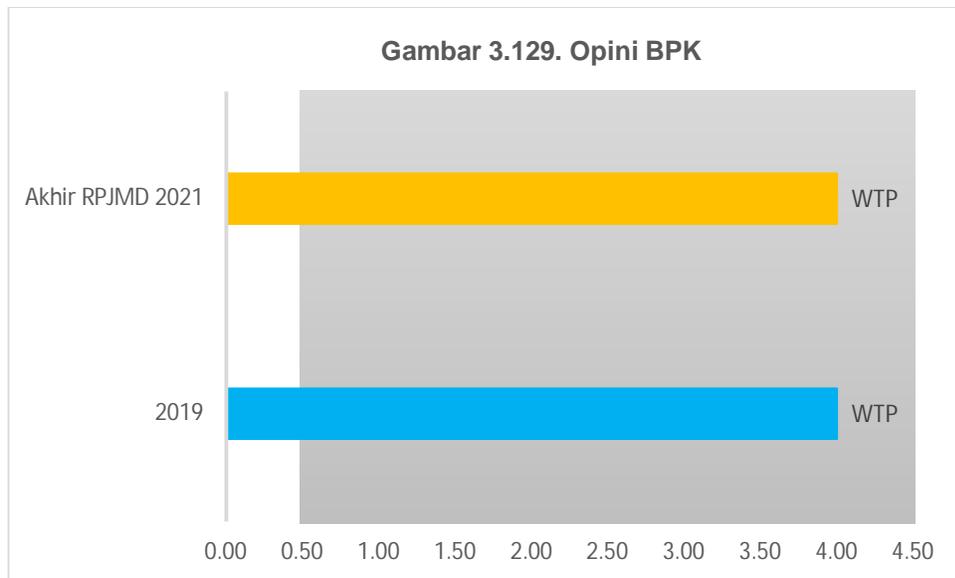
Realisasi Pada tahun 2018 Nilai Akuntabilitas adalah sebesar CC atau >50 sedangkan realisasi pada tahun 2019 Nilai Akuntabilitas Tetap B atau >60



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

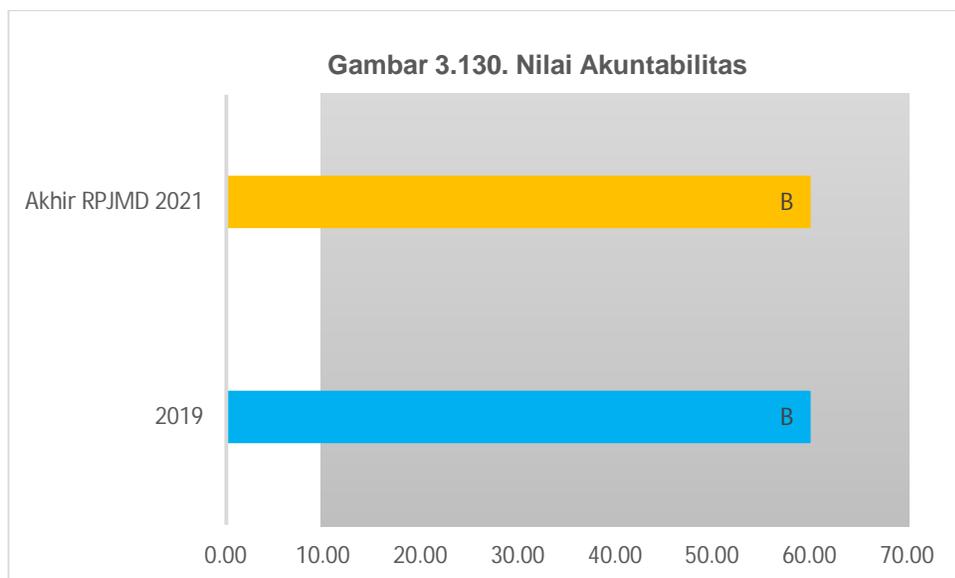
a. Indikator Kinerja Tujuan : BPK

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 adalah WTP atau 4 , realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 adalah WTP atau 4 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100 %.



b. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai Akuntabilitas

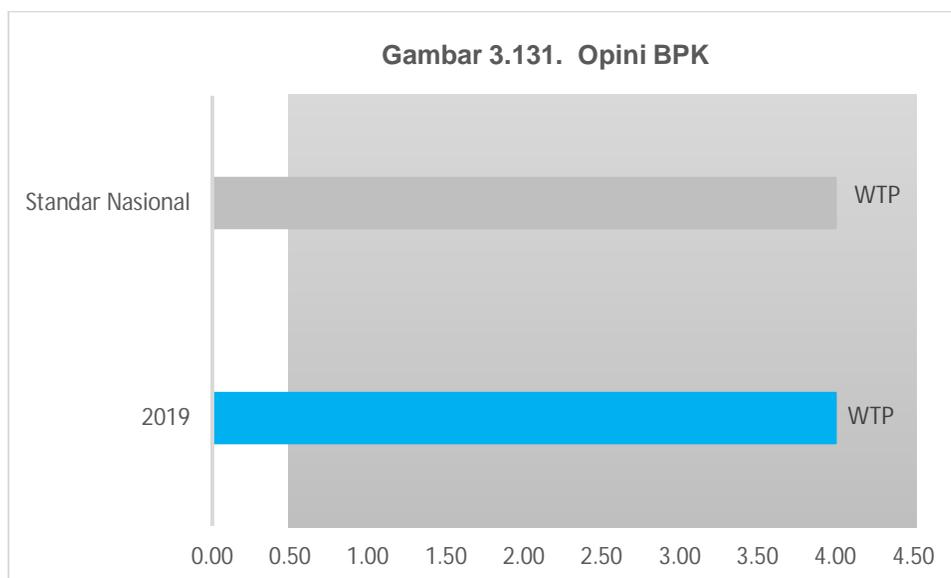
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 adalah B atau >60 realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 adalah B atau >60 dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 100%.



4. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);

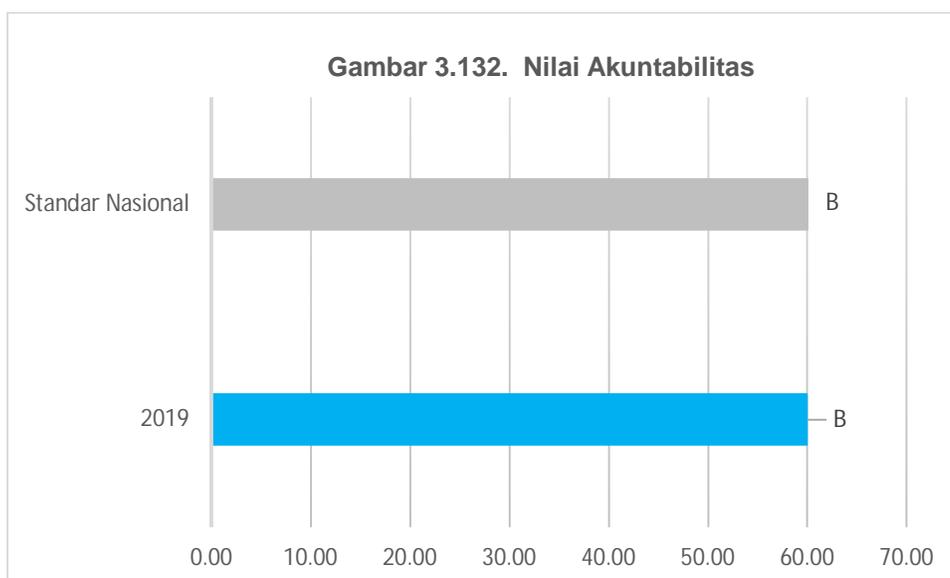
a. Indikator Kinerja Sasaran : Opini BPK

Realisasi Opini BPK Kota Dumai mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Standar Nasional adalah WTP.



b. Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Akuntabilitas

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kota Dumai mendapat nilai B dan Standar Nasional adalah B.



Misi 5. Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan

Pencapaian misi kelima ini melalui 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, 1 (satu) indikator Tujuan, 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 7

Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal

Tujuan 7 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 5 “Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan. Untuk mengukur Tujuan 7 ini terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.27 berikut di bawah ini :

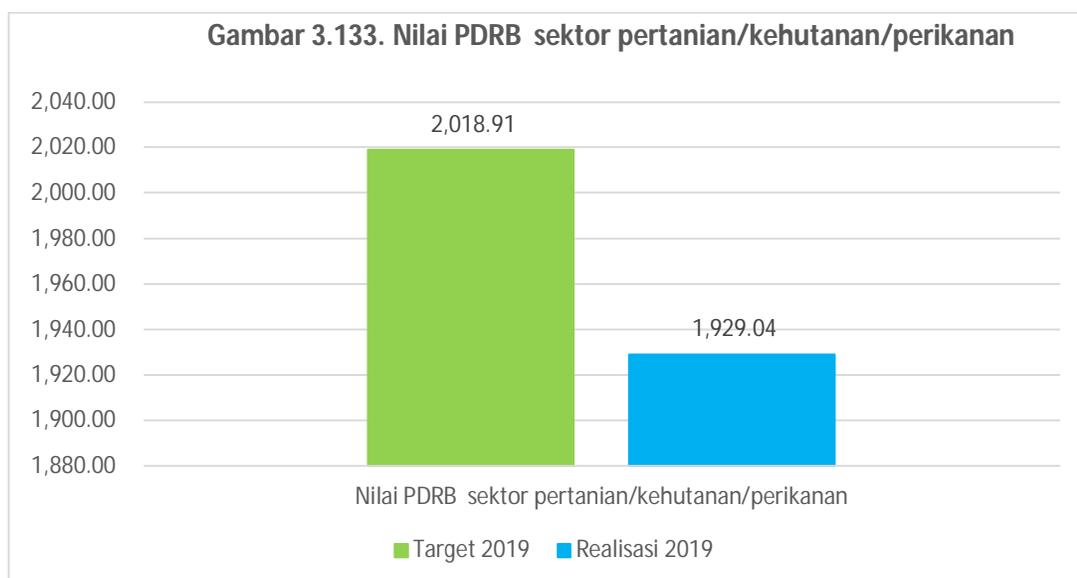
Tabel. 3.27. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 7.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	1.551.170	1.687,38	1.807,38	2.018,91	1.929,04	95,55	2.275,14	84,79
	Rata-rata Capaian Kinerja							95,55		

Terlihat dari tabel 3.27 diatas pada Misi Kedua tujuan 7 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

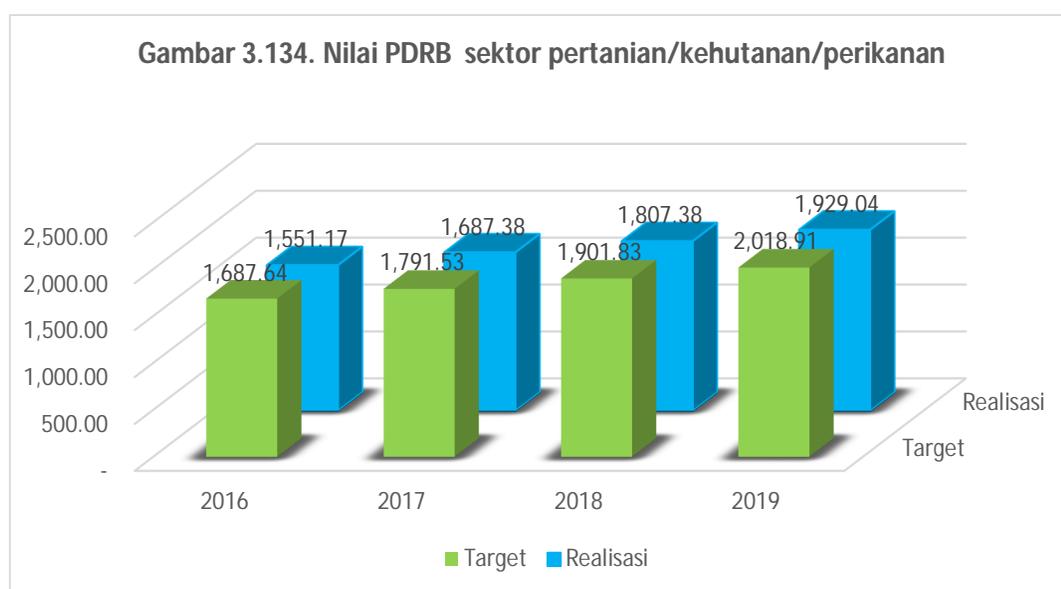
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai PDRB sektor pertanian/ kehutanan/ perikanan

Target tahun 2019 Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan adalah Rp. 2.018,91 Milyar dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 1.929,04 Milyar dengan tingkat capaian sebesar 95,55%.



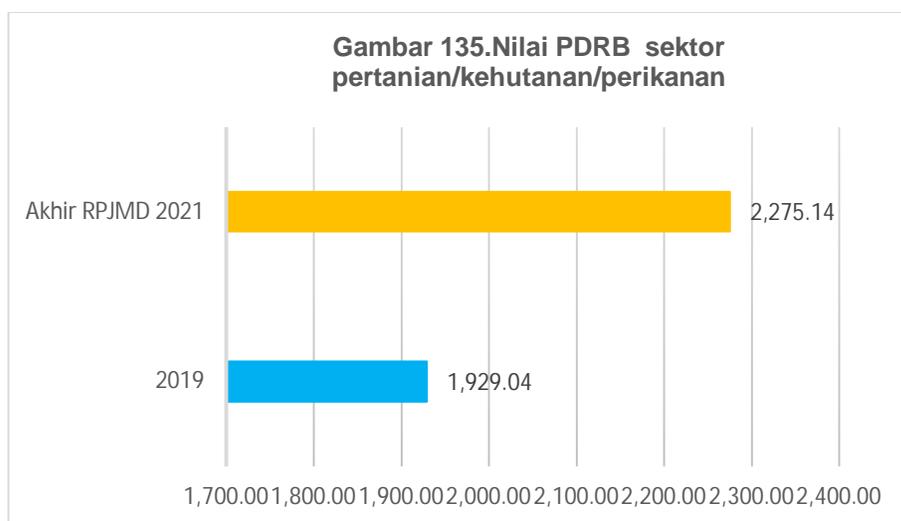
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai PDRB sektor pertanian/ kehutanan/ perikanan Realisasi Pada tahun 2018 Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan adalah sebesar Rp. 1.807,38 Milyar, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan meningkat Rp. 1.929,04 Milyar.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Nilai PDRB sektor pertanian/ kehutanan/ perikanan Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 adalah Rp. 2.275,14 Milyar, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 1929,04 Milyar dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 8479%.



Sasaran Strategis 7.1

Meningkatnya pendapatan petani

Sasaran strategis 7.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan. Untuk mengukur misi kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.28 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.28. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.1

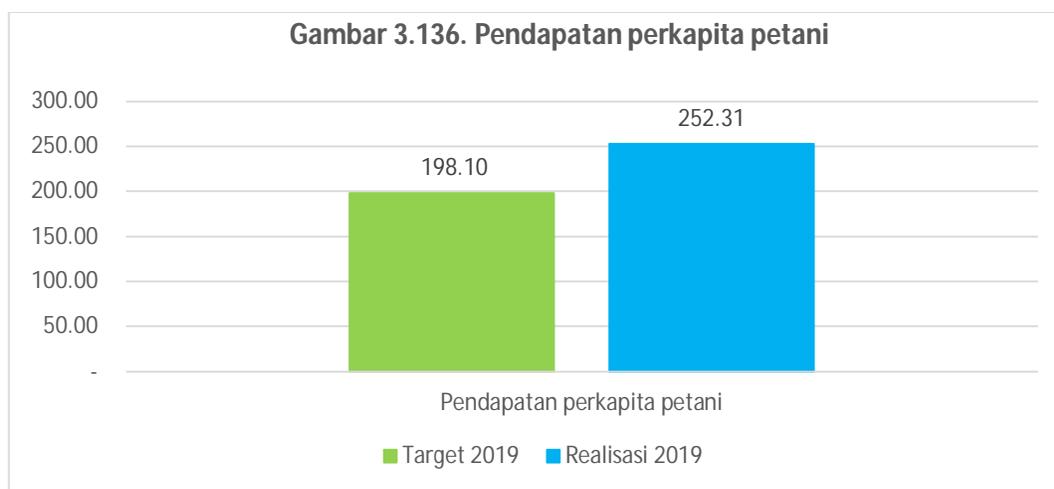
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	320,56	343,44	243,77	198,10	252,31	127,36	223,24	113,02
	Rata-rata Capaian Kinerja							127,36		

Terlihat dari tabel 3.28 diatas pada Tujuan Ketujuh ini sasaran Strategis 7.1 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Pendapatan perkapita petani

Target tahun 2019 Pendapatan perkapita petani adalah Rp. 198,10 juta dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 252,31 Juta dengan tingkat capaian sebesar 127,36%.



Sasaran pendapatan perkapita Petani dilaksanakan melalui program Peningkatan Kesejahteraan petani. jumlah dari kelompok tani di Kota Dumai yang diberikan bantuan baik sarana produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, lahan pekarangan maupun peternakan dan juga pelatihan/magang. Target yang ingin dicapai Kota Dumai pada tahun 2019 yakni 126 Kelompok. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 sebanyak 140 Kelompok atau tercapai 100 %. Pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan. Ketiga kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani.

Sasaran ini mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai yaitu sebagai berikut :

1) Produksi Komoditi Pertanian

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 2 program utama, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Target indikator kinerja Produksi Komoditi Pertanian pada tahun 2019 sebesar 20.818Ton dengan capaian sebesar 22.418 Ton atau tercapai 100,00% dari target.

2) Produksi Komoditi Perkebunan

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 2 program utama, yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Target indikator kinerja Produksi Komoditi Perkebunan pada tahun 2019 sebesar 84.756 Ton dengan capaian sebesar 85.025 Ton atau 100,00% dari target.

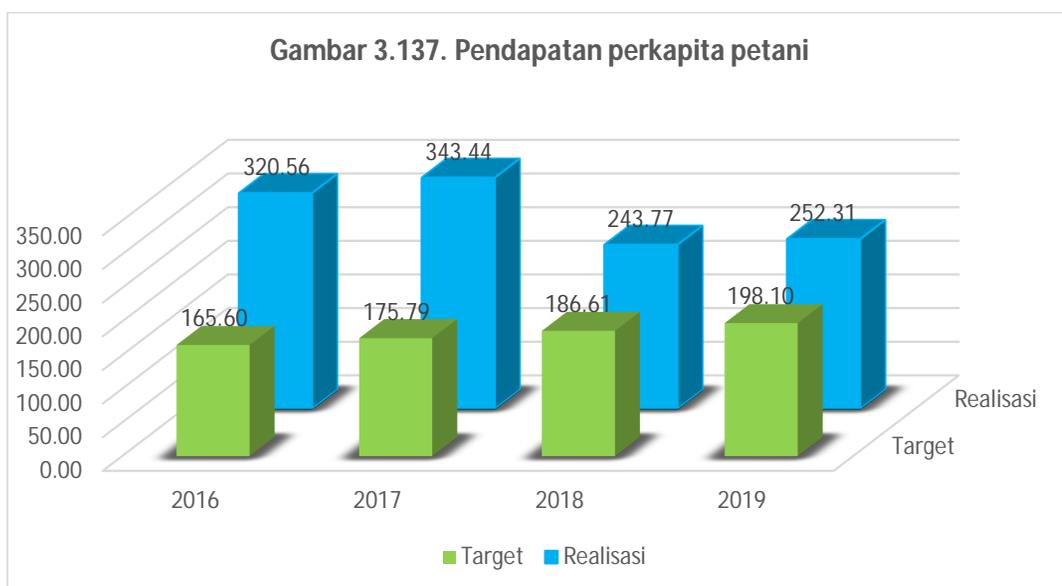
3) Populasi Ternak

Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 1 (satu) program utama yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program tersebut kemudian dijabarkan kedalam 2 (dua) kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat dan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak. Target indikator kinerja Populasi Ternak pada tahun 2019 sebanyak 6.093 Satuan Ternak dengan realisasi 7.013 Satuan Ternak atau tercapai 100,00% dari target.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Pendapatan perkapita petani

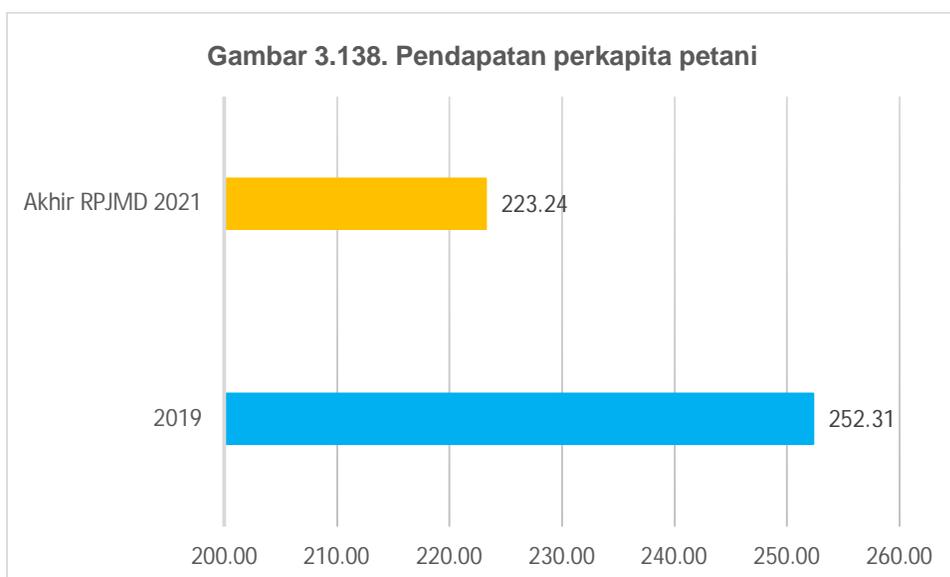
Realisasi Pada tahun 2018 Pendapatan perkapita petani adalah sebesar Rp.243,77 Juta, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Pendapatan perkapita petani menurun sebesar Rp. .252,31 Juta.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Pendapatan perkapita petani

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar Rp. 223,24 Juta, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 252,31 Juta dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 113,02%. Dimana realisasi telah melampaui target jangka menengah akhir tahun 2021.



Sasaran Strategis 7.2

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Sasaran strategis 7.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan

“Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan. Untuk mengukur sasaran misi kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.29 berikut dibawah ini :

Tabel. 3.29. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.2

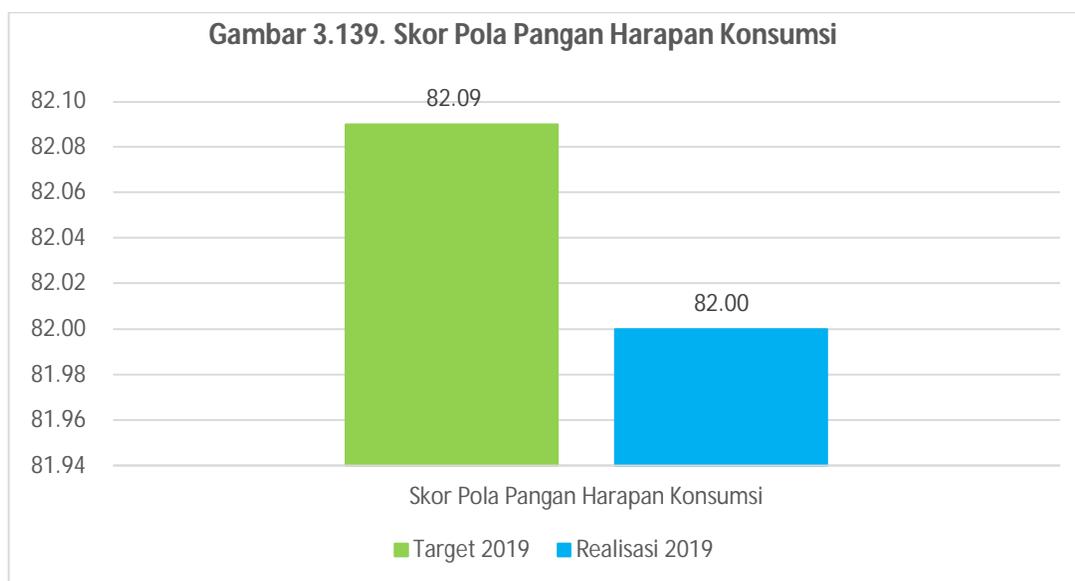
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021		
1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	81,07	81,70	82,10	82,09	82,00	99,89	83,74	97,9	
Rata-rata Capaian Kinerja									99,89		

Terlihat dari tabel 3.29 diatas pada Tujuan Ketujuh ini sasaran Strategis 7.2 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

Target tahun 2019 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi adalah 82,09 dan realisasi tahun 2019 sebesar 82,00 dengan tingkat capaian sebesar 99,89.%.



Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja utama dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu sebagai berikut :

1) Produksi Komoditi Pertanian

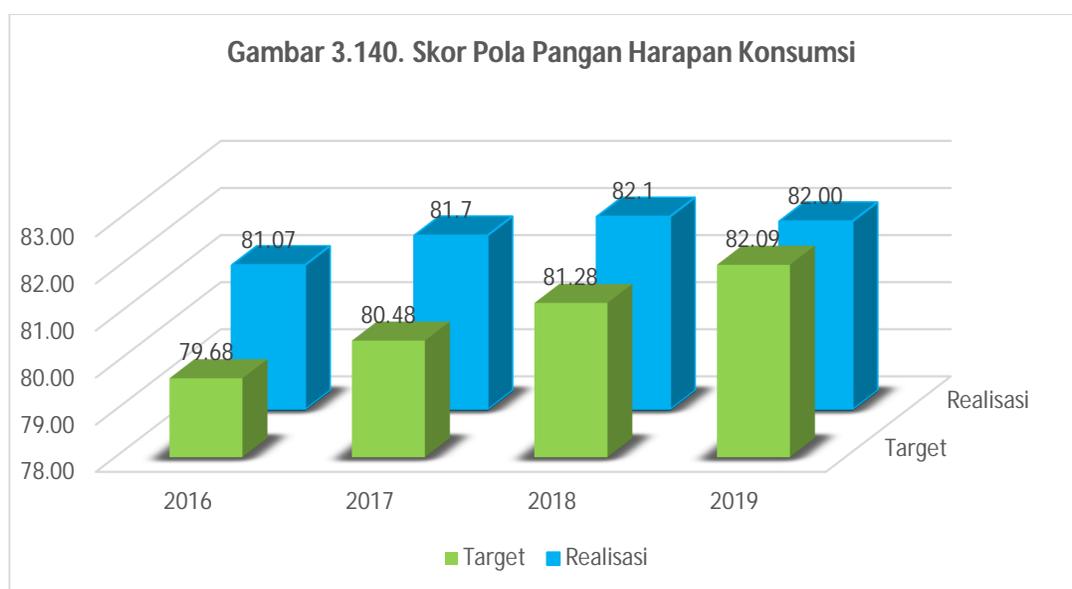
Pelaksanaan arah kebijakan ini dilaksanakan melalui 2 program utama, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. Target indikator kinerja Produksi Komoditi Pertanian pada tahun 2019 sebesar 20.818Ton dengan capaian sebesar 22.418 Ton atau tercapai 100,00% dari target.

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

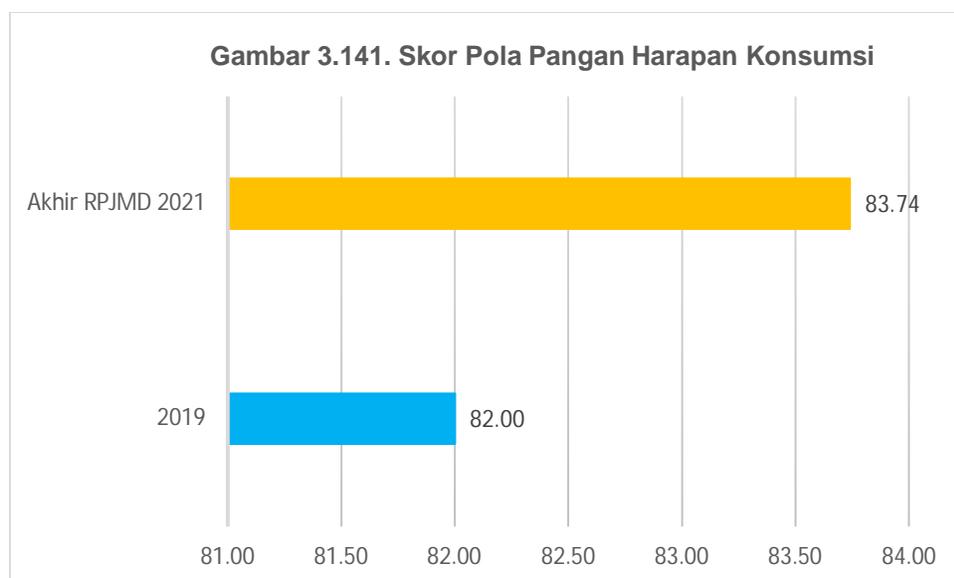
Realisasi Pada tahun 2018 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi adalah sebesar 82,10, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi meningkat sebesar 82,00



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 83,74 realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 82,00% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 97,9 %.



Misi 6. Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah

Pencapaian misi keenam ini melalui 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, 1 (satu) indikator Tujuan, 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 8

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Tujuan 8 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 6 “Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Industri, Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mengukur Tujuan 8 ini terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.30 di bawah ini :

Tabel. 3.30. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 8.

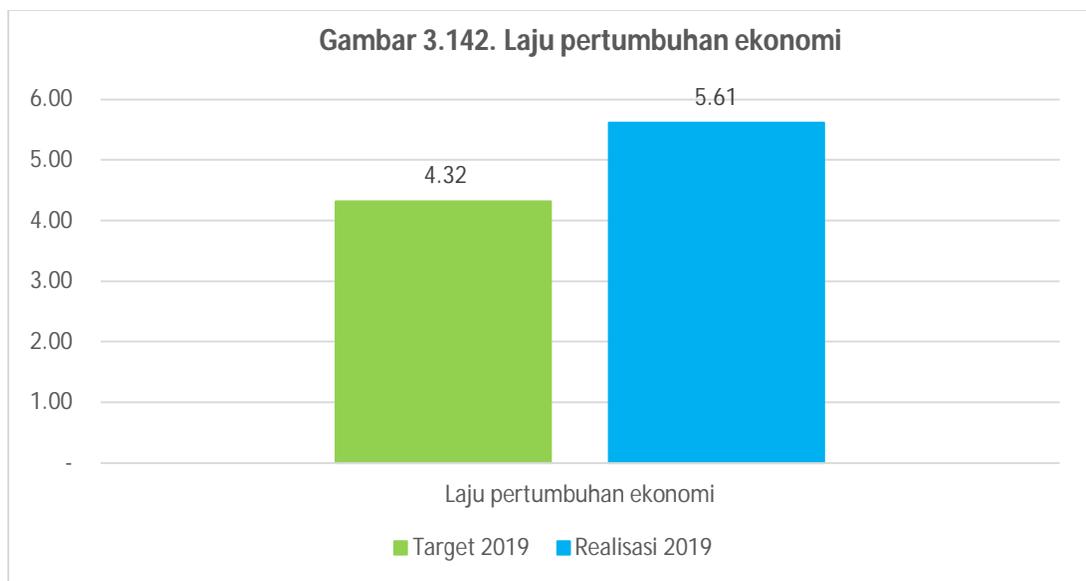
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,64	4,18	4,45	4,32	5,61	129,86	4,42	126,92
	Rata-rata Capaian Kinerja							129,86		

Terlihat dari tabel 3.30 diatas pada Misi Keenam tujuan 8 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

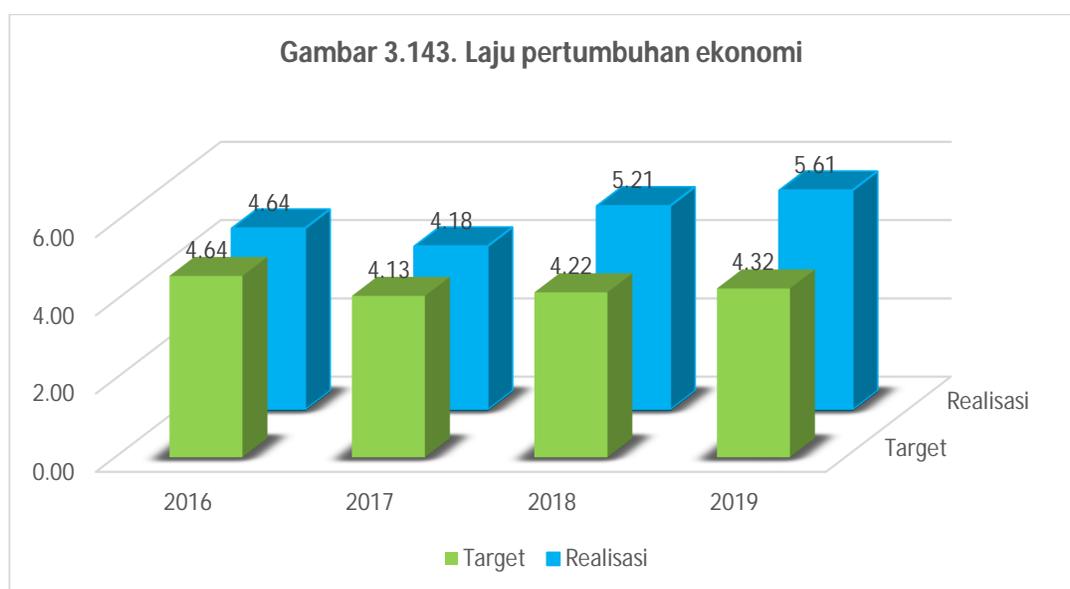
a. Indikator Kinerja Tujuan : Laju pertumbuhan ekonomi

Target tahun 2019 Laju pertumbuhan ekonomi adalah 4,32% dan realisasi tahun 2019 sebesar 5,61% dengan tingkat capaian sebesar 129,86%.

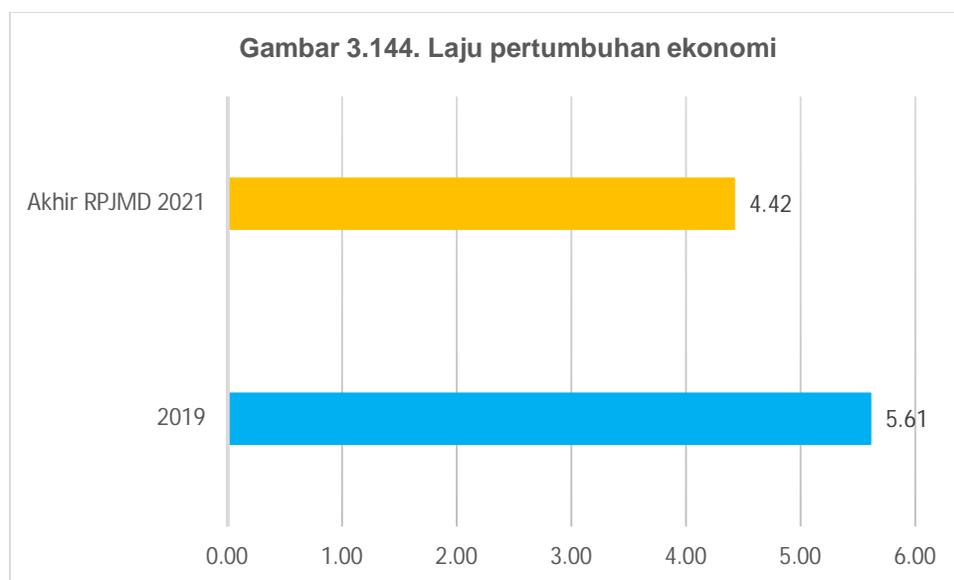


Bila kita lihat angka PDRB tahun 2018–2019 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi kenaikan dari 33.092.965,7 juta rupiah pada tahun 2018 meningkat menjadi 36.192.405,0 juta rupiah di tahun 2019. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tercatat 23.540.404,6 juta rupiah pada tahun 2018 meningkat menjadi 24.860.692,7 juta rupiah pada tahun 2019. Yang berarti besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2019 sebesar 5,61 persen.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Laju pertumbuhan ekonomi
 Realisasi Pada tahun 2018 Laju pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,21%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,61%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Laju pertumbuhan ekonomi
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 4,42%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 5,61% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 126,92%.



Sasaran Strategis 8.1

Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah

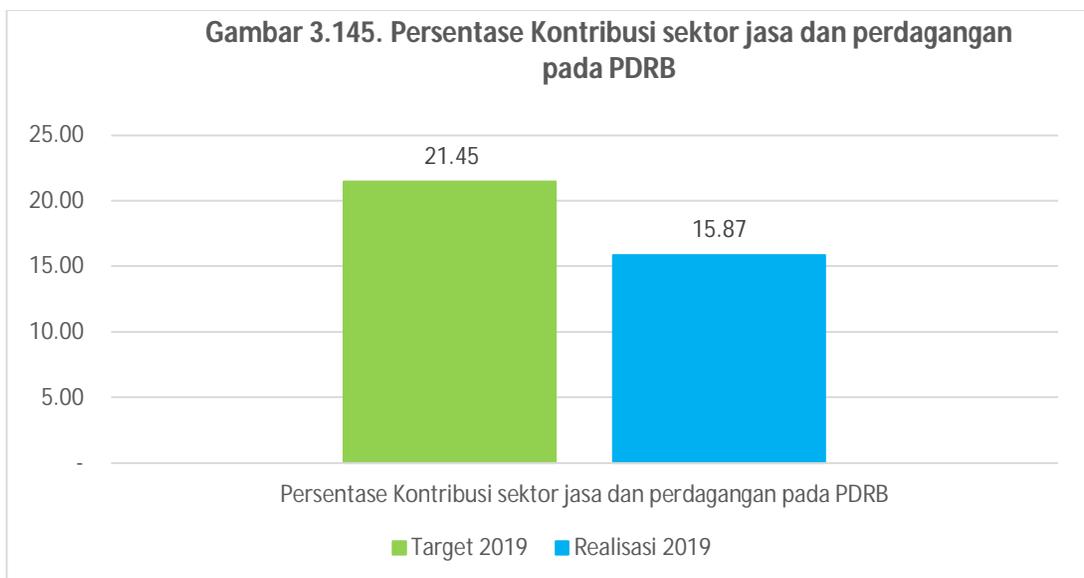
Sasaran strategis 8.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk mengukur sasaran misi ketiga ini terdapat 2 (Dua) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.31 berikut dibawah ini :

Tabel. 3.31. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.1

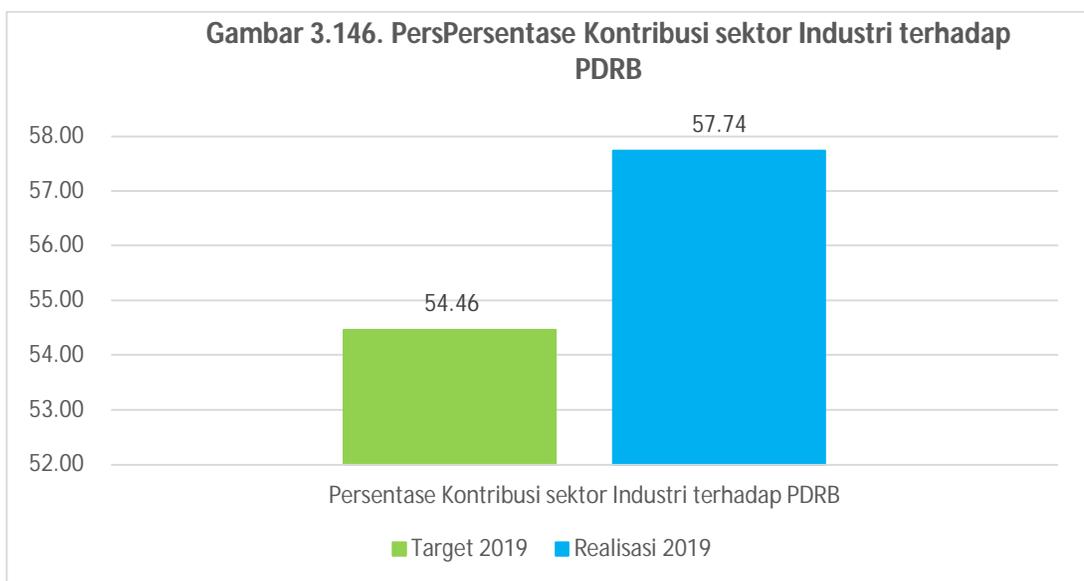
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21,13	20,47	19,84	21,45	15,87	73,99	21.47	73,92
2	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	53,21	53,93	54,75	54,46	57,74	106,02	54.85	105,27
Rata-rata Capaian Kinerja								90,00		

Terlihat dari tabel 3.31 diatas pada Tujuan Kedelapan ini sasaran Strategis 8.1 terdapat 2 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB
Target tahun 2019 Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB adalah 21,45% dan realisasi tahun 2019 sebesar 15,87% dengan tingkat capaian sebesar 73,99%.



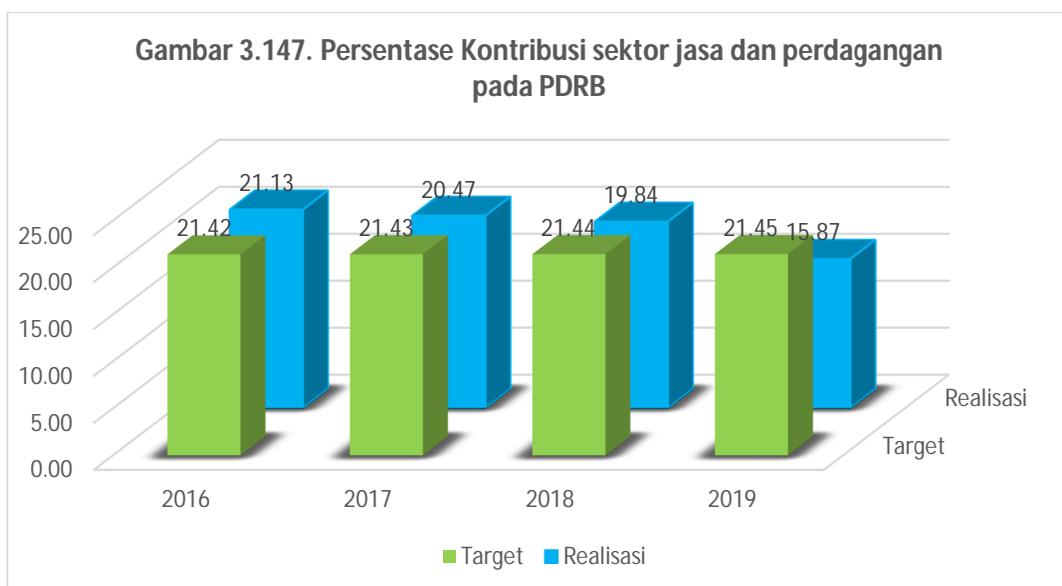
- b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
 Target tahun 2019 Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB adalah 54,46% dan realisasi tahun 2019 sebesar 57,74% dengan tingkat capaian sebesar 106,02%.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

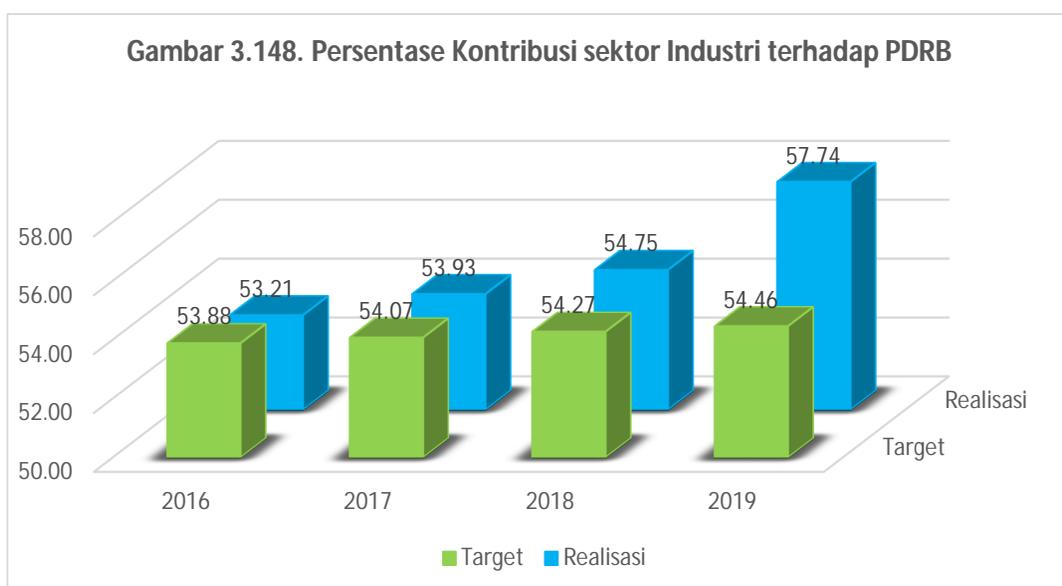
- a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB

Realisasi Pada tahun 2018 Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB adalah sebesar 19,84%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB menurun menjadi 15,87%.



- b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

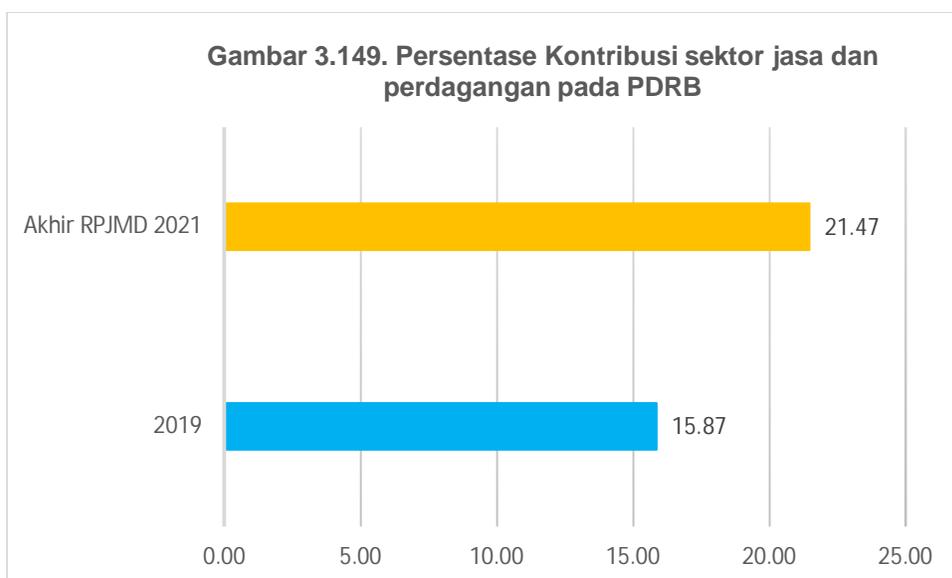
Realisasi Pada tahun 2018 Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB adalah sebesar 54,75%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB meningkat menjadi 57,74%.



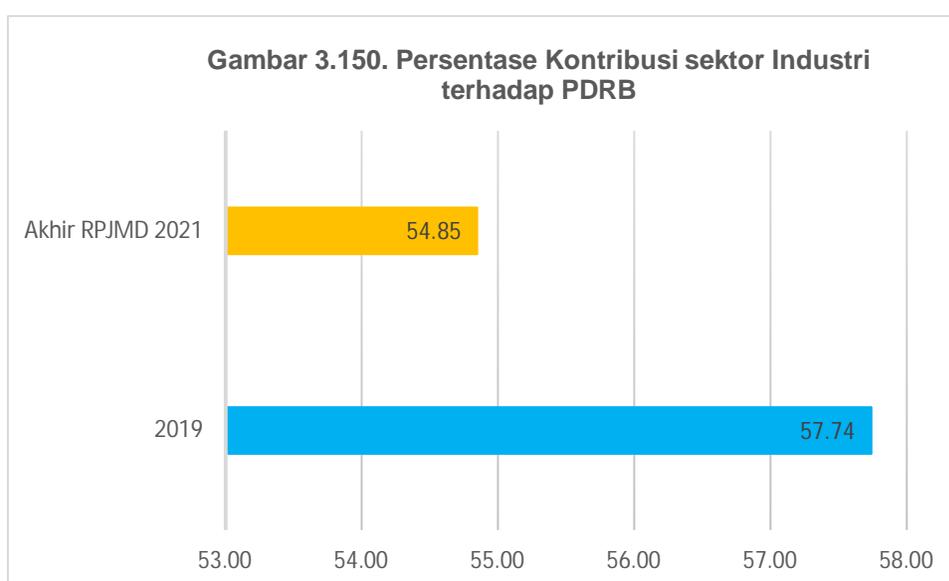
3. Perbandingan realisasi kinerja Sasaran sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 21,47%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 15,87% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 73,92%.



- b. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 54,85%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 57,74% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 105,27%.



Sasaran Strategis 8.2

Meningkatnya investasi di Kota Dumai

Sasaran strategis 8.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi**”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.33 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.32. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.33

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	

1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	5.563.502.258.070	4.398.108.780.000	2.006.313.400.000	5.904.033.104.282	5.937.390.800.000	100,56	6.142.556.041.695	96,66
	Rata-rata Capaian Kinerja							100,56		

Terlihat dari tabel 3.31 diatas pada Tujuan Kedelapan ini sasaran Strategis 8.2 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Target tahun 2019 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) adalah Rp. 5.904.033.104.282 dan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 5.937.390.800.000 dengan tingkat capaian sebesar 100,56%.

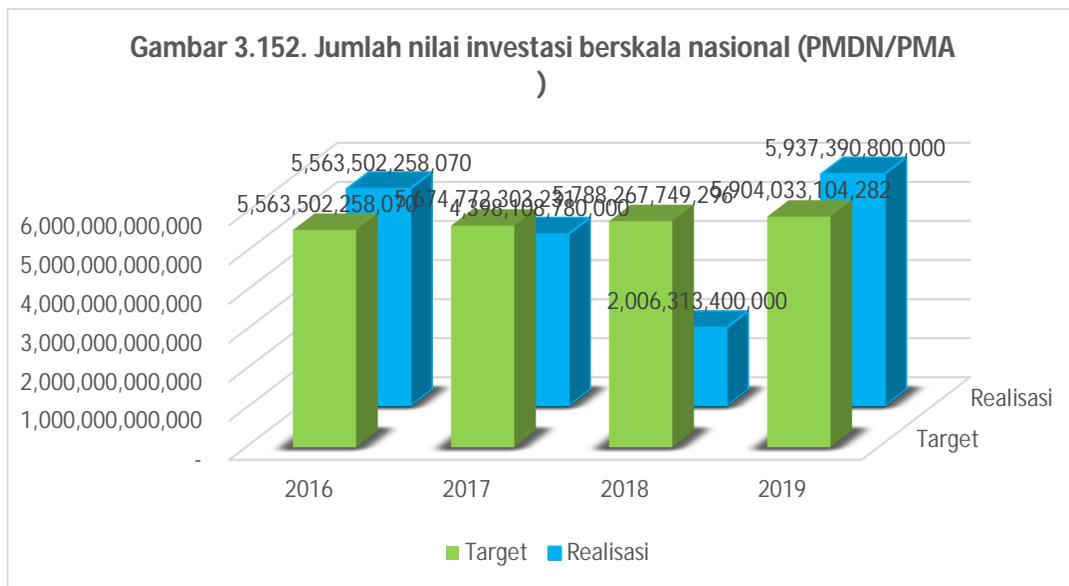


Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya penanaman modal yang ditanamkan suatu perusahaan/investor, untuk pembangunan proyek investasi berdasarkan izin prinsip yang dimilikinya. Nilai realisasi investasi dihitung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mengacu pada periode pelaporan. (Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM No. Peraturan BKPM Nomor 14 tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran adalah Meningkatnya investasi di Kota Dumai dengan 1 (satu) indikator kinerja “*Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)*”. Target dari indikator sasaran adalah sebesar Rp. 5.904.033.104.282,- dengan realisasi capaian pada tahun 2019 sampai pada Triwulan IV sebesar Rp. 5.937.390.800.000,- atau sebesar 100,56%. Selama sampai dengan triwulan IV tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 2.237.451.800.000,- dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 3.699.939.000.000,- mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 195,94% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018.

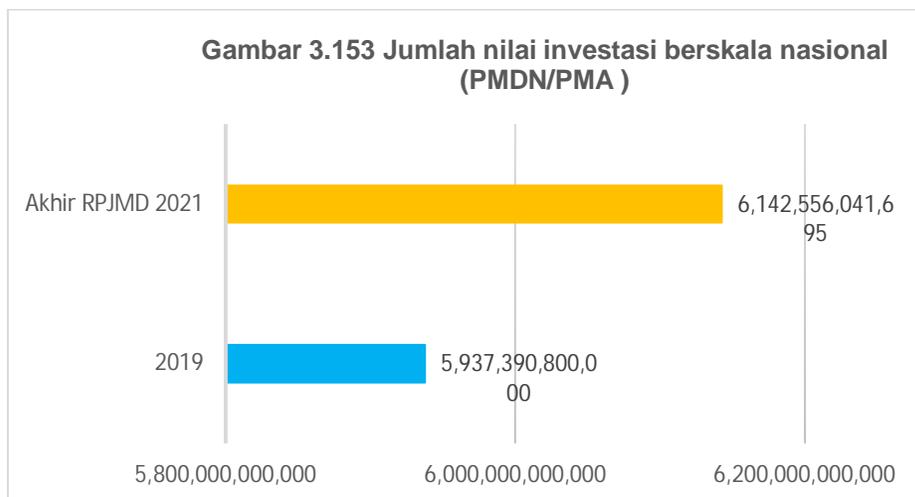
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Realisasi Pada tahun 2018 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) adalah sebesar Rp. 2.006.313.400.000, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) menurun menjadi Rp. 5.937.390.800.000.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 1Rp. 6.142.556.041.695 . realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp. 5.937.390.800.000, dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2018 terhadap RPJMD 2021** sebesar 96,66%.



Misi 7. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu

Pencapaian misi ketujuh ini melalui 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis, 1 (satu) indikator Tujuan, 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 9

Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini

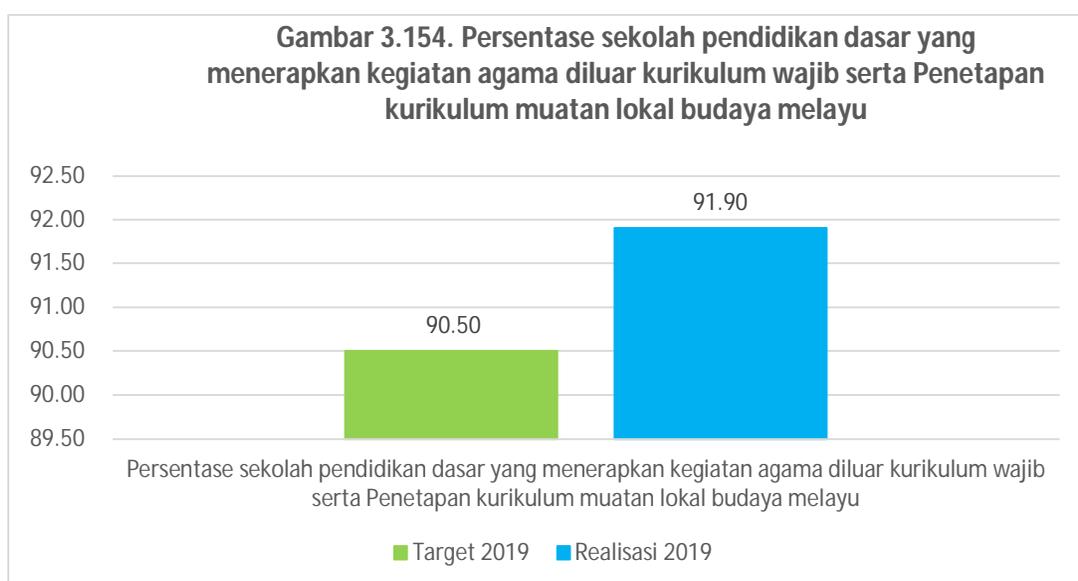
Tujuan 9 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 7 “Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu”. Tujuan ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip. Untuk mengukur Tujuan 9 ini terdapat 1 indikator tujuan. Berikut ditampilkan capaian kinerja Tujuan yang tersaji pada tabel 3.33 berikut di bawah ini :

Tabel. 3.33. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 9.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	67	87,27	88,32	90,5	91,90	101,55	100	91,90
	Rata-rata Capaian Kinerja							101,55		

Terlihat dari tabel 3.33 diatas pada Misi Ketujuh tujuan 9 ini 1 (satu) indikator tujuan tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

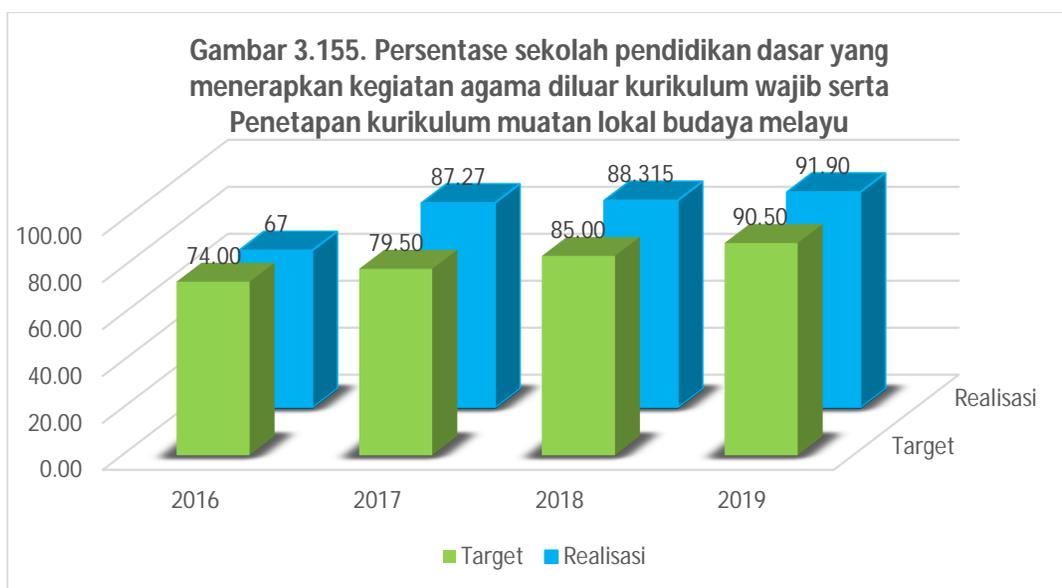
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu
Target tahun 2019 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu adalah 90,50% dan realisasi tahun 2019 sebesar 91,90% dengan tingkat capaian sebesar 91,90%.



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu

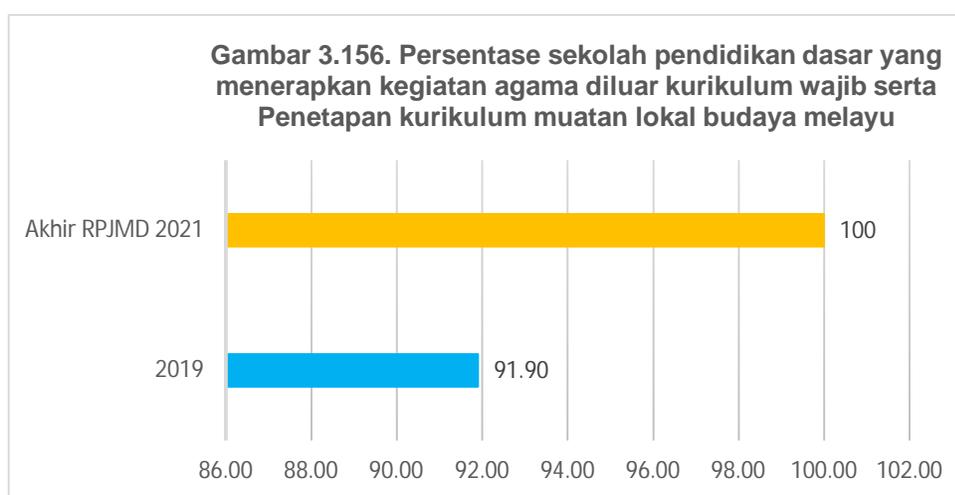
Realisasi Pada tahun 2018 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu adalah sebesar 88,32%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu menurun menjadi 91,90%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

- a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 91,90% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 91,90 %.



Sasaran Strategis 9.1

Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar

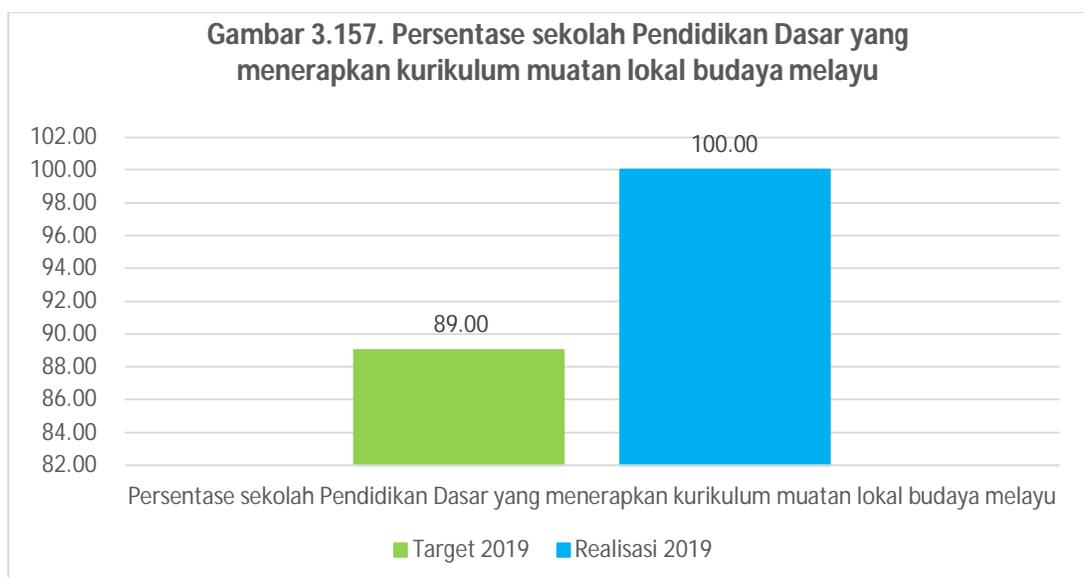
Sasaran strategis 9.1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini”. Sasaran ini didukung OPD secara terpadu yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata. Untuk mengukur sasaran 9.1 ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.34 berikut dibawah ini:

Tabel. 3.34. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.1

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021	
1	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	63	97,14	98,1	89	100	112,36	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja							112,36		

Terlihat dari tabel 3.34 diatas pada Tujuan Kesembilan ini sasaran Strategis 9.1 terdapat 1 (dua) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu
Target tahun 2019 Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu adalah 89% dan realisasi tahun 2019 sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 112,36%.

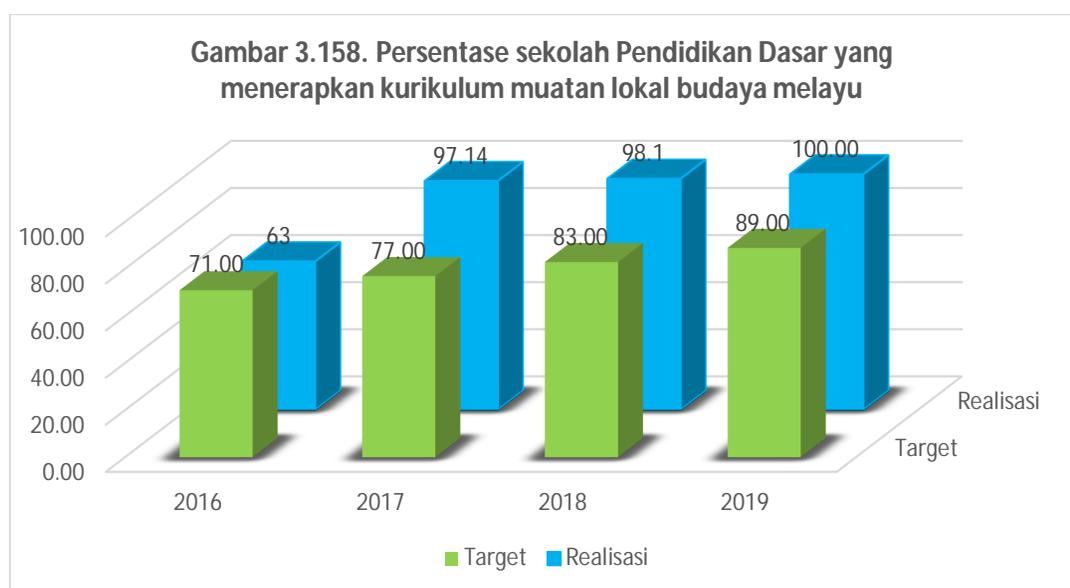


Muatan Lokal Budaya Melayu Riau adalah mata pelajaran yang berisikan budaya Melayu Riau yang meliputi sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola atau tradisi dan karya masyarakat Melayu Riau yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Pengembangan budaya melayu di Kota

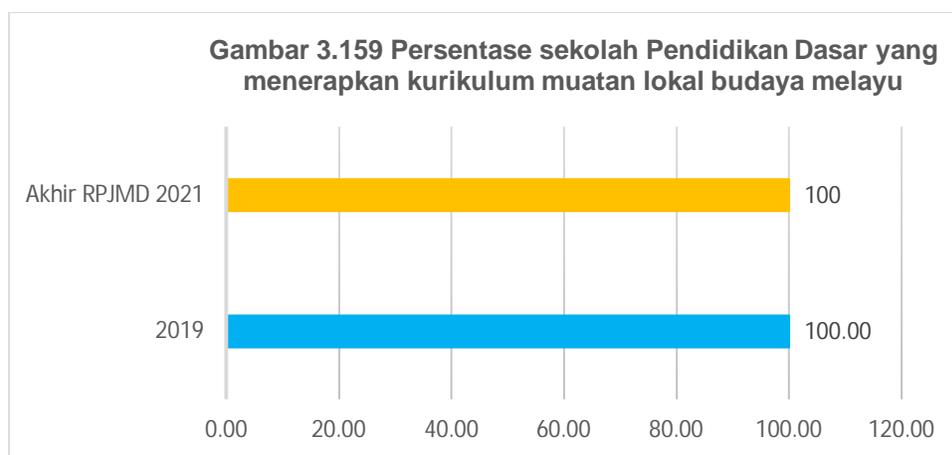
Dumai baik dalam tatanan Pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah laku kehidupan sehari-hari harus menjadi perhatian. Dalam dunia Pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis perlu implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan, realisasi implementasi budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar pada tahun 2018 adalah sebesar 98,10% sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 89% sekolah pada jenjang Pendidikan dasar sudah mengimplementasikan budaya melayu dalam kurikulum Pendidikan dasar. Pada tahun 2019 realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 100%, hal ini dapat dikatakan baik karena persentasi capaian melebihi target yang ditetapkan.

Program pendukung pada indikator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya, serta dengan keluarnya Peraturan Walikota Dumai nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kota Dumai.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu
 Realisasi Pada tahun 2018 Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu adalah sebesar 98,1%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu meningkat sebesar 100%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;
 - a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu
 Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 98,10%.



Sasaran Strategis 9.2

Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar

Sasaran strategis 9.2 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini”. Sasaran ini didukung OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran misi ke empat ini terdapat 1 (Satu) indikator sasaran. Berikut ditampilkan capaian kinerja sasaran yang tersaji pada tabel 3.35 berikut dibawah ini:

Tabel. 3.35. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.2

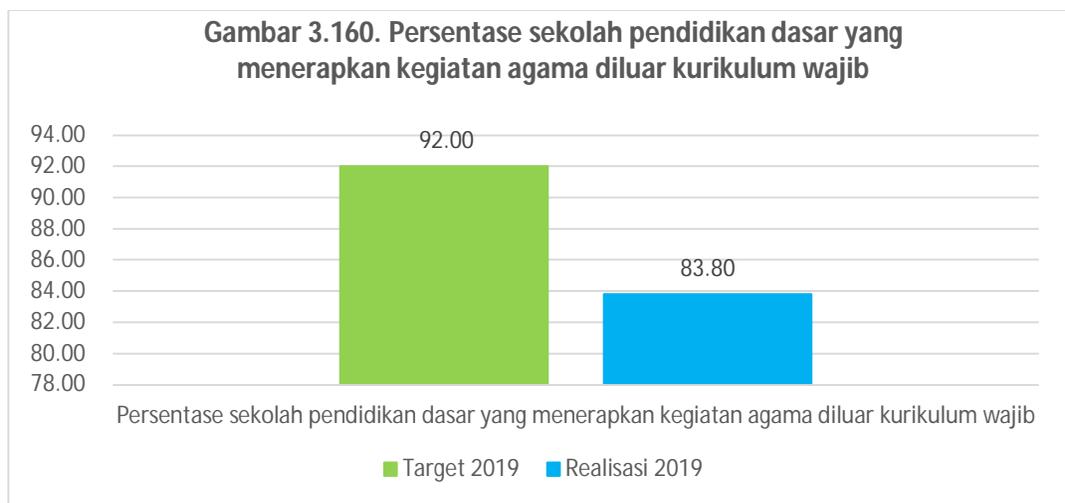
No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir	Capaian s/d 2018 terhadap RPJMD 2021 (%)	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	2021		
1	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	71	79,20	80,37	92	83,80	91,09	100	83,80	
Rata-rata Capaian Kinerja									91,09		

Terlihat dari tabel 3.35 diatas pada Tujuan Kesembilan ini sasaran Strategis 9.2 terdapat 1 (satu) indikator Sasaran tersebut dapat dijelaskan tingkat pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib

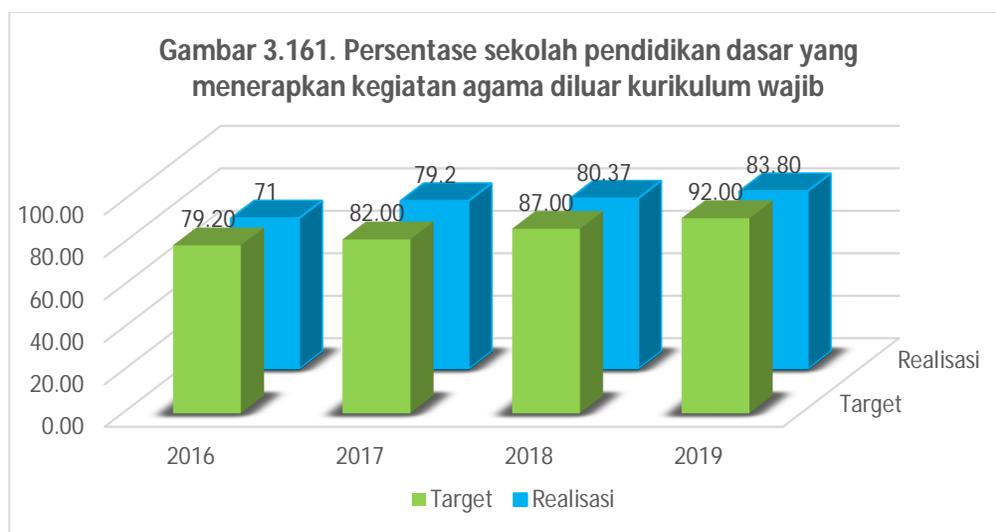
Target tahun 2019 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib adalah 92% dan realisasi tahun 2019 sebesar 83,80% dengan tingkat capaian sebesar 91,09%.



Budaya melayu sangat melekat dengan islam, dalam pembangunan masyarakat harus juga berbasis nilai-nilai agama. Pengembangan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai sejak dini, sekolah juga memegang peranan penting dalam hal ini. Pada tahun 2018 realisasi penerapan nilai-nilai agama dalam Pendidikan dasar adalah sebesar 80,37% sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 87% sekolah pada jenjang Pendidikan dasar menerapkan nilai-nilai agama. Realisasi pada tahun 2019 adalah sebesar 83,8% yang dapat dikatakan baik walaupun belum mencapai target pada tahun 2019, tetapi capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya. Program pendukung pada indicator ini adalah program pengelolaan kekayaan budaya dan program pengelolaan keragaman budaya.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh berbagai pihak baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dan Sekolah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, untuk indikator kinerja yang belum tercapai diantaranya adalah pada urusan kebudayaan. Untuk selanjutnya diharapkan indicator-indikator ini dapat dipenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

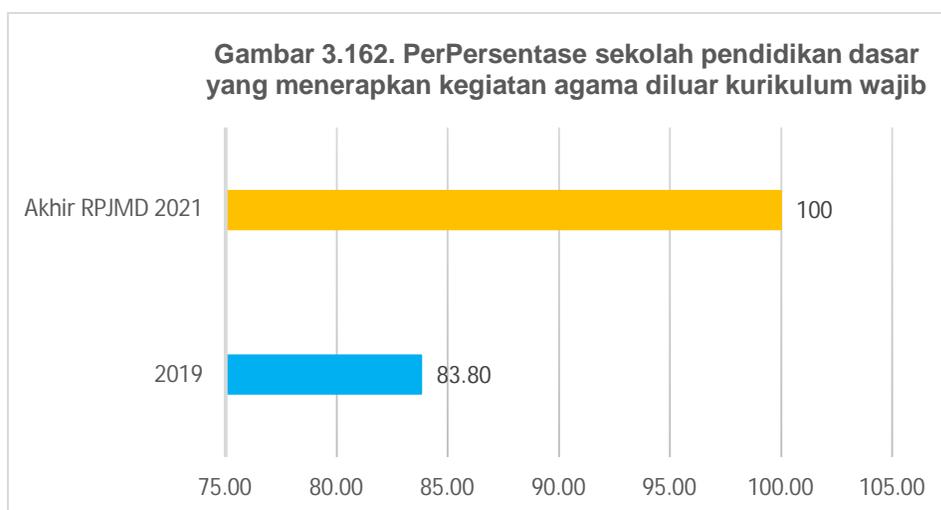
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 - a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib
 Realisasi Pada tahun 2018 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib adalah sebesar 80,37%, sedangkan realisasi pada tahun 2019 Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib meningkat menjadi 83,80%.



3. Perbandingan realisasi kinerja Tujuan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini;

a. Indikator Kinerja Tujuan : Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah akhir tahun 2021 sebesar 100%, realisasi kinerja Tujuan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 83,80% dari target yang ditetapkan, didapat **Capaian sampai dengan 2019 terhadap RPJMD 2021** sebesar 83,80%.



Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Penyebab Kegagalan/ Penurunan Kinerja dari:

1. Pada Sasaran 1.2 “Meningkatnya infrastruktur perkotaan” dengan capaian indikator “Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik” sebesar 65,03% dimana target tahun 2019 sebesar 57,59% sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 65,03. tidak tercapainya realisasi investasi berskala Nasional Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik disebabkan hasil perhitungan kinerja jalan tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi penurunan kinerja sebesar 23,51%. Hal ini disebabkan kesalahan penilaian survey kondisi jalan pada tahun 2018 dimana tipe permukaan kerikil dan tanah sebagian masuk kedalam kategori baik dan sedang.

2. Pada Sasaran 4.1 “Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga” dengan capaian indikator “Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ POPDA)” sebesar 0%. Dengan target pada tahun 2019 sebesar 0, sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar 0 . Hal ini disebabkan Target dari indikator sasaran ini dalam Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata untuk tahun 2019 tidak dilaksanakan karena kegiatan POPDA dilaksanakan 2 tahun sekali.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 3.36. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Misi	Sasaran		Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	Efisiensi
			(%)	(%)	(%)
1	2		3	4	5
Visi Terwujudnya masyarakat damai yang makmur dan madani pada Tahun 2021					
Misi 1	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar				
	Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	100,23	96,56	3,44
	Sasaran 1.2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	224,27	96,05	3,95
	Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan	100,00	95,76	4,24
Misi 2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing				
	Sasaran 2.1	Meningkatnya partisipasi pendidikan	97,03	98,55	1,45
	Sasaran 2.2	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	100,00	91,90	8,10
	Sasaran 2.3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	112,19	97,09	2,91
	Sasaran 3.1	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	99,74	96,37	3,63
	Sasaran 3.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	90,78	94,37	5,63
	Sasaran 4.1	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	0,00	91,16	8,84
Misi 3	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan				
	Sasaran 5.1	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	118,07	94,02	5,98
	Sasaran 5.2	Menurunnya persentase penduduk miskin	117,56	98,04	1,96
	Sasaran 5.3	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	114,09	64,25	35,75
	Sasaran 5.4	Meningkatnya lapangan kerja	123,54	95,95	4,05

Misi	Sasaran		Capaian Kinerja	Capaian Keuangan	Efisiensi
			(%)	(%)	(%)
1	2		3	4	5
Misi 4	Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan				
	Sasaran 6.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	116,67	96,41	3,59
	Sasaran 6.2	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	100,00	85,59	14,41
Misi 5	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan				
	Sasaran 7.1	Meningkatnya pendapatan petani	127,36	90,38	9,62
	Sasaran 7.2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	99,89	98,06	1,94
Misi 6	Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah				
	Sasaran 8.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	90,13	93,95	6,05
	Sasaran 8.2	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	100,56	97,33	2,67
Misi 7	Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu				
	Sasaran 9.1	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	112,36	90,04	9,96
	Sasaran 9.2	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	91,09	91,12	8,88

Dari tabel 3.37 dapat dilihat efisiensi penggunaan sumberdaya yang besar pada :

- 1) Sasaran 5.3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dengan penghematan sebesar 35,75% dengan capaian kinerja 114,09%
- 2) Sasaran 6.2 Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan penghematan sebesar 14,41% dengan capaian kinerja 100%.
- 3) Sasaran 7.1 Meningkatkan pendapatan petani dengan penghematan 9,62% mampu mencapai capaian kinerja sebesar 127,36%
- 4) Sasaran 9.1 Meningkatkan implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar dengan penghematan 9,96% mampu mencapai capaian kinerja sebesar 112,36%

Tabel. 3.37. Efisiensi Anggaran Tahun 2019 Pemerintah Kota Dumai

TABEL EFISIENSI ANGGARAN			
		TOTAL EFISIENSI HASIL ELIMINASI PROGRAM	
PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN		-----	X 100%
		TOTAL ANGGARAN BELANJA NON PEGAWAI	
ISILAH KOLOM DIBAWAH INI:			
1.	TOTAL EFISIENSI HASIL ELIMINASI PROGRAM	84.950.928.556	
2.	TOTAL ANGGARAN BELANJA NON PEGAWAI	= 739.278.481.173,00	isikan hanya angka saja
3.	PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN	=	<u>11%</u>
*Mohon untuk mengisi sheet Rincian Eliminasi Program terlebih dahulu			
** Mohon hanya mengisi data yang valid dan memiliki dokumen pendukung			

Tabel. 3.38. Eliminasi Program

No.	Nama Program	Nilai Efisiensi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.571.417.158,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.981.587.985,41
3	Program peningkatan disiplin aparatur	124.728.500,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	768.309.381,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	290.247.403,00
6	Program Keluarga Berencana	127.861.320,00
7	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	548.600,00
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	134.770.151,00
9	Program pembangunan jalan dan jembatan	1.908.573.721,67
10	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	136.318.300,00
11	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	6.233.917,00
12	Program Penataan Administrasi Kependudukan	25.758.941,00
13	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	11.486.207,00
14	Program Pendidikan Anak Usia Dini	374.005.239,00
15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	60.777.825,00
16	Program pengembangan data/informasi	150.327.997,00
17	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	908.193.538,00
18	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	29.857.514,00
19	Program Pengembangan Nilai Budaya	84.109.088,00
20	Program Pengembangan Perumahan	11.909.550,00
21	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	3.599.740.100,00
22	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	588.202.909,00
23	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	966.051.150,00
24	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	52.335.391,00
25	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	23.356.600,00
26	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	35.853.432,00
27	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	5.960.562,00
28	Program Kerjasama Pembangunan	115.129.768,00
29	Program Lingkungan Sehat Perumahan	263.994.445,00

No.	Nama Program	Nilai Efisiensi
30	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	266.369.222,00
31	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.770.286.888,62
32	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.920.000,00
33	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	59.972.154,00
34	Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.106.800,00
35	Program pengembangan industri kecil dan menengah	138.317,00
36	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	5.017.206,00
37	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	14.304.941,00
38	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	34.129.138,00
39	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.084.196,00
40	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	24.101.505,00
41	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	144.938.500,00
42	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4.267.250,00
43	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	31.088.213,00
44	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	4.570.200,00
45	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2.084.155.041,00
46	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.843.098.848,97
47	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	5.204.678,00
48	Program pelayanan kontrasepsi	41.168.017,00
49	Program pembangunan turap/talud/bronjong	73.684.908,37
50	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	1.256.195.336,00
51	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.016.500,00
52	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	140.833.000,00
53	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.391.000,00
54	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	354.862,00
55	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	0,00
56	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.522.019.776,00
57	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	1.101.500,00
58	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	3.180.061,00
59	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	137.758.756,00
60	Program peningkatan pelayanan angkutan	15.363.410,00
61	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	457.480,00
62	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	17.660.600,00
63	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	4.811.000,00
64	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	0,00
65	Program kerjasama informasi dengan mass media	321.216.835,00
66	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	15.266.000,00
67	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	2.380.405,00
68	Program Pendidikan Non Formal	4.093.000,00
69	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	6.209.400,00
70	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	68.503.239,28
71	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	38.626.050,00
72	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	717.467,00

No.	Nama Program	Nilai Efisiensi
73	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	269.257.000,00
74	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	24.633.768,00
75	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	24.053.433,00
76	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2.867.880.279,00
77	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	4.650.000,00
78	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	2.474.456,00
79	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	2.120.000,00
80	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	93.496.000,00
81	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	36.510.250,00
82	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.085.000,00
83	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	79.500,00
84	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	633.037,00
85	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	11.090.725,00
86	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.388.500,00
87	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	3.200.000,00
88	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	91.013.800,00
89	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	6.055.334,00
90	Program pengelolaan areal pemakaman	54.997.220,00
91	Program pengembangan budidaya perikanan	33.751.424,00
92	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	700.400,00
93	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	17.277.500,00
94	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.454.800.200,00
95	Program peningkatan pengendalian polusi	280.000,00
96	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	388.953.443,00
97	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3.289.378,00
98	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3.638.244,00
99	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	10.025.000,00
100	Program pendidikan politik masyarakat	35.975.000,00
101	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	177.576,00
102	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	124.909.134,00
103	Program pengembangan perikanan tangkap	37.291.880,00
104	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	15.331.500,00
105	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100.000,00
106	Program perencanaan pembangunan daerah	175.413.787,00
107	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	201.387.209,00
108	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	76.011.986,00
109	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	9.719.000,00
110	Program peningkatan produksi hasil peternakan	67.390.600,00
111	Program perencanaan pembangunan ekonomi	58.348.422,00
112	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	69.789.412,00
113	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1.268.099,00
114	Program Penataan Struktur Industri	0,00

No.	Nama Program	Nilai Efisiensi
115	Program pengelolaan areal pemakaman	1.290.945,00
116	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0,00
117	Program Peningkatan Dukungan Pendidikan Bagi Mahasiswa	106.040.479,00
118	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	234.733.938,00
119	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	9.236.081,00
120	Program perencanaan sosial dan budaya	70.504.382,00
121	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	862.924.065,24
122	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	6.202.650,00
123	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.034.800,00
124	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	788.962.533,87
125	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	75.462.404,00
126	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	12.506.329,00
127	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.850.000,00
128	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	118.386.045,00
129	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	36.037.000.000,00
130	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	417.705.866,76
131	Program Pengembangan Kemitraan	73.178.300,00
132	Program Pengendalian Penduduk	27.640.976,00
133	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	9.726.400,00
134	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	10.689.750,00
135	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	2.860.002,00
136	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	49.705.844,00
137	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	11.044.326.335,00
138	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	287.243.003,00
139	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	18.203.907,00
140	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	554.878.840,00
141	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	402.655.105,00
142	Program Pengendalian Banjir	209.806.211,00
143	Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	492.251.590,00
144	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	535.717.970,00
145	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	513.210.800,00
146	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	24.611.252,00
147	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	3.306.250,00
148	Program Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air Daerah Imbuhan Air Tanah	23.292.736,00
149	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	536.133.672,00
150	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.956.000,00
151	Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari Besar	51.320.000,00
152	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	36.217.808,00
153	Program Perencanaan Tata Ruang	54.659.892,00
154	Program Pemanfaatan Ruang	9.282.500,00
155	Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan	97.258.023,00
156	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	26.789.200,00

No.	Nama Program	Nilai Efisiensi
157	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	320.000,00
158	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di RSUD	247.191.916,00
159	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	(17.760.127.399,38)
160	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100.000,00
161	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	6.489.750,00
162	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se Kota Dumai	16.106.338,00
163	Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	1.516.357.267,13
164	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	100.133.857,00
165	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	331.099.785,00
166	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	0,00
167	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00
168	Program Reformasi Birokrasi	13.638.267,00
	Total Efisiensi	84.950.928.556

D. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Pada Sasaran 1.2 : Meningkatnya infrastruktur perkotaan, dengan Indikator Kinerja Utama “Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik” dengan target 2019 sebesar 57,59% dan realisasi sebesar 37,45% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 65,03%.

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 391.923.850,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 118.331.100,00 atau sebesar 30,19 % yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Kota
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 65.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.370.000,00 dan atau sebesar 19,03 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.
- b) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Timur
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 65.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.920.000,00 dan atau sebesar 7,57% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karena tidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.
- c) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Barat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 52.600.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 23.260.000,00 dan atau sebesar 44,22% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %.Kegiatan ini tidak mencapai target karenatidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.

d) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Dumai Selatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.040.000,00 dan atau sebesar 40,11% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %.Kegiatan ini tidak mencapai target karenatidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.

e) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Bukit Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 35.768.350,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 21.160.000,00 dan atau sebesar 59,16% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %.Kegiatan ini tidak mencapai target karenatidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.

f) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Medang Kampai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 77.155.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.326.200,00 dan atau sebesar 12,09% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0%.Kegiatan ini tidak mencapai target karenatidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.

g) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Sungai Sembilan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 61.400.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.254.900,00 dan atau sebesar 54,16% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Ruas Jalan Lingkungan (semenisasi) yang dibangun dengan target 6 Ruas atau capaian realisasi 0 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karenatidak ada kegiatan fisik maupun belanja modal.

2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 7.448.309.150,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 5.837.817.467,38 atau sebesar 78,38% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.891.401.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.015.644.700,00 dan atau sebesar 69,71% adapun indikator kinerja keluaran

adalah Jumlah Panjang Saluran drainase yang dipelihara dengan target 3 KM atau capaian realisasi 100%.

3. Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 1.978.402.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 462.045.232,87 atau sebesar 23,35% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.978.402.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 462.045.232,87 dan atau sebesar 23,35% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibangun dengan target 4 Unit atau capaian realisasi 50 %. Kegiatan ini tidak mencapai target karena Belum mendapatkan izin dari Dinas Kehutanan Prov Riau.

E. Realisasi Anggaran Tahun 2019

**Tabel. 3.39. Realisasi Anggaran sesuai Perubahan Perjanjian Kinerja 2019
Pemerintah Kota Dumai**

Tujuan / Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	
Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar					
Tujuan 1 :	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar				
Sasaran 1.1 :	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	20.724.363.802	20.017.909.268	96,59
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	119.301.000	108.611.250	91,04
		Jumlah	20.843.664.802	20.126.520.518	96,56
Sasaran 1.2 :	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8.395.082.840	8.156.623.790	97,16
		Program Perencanaan Tata Ruang	799.247.500	744.773.161	93,18
		Program Pemanfaatan Ruang	269.928.600	260.646.100	96,56
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	108.296.100	81.506.900	75,26
		Program pembangunan jalan dan jembatan	73.796.687.937	73.396.339.134	99,46
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	391.923.850	118.331.100	30,19
		Program			92,45

Tujuan / Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	
		lingkungan sehat perumahan	3.364.627.300	3.110.550.855	
		Program Pengembangan Perumahan	542.876.000	534.888.614	98,53
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	7.448.309.150	5.837.817.467	78,38
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.147.217.200	3.096.432.400	98,39
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	5.270.629.050	4.457.857.125	84,58
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	392.684.200	264.754.000	67,42
		Program peningkatan pelayanan angkutan	1.408.028.410	1.189.427.500	84,47
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.670.643.000	1.556.147.000	93,15
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	507.000.000	489.722.500	96,59
		Program pengelolaan areal pemakaman	540.050.200	485.052.980	89,82
		Jumlah	108.053.231.337	103.780.870.626	96,05
Sasaran 1.3 :	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program peningkatan pengendalian polusi	85.000.000	84.720.000	99,67
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	236.200.152	183.228.511	77,57
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.064.655.100	7.762.610.859	96,25
		Jumlah	8.385.855.252	8.030.559.370	95,76
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing					
Tujuan 2 :	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan				
Sasaran 2.1 :	Meningkatnya partisipasi pendidikan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	528.780.250	468.725.945	88,64
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.668.255.400	1.466.868.191	87,93

Tujuan / Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1		2	3	4	5
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.464.316.980	2.135.311.741	86,65
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	36.037.000.000	36.037.000.000	100,00
		Jumlah	40.698.352.630	40.107.905.877	98,55
Sasaran 2.2 :	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	Program Pendidikan Non Formal	227.233.230	223.140.230	98,20
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.322.451.100	15.905.650.900	91,82
		Jumlah	17.549.684.330	16.128.791.130	91,90
Sasaran 2.3 :	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	63.253.448.839	61.410.349.989	97,09
		Jumlah	63.253.448.839	61.410.349.989	97,09
Tujuan 3 :	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Sasaran 3.1 :	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	84.210.000	79.254.000	94,11
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	72.005.000	70.988.500	98,59
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.589.638.536	1.513.626.550	95,22
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	16.036.436.930,24	15.269.332.243	95,22
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	19.593.399.691	19.175.693.824	97,87
		Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	453.173.700	446.683.950	98,57
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	952.184.750	827.275.616	86,88
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	386.380.000	360.991.500	93,43
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	131.912.250	128.606.000	97,49
		Jumlah	39.299.340.857	37.872.452.183	96,37

Tujuan / Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	
Sasaran 3.2 :	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	53.181.650.000	29.683.499.162	55,82
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	3.666.600.000	2.706.398.863	73,81
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	33.871.283.014	31.894.442.737	94,16
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.055.000.000	2.775.935.773	68,46
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	423.914.000	328.094.622	77,40
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	10.080.830.000	8.742.405.000	86,72
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	97.039.160.000	114.799.287.399	118,30
		Jumlah	202.318.437.014	190.930.063.556	94,37
Tujuan 4 :	Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga				
Sasaran 4.1 :	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	687.176.150	682.908.900	99,38
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	928.487.650	789.899.850	85,07
		Jumlah	1.615.663.800	1.472.808.750	91,16
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan					
Tujuan 5 :	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat				
Sasaran 5.1 :	Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	646.264.000	607.637.950	94,02
		Jumlah	646.264.000	607.637.950	94,02
Sasaran 5.2 :	Menurunnya persentase penduduk miskin	Program Pembinaan Anak Terlantar	-	-	
		Program pembinaan para	199.276.205	196.895.800	98,81

Tujuan / Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1		2	3	4	5
		penyandang cacat dan trauma			
		Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	140.658.054	138.183.598	98,24
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	181.375.500	175.320.166	96,66
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	297.457.100	293.818.856	98,78
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	560.233.000	553.999.083	98,89
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.033.872.120	1.004.718.901	97,18
		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	272.379.207	269.663.200	99,00
		Jumlah	2.685.251.186	2.632.599.604	98,04
Sasaran 5.3 :	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	2.070.260.000	2.042.619.024	98,66
		Program Keluarga Berencana	2.093.553.750	99.299.600	4,74
		Program pelayanan kontrasepsi	1.606.190.300	1.565.022.283	97,44
		Jumlah	5.770.004.050	3.706.940.907	64,25
Sasaran 5.4 :	Meningkatnya lapangan kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	101.045.000	96.234.000	95,24
		Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	179.846.000	164.580.000	91,51
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	791.561.000	768.204.400	97,05
		Jumlah	1.072.452.000	1.029.018.400	95,95
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan					
Tujuan 6 :	Meningkatkan kualitas pelayanan publik				

Tujuan / Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	
Sasaran 6.1 :	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	314.879.500	306.474.068	97,33
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	162.939.000	162.567.500	99,77
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	458.584.700	398.612.546	86,92
		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	219.980.000	219.522.520	99,79
		Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	197.750.000	195.643.200	98,93
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.091.433.936	2.065.674.995	98,77
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	593.682.000	557.171.750	93,85
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	103.000.000	93.281.000	90,56
		Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	826.460.000	708.073.955	85,68
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	115.625.000	112.764.998	97,53
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.231.330.729	1.155.380.300	93,83
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.260.400.000	1.222.594.200	97,00
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	313.479.000	311.559.000	99,39
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	201.480.000	196.830.000	97,69
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	369.510.119	365.076.195	98,80

Tujuan / Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	724.273.559	663.487.811	91,61
		Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	41.035.470	40.486.870	98,66
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.314.744.225	1.280.615.087	97,40
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	496.358.500	493.178.439	99,36
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	521.146.330	496.512.562	95,27
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	393.840.000	393.840.000	100,00
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	711.724.750	711.724.750	100,00
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	73.130.000	57.480.000	78,60
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	653.290.000	446.890.000	68,41
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	895.500.000	895.500.000	100,00
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	190.884.109	190.884.109	100,00
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	436.925.000	433.525.000	99,22
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	885.900.000	885.900.000	100,00
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.000.000	50.000.000	100,00
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	361.422.000	361.422.000	100,00
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan	401.793.000	401.793.000	100,00

Tujuan / Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1		2	3	4	5
		RT			
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.413.000	50.143.000	99,46
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	443.280.000	443.280.000	100,00
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	870.300.000	870.300.000	100,00
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.000.000	48.229.000	96,46
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	580.850.000	577.530.000	99,43
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	953.982.000	953.767.000	99,98
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.000.000	49.815.000	99,63
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	529.830.000	529.347.350	99,91
		Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	969.870.000	969.765.000	99,99
		Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	99.070.548	81.318.500	82,08
		Jumlah	21.895.514.985	20.447.960.705	93,39
Sasaran 6.2 :	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	5.148.158.000	4.767.199.945	92,60
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3.865.366.034	3.521.303.860	91,10
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	390.000.000	374.668.500,00	96,07
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	623.693.080	564.987.822	90,59

Tujuan / Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1		2	3	4	5
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	8.612.193.540	7.663.979.228	88,99
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	80.780.200	69.061.987	85,49
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	204.618.000	203.900.533	99,65
		Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	30.865.000	30.825.000	99,87
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.172.642.500	3.142.784.986	99,06
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	232.351.438	227.146.760	97,76
		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	2.769.737.000	2.448.520.165	88,40
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	11.489.447.272	7.865.255.181	68,46
		Program perencanaan pembangunan daerah	1.791.033.600	1.453.253.717	81,14
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	289.411.955	238.425.985	82,38
		Program perencanaan sosial dan budaya	793.706.000	723.201.618	91,12
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.340.508.950	5.921.413.840	93,39
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	94.000.000	92.369.000,00	98,26
		Jumlah	45.928.512.569	39.308.298.127	85,59
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan					
Tujuan 7 :	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal				
Sasaran 7.1 :	Meningkatnya pendapatan petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	795.483.400	743.148.009	93,42

Tujuan / Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1	2	3	4	5	
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.217.932.650	948.675.650	77,89
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	325.000.000	324.920.500	99,98
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	237.470.000	234.270.000	98,65
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	799.190.600	732.100.000,00	91,61
		Program pengembangan budidaya perikanan	739.800.737	706.049.313	95,44
		Program pengembangan perikanan tangkap	700.272.280	662.980.400	94,67
		Jumlah	4.815.149.667	4.352.143.872	90,38
Sasaran 7.2 :	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1.216.859.000	1.192.757.495	98,02
		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	92.700.000	91.431.901	98,63
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	518.300.000	508.275.000,00	98,07
		Jumlah	1.827.859.000	1.792.464.396	98,06
Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah					
Tujuan 8 :	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi				
Sasaran 8.1 :	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	186.583.048	100.442.486	53,83
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.942.000.000	1.877.365.361	96,67
		Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	-	-	
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	76.148.185	76.009.868	99,82

Tujuan / Sasaran		Program	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	CAPAIAN KEUANGAN (%)
1		2	3	4	5
		Program peningkatan kemampuan teknologi industri	306.062.314	304.960.814	99,64
		Jumlah	2.510.793.547	2.358.778.529	93,95
Sasaran 8.2 :	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	314.879.500	306.474.068	97,33
		Jumlah	314.879.500	306.474.068	97,33
Misi 7 :Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu					
Tujuan 9 :	Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini				
Sasaran 9.1 :	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	726.132.000	623435000	85,86
		Program pengembangan Kemitraan	1.039.253.500	966.075.200	92,96
		Jumlah	1.765.385.500	1.589.510.200	90,04
Sasaran 9.2 :	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.050.000.000	2.012.000.000	98,15
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	4.361.217.540	3.830.103.868	87,82
		Jumlah	6.411.217.540	5.842.103.868	91,12

F. Penjabaran Realisasi Anggaran berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

1. Sasaran 1.1. Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 20.724.363.802 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.017.909.268,13 atau sebesar 96,59 %.

1) Kegiatan Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 9.093.117.400,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.954.253.700,00 dan atau sebesar 98,47 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan dengan target 90 KM

atau capaian realisasi 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan dengan target 90 KM atau capaian realisasi 100 %.

2) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 219.704.250,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 214.238.500,00 atau sebesar 97,51 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Saluran Irigasi yang yang di pelihara 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Kebutuhan Saluran Irigasi yang yang di pelihara 1 Tahun dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 100 %.

3) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu Air

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 627.227.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 467.741.000,00 dan atau sebesar 74,57 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pintu Air yang dipelihara dengan target 15 Unit atau capaian realisasi 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pintu Air yang dipelihara dengan target 15 Unit atau capaian realisasi 100 %.

4) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 659.961.050,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 579.052.500,00 dan atau sebesar 87,74 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan dengan target 1000 M atau capaian realisasi 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran sungai yang dibersihkan dengan target 1000 M atau capaian realisasi 100 %.

5) Kegiatan Pembangunan infrastruktur Air Bersih

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 10.124.353.602,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.802.623.568,13 dan atau sebesar 96,82 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Masyarakat yang terlayani air bersih dengan target 21500 Jiwa atau capaian realisasi 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Masyarakat yang terlayani air bersih dengan target 21500 Jiwa atau capaian realisasi 100 %.

b. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 119.301.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 108.611.250 atau sebesar 91,04 %.

1) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 119.301.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 108.611.250,00 dan atau sebesar 91,04 % Adapun indikator kinerja keluaran

adalah Jumlah Bangunan prasarana yang dibangun dengan target 1 Unit atau capaian realisasi 100 %.

2. Sasaran 1.2. Meningkatnya infrastruktur perkotaan

Dinas Perumahan dan Permukiman

a. Program Pengembangan Perumahan

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 542.876.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 534.888.614,- atau 98,53%.

1) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini di anggarkan dana sebesar Rp. 542.876.000,- dan telah di pergunakan sebesar Rp. 534.888.614,- atau realisasi sebesar 98,53% dengan indikator Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana rumah Sederhana Sehat.

b. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 8.395.082.840,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 8.156.623.790,- atau 97,16%.

1) Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur

Kegiatan pembangunan / peningkatan infrastruktur ini di anggarkan dana sebesar Rp. 8.395.082.840,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.156.623.790,- atau 97,16%. Dengan indikator Persentase infrastruktur lingkungan kawasan pemukiman yang layak dan baik.

c. Program pengelolaan areal pemakaman

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 540.050.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 485.052.980,- atau sebesar 89,82 %.

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dianggarkan dana sebesar Rp. 196.300.000,- dan telah dipergunakan sebesar Rp. 153.130.000,- atau terealisasi sebesar 78,01 %, adapun indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 799.247.500 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 744.773.161 atau sebesar 93,18 %.

1) Kegiatan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 799.247.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 744.773.161,00 dan atau sebesar 93,18 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Tahunan dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

b. Program Pemanfaatan Ruang

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 269.928.600 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 260.646.100 atau sebesar 96,56 %.

1) Kegiatan Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 799.247.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 744.773.161,00 dan atau sebesar 93,18 % adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Tahunan dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100 %.

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 108.296.100 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 81.506.900 atau sebesar 75,26 %.

1) Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 108.296.100,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 81.506.900,00 dan atau sebesar 75,26% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen pengawasan IMB dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

d. Program pembangunan jalan dan jembatan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 73.796.687.937,41 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 73.396.339.133,74 atau sebesar 99,46%.

1) Kegiatan Pembangunan Jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 69.160.198.461,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 68.806.251.733,74 dan atau sebesar 99,49% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang jalan yang dibangun dengan target 10 Km atau capaian realisasi 100%.

2) Kegiatan Pembangunan Jembatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.451.239.476,41 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.417.673.400,00 dan atau sebesar 99,25% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah jembatan yang dibangun dengan target 5 Unit atau capaian realisasi 100%.

3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 185.250.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 172.414.000,00 dan atau sebesar 93,07% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan bulanan kegiatan dengan target 5 Laporan atau capaian realisasi 100 %.

e. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 74.483.09.150 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.837.817.467,38 atau sebesar 78,38 %.

1) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4.556.907.950,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.822.172.767,38 dan atau sebesar 83,88% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara dengan target 1200 M atau capaian realisasi 100%

2) Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 2.891.401.200,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.015.644.700,00 dan atau sebesar 69,71%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Saluran drainase yang dipelihara dengan target 3 KM atau capaian realisasi 100%.

Dinas Perhubungan

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 5.270.629.050,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.457.857.125,- atau 84,58%.

1) Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 635,000,000,- dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 459,080,000,- atau 72.30 % dari anggaran.

2) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Sektor Perhubungan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 119,907,600,- dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 119,000,600,- atau 99.24 % dari anggaran.

2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 44,595,100,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar sebesar Rp. 41,395,100,- atau 92.82 % dari anggaran.

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp392.684.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 264.754.000,- atau 67,42% .

1) Kegiatan Rehabilitas/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 87,813,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 87,175,000,- atau 99.27 %.

2) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rambu, marka jalan, traffic light, warning light, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 304,871,200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 177,579,000,- atau 58.25 %.

c. Program peningkatan pelayanan angkutan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.408.028.410,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.189.427.500,- atau 84,47 %.

1) Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 941,520,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 837,870,000,- atau 88.99 %.

2) Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana jasa angkutan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 41,513,410,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28,200,000,- atau 67.93 %.

3) Kegiatan penyelenggaraan, pengendalian, dan pengamanan angkutan lebaran, natal, dan tahun baru

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 424,995,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 323,357,500,- atau 76.09 %

d. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.670.643.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.556.147.000,- atau 93,15%. Anggaran tersebut dialokasikan melalui kegiatan di bawah ini :

1) Kegiatan pengadaan rambu lalu lintas

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 330,000,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 266,987,000,- atau 80.91%.

2) Kegiatan pengadaan marka jalan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 699,888,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 667,515,000,- atau 95.37%.

3) Kegiatan operasi penertiban dan penegakan hukum

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 240,955,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 238,405,000,- atau 98.94 %.

4) Kegiatan Pengadaan *Traffic Light* dan *Warning Light*

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 299,700,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 287,080,000,- atau 95.75 %.

5) Kegiatan Pembangunan Trotoar, Median Jalan dan Pulau Jalan

Anggaran yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 100,100,000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 96,160,000,- atau 96.06 %.

Dinas Lingkungan Hidup

a. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.147.217.200 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.096.432.400 atau 98,39%.

1) Pengembangan Taman Rekreasi

Pada Kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 48.750.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.750.000,- atau sebesar 100%,

2) Pemeliharaan RTH

Pada Kegiatan ini alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.098.467.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.096.432.400,- atau sebesar 100%,

3. Sasaran 1.3. Meningkatnya kualitas lingkungan

Dinas Lingkungan hidup

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 8.064.655.100 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.762.610.859 atau 96,25%.

1) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

kegiatan penyediaan sarana dan prasarana sampah sebesar Rp. 2.211.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 2.132,315.000,- artinya secara anggaran yang tersedia dengan terealisasi mencapai 96.44 %. Rata rata timbunan sampah tahun 2019 pertahunnya mencapai, 63.510 m³/tahun sedangkan produksi timbunan volume sampah kota dumai sebesar 109.956,25 M3 /Tahun armada yang tersedia hanya 15 Truk 18 truck sampah dan 12 kontainer . artinya dengan armada yang tersedia produksi sampah pertahunnya hanya dapat ditanggulangi sebesar 63.510 m³/Tahun.

2) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.542.943.300,- dan realisasi keuangan Rp. 5.519.932400,- atau 100%. telah mencapai target yang diinginkan yaitu meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat.

b. Program peningkatan pengendalian polusi

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 85.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 84.720.000 atau 99,67%.

1) Pengujian polusi udara ambien

kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 85.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.720.000,- atau sebesar 99.67% dari dana yang dianggarkan tersebut telah dilakukan pengujian sample di 7 titik lokasi yang ada di kota dumai hasil pengujian parameter didapat tingkat plutan di kota dumai tidak ada yang melebihi nilai baku mutu(kategori baik)

4. Sasaran 2.1. Meningkatnya partisipasi pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.464.316.980 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.135.311.741 atau 86,65%.

1) Pembangunan gedung sekolah

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 33,278,900.00,- dan realisasi keuangan Rp 31,795,230.00,- atau 95.54%. Kegiatan Pembangunan gedung sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Tersedianya Sarana Pendidikan.

2) Penambahan ruang kelas sekolah

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 336,299,100.00,- dan realisasi keuangan Rp. 336,299,100.00,- atau 100%.

Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Bertambahnya ruang kelas yang dibangun.

3) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 200,000,000.00 dan realisasi keuangan Rp. 199,620,000.00,- atau 99.81%%. Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terlengkapinya alat praktik dan peraga siswa.

4) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp156,000,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 156,000,000.00,- atau 100%. Tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Ruang kelas yang direhabilitasi

5) Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 92,400,500.00,- dan realisasi keuangan Rp. 77,809,500.00 atau 84.21%.

6) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 143,030,780.00,- dan realisasi keuangan Rp. 128,857,900.00,- atau 90.09%. Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Meningkatkan prestasi kepala sekolah, guru dan siswa PAUD

7) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 196,642,400.00,- dan realisasi keuangan Rp. 183,050,400.00,- atau 93.09%. Kegiatan Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Tersusunnya Kurikulum dan Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD

- 8) Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 62,726,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 62,726,000.00,- atau 100.00%. Kegiatan Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Meningkatkan Kreatifitas Pendidik PAUD
- 9) Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 84,974,500.00,- dan realisasi keuangan Rp84,136,951.00,- atau 99.01%. Kegiatan Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Meningkatnya prestasi guru dan siswa PAUD
- 10) Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan TK Negeri
Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 678,964,800.00,- dan realisasi keuangan Rp. 655,380,660.00,- atau 96.53%. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Penyediaan dukungan operasional Tk Negeri
- 11) Pembangunan Prasarana Belajar SKB
Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 220,000,000.00,- dan realisasi keuangan Rp. 219,636,000.00,- atau 99,83%. Kegiatan Pembangunan prasarana belajar SKB tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Tersedianya Sarana Pendidikan

b. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.668.255.400 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.466.868.191 atau 87,93%.

- 1) Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 174,176,500.00,- dan realisasi keuangan Rp. 170,769,300.00,- atau 98.04%. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Tersedianya laporan monitoring yang efisiensi dan efektifitas.
- 2) Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 559,248,100.00,- dan realisasi keuangan Rp. 487,694,808.00,- atau 87.21%. Kegiatan Penerapan sistem dan informasi manajemen Pendidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Pembaharuan data siswa dapat update setiap bulan
- 3) Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 848,405,400.00,- dan realisasi keuangan Rp. 725,315,083.00,- atau 85.49%. Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu

Pendidikan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Peserta yang mengikuti kegiatan

4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini anggaran yang tersedia sebesar Rp. 86,425,400.00,- dan realisasi keuangan Rp. 83,089,000.00 atau 96.14%. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator terdatanya jumlah sarana dan prasarana sekolah

Dinas Perpustakaan dan Arsip

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 528.780.250 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 468.725.945 atau 88,64%.

1) Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah.

Dengan anggaran sebesar Rp.104.593.000,- dan terealisasi Rp. 102.929.800,- atau 98.41 %. Adapun *out put* dari penggunaan anggaran ini adalah jumlah perpustakaan yang dibina dengan target 4 perpustakaan atau terealisasi sebesar 98.41%, dan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase terbina nya perpustakaan umum, khusus dan perpustakaan sekolah dengan target 90 % perpustakaan dan terealisasi 98.41%.

2) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.103.566.000,- dan realisasi Rp. 92.961.000,- atau 89.76%. *Out put* dari kegiatan ini adalah jumlah lomba yang diadakan dengan target sebanyak 2 (dua) lomba dan teralisasi 100%. Sedangkan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase terlaksananya lomba perpustakaan dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 90% dan teralisasi 89.76%

3) Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.225.000.000,- dan realisasi Rp.190.506.050,- atau 84.67%. *Out put* dari kegiatan ini adalah jumlah koleksi perpustakaan dengan target sebanyak sebanyak 2.250 judul e-book dan teralisasi sebanyak 2.460 judul e-book. Sedangkan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase judul e-book yang tersedia didinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 90% dan teralisasi 90%.

4) Preservasi bahan pustaka (perawatan) dan perbaikan bahan pustaka

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.25.396.250,- dan realisasi Rp.24.270.000,- atau 95.57%. *Out put* dari kegiatan ini adalah jumlah koleksi perpustakaan yang dirawat dengan target sebanyak 200 eks dan teralisasi sebanyak 200 eks atau 100%. Sedangkan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase terawatnya bahan pustaka dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 90% dan terealisasi sebesar 100%.

5) Pengembangan otomasi perpustakaan (teknologi informasi perpustakaan)

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.70.225.000,- dan realisasi Rp.58.059.095,- atau 82.68%. *Out put* dari kegiatan ini adalah jumlah kegiatan otomasi perpustakaan yang dilaksanakan dengan target 1 aplikasi dan teralisasi 100%. Sedangkan *out come* dari kegiatan ini adalah persentase pengembangan otomasi perpustakaan yang dilaksanakan dinas perpustakaan dan kearsipan dengan target 90% dan terealisasi sebesar 100%.

5. Sasaran 2.2. Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar

a. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 17.322.451.100 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.905.650.900 atau 91,90%.

1) Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 231,566,000.00 - dan realisasi Rp. 178,966,000.00,- atau 77.29%. Kegiatan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terlaksananya pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian profesi pendidik dan tenaga kependidikan SD.

2) Pelaksanaan sertifikasi pendidik SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 507,400,000.00,- dan realisasi Rp. 456,299,700.00 atau 89.93%. Kegiatan Pelaksanaan sertifikasi Pendidik SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terlaksananya sertifikasi Pendidik SD

3) Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45,000,000.00,- dan realisasi Rp. 44,792,800.00 atau 99.54%. Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD

4) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 444,010,000.00 dan realisasi Rp. 441,110,100.00,- atau 99.35%. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendidik untuk memenuhi standar Kompetensi SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendidik yang memenuhi standar Kompetensi

5) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 393,995,000.00,- dan realisasi Rp. 390,900,000.00 atau 99.21%. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendidik untuk memenuhi standar Kompetensi SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendidik yang memenuhi standar Kompetensi

- 6) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) SD
 Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34,180,000.00,- dan realisasi Rp. 34,180,000.00,- atau 100.00%. Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terbinanya Kelompok Kerja Guru (KKG) SD
- 7) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) SMP
 Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35,385,000.00,- dan realisasi Rp. 35,280,000.00,- atau 99.70%. Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terbinanya Kelompok Kerja Guru (KKG) SMP.
- 8) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD
 Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13,623,800,000.00,- dan realisasi Rp. 12,402,600,000.00,- atau 91.04%. Kegiatan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terlaksananya Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD.
- 9) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP
 Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1,509,400,000.00,- dan realisasi Rp. 1,439,692,200.00,- atau 95.38%. Kegiatan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terlaksananya Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMP.
- 10) Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD
 Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 174,722,900.00,- dan realisasi Rp. 174,512,900.00 atau 99.88%. Kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terlaksananya Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SD
- 11) Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP
 Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 152,640,500.00,- dan realisasi Rp. 151,920,500.00 atau 99.53%. Kegiatan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terlaksananya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP
- 12) Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 170,351,700.00,- dan realisasi Rp. 155,396,700.00 atau 91.22%. Kegiatan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator Terlaksananya pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian profesi pendidik dan tenaga kependidikan SMP

6. Sasaran 2.3. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 63.253.448.838,59 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 61.410.349.988,75 atau 97,09%.

1) Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 19,345,000.00 dan realisasi Rp. 19,320,000.00 atau 99.87%. Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator Berkurangnya persentase masyarakat belum tamat SD/setara di Kota Dumai.

2) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 67,895,000.00,- dan realisasi Rp. 67,814,000.00 atau 99.88%. Kegiatan Penyelenggaraan Paket B Setara SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator Berkurangnya persentase masyarakat belum tamat SMP/setara di Kota Dumai

3) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 124,871,400.00,- dan realisasi Rp. 122,531,557.00 atau 98.13%. Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator Tercapainya Perhitungan Indikator SPM di Pendidikan Dasar di Kota Dumai

4) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 292,229,900.00,- dan realisasi Rp. 267,935,900.00 atau 91.69%. Kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator Meningkatnya kesadaran pendidikan bagi stakeholder dan penyusunan profil pendidikan Kota Dumai

5) Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5120274650,- dan realisasi Rp. 4950696955 atau 96,69%. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SMPN 1 tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator Terpenuhinya pelayanan Pendidikan.

- 6) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 497,041,870.00 dan realisasi Rp. 484,550,000.00 atau 97.49%. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah yang dibangun
- 7) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 788,000,000.00,- dan realisasi Rp. 788,000,000.00 atau 100.00%. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah rumah dinas guru/Penjaga sekolah yang dibangun.
- 8) Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 400,000,000.00,- dan realisasi Rp. 399,123,000.00 atau 99.78%. Kegiatan Penambahan ruang guru sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah ruang majelis guru yang dibangun.
- 9) Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula Tingkat SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200,000,000.00 dan realisasi Rp. 199,476,000.00 atau 99.74%. Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Ruang serba guna yang dibangun
- 10) Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8,427,531,153.00 dan realisasi Rp. 18,199,325,007.00 atau 97.29%. Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah ruang kelas yang di bangun.
- 11) Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 916,061,500.00,- dan realisasi Rp. 885,354,486.41 atau 96.65%. Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah ruang kelas yang di bangun.
- 12) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SMP
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 980,000,000.00,- dan realisasi Rp. 980,000,000.00 atau 100%. Kegiatan Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah laboratorium yang dibangun.
- 13) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2,176,000,000.00 dan realisasi Rp. 2,172,056,000.00 atau 99.82%. Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah sekolah yang dibangun taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

14) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 400,000,000.00 dan realisasi Rp. 399,352,000.00 atau 99.84%. Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah sekolah yang dibangun taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

15) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 723,202,600.00,- dan realisasi Rp. 695,253,050.00 atau 96.14%. Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terselenggaranya UN dan US SD/MI

16) Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 400,585,300.00,- dan realisasi Rp. 375,673,300.00 atau 93.78%.

Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terselenggaranya UN dan US SMP/MTs

17) Pengadaan mebeluer sekolah Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3,950,251,059.59 dan realisasi Rp. 3,881,331,000.00 atau 98.26%. Kegiatan Pengadaan mebeluer sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Tercukupinya kebutuhan Mebeleur Sekolah

18) Pengadaan mebeluer sekolah Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1,492,000,000.00,- dan realisasi Rp. 1,384,898,000.00 atau 92.82%. Kegiatan Pengadaan mebeluer sekolah Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Tercukupinya kebutuhan Mebeleur Sekolah

19) Pembangunan gedung sekolah Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1,045,947,200.00,- dan realisasi Rp. 1,038,142,428.00 atau 99.25%. Kegiatan Pembangunan gedung sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah tingkat SD

20) Pembangunan gedung sekolah Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1,956,308,506.00,- dan realisasi Rp. 1,937,439,727.00 atau 99.04%. Kegiatan Pembangunan gedung sekolah Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator terpenuhnya kebutuhan gedung sekolah.

21) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4,228,000,000.00,- dan realisasi Rp. 4,119,932,000.00 atau 97.44%. Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah WC dan sumur bor yang dibangun.

- 22) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 222,000,000.00 dan realisasi Rp. 221,740,000.00 atau 99.88%. Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah WC dan sumur bor yang dibangun.
- 23) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1,290,000,000.00 dan realisasi Rp. 1,290,000,000.00 atau 100.00%.
Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP Jumlah tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator perpustakaan sekolah yang dibangun.
- 24) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12,515,000,000.00 dan realisasi Rp. 12,264,156,043.34 atau 98.00%. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi.
- 25) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2,287,200,000.00,- dan realisasi Rp. 2,277,168,000.00 atau 99.56%. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah ruangan sekolah yang Rehabilitasi.
- 26) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 278,186,700.00,- dan realisasi Rp. 278,184,069.00 atau 100.00%. Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan
- 27) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SMP
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 257,290,000.00 dan realisasi Rp. 257,290,000.00 atau 100.00%. Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan
- 28) Pengadaan perlengkapan sekolah Tingkat SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1,030,000,000.00 dan realisasi Rp. 870,000,000.00 atau 84.47%. Kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Tercukupinya kebutuhan perlengkapan sekolah.
- 29) Pengadaan perlengkapan sekolah Tingkat SMP
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 603,750,000.00 dan realisasi Rp. 207,350,000.00 atau 34.34%. Kegiatan Pengadaan perlengkapan sekolah Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Tercukupinya kebutuhan perlengkapan sekolah
- 30) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SD
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 333,000,000.00 dan realisasi Rp. 333,000,000.00 atau 100.00%. Kegiatan Pengadaan alat praktik dan

peraga siswa Tingkat SD tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terpenuhinya Kebutuhan Alat Praktik Peraga Siswa

31) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8,475,694,500.00,- dan realisasi Rp. 8,287,633,830.00 atau 97.78%. Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tingkat SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indicator Terpenuhinya kebutuhan alat praktik peraga siswa

32) Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1,755,782,500.00,- dan realisasi Rp. 1,755,623,636.00 atau 99.99%. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP tingkat capaian sebesar 100% dengan indikator Terpenuhinya indeks kebutuhan siswa per tahun yang disubsidi

7. Sasaran 3.1. Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan

a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2019 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 386.380.000,- Dari anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 360.991.500,- atau sebesar 93,43%.

a) Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp158.886.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp142.297.500,- atau sebesar 89,56% dari anggaran. Adapun indicator kinerja keluaran adalah jumlah pembinaan kelurahan siaga aktif 20 kelurahan dengan realisasi 100% dari target kinerja.

b) Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 162.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 153.400.000,- atau sebesar 94,57% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran pelaksanaan lomba posyandu teladan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

c) Peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.65.294.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp65.294.000 atau sebesar 100% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah tenaga kesehatan yang dilakukan verifikasi perizinannya 20 orang, jumlah puskesmas yang dibina 10 puskesmas, jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 20 tempat, jumlah puskesmas yang

memiliki 5 jenis ketenagaan 10 puskesmas, dan jumlah PNS berprestasi yang mendapatkan penghargaan 9 orang dengan realisasi sebesar 100%.

b. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Pada tahun 2019 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 131.912.250. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 128.606.000 atau sebesar 97,49%.

a) Kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp16.162.250 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 14.625.000 atau sebesar 90,49% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan evaluasi SDIDTK di 10 puskesmas, pelaksanaan supervisi fasilitatif kesehatan anak 10 puskesmas dengan realisasi sebesar 100%.

b) Kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp115.750.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp113.981.000 atau sebesar 98.47% dari anggaran. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan pertemuan penguatan kapasitas petugas program anak 1 kali, pelaksanaan bimbingan teknis program kesehatan anak 1 kali, dan monitoring pelaksanaan SHK (Skrining Hipotyroid Kongenital) di puskesmas 10 puskesmas semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

c. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2019 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 16.036.436.930,24,-. Dari total anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 15.269.332.243,- atau sebesar 95,22%.

a) Kegiatan penyusunan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp81.078.200,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp59.845.000,- atau sebesar 73.81%. indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) yang dihasilkan, jumlah dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dihasilkan, jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan, dan jumlah dokumen Musrenbang Dinas Kesehatan yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

b) Kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp52.295.510 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp24.450.000 atau sebesar 46.75%. Pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan yang dihasilkan, jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dihasilkan per tahun, dan jumlah dokumen DHA yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

- c) Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.418.925.269,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.332.429.996,- atau sebesar 93.90%. Pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah pertemuan validasi data yang dilaksanakan, jumlah pertemuan evaluasi pengelola SIK yang dilaksanakan, jumlah dokumen profil kesehatan yang dihasilkan, jumlah dokumen informasi ringkas kesehatan yang dihasilkan, jumlah puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan dan jumlah rumah sakit yang melaksanakan sistem informasi kesehatan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

- d) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp95.600.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp84.050.000,- atau 87.92%. Pencapaian indikator kinerja keluaran untuk jumlah dokumen evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan kematian yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan tahunan yang dihasilkan, jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang dihasilkan dan jumlah dokumen LPPD dan LKPJ Dinas Kesehatan yang dihasilkan semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

- e) Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp2.126.767.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.972.775.098,- atau sebesar 92.76%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja

- f) Kegiatan BLUD Puskesmas Dumai Barat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.100.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.044.963.928 atau sebesar 95.00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

- g) Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.330.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.307.669.371 atau sebesar 98.32%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

- h) Kegiatan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 2.251.676.960 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp2.245.673.027

atau sebesar 99,73%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

i) Kegiatan BLUD Puskesmas Medang Kampai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp871.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp848.475.497 atau sebesar 97,41%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

j) Kegiatan BLUD Puskesmas Bumi Ayu

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.288.354.450 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.161.764.775 atau sebesar 90,17%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

k) Kegiatan BLUD Puskesmas Bukit Timah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp509.875.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp503.952.425 atau sebesar 98,84%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

l) Kegiatan BLUD Puskesmas Jaya Mukti

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp2.290.934.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp2.289.646.721 atau sebesar 99,94%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas dengan cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

m) Kegiatan BLUD Puskesmas Purnama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp937.190.891,24 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp916.678.104 atau sebesar 97,81%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

n) Kegiatan BLUD Bukit Kayu Kapur

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.682.738.650 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp1.476.958.301 atau sebesar 87,77%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan yang berkualitas cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

d. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2019 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 72.005.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.70.917.000 atau sebesar 98,59%.

a) Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp72.005.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp70.988.500 atau sebesar 98,59%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah apotik yang diawasi dan di bina 30 sarana, jumlah toko obat yang diawasi dan dibina 30 sarana, jumlah IRTP yang diawasi dan dibina 50 sarana, jumlah toko makanan-minuman yang diawasi dan dibina 30 sarana dan jumlah puskesmas yang diawasi dan dibina 10 puskesmas semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pada tahun 2019 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 952.184.750,- Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 827.275.616,- atau sebesar 86,88%.

a) Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp952.184.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp827.275.616,- atau sebesar 86,88%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sarana air bersih yang dihasilkan 2 dokumen, dokumen pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M yang dihasilkan 2 dokumen, dokumen pelaksanaan survey study EHRA 1 kali semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pada tahun 2019 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.589.638.536,- Dari total anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp 1.513.626.550,- atau sebesar 95,22%.

a) Kegiatan penyemprotan/*fogging* sarang nyamuk

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp451.713.300 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp450.592.750,- atau sebesar 99,75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelaksanaan fogging fokus sebanyak 218 semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

b) Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp217.154.450,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.217.154.200 atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran untuk jumlah ketersediaan insektisida DBD 296 liter dan jumlah ketersediaan swingfog 2 unit semuanya mencapai cakupan 100 % dari realisasi target kinerja.

c) Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp104.947.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp73.740.000 atau sebesar 70,26%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaan catch up campaign campak SD di 29 SD dan pelaksanaan pelayanan bulan imunisasi anak sekolah dengan realisasi semuanya sebesar 100%.

d) Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp583.618.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp575.710.000,- atau sebesar 98,65%. pencapaian indikator kinerja keluaran untuk terlaksananya larvasidasi massal, Pelaksanaan PE DBD larvasidasi selektif, Pelaksanaan penemuan BTA(+) TB Paru, pelaksanaan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan pelaksanaan pengendalian penyakit IMS semuanya mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

8. Sasaran 3.2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Dinas Kesehatan

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2019 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 33.871.283.014,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 31.894.442.737,- atau sebesar 94,16%.

a) Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.11.035.196.036,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 10.454.148.448,- atau sebesar 94,73%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelaksanaan pelayanan JKN di puskesmas dan pembinaan pelayanan jaminan kesehatan dengan realisasi sebesar 100%.

b) Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.226.590.278,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 8.985.454.849,- atau sebesar 97,98%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini jumlah pengadaan peralatan kesehatan puskesmas dan jaringannya, dengan realisasi semuanya sebanyak 100%.

c) Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 89.222.700,-. dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 89.090.000 atau sebesar 99,85%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelatihan mutu kader posyandu dan pelacakan kasus balita BGM, Gizi Kurang dan Gizi Buruk dengan realisasi semuanya 100%.

d) Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 240.605.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 173.369.500,- atau sebesar 72,06%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah pelacakan kasus kematian ibu dan bayi, pelaksanaan pertemuan audit maternal perinatal (AMP), penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK), jumlah pembahasan

kasus kematian ibu dan bayi serta jumlah pelaksanaan konsultasi dokter Sp. OG dalam rangka penurunan AKI dengan realisasi semuanya 100%

e) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan khusus

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 42.122.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 42.122.500,- atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah jumlah puskesmas yang mendapat pembinaan program kesehatan indera, dan jumlah sekolah yang dilakukan penjangkaran kesehatan dengan realisasi semuanya 100%.

f) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 13.199.480.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 12.059.220.840,- atau sebesar 91,92%. Adapun indikator keluaran kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan pembinaan manajemen puskesmas, Jumlah pelaksanaan pembinaan perkesmas kewilayahan, jumlah anak yang mendapatkan pelayanan sunat masal, jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat kacamata gratis, jumlah puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi puskesmas dan jumlah pelaksanaan kegiatan perkesmas dengan realisasi semuanya 100%.

g) Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.118.065.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.91.036.500,- atau sebesar 77,11%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah sarana pelayanan kesehatan di RS, Rad, Lab yang dibina, pelaksanaan sistem pelaporan SIMRS, dengan realisasi 100%, pelaksanaan pelayanan kesehatan dokter spesialis ke puskesmas dengan realisasi 50%, dan pelaksanaan visitasi supervisi pelayanan rumah sakit kota dumai mencapai cakupan 100% dari realisasi target kinerja.

Rumah Sakit Umum Daerah

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk program ini, jumlah anggaran sebesar Rp 4.055.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.775.935.773,- atau 68,46%.

- a) Pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.055.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.959.925.236,- atau 97,66%. Adapun indikator outputnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Kota Dumai dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bualan atau 100%.

b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 423.914.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 328.094.622 atau 77,40%.

- a) Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar Pelayanan Kesehatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 423.914.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.328.094.622

atau 90,40%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pelaksanaannya akreditasi RSUD hasil terlaksannya akreditasi RSUD.

c. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 53.181.650.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 29.683.499.162,- atau 55,82%.

- a) Pada kegiatan Pembangunan rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.547.374.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.894.132.665,- atau 60,68%, Tidak teralisasi dengan maksimal dikarenakan pihak ke 3 tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- b) Pada kegiatan Pengadaan alat-alat rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.408.873.759,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.058.106.684,- atau 93,69%, Adapun indikator Pengadaan alat-alat rumah sakit dengan target 100% dan realisasi 100% atau capaian sebesar 100%.
- c) Pada kegiatan Pengadaan obat-obatan rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.634.098.141,- dengan realisasi sebesar Rp.4.623.626.116,- atau 99,77%. Adapun indikator output Penyediaan Obat-obatan Rumah Sakit Rumah Sakit dengan target 100% dan realisasi sebesar 100% atau capaian 100%.
- d) Pada kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 46.601.000 dengan realisasi Rp. 45.781.450,- atau 98,24%. Adapun indikator output Terlaksannya pengadaan rumah sakit dengan target 100% dan realisasi sebesar 100% atau capaian 100%.
- e) Pada kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit anggaran sebesar Rp. 2.212.703.100 dengan realisasi sebesar Rp.2.197.430.700,- atau 99,31%. Adapun indikator output Penyediaan bahan-bahan Logistik Rumah dengan target 2 kegiatan dengan realisasi 2 kegiatan atau capaian 100%.
- f) Pada kegiatan Pengadaan logistik keperawatan rumah sakit sebesar Rp.332.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 318.246.050,- atau 95,86%. Adapun indikator out put Pelaksanaan Logistik Keperawatan dengan target 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan atau capaian 100%.

d. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.666.600.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.706.398.863,- atau 73,81%.

- a) Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.386.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.100.277.000,- atau 91,55%, adapun indikator output Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit dengan target 100% dan realisasi 100% atau capaian 100%.
- b) Pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakitdialokasikan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 279.999.997,- atau 100 %. Adapun indikator output Pelaksanaan

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan atau capaian 100%.

e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 10.080.830.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 8.742.405.000 atau 86,72%.

- a) Pada kegiatan Pelayanan tenaga para medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.920.830.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.680.259.500,- atau 97,58%. Adapun indikator output terbayarnya Insetif Kesehatan dengan target 584 orang dengan realisasi 584 orang, atau capaian sebesar 100%.
- b) Pada kegiatan Pelatihan dan pendidikan tenaga keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dialokasikan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 158.378.584,- atau 95,86%. Adapun indikator Penyediaan Jumlah Keperawatan yang mengikuti Pelatihan Meningkatkan Kompe dengan target 1 kegiatan dan realisasi sebesar 1 kegiatan atau capaian 100%.

9. Sasaran 4.1. Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

a. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 687.176.150,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 682.908.900,- atau sebesar 99,38%.

- a) Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Paskibraka
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 544.452.891,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 541.757.100,- dan atau sebesar 99,50%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah anggota pengibar bendera pada peringatan HUT RI di Kota Dumai dengan target 35 orang atau capaian realisasi 100%.
- b) Kegiatan Seleksi dan pembinaan pemuda marchingband
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 142.723.259,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 141.151.800,- dan atau sebesar 98,90%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta macrhinband yang dilatih dengan target 60 orang atau capaian realisasi 100%.

b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 928.487.650,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 789.899.850,- atau sebesar 85,07%.

a) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 105.421.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 104.820.000,- dan atau sebesar 99,43%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah bulan pelaksanaan senam kesegaran jasmani (Car Free Day) dengan target 11bulan atau capaian realisasi 100%.

b) Kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 108.470.000,- dan atau sebesar 90,39%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah cabang olahraga yang dilaksanakan antar pelajar dengan target 1 cabang yaitu lomba bola kaki SSB U12, lomba ini diikuti oleh klub SSB U 12 tidak hanya dari Dumai tapi juga diikuti oleh klub SSB dari kab/kota dan propinsi lainnya seperti Jambi, Padang dan Medan atau capaian realisasi 100%.

c) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 252.572.100,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 173.689.400,- dan atau sebesar 68.77%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kab/kota yang mengikuti kompetisi Bola Volly Walikota Cup dengan target 12 kab/kota atau capaian realisasi 100%.

10. Sasaran 5.1. Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pada tahun 2019, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 646.264.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 607.637.950,- atau 94,02%.

1) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 178.580.000,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 148.220.000,00 atau 83,00%. Adapun indikator output adalah terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dengan target 10 Koperasi atau capaian realisasi 100%.

2) Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.43.175.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp.42.475.000,- atau 98,38%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap koperasi di Kota Dumai dengan target 7 Kecamatan atau capaian realisasi 100%.

3) Pelatihan Perpajakan Bagi Pengurus Koperasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 66.509.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp. 66.309.000 atau 99,70%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pelatihan perpajakan bagi pengurus koperasi dengan target 25 Koperasi atau capaian realisasi 100%

4) Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 358.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp 350.633.950 atau 97,94%. Indikator kinerja kegiatannya yaitu keluarannya adalah

Terselenggaranya Pelatihan bagi insan perkoperasian, bagi pengurus / pengawas/anggota/ pengelola koperasi/pelaku usaha mikro/wirausaha muda/pemula dan tenaga pendamping yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan/ Sumber daya manusia.pelatihan ini dilaksanakan selama 12 hari dengan 3 angkatan, dengan target 143 Orang.

11. Sasaran 5.2. Menurunnya persentase penduduk miskin

Dinas Sosial

a. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 199.276.205,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 196.895.800,- atau 98,81%.

1) Kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.199.276.205,- dengan realisasi Rp. 196.895.800,- atau 98,81%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah para penyandang cacat dan trauma yang dilakukan pembinaan pendayagunaan dengan target 27 Orang.

b. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 181.375.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 175.320.166,- atau 96,66%.

1) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 62.675.500,- dengan realisasi Rp. 59.840.166,- atau 95,48%. Indikator kinerja kegiatannya adalah Jumlah pecandu narkoba yang direhab dipanti rehabilitasi kecanduan narkoba dan jumlah PMKS yang diberikan ilmu keterampilan berusaha dengan target 6 Orang.

2) Kegiatan Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial.

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 118.700.000,- dengan realisasi Rp. 115.480.000,- atau 97,29%. Indikator kinerja kegiatannya adalah gelandangan, pengemis yang dikembalikan ketempat asalnya dengan target 150 Orang.

c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 297.457.100,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 293.818.856,- atau 98,78%.

1) Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku- pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70.618.000,- dengan realisasi Rp. 68.876.264,- Atau 97,53%. Indikator kinerja kegiatannya adalah

Meningkatnya Pemahaman Dunia Usaha dalam keikutsertaan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan target 68 Orang.

- 2) Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 226.839.100, dengan realisasi Rp. 224.942.592,- Atau 99,16%. Indikator kinerja kegiatannya adalah Jumlah peningkatan kualitas SDM yang menjadi mitra kerja sosial dengan target 190 Orang.

d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Pada tahun 2019, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 560.233.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 553.999.083,- atau 98,89%.

- 1) Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 316.594.00,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 316.397.214,- atau 99,94%. Indikator kinerja kegiatannya yaitu tersedianya data PMKS dan PSKS dengan target 17.804 KK, tersedianya data Verivali PBI JKN dengan target 61.414 jiwa.

- 2) Kegiatan Pengembangan pendampingan Program Keluarga Harapan

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 243.639.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 237.397.214,- atau setara dengan 97,52%. Indikator kinerja kegiatannya yaitu tersedianya data dan pendampingan terhadap penerima PKH dengan target 6.186 KK

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 272.379.207,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 269.663.200, - atau sebesar 99,00%.

- 1) Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 272.379.207,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 269.663.200,- atau 99%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya pembinaan UMKM di setiap kecamatan dengan target 7 kecamatan atau capaian realisasi 100%

12. Sasaran 5.3. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

a. Program Keluarga Berencana

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk Rp. 2.093.553.750,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.965.692.430,- atau sebesar 93,89 %.

- 1) Kegiatan Pembinaan keluarga berencana

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 911.553.750,- terealisasi sebesar Rp. 897.749.430,- atau sebesar 98,49%. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah :

- a) Terbinanya kelompok kegiatan keluarga sejahteradengan target 7 Kelompok atau capaian realisasi 7 Kelompok atau 100%.
 - b) Terlaksananya Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kota Dumai dengan target 12 Bulan atau capaian realisasi 12 Bulan atau 100%.
- 2) Kegiatan Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
- Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 654.590.000,- terealisasi sebesar Rp. 552.525.000,- atau sebesar 84,41%. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas PP dan KB dengan target 128 Unit atau capaian realisasi 114 Unit atau 89,06%.
- 3) Kegiatan Pembangunan Balai Penyuluhan KB
- Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 527.410.000,- terealisasi sebesar Rp. 515.418.000,- atau sebesar 97,73%. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah Tersedianya pembangunan/ alih fungsi balai penyuluhan KB dengan target 2 Unit atau capaian realisasi 2 Unit atau 100%.

b. Program pelayanan kontrasepsi

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk Rp. 1.606.190.300 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.565.022.283,- atau sebesar 97,44 %.

1) Kegiatan Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.606.190.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.565.022.283,- atau 97,44%. Adapun Indikator kinerja keluaran adalah :

- a) Terselenggaranya kegiatan Pelayanan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara KB Kes, PKK KB Kes , MOP dan Daerah Galcitas dengan target 4 Kegiatan atau capaian realisasi 4 Kegiatan atau 100%
- b) Terselenggaranya Work Shop bagi Bendahara Materil dan Petugas Gudang Alkon dengan target 25 Faskes atau capaian realisasi 20 Faskes atau 80%
- c) Terselenggaranya Promosi Kespro pada PUS dengan target 1 Kegiatan atau capaian realisasi 1 Kegiatan atau 100%.

13. Sasaran 5.4. Meningkatnya Lapangan Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Pada Tahun 2019, jumlah Anggaran Rp. 101.045.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 96.234.000,- atau sebesar 95,24%.

1) Kegiatan Verifikasi SP/SB

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 101.045.000,- terealisasi sebesar Rp. 96.234.000,- dan atau sebesar 95,24%, Adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Dokumen Verifikasi SP/SB dengan target 1 Dokumen atau capaian realisasi 100%.

b. Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja

Pada Tahun 2019, jumlah Anggaran Rp. 179.846.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 164.580.000,- atau sebesar 91,51%.

1) Kegiatan Pembinaan Dewan Pengupahan

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 179.846.000,- terealisasi sebesar Rp. 164.580.000,- dan atau sebesar 91,51 %, Adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah rapat rutin Dewan Pengupahan Kota Dumai dengan target 5 kali atau capaian realisasi 100%.

c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pada Tahun 2019, jumlah Anggaran Rp. 791.561.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 768.204.400,- atau sebesar 97,05%.

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 791.561.000,- terealisasi sebesar Rp. 768.204.400,- dan atau sebesar 87,05%, Adapun Indikator Kinerja keluaran adalah Jumlah Tenaga Kerja yang terampil dan memiliki keahlian serta bersertifikasi dengan target 32 orang atau capaian realisasi 100 %.

14. Sasaran 6.1. Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 314.879.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 306.474.068 atau sebesar 97,33%.

1) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 162.939.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 162.567.500,-. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 162.939.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 162.567.500,- atau sebesar 99,77%.

1) Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Terpadu

Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 274.123.910,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 266.940.312,- atau sebesar 97,38%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah terlaksananya sosialisasi perizinan dan non perizinan dengan target 1 Kecamatan/Media atau capaian realisasi 100%.

2) Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 266.438.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 266.052.066,- atau sebesar 99,86% Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah terselenggaranya pelayanan

administrasi perizinan dan non perizinan dengan target 12 bulan atau capaian realisasi 100%.

3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 78.119.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.529.800,- atau sebesar 92,84%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya monitoring izin usaha dengan target 4 kali atau capaian realisasi 100%.

4) Kegiatan Pengawasan Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan.

Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 164.086.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 158.764.580,- atau sebesar 96,76%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah terlaksananya peningkatan pelayanan pengaduan perizinan dan non perizinan dengan target 15 berkas atau capaian realisasi 86,67%.

5) Kegiatan Survey Penerbitan Perizinan.

Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 217.530.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 120.150.000,- atau sebesar 55,23%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah izin usaha yang akan diterbitkan dengan target 3.300 izin.

Sekretariat Daerah

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 458.584.700 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 398.612.546 atau 86,92%.

1) Kegiatan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.281.226.900,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.221.276.762,- atau dengan persentase 78,68%. Adapun indikator kinerja terbitnya sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 18 persil dari target 10 persil dengan capaian kinerja 100%.

2) Kegiatan Inventarisasi, Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemerintah Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.177.357.800,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.177.335.784,- atau dengan persentase 99,99%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah data/persil tanah asset Pemerintah Kota Dumai sebanyak 33 persil dari target 15 persil dengan capaian kinerja 100%.

b. Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 219.980.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 219.522.520 atau 99,79%.

1) Kegiatan Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. Rp.219.980.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 219.522.520,- atau dengan persentase 99,79%. Adapun indikator kinerja keluaran

adalah jumlah konflik/permasalahan tanah di Daerah Kota Dumai yang terfasilitasi/terselesaikan yaitu realisasi data penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 7 kasus dari target dan realisasi 5 kasus dengan capaian kinerja adalah 100%.

c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 369.510.119 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 365.076.195 atau 98,80%.

1) Kegiatan Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.47.797.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. Rp.47.170.000,- atau 98,69%. Sedangkan untuk IKU adalah melalui pembinaan 196 posyandu aktif, yaitu adalah persentase meningkatnya posyandu aktif di Kota Dumai dengan target 196 posyandu aktif dan realisasi 196 posyandu aktif dengan persentase capaian kinerja adalah 100%.

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (PKK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.321.712.619,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.317.906.195,- atau 98,82%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) Kota Dumai adalah 3 kegiatan (HKG, jambore dan sosialisasi program PKK) dengan target dan realisasi 3 kegiatan atau dengan capaian kinerja 100%.

d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 724.273.559 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 663.487.811 atau 91,61%.

1) Kegiatan Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 304.070.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 303.849.378,- atau 99,93%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota Dumai, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Tahun 2019 dengan target dan realisasi 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%.

2) Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.85.936.240,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 84.332.432,- atau 98,13%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah informasi dan edukasi teknologi tepat guna dengan target dan persentase kinerja 100% yaitu lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat Kota Dumai pada tahun 2019.

3) Kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 216.772.419,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 216.721.101,- atau 99,99%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah kegiatan peningkatan kinerja melalui evaluasi perkembangan kelurahan sebesar 100%.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 197.750.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 195.643.200 atau 98,93%.

1) Pendataan akta kelahiran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.659.600,- (99,66%) dengan indikator kinerja keluaran persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran sebesar 95% dan terealisasi 92% (97%), dan persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 40% dan terealisasi 30% (76%).

2) Penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 97.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.983.600,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 98,19% dengan indikator kinerja keluaran jumlah dokumen Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen (100%).

b. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.091.433.936 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.065.674.995 atau 98,77%.

1) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.012.132.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 994.629.100,- (98,27%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah sistem kependudukan yang digunakan sebanyak 2 (dua) sistem dan terealisasi 2 (dua) sistem (100%).

2) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.601.936,- dengan realisasi sebesar Rp. 134.541.350,- (98,49%) dengan indikator kinerja keluaran jumlah laporan informasi data kependudukan sebanyak 2 (dua) laporan dan terealisasi 2 (dua) laporan (100%).

3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 578.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 573.915.700,- (99,29%) dengan indikator kinerja keluaran persentase peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 80% dan terealisasi 80% (100%).

4) Pengembangan data base kependudukan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 215.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 214.298.845,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 99,67% dengan indikator kinerja keluaran *updating data base* kependudukan dengan target 12 (dua belas) bulan dan terealisasi 12 (dua belas) bulan (100%).

5) Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 149.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 148.290.000,-. Tingkat pencapaian terealisasi sebesar 99,06% dengan indikator kinerja keluaran jumlah Laporan Kependudukan yang dapat diakses masyarakat sebanyak 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen (100%).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 593.682.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 557.171.750,- atau 93,85%:

1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.118.320.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 107.034.000,- atau 90,46% dengan indikator keluaran jumlah peralatan dan mesin serta mobil pemadam kebakaran yang diservis dengan target kinerja keluaran 14 unit.

2) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 475.362.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 450.137.750,- atau 94,69% dengan indikator keluaran jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran dan target kinerja keluaran 7 kecamatan.

b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp103.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 93.281.000,- atau 90,56%:

1) Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam.

Jumlah Anggaran sebesar Rp. 20.100.000,- dengan realisasi penyerapan Rp.13.800.000, atau 68,66% dengan indikator keluaran tercapainya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana se Kota Dumai dan target kinerja keluaran 12 bulan.

2) Identifikasi Potensi dan Dampak Bencana

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 82.900.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 79.481.000,- atau 35,08% dengan indikator keluaran tersedianya dokumen data informasi bencana dan target kinerja keluaran 1 dokumen.

c. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 826.460.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 708.073.955,- atau 85,68%:

1) Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 115.625.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 112.764.998,-

atau 97,53% dengan indikator keluaran jumlah kejadian penanganan bencana, target kinerja keluaran 100 kali kejadian (hotspot).

d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp 115.625.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 112.764.998,- atau 97,53%.

a. Koordinasi Penanggulangan Daerah Rawan Bencana

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 115.625.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 112.764.998,- atau 97,53% dengan indikator keluaran jumlah yang mengikuti rakor penanggulangan daerah rawan bencana, target kinerja keluaran 6 orang.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 1.231.330.729,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.155.380.300,- atau sebesar 93,83%.

- 1) Kegiatan penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini aparat intelijen daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 167.329.981 dan terealisasi sebesar Rp. 163.579.000 atau 97,76%. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat Tim Kewaspadaan di Kota Dumai dengan baik dan lancar dengan target kinerja sebanyak 23 orang dan terealisasi sebanyak 23 orang atau sebesar 100%.
- 2) Kegiatan pemantauan kegiatan dan aktifitas organisasi masyarakat/lembaga swadaya
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 158.407.000 dan terealisasi sebesar Rp. 148.381.200 atau 93,67%. Indikator kinerja kegiatannya yaitu terkumpulnya data ormas, LSM dan yayasan dengan target kinerja selama 7 bulan dan terealisasi sebanyak 7 bulan atau sebesar 100%.
- 3) Kegiatan pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 243.627.000 dan terealisasi sebesar Rp. 217.727.000 atau 89,37%. Indikator kinerja kegiatannya yaitu orang asing dan tenaga kerja asing yang dipantau dengan target kinerja selama 8 bulan dan terealisasi sebanyak 8 bulan atau sebesar 100%.
- 4) Kegiatan rumusan perencanaan dan kebijakan penanggulangan dan penyelesaian konflik daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 661.966.748 dan terealisasi sebesar Rp. 625.693.100 atau 94,52%. Indikator kinerja kegiatannya yaitu rencana dan kebijakan pencegahan dan penyelesaian konflik dengan target kinerja selama 9 bulan dan terealisasi sebanyak 9 bulan atau sebesar 100%.

Satuan Polisi Pamong Praja

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ini sebesar Rp. 1.260.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.222.594.200,- atau sebesar 97,00%.

- 1) Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dialokasikan sebesar Rp. 810.275.000,- dari dana yang di alokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp, 797.415.000,- atau sebesar 98.41%. Adapun indikator keluaran (output) kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dari target sebesar 12 Bulan terealisasi sebanyak 12 Bulan atau capaian kinerja sebesar 100%
- 2) Pengendalian Keamanan Lingkungan
dialokasikan dana sebesar Rp. 275.635.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 260.849.200,- Atau sebesar 94,63%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dari target sebesar 3 Kegiatan terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau capaian kinerja 100%.
- 3) Pembinaan dan Pendampingan Pengawas Perda di Kecamatan dan Kelurahan
dialokasikan dana sebesar Rp. 25.290.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 25.290.000,- Atau sebesar 100%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengawas Perda di Kecamatan dan Kelurahan dari target 12 Bulan terealisasi 12 Bulan atau capaian kinerja 100%.
- 4) Pengamanan dan Penertiban
dialokasikan dana sebesar Rp. 149.200.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 139.040.000,- Atau sebesar 93.19%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pengamanan dan Penertiban dari target 12 Bulan terealisasi 12 Bulan atau capaian kinerja 100%.

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal ini sebesar Rp. 313.479.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 311.559.000,- atau sebesar 99,39%.

- 1) Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja,
dialokasikan dana sebesar Rp. 4.425.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.425.000 atau sebesar 100%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dari target 1 kali terealisasi 1 kali atau capaian kinerja 100%.
- 2) kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dari target 1 kali terealisasi 1 kali atau capaian kinerja 100%. Adapun capaian

indikator keluaran (output) kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dari target 1 kali terealisasi 1 kali atau capaian kinerja 100%.

- 3) Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan,

dialokasikan dana sebesar Rp. 243.535.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 242.015.000,- atau sebesar 99.37%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan dengan target sebesar Jumlah Operasi Yustisi 2 kali terealisasi juga 2 kali dengan capaian kinerja 100%.

- 4) Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota Dumai, dialokasikan dana sebesar Rp. 65.519.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 65.119.000 atau sebesar 99.38%. Adapun capaian indikator keluaran (output) kegiatan Pengawasan Terhadap Penegakan Perda Perizinan dan Non Perizinan di Kota Dumai dengan target Pengawasan sebesar 200 pengusaha terealisasi juga 200 pengusaha dengan capaian kinerja 100%.

c. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan ini sebesar Rp. 201.480.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 196.830.000,- atau sebesar 97,69%.

- 1) Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat, dialokasikan dana sebesar Rp. 134.060.000 dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp 130.760.000 atau sebesar 97.53%. Adapun capaian indicator keluaran (output) kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat dari target 184 orang terealisasi sebanyak 184 orang atau capaian kinerja 100%.
- 2) Pemberdayaan Satlinmas Kota Dumai, dialokasikan dana sebesar Rp. 67.420.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 66.070.000 atau sebesar 97.99%. Adapun capaian indicator keluaran (output) kegiatan Pemberdayaan Satlinmas Kota Dumai dari target 1 kali terealisasi sebanyak 1 kali atau capaian kinerja 100%.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 410.35.470 dan terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 40.486.870 atau sebesar 98,66%.

- 1) Kegiatan perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan public
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 41.035.470,00 terealisasi sebesar Rp. 40.486.870,00 atau 98,66% dengan indikator keluaran dari kegiatan

ini yaitu terlaksananya kegiatan lokakarya agenda politik perempuan dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%.

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 1.314.744.225 dan terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.280.615.087 atau sebesar 97,40%.

- 1) Kegiatan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.373.971.510,00 dan terealisasi sebesar Rp.367.487.906,00 atau 98,27 dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya pendataan kelembagaan organisasi perempuan, gender, dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%,

- 2) Kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG).

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.31.872.495,00 dan terealisasi sebesar Rp.25.872.495,00 atau 81,17% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan target 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang atau 100%.

- 3) Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak .

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.98.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.97.004.300,00 atau 98,82% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya pembentukan dan pengukuhan forum anak 2019-2021 dengan target 100 orang dan terealisasi sebanyak 100 orang atau 100%.

- 4) Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.173.264.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.172.691.163,00 atau 99,67% dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu terselenggaranya bimbingan teknis sekolah ramah anak dengan target 30 orang dan terealisasi sebanyak 30 orang atau 100%.

- 5) Kegiatan pengembangan pusat layanan masyarakat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.198.668.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.198.050.526,00 atau 99,69% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dengan target 50 kasus dan terealisasi sebanyak 50 kasus atau 100%.

- 6) Kegiatan pelaksanaan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.161.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.160.649.856,00 atau 99,35% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terselenggaranya bimbingan teknis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) dengan target 20 Aktivistis PATBM dan terealisasi sebanyak 20 Aktivistis PATBM atau 100%.

- 7) Kegiatan pengembangan sistem informasi gender dan anak
 Anggaran yang tersedia sebesar Rp 177.487.420,00 dan terealisasi sebesar Rp.173.360.141,00 atau 97,67% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya profil data gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%, serta tersedianya media informasi dengan target 55% dan terealisasi 100%.
- 8) Kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG
 Anggaran yang tersedia sebesar Rp.99.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.85.498.700,00 atau 85,82% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%.

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 496.358.500 dan terealisasi sebesar Rp. 493.178.439 atau sebesar 99,36%.

- 1) Kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
 Anggaran yang tersedia sebesar Rp.171.414.000,00 terealisasi sebesar Rp.169.749.340,00 atau 99,03% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini adalah pelatihan keterampilan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan target kinerja sebanyak 35 orang, terealisasi sebanyak 35 orang atau 100%.
- 2) Kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
 Anggaran yang tersedia sebesar RP.113.459.000 terealisasi sebesar Rp.113.362.000,00 atau 99,91% dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT dengan target kinerja sebanyak 100 orang, terealisasi sebanyak 100 orang atau 100%.
- 3) Kegiatan workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga
 Anggaran yang tersedia sebesar Rp.49.157.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.171.124,00 atau 97,99% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya workshop peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan sebagai kepala keluarga dengan target 20 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 100%.
- 4) Kegiatan pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 Anggaran yang tersedia sebesar Rp.162.328.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 161.895.975,00 atau 99,73% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya upaya pencegahan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan pembinaan tim KDRT di kelurahan dengan target kinerja sebanyak 100% dan terealisasi 100%.

d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 521.146.330 dan terealisasi sebesar Rp. 496.512.562 atau sebesar 95,27%.

- 1) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.353.939.830,00 dan terealisasi sebesar Rp.344.775.439,00 atau 97,41%. dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan dengan target kinerja 35 organisasi dan terealisasi sebanyak 35 organisasi atau sebesar 100%,
- 2) Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.65.673.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.65.473.623,00 atau 99,70% dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) dengan target kinerja 10 kelurahan dan terealisasi sebanyak 10 kelurahan atau sebesar 100%, dan terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dengan target kinerja 1 kecamatan dan terealisasi sebanyak 1 kecamatan atau sebesar 100%.

Kecamatan Dumai Barat

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 393.840.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 393.840.000 atau 100 %.

- 1) Kegiatan Penilaian kinerja unit pelayanan publik.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 21.840.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 21.840.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba tingkat kecamatan dengan realisasi kinerja 100%.
- 2) Kegiatan Pembinaan pos pelayanan terpadu Kelurahan STDI.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 96.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 96.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan STDI dengan realisasi kinerja 100%.
- 3) Kegiatan Pembinaan pos pelayanan terpadu Kelurahan Pangkalan Sesai.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 84.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 84.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Pangkalan Sesai dengan realisasi kinerja 100%.
- 4) Kegiatan Pembinaan pos pelayanan terpadu Kelurahan Purnama.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 120.000.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Purnama dengan realisasi kinerja 100%.
- 5) Kegiatan Pembinaan pos pelayanan terpadu Kelurahan Bagan Keladi.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 72.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 72.000.000,- atau 100%.

Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader posyandu kesehatan balita dan usila di Kelurahan Purnama dengan realisasi kinerja 100%.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 711.724.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 711.724.750,- atau 100%.

1) Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan STDI.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 151.961.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 151.961.250,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan STDI dengan realisasi kinerja 100%.

2) Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pangkalan Sesai.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 167.942.750,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 167.942.750,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Pangkalan Sesai dengan realisasi kinerja 100%.

3) Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Purnama.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 239.859.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 239.859.500,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Purnama dengan realisasi kinerja 100%.

4) Kegiatan Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bagan keladi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 151.961.250,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 151.961.250,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pengurus LPMK dan Ketua RT yang dibina di Kelurahan Bagan Keladi dengan realisasi kinerja 100%.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 73.130.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 57.480.000 atau 78,60%.

1) Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 57.650.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 57.480.000,- atau 99,71%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tim penggerak PKK yang dibina Kecamatan dan Kelurahan dengan realisasi kinerja 99,71%.

2) Kegiatan Pembinaan PKK Kelurahan Purnama.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ini di APBD Perubahan sebesar Rp. 15.480.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah tim penggerak PKK yang dibina Kelurahan dengan realisasi kinerja 0%.

Kecamatan Dumai Timur

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 653.290.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 446.890.000,- atau 68,41 %.

1) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 4.350.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4.350.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan selama 1 (satu) tahun dengan realisasi kinerja 100 %.

2) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 32.692.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 32.692.000,- atau 100 %.

3) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Binjai Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 199.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 199.200.000,- atau 100.00 %.

4) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Batrem Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 73.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 73.800.000,- atau 100.00 %.

5) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Jaya Mukti Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 163.200.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 163.200.000,- atau 100.00 %.

6) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Palas Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 61.800.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 61.800.000,- atau 100.00 %.

7) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Buluh Kasap Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 135.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 135.600.000,- atau 100.00 %.

8) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Buluh Kasap Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 7.000.000,- atau 77.78 %.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 895.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 895.500.000,- atau 100 %.

1) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 9.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 9.600.000,- atau 100.00 %.

- 2) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Binjai
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 195.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 195.900.000,- atau 100.00 %.
- 3) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Batrem
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 156.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 156.900.000,- atau 100.00 %.
- 4) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Jaya Mukti
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 219.300.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 219.300.000,- atau 100.00 %.
- 5) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Palas
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 141.300.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 141.300.000,- atau 100.00 %.
- 6) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Buluh Kasap
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 172.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 172.500.000,- atau 100.00 %.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 190.884.109,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 190.884.109,- atau 100 %.

1) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 47.551.000,- atau 91.44 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya laporan kegiatan PKK selama 1 (satu) tahun 4 Pokja dengan realisasi kinerja 100 %.

2) Pembinaan PKK Kelurahan Buluh Kasap

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 32.903.809,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 29.065.000,- atau 88.33 %.

3) Pembinaan PKK Kelurahan Tanjung Palas

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 131.100.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 12.950.000,- atau 95.85 %.

4) Pembinaan PKK Kelurahan Jaya Mukti

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 9.600.000,- atau 96.00 %.

5) Pembinaan PKK Kelurahan Teluk Binjai

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 72.880.300,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 22.140.300,- atau 30.38 %.

Kecamatan Bukit Kapur

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 436.925.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 433.525.000,- atau 99,22 %.

1) Pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.408.000.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.408.000.000 atau 100%.

2) Penilaian kinerja unit pelayanan publik

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp. Rp.25.525.000,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.25.525.000,- atau 100%.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp 885.900.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 885.900.000 atau 100 %.

1) Pembinaan LPMK dan RT se-Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.885.900.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.885.900.000,- atau 100%.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 %.

1. Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100%.

Kecamatan Medang Kampai

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 361422000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 361.422.000,- atau 100 %.

1) Kegiatan pembinaan pos pelayanan Terpadu

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 337.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 337.900.000 atau sebesar 100%. Adapun Indikator kinerja keluaran terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kecamatan dan honorarium tenaga kader posyandu selama 12 bulan.

2) Kegiatan penilaian kinerja unit pelayanan publik

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.522.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.522.000 atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai sebanyak 4 Kelurahan dan terealisasi 4 Kelurahan.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 401.793.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 401.793.000,- atau 100%.

1) Kegiatan pembinaan LPMK dan RT

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 401.793.000,- terealisasi sebesar Rp. 401.793.000 atau sebesar 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran tersedianya honorarium LPMK dan RT se Kecamatan medang kampai dan terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurusan LPMK dan RT dengan target kinerja dalam 12 bulan.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 50.413.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 50.143.000,- atau 99,46 %.

1) Kegiatan pembinaan PKK Kecamatan

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.413.000,- terealisasi sebesar Rp. 50.143.000 atau sebesar 99,46%. Adapun Indikator kinerja keluaran Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat dengan target kinerja dalam 1 Lembaga.

Kecamatan Sungai Sembilan

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 443.280.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 443.280.000,- atau 100%.

1) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 23.280.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 23.280.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 5 Kelurahan dengan dan terealisasi 5 Kelurahan atau 100%.

2) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Tanjung Penyembal

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja kelurahan adalah jumlah kader posyandu balita dan usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- 3) **Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bangsal Aceh**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.60.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- 4) **Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Lubuk Gaung**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.84.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 84.000.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- 5) **Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Basilam Baru**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.156.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 156.000.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- 6) **Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Batu Teritip**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100%. Adapun indicator kinerja kelurahan adalah Jumlah Kader Posyandu Balita dan Usila yang dibayar selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 870.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 870.300.000,- atau 100%.

- 1) **Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Tanjung Penyembal**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 180.300.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 180.300.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Tanjung Penyembal yang dibina selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.
- 2) **Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bangsal Aceh**
Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 117.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 117.900.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Bangsal Aceh yang dibina selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

- 3) **Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Lubuk Gaung**
 Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 234.900.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 234.900.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Lubuk Gaung yang dibina selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.
- 4) **Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Basilam Baru**
 Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 211.500.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 211.500.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Basilam Baru yang dibina selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.
- 5) **Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Batu Teritip**
 Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 125.700.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 125.700.000,- atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Batu Teritip yang dibina selama 12 bulan dan terealisasi 12 Bulan atau 100 %.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 48.229.000,- atau 96,46%.

- 1) **Pembinaan PKK Kecamatan**
 Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.229.000,- atau 96,46%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah TP PKK yang dibina Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 6 TP PKK dan terealisasi 6 TP PKK atau 100%

Kecamatan Dumai Kota

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 580.850.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 577.530.000,- atau 99,43 %.

1) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 25.250.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 25.250.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelayanan kesehatan balita dan usila di kecamatan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

2) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 30.000.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 30.000.000,-

atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba pada Kecamatan Dumai Kota sebanyak 5 (lima) Kelurahan dengan realisasi kinerja 100%.

3) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 134.160.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 134.160.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di kelurahan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

4) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rimba Sekampung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 109.960.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 109.960.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di kelurahan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

5) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Sukajadi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 134.160.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 134.160.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di kelurahan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

6) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bintan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 85.760.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 84.160.000,- atau 97,95 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di kelurahan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

7) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Laksamana

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 61.560.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 60.000.000,- atau 97,47 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah kader pelayanan kesehatan balita dan usila di kelurahan selama 12 (dua belas) bulan dengan realisasi kinerja 100 %.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 953.982.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 953.767.000,- atau 99,98 %.

1) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 44.182.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 44.182.000,- atau 100 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan

ketua RT Kecamatan yang dibina sebanyak 147 orang dengan realisasi kinerja 100%.

2) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Dumai Kota

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 163.300.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 163.251.000,- atau 99,97 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan ketua RT kelurahan yang dibina selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

3) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Rimba Sekampung

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 235.600.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 235.573.500,- atau 99,99 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan ketua RT kelurahan yang dibina selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

4) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Sukajadi

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 228.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 228.871.000,- atau 99,99 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan ketua RT kelurahan yang dibina selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

5) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bintan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 186.100.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 186.058.000,- atau 99,98 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan ketua RT kelurahan yang dibina selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

6) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Laksamana

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 95.900.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 95.831.000,- atau 99,93 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah pengurus LPMK dan ketua RT kelurahan yang dibina selama 12 bulan dengan realisasi kinerja 100%.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 49.815.000,- atau 99,63 %.

1) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 49.815.000,- atau 99,63 %. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 6 TP PKK dengan realisasi kinerja 100 %.

Kecamatan Dumai Selatan

a. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 529.830.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 529.347.350,- atau 99,91%.

1) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 24.390.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 24.316.500,- atau 99,89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di kecamatan dengan realisasi 100%.

2) Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 46.440.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 46.030.850,- atau 99,12%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Kelurahan yang mengikuti Lomba pada Kecamatan Dumai Selatan dengan realisasi 99,12%.

3) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 120.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 120.600.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Ratu Sima dengan realisasi 100%.

4) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 96.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 96.600.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bukit Datuk dengan realisasi 100%.

5) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 84.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 84.600.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bumi Ayu dengan realisasi 100%.

6) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 84.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 84.600.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Mekar Sari dengan realisasi 100%.

7) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 72.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 72.600.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah kader Pelayanan Kesehatan Balita dan Usila di Kelurahan Bukit Timah dengan realisasi 100%.

b. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 969.870.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 969.765.000,- atau 99,99%.

1) Pembinaan LPMK dan RT

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 55.770.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 55.665.000,- atau 99,81%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus Ketua LPMK dan Ketua RT Kecamatan yang dibina dengan realisasi 100%.

2) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 189.100.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 189.100.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Ratu Sima dengan realisasi 100%.

3) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 267.600.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 267.600.000,- atau 99,81%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Datuk dengan realisasi 100%.

4) Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 165.550.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 165.550.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bumi Ayu dengan realisasi 100%.

5) Pembinaan LPMK dan RT Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 134.150.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 134.150.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Mekar Sari dengan realisasi 100%.

6) Pembinaan LPMK dan RT Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 157.700.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 157.700.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengurus LPMK dan RT Kelurahan Bukit Timah dengan realisasi 100%.

c. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 99.070.548,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 81.318.500,- atau 82,08%.

1) Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 83.186.948,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 81.318.500,-

atau 97,75%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di kelurahan dan kecamatan dengan realisasi 98%.

2) Pembinaan PKK Kelurahan Bumi Ayu

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.889.600,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina kelurahan dengan realisasi 0%.

3) Pembinaan PKK Kecamatan Kelurahan Bukit Timah

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 5.072.000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 5.072.000,- atau 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina kelurahan dengan realisasi 100%.

4) Pembinaan PKK Kecamatan Mekar Sari

Jumlah Anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 4,922,000,- dengan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina di kelurahan dengan realisasi 0%.

15. Sasaran 6.2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp 5.148.158.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.767.199.945,- atau sebesar 92,60%.

1) Seleksi penerimaan calon PNS

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 470.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 269.561.849,- atau 57.25% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah pelamar CPNSD yang mengikuti seleksi target 90% dan terealisasi 90% atau 100%;

2) Penempatan PNS

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 119.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 113.929.000,- atau 95.74% dengan indikator kinerja keluaran adalah terlaksananya penempatan pegawai target 175 SK dan terealisasi 186 SK yang terdiri dari SK Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi serta Fungsional atau 106.29%;

3) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 337.411.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 321.069.898,- atau 95.16% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah berkas kenaikan pangkat ASN yang diusulkan pada 2

periode target 700 orang dan terealisasi 939 orang atau 134.14% periode April sebanyak 500 orang dan periode Oktober sebanyak 439 orang;

- 4) Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 335.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 330.491.066,- atau 98.54% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah data/informasi ASN Kota Dumai target 4.000 orang dan terealisasi 4.087 orang atau 102.18%;
- 5) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 123.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 104.558.945,- atau 84.70% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya target 200 orang dan terealisasi 455 orang atau 227.50%;
- 6) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 39.613.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.827.062,- atau 62.67% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN target 5 kasus dan terealisasi 1 kasus yang terselesaikan hingga menjadi SK Penjatuhan Hukuman Disiplin atau 20%;
- 7) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.330.000,- atau 88.99% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN Kota Dumai yang mendapatkan bantuan tugas belajar target 2 orang dan terealisasi 2 orang atau 100%;
- 8) Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 980.187.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 957.002.392,- atau 97.63 dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan target 40 orang dan terealisasi 37 orang atau 92.50%;
- 9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 85.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.300.000,- atau 94.25% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah OPD/Unit Kerja yang di monitoring target 37 SKPD dan terealisasi 37 SKPD atau 100%;
- 10) Pelaksanaan sumpah/janji PNS
Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.150.000,- atau 100% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang melaksanakan sumpah/janji target 85 orang dan terealisasi 81 orang atau 95.29%;
- 11) Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 189.110.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 188.800.000,- atau 99.84% dengan indikator kinerja keluaran adalah tersusunnya dan tertatanya arsip data PNS Kota Dumai target 4.000 PNS dan terealisasi 4.087 orang atau 102.18%;

12) Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.553.292.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.552.546.000,- atau 99.95% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan target 169 orang dan terealisasi 169 orang atau 100%;

13) Seleksi/Uji Kompetensi PNS

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 743.524.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 669.633.733,- atau 90.06% dengan indikator kinerja keluaran adalah jumlah ASN yang mengikuti seleksi/uji kompetensi target 20 orang dan terealisasi 15 orang atau 75%.

Inspektorat

a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 3.865.366.034 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.521.303.860 atau 91,10 %.

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.298.947.680,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.230.374.000,00 atau 94,72%. Adapun indikator dengan indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 68 LHP dan terealisasi 68 LHP atau 100 %, dijalankan melalui Pemeriksaan Reguler sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan serta melaksanakan pemeriksaan diluar PKPT yang telah diprogramkan yakni yang bersumber dari pemeriksaan Kasus/Khusus.

2) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 399.177.504,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 322.007.000,00 atau 80,67%. Indikator kinerja keluarannya adalah dokumen yang terdiri dari target 10 (sepuluh) Dokumen yang direviu setiap tahunnya dan terealisasi adalah 10 (sepuluh) Dokumen atau 100,00%

3) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 213.840.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 196.278.000,00 atau 91,79%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sebanyak 15 laporan dan terealisasi sebanyak 15 laporan atau 100%.

4) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 61.464.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 60.307.000,00 atau 98,12%. Adapun indikator kinerja keluarannya indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pengawasan Reguler sebanyak 1 (satu) dokumen terealisasi sebanyak 1 (satu) Dokumen atau 100%.

5) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp.201.081.350,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.197.489.00,00 atau 98,21%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebanyak 2 (Dua) kali dan terealisasi 2 (Dua) kali atau 100%.

6) Meneliti / Menilai Laporan Wajib LP2P

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 81.445.300,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 77.564.300,00 atau 95,23%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah persentase PNS yang menyampaikan LP2P tepat waktu dengan target 100% dan terealisasi 100%.

7) Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 90.128.114,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 66,858.000,00 atau 74,18%. Adapun indikatornya adalah 1 Jumlah Dokumen terealisasinya sebanyak 1 jumlah Dokumen atau 100%

8) Audit Khusus / Tertentu

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 76.790.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 51,345.000,00 atau 66,86%. Adapun indikatornya adalah 1 Jumlah laporan Hasil Pemeriksaan

9) Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.156.050.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 117.222.000,00 atau 75,11%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja OPD, yang direncanakan sebanyak 37 OPD dan terealisasi 37 OPD atau 100%

10) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.139.529.800,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 139.403.200,00 atau 99,91 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, yang direncanakan dengan target 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau terealisasi 100%

11) Pengendalian Gratifikasi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.151.953.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.143.808.560,00 atau 94,64%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah Dokumen/ Laporan dilaksanakan dengan target 1 Laporan dan terealisasi 1 Laporan atau terealisasi 100%

12) Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.221.461.417,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 210.601.800,00 atau 95,10%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Dokumen Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan target 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau terealisasi 100%

13) Reviu Penyerapan Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.52.800.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.44.864.000,00 atau 84,97 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Laporan Triwulan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Kota Dumai dilaksanakan dengan target 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan atau terealisasi 100%

14) Peningkatan Kapabilitas APIP

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.60.500.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.58.759.000,00 atau 97,12%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah Dokumen/Laporan dilaksanakan dengan target 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau terealisasi 100%.

15) Saber Pungli

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.158.550.069,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.156.605.000,00 atau 98,77%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah Dokumen/Laporan dilaksanakan dengan target 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen atau terealisasi 100%.

16) Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.205.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.175.983.000,00 atau 85,85%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah Dokumen/Laporan dilaksanakan dengan target 1 Dokumen dan terealisasi 100%.

17) Survei Penilaian Integritas

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.296.637.300,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.271.835.000,00 atau 91,64%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Jumlah Dokumen/Laporan dilaksanakan dengan target 1 Dokumen dan terealisasi 100%

b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 390.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 374.668.500 atau 96,07%.

1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp.327.650.000,00 dengan relisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 325.148.500,00 atau 99,24%. Indikator kinerja kegiatan ini jumlah aparatur yang mengikuti Diklat JFA dari yang direncanakan sebanyak 40 orang dan terealisasi 40 orang atau tingkat capaian 100%.

2) In House Training Aparatur Pengawasan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar sebesar Rp.62.350.000,00 dengan relisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 49.520.000,00 atau 79,42%. Indikator kinerja kegiatan ini jumlah aparatur yang mengikuti In House Training yang direncanakan sebanyak 50 orang dan terealisasi 50 orang atau tingkat capaian 100%.

Sekretariat Daerah

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 623.693.080 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 564.987.822 atau 90,59%.

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia Rp.298.769.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.251.898.125,- atau dengan persentase 84,31%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah peringkat LPPD Kota Dumai dengan persentase adalah dengan target pada peringkat 6 dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2019 dengan realisasi adalah peringkat 5 atau dengan capaian realisasi sebesar 117%

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 8.612.193.540,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.663.979.228,- atau 88,99%.

1) Penyusunan Standar Satuan Harga

Kegiatan penyusunan standar satuan harga, dianggarkan sebesar Rp. 159.057.980,- realisasi sebesar Rp. 158.647.980,- atau sebesar 99,741%. Kegiatan penyusunan standar satuan harga tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian adalah buku standar harga barang dan jasa sebanyak 1 laporan. Adapun hasil kegiatan penyusunan standar satuan harga berupa buku standarisasi harga satuan barang dan jasa untuk keperluan Pemerintah Kota

Dumai yang merupakan pedoman penetapan harga barang dalam penyusunan APBD Tahun 2020.

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dianggarkan sebesar Rp. 1.096.372.275,- realisasi sebesar Rp. 1.072.678.035,- atau 97,84%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian program adalah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan produk hukum daerah yang mengatur tentang APBD Tahun 2019 yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp.154.555.500,- realisasi sebesar Rp. 146.060.000,- atau 94,50%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD merupakan penjabaran secara terperinci dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Kegiatan ini menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp. 618.641.850,- realisasi sebesar Rp. 419.935.350,- atau 67,88%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD menghasilkan produk hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

5) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp.150.215.300,- realisasi sebesar Rp. 108.257.500,- atau 72,07%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD sebanyak 1 dokumen. Kegiatan ini menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019.

- 6) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggarkan sebesar Rp. 686.267.300,- realisasi sebesar Rp. 664.587.387,- atau 96,84%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Perda. Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menghasilkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018.
- 7) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dianggarkan sebesar Rp.100.211.000,- realisasi sebesar Rp. 94.187.000,- atau 93,99%. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 Perwa. Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2018.
- 8) Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dianggarkan sebesar Rp.475.800.000,- realisasi sebesar Rp. 378.993.511,- atau 79,65%. Kegiatan bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah jumlah pegawai dalam mengikuti bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan sebanyak 120 orang. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang aturan pengelolaan keuangan daerah yang sifatnya sosialisasi aturan baru dibidang keuangan sejumlah 120 orang.
- 9) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah dianggarkan sebesar Rp. 274.815.840,- realisasi sebesar Rp. 274.787.084,- atau 99,99%. Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah jumlah peserta bimbingan teknis dan sosialisasi manajemen /aset barang milik daerah sejumlah 240 orang. Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah yaitu mengikutsertakan Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu dalam bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah serta

sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugasnya.

10) Inventarisasi Aset

Kegiatan inventarisasi Aset dianggarkan sebesar Rp. 207.329.200,- realisasi sebesar Rp. 202.506.155,- atau 97,67%. Kegiatan inventarisasi aset tingkat pencapaiannya sebesar 100%. Kegiatan inventarisasi aset tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan dokumen penelusuran gedung dan bangunan, penelusuran aset yang berasal dari dana APBN dan APBD Provinsi yang dihibahkan Pemerintah Kota Dumai sebanyak 2 dokumen. Kegiatan inventarisasi Aset menghasilkan dokumen penelusuran gedung/ bangunan yang pendanaannya bersumber APBD dan APBD Provinsi.

11) Pengamanan Barang Milik Daerah

Kegiatan pengamanan barang milik daerah dianggarkan sebesar Rp. 94.700.000,- realisasi sebesar Rp. 82.728.634,- atau 87,36%. Kegiatan pengamanan barang milik daerah pencapaiannya sebesar 100%, Kegiatan pengamanan barang milik daerah pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan Peningkatan Pengamanan Fisik Terhadap Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang bertujuan melakukan. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan yang bertujuan melakukan pengamanan aset dengan tujuan sesuai peruntukkan dan penggunaannya.

12) Penertiban Aset

Kegiatan Penertiban Aset dianggarkan sebesar Rp.127.435.000,- realisasi sebesar Rp. 88.310.967,- atau 69,30%. Kegiatan penertiban aset tingkat pencapaiannya sebesar 100%. Kegiatan penertiban aset tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah penertiban aset berupa barang milik daerah dalam rangka pelaksanaan OPD Baru sebanyak 36 OPD. Kegiatan penertiban aset menghasilkan kegiatan penertiban aset terhadap 36 Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Dumai dengan maksud menertibkan seluruh aset milik Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan peruntukannya.

13) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp.295.300.000,- realisasi sebesar Rp.181.718.187,- atau 61,54%. Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan sejumlah 1 paket. Kegiatan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan Kota Dumai. Pengembangan kegiatan ini sejumlah 1 paket. Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan sistem informasi dan manajemen keuangan Kota Dumai dengan tujuan tertib administrasi keuangan.

- 14) **Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah**
Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 132.263.500,- realisasi sebesar Rp. 129.478.568,- atau 97,89%. Kegiatan penyusunan data administrasi keuangan daerah tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah (1) Register SP2D BL dan BTL Perbulan sejumlah 1.500 lembar; (2) Buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD sejumlah 36 buku; (3) Register SP2D per SKPD sejumlah 3.500 lembar.
- 15) **Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan**
Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahunan dianggarkan sebesar Rp. 228.946.000,- realisasi sebesar Rp. 228.675.290,- atau 99,88%. Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah tahunan tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah (1) Tersusunnya laporan barang milik daerah tahunan sejumlah 1 laporan; (2) Rekapitulasi daftar mutasi barang sejumlah 1 laporan. Kegiatan penyusunan laporan barang milik daerah tahunan menghasilkan dokumen barang milik Pemerintah Kota Dumai setiap tahunnya. Adapun dokumen yang dihasilkan sejumlah 2 dokumen yaitu (1) laporan barang milik daerah tahunan; dan (2) rekapitulasi daftar mutasi barang.
- 16) **Rekonsiliasi Aset SKPD**
Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD dianggarkan sebesar Rp.196.272.150,- realisasi sebesar Rp. 196.124.000,- atau 99,92%. Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, Kegiatan Rekonsiliasi Aset SKPD tingkat pencapaiannya sebesar 100%, dengan capaian kegiatan adalah jumlah OPD yang dilaksanakan rekonsiliasi sejumlah 36 OPD. Kegiatan rekonsiliasi aset merupakan kegiatan rekon barang milik daerah diseluruh OPD yang ada di Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan pada 36 OPD yang ada di Kota Dumai. Tujuan dari kegiatan rekonsiliasi aset OPD yaitu agar pengelolaan daerah tepat waktu, akuntabel dan transparan.
- 17) **Penilaian Aset/Barang Milik Daerah**
Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp.92.741.620 realisasi sebesar Rp.55.572.476,- atau 59,92%. Kegiatan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah sebesar 100%, dengan capaian kegiatan terlaksananya penilaian aset/barang daerah sejumlah 36 OPD. Kegiatan penilaian aset/barang milik daerah merupakan kegiatan penilaian aset/barang milik daerah yang dilaksanakan pada 36 OPD yang ada di Kota Dumai. Penilaian aset/barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka penghapusan aset sehingga dilakukan penilaian aset terlebih dahulu.
- 18) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah**
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp. 185.000.000,- realisasi sebesar Rp.180.267.361,- atau 97,44%. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan capaian kegiatan jumlah pejabat pembantu pengelola barang milik daerah yang dikirim sejumlah 15 orang. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya pejabat pengelola barang

milik daerah merupakan kegiatan yang mengirimkan pejabat pembantu pengelola barang milik daerah untuk mengikuti bimtek/sosialisasi terhadap aturan dibidang aset. Adapun kegiatan ini dengan mengirimkan sejumlah 15 orang yang dimaksudkan pejabat pembantu pengelola barang milik daerah memahami semua siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

19) Penyusunan Standar Biaya

Kegiatan Penyusunan standar biaya dianggarkan sebesar Rp.209.262.050,- realisasi sebesar Rp.193.733.793,- atau 92,58%. Kegiatan Penyusunan standar biaya sebesar 100% dengan capaian kegiatan buku standar biaya sejumlah 100 buku. Kegiatan penyusunan standar biaya menghasilkan buku standar biaya tahun anggaran 2019. Buku standar biaya tahun anggaran 2020 digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020. Buku tersebut dibagikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kota Dumai.

20) Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp.241.418.150,- realisasi sebesar Rp.232.195.041,- atau 96,18%. Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD sebesar 100% dengan capaian kegiatan jumlah skpd dalam pertemuan rekonsiliasi yang dilaksanakan sejumlah 36 SKPD. Kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dilaksanakan setiap bulannya kepada 36 SKPD yang ada di Kota Dumai. Kegiatan ini dimaksudkan mensinkronkan antara realisasi belanja dan pendapatan baik manual maupun by system sehingga sesuai antara keduanya.

21) Penyusunan Ketentuan-Ketentuan Barang Milik Daerah

Kegiatan Penyusunan Ketentuan-ketentuan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp.117.439.500,- realisasi sebesar Rp.94.226.501,- atau sekitar 80,23%. Kegiatan Penyusunan Ketentuan-ketentuan Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan 1(satu) laporan. Penyusunan Ketentuan-ketentuan Barang Milik Daerah.

22) Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD

Kegiatan Sosialisasi pedoman Penyusunan APBD dianggarkan sebesar Rp.198.658.000,- realisasi sebesar Rp.165.360.850,- atau sekitar 83,23%. Kegiatan Sosialisasi pedoman Penyusunan APBD sebesar 100% dengan 77 (tujuh puluh tujuh) orang. Adapun yang menjadi peserta sosialisasi adalah Kasubbag. Perencanaan OPD, dan Lurah Se-Kota Dumai.

23) Rapat Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dianggarkan sebesar Rp.221.426.264,- realisasi sebesar Rp.204.187.090,- atau sekitar 92,21%. Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran sebesar 100% dengan 1 (satu) laporan.

24) Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung

Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.124.916.625,- realisasi sebesar Rp.124.747.259,- atau 99,86%. Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung sebesar 100% dengan capaian kegiatan

Jumlah laporan rekonsiliasi belanja tidak langsung sejumlah 8 laporan. Kegiatan Rekonsiliasi Belanja Tidak Langsung dimaksudkan mensinkronkan antara pengeluaran yang sudah dikeluarkan baik manual maupun by system sehingga sesuai antara keduanya.

25) Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi

Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi dianggarkan sebesar Rp.361.902.260,- realisasi sebesar Rp.358.116.156,- atau 98,95%. Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan provinsi sebesar 100% dengan capaian kegiatan Data dana pusat dan provinsi sebanyak 1 laporan. Kegiatan Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi untuk mensinkronkan data dana transfer pusat dan provinsi baik sifatnya dana perimbangan maupun dana bagi hasil pajak dan non pajak.

26) Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Kegiatan Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp.140.000.000,- realisasi sebesar Rp.84.848.620,- atau 60,61%. Kegiatan Bimtek Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dengan capaian sebesar 100% dengan sasaran jumlah peserta bimtek penyusunan laporan keuangan daerah sejumlah 210 orang. Adapun yang menjadi peserta yaitu para Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran OPD.

27) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp.169.513.000,- realisasi sebesar Rp.132.453.155,- atau 78,14%. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dengan capaian sebesar 100% dengan sasaran jumlah laporan keuangan akhir tahun kota Dumai sejumlah 1 laporan. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Dumai dalam rangka persiapan penyusunan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.

28) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp.120.711.000,- realisasi sebesar Rp.61.416.189,- atau 50,88%. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai sebesar 100% dengan capaian kegiatan jumlah laporan keuangan semesteran kota Dumai sejumlah 1 laporan. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Dumai dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran Kota Dumai Tahun 2019 dalam rangka persiapan penyusunan laporan akhir tahun Kota Dumai Tahun 2020.

29) Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai

Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp.238.960.390,- realisasi sebesar Rp.237.707.961,- atau 99,48%. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai realisasi fisik sebesar 100 %

dengan capaian kegiatan jumlah laporan dan penyelesaian atas kasus-kasus kerugian daerah kota Dumai sejumlah 1 laporan. Kegiatan Penyusunan Laporan dan Penyelesaian atas Kasus-kasus Kerugian Daerah Kota Dumai berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR). Kegiatan TP-TGR dimaksudkan untuk penyelesaian kerugian negara.

- 30) Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Keuangan Serta Aset Daerah.

Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah Kota Dumai dianggarkan sebesar Rp.199.800.000,- realisasi sebesar Rp.199.785.280,- atau 99,99%. Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip keuangan serta aset daerah Kota Dumai realisasi fisik sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 500 dokumen.

- 31) Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp.49.356.000,-realisasi sebesar Rp.43.680.000,- atau 88,50%. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Dumai sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 1 (satu) laporan.

- 32) Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Semesteran I dan II Akhir Tahun Anggaran

Kegiatan Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Semesteran I dan II Akhir Tahun Anggaran dianggarkan sebesar Rp.148.892.000,- realisasi sebesar Rp.116.142.374,- atau 78,00%. Kegiatan Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Semesteran I dan II Akhir Tahun Anggaran sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 1 (satu) laporan.

- 33) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp.284.004.900,- realisasi sebesar Rp.264.014.781,- atau sekitar 92,96%. Kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebesar 100% dengan capaian kegiatan sejumlah 1 (satu) laporan.

- 34) Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM

Kegiatan Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM dianggarkan sebesar Rp.104.000.000,- realisasi sebesar Rp.73.394.589,- atau sekitar 70,48%. Kegiatan Penyusunan Daftar RKBMD dan RKPBM realisasi fisik sebesar 100% dengan capaian 2 (dua) Dokumen yaitu Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM).

- 35) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) dianggarkan sebesar Rp.251.676.400,- realisasi sebesar Rp.250.757.659,- atau 99,63%. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) sebesar 100%, dengan capaian kegiatan sistem informasi barang milik daerah (SIM-BMD) dan Entry SIMDA BMD sejumlah 1 paket. Kegiatan pengembangan sistem informasi barang milik daerah (SIMDA-BMD) merupakan kegiatan pengembangan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Kota Dumai.

Pengembangan kegiatan ini sejumlah 1 paket. Aplikasi SIMDA-BMD merupakan aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Dumai dalam pengelolaan sistem informasi dan manajemen barang milik daerah Kota Dumai dengan tujuan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

36) Penyusunan Peraturan Walikota Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp.104.000.000,- realisasi sebesar Rp.73.294.589,- atau sebesar Rp.70,48%. Kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi fisik sebesar 100% dengan hasil 1 (satu) Rancangan Perwa yaitu Perwa Sistem Kebijakan Akuntansi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

a. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 80.780.200 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 69.061.987 atau 85,49%.

1) Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah;

Jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 46.978.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.532.200,- atau 86,28% dengan Indikator Kinerja keluaran (*Out put*) dari kegiatan ini adalah Jumlah OPD/unit kerja yang ditata dan didata dengan target 5 (lima) OPD/unit kerja dengan realisasi 5 OPD yang ditata dan didata atau terealisasi 100%.

2) Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika;

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.802.000,- dan terealisasi Rp. 28.529.787,- atau berkisar 84,40% dengan Indikator Kinerja keluaran (*Out put*) dari kegiatan ini adalah Jumlah OPD/unit kerja yang ditata dan didata dengan target 5 (lima) OPD/unit kerja dengan realisasi 5 OPD yang ditata dan didata atau terealisasi 100%.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 204.618.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 203.900.533 atau 99,65%.

1) Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip;

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 111.381.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 110.835.355,- atau sebesar 99,51%. *Output* dari kegiatan ini adalah Jumlah naskah arsip yang disusun dan diterbitkan dengan 7 perwa dan 1 perda dan terealisasi 100%.

2) Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta;

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 93.237.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 93.065.178,- atau sebesar 99,92%. *Output* dari kegiatan ini adalah Jumlah Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kearsipan dengan target 35 orang dan sebanyak 37 orang.

Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 30.865.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 30.825.000 atau 99,06%.

- 1) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari Besar Nasional/Daerah/Keagamaan
Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 30.865.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 130.825.000,- atau sebesar 99,8%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah informasi publik dan informasi hari besar nasional/daerah/keagamaan dalam 3 event dengan realisasi sebesar 100%.

b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Mass

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.172.642.500 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.142.784.986 atau 99,06%.

- 1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 1.628.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.626.110.000,- atau sebesar 99,9%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dalam 24 OPD dengan realisasi sebesar 100%.
- 2) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 177.367.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 174.817.983,- atau sebesar 98,5%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Persentase penerapan aplikasi e-Government dalam 60 % dengan realisasi sebesar 100%.
- 3) Pengelolaan media online Humas dan Infokom Pemerintah Kota Dumai
Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 181.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 175.303.403,- atau sebesar 96,4%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Informasi yang disampaikan melalui jaringan online Pemerintah Kota Dumai dalam 1 media online dengan realisasi sebesar 100%.
- 4) Pengelolaan website Pemko Dumai
Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.672.000,- atau sebesar 99,4%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah *website* Pemko Dumai yang di kelola dalam 1 *website* dengan realisasi sebesar 100%.
- 5) Pengelolaan server dan aplikasi data center Pemko Dumai
Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 143.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 139.305.400,- atau sebesar 97,1%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Server dan Aplikasi Data Center yang dikelola dalam 1 data center dengan realisasi sebesar 100%.
- 6) Pengadaan alat studio, komunikasi dan jaringan
Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 299.900.000,- atau sebesar 99,9%. Adapun indikator kinerja

keluaran kegiatan ini adalah Jumlah peralatan alat studio dan jaringan TIK dalam 5 unit dengan realisasi sebesar 100%.

7) Pengembangan dan Pengelolaan Comand Center Kota Dumai

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 680.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 669.176.200,- atau sebesar 98,4%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah command center yang terbentuk dalam 1 *command center* dengan realisasi sebesar 100%.

8) Pengadaan dan pemeliharaan alat studio dan komunikasi

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.500.000,- atau sebesar 71,4%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah peralatan alat studio dan komunikasi dalam 7 unit dengan realisasi sebesar 100%.

c. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 232.351.438 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 227.146.760 atau 97,76%.

1) Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 118.251.438,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.573.944,- atau sebesar 97,74%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dalam bidang komunikasi dan informasi dalam 36 orang dengan realisasi sebesar 100%.

2) Pelatihan SDM dalam bidang kehumasan

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 114.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.572.816,- atau sebesar 97,8%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah SDM yang dilatih dalam 8 orang dengan realisasi sebesar 100%.

d. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.769.737.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.448.520.165 atau 88,40%.

1) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 629.676.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 579.540.746,- atau sebesar 92,8%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah informasi media visual dalam 4 orang dengan realisasi sebesar 100%.

2) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 80.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.893.281,- atau sebesar 52%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah pertemuan dalam 4 pertemuan dengan realisasi sebesar 100%.

3) Pembinaan Media Peliput dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 463.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 436.315.009,- atau sebesar 94,2%. Adapun indikator kinerja

keluaran kegiatan ini adalah Jumlah majalah gerak pembangunan Pemko Dumai dalam 12 majalah dengan realisasi sebesar 100%.

4) Penyebarluasan informasi hari-hari besar

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 205.870.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 198.384.092,- atau sebesar 96,36%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah *event* hari - hari besar dalam 2 *event* dengan realisasi sebesar 100%.

5) Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 103.726.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.466.583,- atau sebesar 96,2%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang di bina dalam 5 KIM dengan realisasi sebesar 100%.

6) Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah

Untuk kegiatan ini Anggaran yang tersedia Rp. 1.291.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.094.920.454,- atau sebesar 84,8%. Adapun indikator kinerja keluaran kegiatan ini adalah Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 4 publikasi dan Jumlah layanan informasi daerah yang dikelola dalam 5 informasi dengan realisasi sebesar 100%.

Sekretariat DPRD

a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Jumlah Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp. 11.489.447.272,- dengan Realisasi Penyerapan anggaran Sebesar Rp. 7.865.255.181,- atau 68,46%.

1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.592.939.772,- dengan realisasi Penyerapan anggaran Rp.1.031.618.369,- atau 64,76%. Adapun indikator kinerja keluarannya jumlah pembahasan pansus dalam pembahasan rancangan peraturan daerah yang disetujui menjadi peraturan daerah dengan target 5 pansus dan terealisasi atau 80%.

2) Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 423.300.000,- dengan realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 180.750.000,- atau 42,70%. Adapun indikator jumlah pertemuan atau dialog dengan stakeholder bersama DPRD Kota Dumai dengan target 4 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan atau 50% dengan alasan kegiatan ini dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dengan SKPD dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

3) Rapat Alat kelengkapan Dewan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.018.560.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

140.660.000,- atau 13,81%. Adapun indikator kerjanya adalah jumlah alat kelengkapan DPRD yang melaksanakan rapat dengan target 80% dan terealisasi 80%

4) Rapat - Rapat Paripurna

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.747.100.000,- dengan realisasi Penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.264.974.000,- atau 72,40%. Adapun target indikator kinerja keluarannya adalah jumlah rapat paripurna DPRD Kota Dumai dengan target 37 Paripurna dan terealisasi 36 paripurna atau 97.2%.

5) Kegiatan Reses

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.430.700.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.370.744.000,- atau 95,81%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Dumai dengan realisasi 3 kegiatan/masa sidang anggota DPRD kota Dumai.

6) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.804.000.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.507.249.594,- atau 83,55%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah anggota DPRD Kota Dumai yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan tingkat capaian 100% dengan alasan terlaksananya seluruh kegiatan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.

7) Kunjungan Kerja Komisi –Komisi DPRD

Jumlah Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.499.647.500,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.136.286.734,- atau 75,77 %. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah kabupaten/kota yang dikunjungi DPRD Kota Dumai dengan target 9 Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 9 Kabupaten/Kota atau 100% dengan alasan terlaksananya seluruh kunjungan kerja Komisi DPRD Kota Dumai.

8) Penyampaian Aspirasi masyarakat secara Langsung

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 97.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- atau 87,63%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah penyerapan aspirasi masyarakat langsung kepada DPRD Kota Dumai dengan target kegiatan dengan realisasi 2 kegiatan dengan alasan kegiatan ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

9) Pengkajian, penelaahan, Pembahasan KUA-PPAS,RAPBD KUA-PPASP, PPASP, APBD-P, laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta prognosis.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.365.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.703.572.484,- atau 51,54%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah pembahasan KUA-

PPAS / KUPAPPAS, Perubahan, Perda RAPBD/P, Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama beserta Prognosis dan Tindak Lanjut LHP BPK RI dengan target 3 Perda dan realisasi 3 Perda atau 100%

10) Penyediaan Alat Kelengkapan DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp.511.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 444.400.000,- atau 86,93%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah tenaga ahli, staf tenaga ahli, fraksifraksi, teanga ahli fraksi DPRD Kota Dumai Dengan target 8 Fraksi dan realisasi 8 Fraksi atau 100% dengan alasan terlaksananya tenaga ahli untuk seluruh fraksi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Program perencanaan pembangunan daerah

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.791.033.600 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.453.253.717 atau 81,14%.

- 1) Pada Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dialokasikan dana sebesar Rp. 169.034.100,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 151.865.500,- atau 89,84% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah forum OPD yang dilaksanakan sebanyak 1 Forum.
- 2) Pada Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 244.368.400,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 241.403.494,- atau 98,79% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun sebanyak 2 Dokumen.
- 3) Pada Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 274.874.400,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 260.817.900,- atau 94,89% dengan capaian kinerja 100% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional sebanyak 3 Kali.
- 4) Pada Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 213.079.300,- dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 195.330.923,- atau 91,67% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu sebanyak 1 Dokumen.
- 5) Pada Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) dialokasikan dana sebesar Rp. 178.700.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 172.030.300,- atau 96,27% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu sebanyak 1 Dokumen.

- 6) Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 61.800.000,- , dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 61.300.000,- atau 99,19% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen evaluasi RKPD sebanyak 4 Dokumen.
- 7) Pada kegiatan Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai dialokasikan dana sebesar Rp. 46.831.200,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan sebesar Rp. 40.677.100,- atau 86,86% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK sebanyak 1 Dokumen.
- 8) Pada Kegiatan Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals dialokasikan dana sebesar Rp. 189.235.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 182.600.500,- atau 96,49% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s sebanyak 1 Dokumen.
- 9) Pada Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dialokasikan dana sebesar Rp. 155.111.200,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 147.228.000,- atau 94,92% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)sebanyak 1 Dokumen.
- 10) Pada Kegiatan Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus dialokasikan dana sebesar Rp. 138.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 130.595.000,- atau 94,63% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus sebanyak 1 Dokumen.
- 11) Pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp. 120.000.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 91.537.300,- atau 76,28% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen petunjuk teknis dana pembangunan kelurahan sebanyak 1 Dokumen.

b. Program perencanaan pembangunan ekonomi

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 289.411.955 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 238.425.985 atau 82,38%.

- 1) Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dialokasikan dana sebesar Rp. 198.868.210,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 194.172.240,- atau 97,64% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 1 Dokumen.
- 2) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 90.543.745,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 44.253.745,- atau 48,88% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan SDA sebanyak 1 Dokumen.

c. Program perencanaan sosial dan budaya

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 793.706.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 723.201.618 atau 91,12%.

- 1) Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dialokasikan dana sebesar Rp. 194.306.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 190.385.018,- atau 97,98% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya sebanyak 1 Dokumen.
- 2) Pada Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dialokasikan dana sebesar Rp. 103.343.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 90.051.000,- atau 87,14% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya sebanyak 1 Dokumen.
- 3) Pada Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM dialokasikan dana sebesar Rp. 224.947.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 218.354.600,- atau 97,07%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM sebanyak 1 Dokumen.
- 4) Pada Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan dialokasikan dana sebesar Rp. 174.056.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 166.491.000,- atau 95,65% dengan capaian kinerja 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur sebanyak 1 Dokumen.
- 5) Pada Kegiatan Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM dialokasikan dana sebesar Rp. 97.054.000,- dari dana yang dialokasikan dapat direalisasikan Rp. 57.920.000,- atau 59,68%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM sebanyak 1 Dokumen.

Badan Pendapatan Daerah

a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.340.508.950 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.921.413.840 atau 93,39%.

1) Kegiatan Pemeliharaan SIMPATDA

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 484.836.600,- terealisasi sebesar Rp 481.320.045,-, atau sebesar 99,27%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah tersedianya data wajib pajak daerah yang valid sebesar 90%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 85% artinya tersedianya data wajib pajak daerah yang valid sebesar 85%.

- 2) Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 370.399.000,- terealisasi sebesar Rp 330.523.584,-, atau sebesar 89,23%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah tercapainya sosialisasi pajak daerah melalui sarana promosi pajak sebanyak 3 media. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya sosialisasi pajak daerah melalui sarana promosi pajak, yaitu :
- iklan radio,
 - spanduk dan baleho yang dipasang pada panggung reklame yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai;
 - pengumuman melalui media cetak lokal dengan total sebanyak 3 (tiga) media.
- 3) Kegiatan Monitoring Penyampaian SPPT PBB
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 471.575.150,- terealisasi sebesar Rp 422.075.000,-, atau sebesar 89,50%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak dengan target 7 kecamatan. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya penyampaian SPPT PBB kepada wajib Pajak pada 7 kecamatan.
- 4) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Daerah
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 109.119.000,- terealisasi sebesar Rp 107.496.000,-, atau sebesar 98,51%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah monitoring dan evaluasi pendapatan daerah yang telah dilaksanakan dengan target sebanyak 4 kali. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah sebanyak 4 kali.
- 5) Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 246.018.400,- terealisasi sebesar Rp 234.281.879,-, atau sebesar 95,23%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran dan tunggakan pajak dengan target 500 STPD. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 164% artinya terpenuhinya target terlaksananya kepatuhan wajib pajak melakukan pembayaran dan tunggakan pajak sebanyak 410 STPD dari target awal sebanyak 250 STPD.
- 6) Kegiatan Pendataan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 349.070.500,- terealisasi sebesar Rp 347.523.585,-, atau sebesar 99,56%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah tersedianya Data Potensi wajib pajak daerah dengan target 3.000 WP/WR. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 88,60% artinya tersedianya data potensi wajib pajak daerah sebanyak 2.658 WP/WR dari target awal sebanyak 3.000 WP/WR.
- 7) Kegiatan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 169.280.000,- terealisasi sebesar Rp 166.167.606,-, atau sebesar 98,16%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah tersusunnya data penerimaan daerah dengan unit kerja penerima

PAD yang valid dengan target 4 laporan. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersusunnya data penerimaan daerah dengan unit kerja penerima PAD yang valid sebanyak 4 Laporan, yaitu Laporan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Kota Dumai Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2019.

8) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 149.553.750,- terealisasi sebesar Rp 144.553.723,-, atau sebesar 96,66%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah petugas pemungut yang menerima kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dengan target 30 aparatur. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 60% artinya petugas pemungut yang menerima kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis sebanyak 18 aparatur dari target awal sebanyak 30 aparatur.

9) Kegiatan Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp 111.423.224,-, atau sebesar 92,85%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah berkas keberatan Pajak/Retribusi yang dilayani dengan target 300 berkas. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 103,33% artinya terpenuhinya berkas keberatan Pajak/Retribusi yang dilayani sebanyak 31 berkas dari target awal sebanyak 30 berkas.

10) Kegiatan Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 808.999.250,- terealisasi sebesar Rp 798.718.731,-, atau sebesar 98,73%. Indikator kinerja kegiatannya adalah persentase tercapainya pelayanan prima kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan target 100%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya pelayanan prima kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100%.

11) Kegiatan Penyusunan Basis Data OP PBB P2

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 316.691.700,- terealisasi sebesar Rp 243.203.150,-, atau sebesar 76,79%. Indikator kinerja kegiatannya adalah terwujudnya basis data PBB-P2 yang akuntabel dengan target 1 kecamatan. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terwujudnya basis data PBB-P2 yang akuntabel pada 1 kecamatan, yaitu updating basis data PBB P2 pada Kecamatan Medang Kampai.

12) Kegiatan Verifikasi Penetapan Pajak

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 248.433.000,- terealisasi sebesar Rp 239.042.818,-, atau sebesar 96,22%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah tercapainya verifikasi penetapan pajak daerah dengan target 500 WP. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 108,8% artinya tercapainya Verifikasi penetapan Pajak Daerah sebanyak 544 WP dari target awal sebanyak 500 WP.

13) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Subjek dan Objek Pajak

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 215.722.000,- terealisasi sebesar Rp 206.872.648,-, atau sebesar 95,90%. Indikator kinerja kegiatannya adalah persentase pengawasan, penertiban dan penindakan objek pajak yang telah dilaksanakan dengan target 75%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya pengawasan, penertiban dan penindakan objek pajak sebesar 75%.

14) Kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 324.123.500,- terealisasi sebesar Rp 317.895.301,-, atau sebesar 98,08%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah pemeriksaan Wajib Pajak Daerah yang telah dilakukan dengan target 3 kali. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 133,33% artinya terpenuhinya target terlaksananya Pemeriksaan Wajib Pajak sebanyak 4 kali pemeriksaan, yaitu:

- a) Pemeriksaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ),
- b) Pemeriksaan Pajak Air Tanah,
- c) Pemeriksaan Restoran dan Rumah Makan, dan
- d) Pemeriksaan Pajak Hotel.

15) Validasi Data Piutang PBB P2

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 344.896.900,- terealisasi sebesar Rp 324.569.919,-, atau sebesar 94,11%. Indikator kinerja kegiatannya adalah SK penghapusan Piutang PBB-P2 dengan target 1 Kecamatan. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya terlaksananya SK penghapusan Piutang PBB-P2 pada 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Medang Kampai.

16) Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundangan Tata Kelola Pendapatan Daerah

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 289.071.000,- terealisasi sebesar Rp 215.723.476,-, atau sebesar 74,63%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait tata kelola pendapatan yang disusun dengan target 5 Perda. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 200% artinya tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait tata kelola pendapatan sebanyak 3 Draft Peraturan Daerah Kota Dumai dan 7 Draft Peraturan Walikota Dumai, yaitu:

- a) Draft Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pajak Sarang Burung Walet,
- b) Draft Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pajak Parkir,
- c) Draft Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pajak Penerangan Jalan,
- d) Draft Peraturan Walikota Dumai Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Dumai,
- e) Draft Peraturan Walikota Dumai Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan,
- f) Draft Peraturan Walikota Dumai Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame,

- g) Draft Peraturan Walikota Dumai Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah,
 - h) Draft Peraturan Walikota Dumai Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel,
 - i) Draft Peraturan Walikota Dumai Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, dan
 - j) Draft Peraturan Walikota Dumai Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- 17) Kegiatan Monitoring Penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi daerah
 Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 58.519.200,- terealisasi sebesar Rp 43.219.200,-, atau sebesar 73,85%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah terdistribusinya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak dengan target 1.000 SKPD/SKRD. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 51,7% artinya terdistribusinya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak sebanyak 517 SKPD/SKRD dari target awal sebanyak 1.500 SKPD/SKRD.
- 18) Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar
 Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 425.240.400,- terealisasi sebesar Rp 403.203.584,-, atau sebesar 94,82%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah terlaksananya penilaian khusus Objek Pajak Non Standar dengan target 10 OP. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 200% artinya terlaksananya Penilaian Khusus Objek Pajak Non Standarsebanyak 20 Objek Pajak dari target awal sebanyak 10 OP.
- 19) Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah
 Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 59.535.000,- terealisasi sebesar Rp 59.387.000,-, atau sebesar 99,75%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah tersedianya sarana promosi dan informasi dengan target 1 paket. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% dengan tersedianya Sarana Promosi dan Informasi sebanyak 1 paket.
- 20) Kegiatan Analisis dan Penyempurnaan ZNT/NIR
 Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 243.947.850,- terealisasi sebesar Rp 241.420.074,-, atau sebesar 98,96%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 dengan target 7 Kelurahan. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 dengan target 7 Kelurahan. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya Terlaksananya Analisis ZNT sebagai dasar penetapan NJOP PBB P2 pada 7 kelurahan di wilayah Kota Dumai, yaitu:
- a) Kelurahan Laksamana,
 - b) Kelurahan Dumai Kota,

- c) Kelurahan Mekar Sari,
- d) Kelurahan Bumi Ayu,
- e) Kelurahan Teluk Binjai,
- f) Kelurahan Medang Kampai, dan
- g) Kelurahan Purnama.

21) Kegiatan Penerapan Sistem Online Pembayaran Pajak Daerah

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp 49.400.764,-, atau sebesar 98,80%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah terwujudnya penerapan transaksi secara online kepada wajib pajak dengan target 100 WP. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 94% artinya terwujudnya Penerapan Transaksi Secara Online Kepada Wajib Pajak sebanyak 94 WP dari target awal sebanyak 100 WP.

22) Kegiatan Penyusunan Prediksi Penerimaan Pendapatan Pajak/Retribusi Daerah

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 99.565.250,- terealisasi sebesar Rp 99.403.923,-, atau sebesar 99,84%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah dokumen prediksi pendapatan yang disusun dengan target 2 dokumen. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tersusunnya dokumen prediksi pendapatan sebanyak 2 dokumen, yaitu Dokumen Prediksi APBD Murni Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Prediksi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

23) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Bidang PBB P2

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 206.101.000,- terealisasi sebesar Rp 172.636.607,-, atau sebesar 83,76%. Indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah petugas yang mendapatkan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang PBB P2 target 30 orang. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya petugas yang mendapatkan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang PBB P2 sebanyak 30 orang.

24) Kegiatan Verifikasi BPHTB

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 149.810.500,- terealisasi sebesar Rp 131.351.999,-, atau sebesar 87,68%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya petugas yang mendapatkan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang PBB P2 sebanyak 30 orang. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 80% artinya tersedianya data verifikasi BPHTB yang valid sebanyak 80 OP dari target awal sebanyak 100 OP.

25) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp 30.000.000,-, atau sebesar 100%. Indikator kinerja kegiatannya adalah persentase barang milik perangkat daerah yang terinventarisir dengan baik dengan target 90%. Nilai capaian indikator kinerja keluaran 100% artinya tercapainya Barang Milik Perangkat Daerah yang terinventarisir dengan baik sebanyak 90%.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 94.000.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 92.369.000,- atau sebesar 98,26%.

- 1) Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 47.150.000,00 terealisasi sebesar Rp 46.732.000,00 atau sebesar 99,11% dengan indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya kegiatan FKUB dengan target 3 kegiatan dan terealisasi 3 kegiatan atau sebesar 100%.
- 2) Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 46.850.000,00 terealisasi sebesar Rp 45.637.000,00 atau sebesar 97,41%. dengan indikator kinerja keluaran adalah terselenggaranya kegiatan FPK dengan target 3 kegiatan dan terealisasi 3 kegiatan atau sebesar 100%.

16. Sasaran 7.1. Meningkatnya pendapatan petani

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 795.483.400 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 743.148.009 atau 93,42%.

- 1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 539.505.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 524.483.568,00 atau 97,22%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Jumlah even yang diikuti kelompok tani (Pekan Daerah KTNA di Kab.Kuansing) 80 Orang dengan realisasi 80 Orang.
- 2) Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 17.413.400,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 17.413.400,00 atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Jumlah peternak yang terlatih 30 Orang dengan realisasi 30 Orang.
- 3) Kegiatan Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 238.565.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 201.251.041,00 atau 84,36 %. Adapun indikator kinerja keluaran ; Pengembangan Tanaman Hortikultura 20 Ha dengan realisasi 20 Ha. Pengembangan Tanaman hortikultura tersebut meliputi Jagung Manis 6 Ha, Semangka 4 Ha, Sayuran 5 Ha dan Nenas 5 Ha.

b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.217.932.650 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 948.675.650 atau 77,89%.

1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 1.131.971.150,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 863.394.150,00 atau 76,27% Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Normalisasi Saluran Air di KPT 1 Unit dengan realisasi 1 Unit, Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal 5 Unit, Tersedianya sarana dan prasarana alat mesin pertanian 39 unit dengan realisasi 39 unit. Realisasi hanya 76,27 % dikarenakan untuk pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal dari jumlah 5 unit hanya terlaksana 3 unit. 2 unit tidak terlaksana karena terkendala regulasi dan persyaratan kelompok tani penerima bantuan.

2) Kegiatan Penyuluh Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 85.961.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 85.281.500,00 atau 99,21%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya demonstrasi/pelatihan teknologi tepat guna pengolahan hasil perkebunan 1 kali dengan realisasi 1 kali.

c. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 325.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 324.920.500 atau 99,98%.

1) Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 325.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 324.920.500,00 atau 99,98%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pelatihan tanaman perkebunan 1 kali dengan realisasi 1 kali.

Dinas Perikanan

a. Program pengembangan budidaya perikanan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 739.800.737,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 706.049.313,- atau sebesar 95,44%.

1) Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul

Anggaran pada kegiatan sebesar Rp. 259.731.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 259.434.802,- atau 99,89 %. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran tersedianya peralatan pembenihan sebanyak 13 item, tersedianya pakan untuk budidaya 6.172 kg. Tolak ukur hasil pekerjaan berupa produksi benih ikan sebanyak 800.000 ekor. Realisasi fisik telah dilaksanakan 100%, Produksi benih dicapai sebesar 431.688 ekor. Tidak tercapainya target benih karena adanya

keterlambatan dalam pengelolaan manajemen pengadaan pakan dan adanya kerusakan pada sumur bor Balai Benih Ikan.

2) Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan

Anggaran pada kegiatan sebesar 236.350.737,- dengan realisasi sebesar Rp. 209.971.5 atau sebesar 88,84%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran terpenuhinya operasional pembinaan pelaku usaha perikanan sebanyak 10 kali dan hasilnya mendapat pembinaan pada kelompok budidaya perikanan sebanyak 25 kelompok. Realisasi kegiatan berupa pembinaan pembudidaya 25 kelompok oleh 5 (lima) orang tenaga honorer perikanan dan PNS pada Bidang Budidaya, pembinaan di fokuskan pada kesehatan lingkungan budidaya, CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) yang diharapkan meningkatkan produksi budidaya sebesar 255,20 ton dari pembudidaya. Secara rinci tercatat produksi perikanan air tawar (kolam dan keramba) sebesar 283,92 ton, produksi budidaya air payau 18,14 ton.

3) Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Anggaran pada kegiatan sebesar 137.323.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 134.840.000 atau sebesar 98,19%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran terpenuhinya operasional pembinaan pelaku usaha perikanan sebanyak 80 kali dan hasilnya mendapat pendampingan pada kelompok budidaya perikanan sebanyak 60 orang kali. Realisasi kegiatan berupa pendampingan tani pembudidaya 25 kelompok oleh 5 (lima) orang tenaga honorer perikanan dan PNS pada Bidang Budidaya, nilai produksi pada tahun 2019 sebesar 302,07 ton dari pembudidaya ikan Kota Dumai, Secara rinci tercatat produksi perikanan air tawar (kolam dan keramba) sebesar 283,92 ton, produksi budidaya air payau 18,14 ton. Bila di bandingkan dengan terget produksi budidaya perikanan tahun 2019, maka dapat disimpulkan telah tercapai 118,37%.

4) Kegiatan Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan

Anggaran pada kegiatan sebesar 43.355.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.130.000 atau sebesar 98,48%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran Terlaksananya pelatihan pembudidaya ikan 20 peserta dan hasilnya mendapat Jumlah kelompok pembudidaya terbina sebanyak 20 orang. Realisasi kegiatan berupa pendampingan tani pembudidaya 20 peserta, Secara rinci tercatat produksi perikanan air tawar (kolam dan keramba) sebesar 283,92 ton, produksi budidaya air payau 18,14 ton. Bila di bandingkan dengan terget produksi budidaya perikanan tahun 2019, maka dapat disimpulkan telah tercapai 118,37%.

5) Kegiatan Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan

Anggaran pada kegiatan sebesar 63.355.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.673.011 atau sebesar 93,07%. Kegiatan ini memiliki tolak ukur kinerja berupa keluaran Terlaksananya pengawasan hama dan penyakit ikan dalam 1 tahun sebanyak 70 kali dan hasilnya Produksi perikanan budidaya 308,07 (Ton). Realisasi kegiatan Terlaksananya pengawasan hama dan penyakit ikan sebanyak 70 kali,

Secara rinci tercatat produksi perikanan air tawar (kolam dan keramba) sebesar 283,92 ton, produksi budidaya air payau 18,14 ton. Bila di bandingkan dengan target produksi budidaya perikanan tahun 2019, maka dapat disimpulkan telah tercapai 118,37%.

b. Program pengembangan perikanan tangkap

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 700.272.280,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 662.980.400,- atau sebesar 94,67%.

1) Kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. Rp.700.272.280,- dan Realisasi serapan anggaran sebesar Rp.662.980.400,- atau 94,67%. Pada kegiatan ini telah terlaksana 94,67% karena pada kegiatan ini merupakan honorarium tenaga pendamping bidang kenelayan sebanyak 3 orang, belanja operasional pembinaan untuk tenaga pendamping non PNS 267 kali dan Terlaksananya peningkatan sarana kelompok 2 kelompok dengan hasil kunjungan terhadap 30 KUB (Kelompok Usaha Bersama). Realisasi kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap hanya ada 19 kelompok yang masih aktif pelaksanaannya. Adapun kelompok nelayan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) KUB Nelayan Ramadhani, berlokasi di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Medang Kampai.
- b) KUB Lomek, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
- c) KUB Camar Laut, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
- d) KUB Mekar Jaya, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat
- e) KUB Kuda Laut, berlokasi di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan.
- f) KUB Nelayan Bersatu Jaya, berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan
- g) KUB Terbit Fajar, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
- h) KUB Nelayan Bakti, berlokasi di Kelurahan Purnama, Kecamatan Sungai Barat
- i) KUB Maju Jaya, berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan.
- j) KUB Harapan Baru, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
- k) KUB Hiu Mas, berlokasi di Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan
- l) KUB Muara Geniut, berlokasi di Kelurahan Geniot, Kecamatan Sungai Sembilan
- m) KUB Nelayan Tuna, berlokasi di Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur
- n) KUB Teluk Makmur, berlokasi di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai.

- o) KUB Guntung Sejati, berlokasi di Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai
- p) KUB Nelayan Sejahtera, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai
- q) KUB Medang Kampai Jaya, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.
- r) KUB Nelayan Bunga Mawar, berlokasi di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai.
- s) KUB Mundam Jaya, berlokasi di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai

17. Sasaran 7.2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.216.859.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.192.757.495 atau 98,02%.

1) Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 104.034.600,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 103.496.420,00 atau 99,48%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pendataan SP dan ubinan produktivitas tanaman 12 bulan dengan realisasi 12 bulan.

2) Kegiatan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 147.750.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 147.664.500,00 atau 99,94%. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pemantauan situasi pangan dan gizi mulai dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kecukupan gizi 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Terlaksananya rapat dewan ketahanan pangan bersama seluruh pemangku kepentingan tingkat kota/propinsi 2 kali dengan realisasi 2 kali.

3) Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 159.780.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 155.390.000,00 atau 97,25%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya introduksi pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan gizi keluarga 1 kelompok.

4) Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 133.675.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 123.655.000,00 atau 92,50 %. Adapun indikator kinerja keluaran; Terlaksananya pengembangan tanaman pangan (Kacang tanah) 10 Ha dengan realisasi 10 Ha.

5) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 202.500.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 202.168.520,00 atau 99,84%. Adapun indikator kinerja keluaran; Berpartisipasi dalam lomba cipta menu B2SA tingkat propinsi/nasional 1 kali dengan realisasi 1 kali, Terlaksananya bimtek pengolahan pangan lokal 20 Orang dengan realisasi 20 Orang, Terlaksananya penyuluhan pangan untuk anak sekolah tingkat SD/MI 150 orang dengan realisasi 150 orang.

6) Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu produk perkebunan, produk pertanian

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 469.119.400,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 460.383.055,00 atau 98,14%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya pendampingan kegiatan APBN 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan, Terlaksananya Pengembangan Tanaman Cabe 5 Ha dengan realisasi 5 Ha.

b. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 518.300.000 dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 508.275.000 atau 98,07%.

1) Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 263.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 263.000.000,00 atau 100,00%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Tersedianya alat dan bahan vaksinasi rabies, jembrana dan SE 1 kegiatan dengan realisasi 1 Kegiatan, Terlaksananya pelayanan keswan oleh medik dan paramedik verteriner di puskeswan 12 bulan dengan realisasi 12 bulan, Terlaksananya pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan 1 kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan.

2) Kegiatan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 255.300.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 245.275.000,00 atau 96,07%. Adapun indikator kinerja keluaran ; Terlaksananya Pengawasan Peredaran BAH/HBAH 12 Bulan dengan realisasi 12 Bulan, Terlaksananya Pengawasan Pematangan Hewan Qurban 1 Kali dengan realisasi 1 kali.

Dinas Perikanan

a. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 92.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 91.431.901 atau 98,63%.

1) Kegiatan peningkatan keanekaragaman produk hasil olahan perikanan.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 91.700.000,- dan realisasi dari kegiatan ini adalah Rp. 91.431.901,- atau sebesar 98,63% dan target capaian kegiatan

(output) 1. Terlaksananya lomba masak menu serba ikan sebanyak 2 kali 2. Terlaksananya surevey nilai konsumsi ikan sebanyak 2 kali, realisasi realisasi kegiatan secara berurutan 2 kali, 2 kali atau sebesar 100%.

18. Sasaran 8.1. Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah

Dinas Perdagangan

a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 186.583.048 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 100.442.486 atau 53,83%.

1) Pengembangan pelayanan UPT Metrologi Legal

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 104.683.048,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 100.442.486,00 atau 95,95%. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya tera dan tera ulang alat UTTP sebanyak 1.833 alat. Dinas Perdagangan melalui UPT Metrologi Legal melaksanakan pelayanan tera ini sebanyak 723 alat.

2) Pengembangan Sarana Pelayanan tera / tera ulang dan pengawasan kemetrolagian.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 81.900.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 80.180.000,00 atau 97,90%. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah tera alat UTTP terhadap dunia usaha sebanyak 500 UTTP. Kegiatan ini dilakukan Dinas Perdagangan dibawah bidang metrologi.

b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Pada tahun 2019, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.942.000.000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.877.365.361 atau 96,67%.

1) Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 40.188.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 36.193.500,00 atau 67,24%. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya partisipasi pada pasar lelang luar daerah. Kegiatan ini dilakukan Dinas Perdagangan dibawah bidang perdagangan.

2) Kegiatan Penambahan Sarana dan Prasarana Pasar

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.822.371.500,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.772.561.861,00 atau 97,27%. Indikator keluaran yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan pasar pemerintah sebanyak 2 buah pasar.

3) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Bahan Pokok Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp

79.440.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 68.610.000,00 atau 86,37%. Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk mengendalikan terjadinya fluktuasi harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat. Dalam kegiatan ini, diutamakan untuk memantau harga elpiji di Kota Dumai. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan pengendalian distribusi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh 7 Kecamatan Kota Dumai.

Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program pengembangan industri kecil dan menengah

Pada tahun 2019, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 76.148.185,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 76.009.868 atau 99,82%.

- 1) Bimbingan dan Konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 76.148.185,- dengan realisasi penyerapan anggaran sejumlah Rp. 76.009.868,- atau 99,82%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah bimbingan dan konsultasi peningkatan manajemen usaha, kemasan dan merek bagi IKM kampung binaan dengan target 21 IKM atau capaian realisasi 100%.

b. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Pada tahun 2019, Jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 306.062.314,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp. 304.960.814 atau 99,64%.

- 1) Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.77.905.914,- terealisasi Rp.77.905.914,-. Atau 100%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah menumbuhkan wirausaha baru, terlatihnya IKM hand craft dengan target 12 Orang atau capaian realisasi 100%.

- 2) Kegiatan Pembinaan Industri kerajinan dan industri kreatif

Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 228.156.400,- terealisasi Rp. 227.054.900,-. Atau 99,52%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Adanya motif desain tenun Kota Dumai dan cendra mata Kota Dumai dengan target 100% atau capaian realisasi 100%

19. Sasaran 8.2. Meningkatnya investasi di Kota Dumai

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp314.879.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 306.474.068,- atau sebesar 97,33%.

- 1) Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 146.959.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 145.415.618,- atau sebesar 98,95%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya informasi potensi dan peluang investasi dengan target 1 kegiatan atau capaian realisasi 100%.

2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 24.970.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.159.550,- atau sebesar 88,75%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersusunnya rencana umum penanaman modal dengan target capaian 1 dokumen atau capaian realisasi 0%. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2019, kegiatan ini hanya dilakukan dalam bentuk koordinasi dan konsultasi baik ke Pemerintahan pusat maupun ke Pemerintah Provinsi Riau.

3) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi.

Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar sebesar Rp. 142.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.898.900,- atau sebesar 97,17%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah jumlah keikutsertaan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pameran/seminar/rakor//presentasi investasi daerah dengan target 1 event atau capaian realisasi 100%.

20. Sasaran 9.1. Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

a. Program pengembangan Kemitraan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 1.039.253.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 966.075.200,- atau sebesar 92,96%.

1) Kegiatan Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 698.225.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 632.125.000,- dan atau sebesar 90,53%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dengan target 5pelatihan yaitu : Pelatihan wisata budaya kuliner dan belanja, Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata, Pelatihan wisata budaya tematik, Pelatihan manajemen home stay/rumah wisata/pondok wisata (2x pelatihan). atau capaian realisasi 100%.

2) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 181.178.500,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 179.543.500,- dan atau sebesar 99,10%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah peserta yang mengikuti lomba mancing dengan target 700 orang atau capaian realisasi 100%.

- 3) Kegiatan pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 159.850.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 154.406.700,- dan atau sebesar 96,59%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah dokumen yang dibuat yaitu dokumen RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) target 1 dokumen atau capaian realisasi 100%.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 726.132.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 623.435.000,- atau sebesar 85,86%.

- 1) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar sebesar Rp. 345,911,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 246,669,000.00,- atau sebesar 71.31%. Adapun indikator Terjaganya seni dan budaya daerah dengan capaian 100%.
- 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
Jumlah anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar sebesar Rp. 380,221,000.00,- dengan realisasi sebesar Rp. 376,766,000.00,- atau sebesar 99.09%. Adapun indikator terdatanya keanekaragaman budaya dengan capaian sebesar 100%.

21. Sasaran 9.2. Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar

Sekretariat Daerah

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 2.050.000.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 2.012.000.000,- atau sebesar 98,15% yang direalisasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tenaga Kependidikan Keagamaan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.2.050.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.2.012.000.000,- atau dengan persentase 98,19%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah jumlah honorium guru TPQ, DTA dan Madrasah yang dibantu adalah selama 8 bulan dan target 8 bulan atau dengan realisasi kinerja 100%.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pada tahun 2019, jumlah anggaran Rp. 4.361.217.540 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.830.103.868,- atau sebesar 87,82%.

- 1) Kegiatan Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.947.752.040,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.**931.343.666** atau dengan persentase **98,27%**. Adapun indikator kinerja keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah event MTQ/ Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Provinsi yang diikuti. Adapun event MTQ/STQ adalah di Provinsi Riau yang Ke-38 pada tahun 2019 Kota Pekanbaru, dengan target dan realisasi 1 event/kegiatan adalah 100%.

2) Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.495.250.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.**442.233.600** atau dengan persentase 89,295%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pelatihan bagi pengurus mesjid/musholla yang diadakan adalah 1 kegiatan dengan target 1 kegiatan, jumlah kegiatan pengajian bagi masyarakat yang diadakan selama 5 bulan dengan target 5 bulan, Jumlah haul yang diikuti ke Baslam Langkat, adapun persentase realisasi ke tiga kegiatan tersebut adalah 100%.

3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Haji Kota Dumai

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.186.715.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.754.248.802,- atau dengan persentase 81,74%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah pembinaan calon jemaah haji Kota Dumai yang dilakukan (proses seleksi TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah), pelaksanaan manasik haji, pemberangkatan ke embarkasi Kota Pekanbaru) Provinsi Riau hingga pulang ke Kota Dumai, dengan realisasi kinerja adalah 100%.

4) Kegiatan Peringatan, Penyambutan dan Perayaan Hari - Hari Besar Keagamaan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.995.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.1.701.577.800,- atau dengan persentase 85,27%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah mubaligh yang mendapat bantuan sebanyak 450 orang dengan target realisasi adalah 450 mubaligh, Jumlah petugas rumah ibadah yang mendapat bantuan adalah sebanyak 1.000 orang dengan target dan realisasi yaitu 1.000 orang atau dengan realisasi 100%, jumlah hari besar keagamaan yang diperingati dan realisasi adalah dari target 8 hari besar Islam yaitu 88,89% yaitu Maulid Nabi Muhammad, SAW, Isra' Mikrat Nabi Muhammad, Penyambutan Bulan Suci Ramadhan, Safari Ramadhan, Nuzul Qur'an, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta Tahun Baru Islam 1441 H).



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2019. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Dumai selama tahun 2019 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2016-2021 dan telah memenuhi 17 (Tujuh belas) sasaran strategisnya yang realisasi > 91% sebagaimana yang telah ditargetkan dari total 21 sasaran strategis. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Dumai dapat dinyatakan sangat berhasil.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Dumai juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.441.209.992.543,95, jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp1.230.199.768.251,24 atau 85,36% (un audit tertanggal 28 Februari 2020)

Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kota Dumai akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Adapun upaya perbaikan terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target pada tahun 2019, seperti:

- 1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (dengan capaian 65,03%)

Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Program Pembangunan jalan dan jembatan.

- 2) Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan (dengan capaian 99,04%)

Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Perhubungan dengan Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan; Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

- 3) Harapan lama sekolah (dengan capaian 93,58)
Perangkat Daerah Penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 4) Angka melek huruf (dengan capaian 96,22%)
Perangkat Daerah Penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Program Pengembangan Budaya Baca;
- 5) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (dengan capaian 99,18%)
Perangkat Daerah Penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (dengan capaian 87,92%)
Perangkat Daerah Penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 7) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs (dengan capaian 96,84%)
Perangkat Daerah Penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- 8) GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit (dengan capaian 81,03%)
Perangkat daerah penanggung jawab adalah Rumah Sakit Umum Daerah dengan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata; Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
- 9) Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA) (dengan capaian tidak ada atau 0%, dikarenakan POPDA diselenggarakan 2 tahun sekali)
Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan Program peningkatan peran serta kepemudaan; Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
- 10) Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (dengan capaian 99,89%)
Perangkat daerah Penanggung jawab adalah Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan); Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- 11) Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan (dengan capaian 95,55%)
Perangkat Daerah Penanggung jawab adalah Dinas ketahanan Pangan dan

Pertanian dengan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; Program peningkatan produksi hasil peternakan,

12) Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB (dengan capaian 73,99%)

Perangkat daerah penanggung jawab adalah Dinas Perdagangan dengan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

13) Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib (dengan capaian 91,09)

Perangkat Daerah penanggung jawab adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan; Sekretariat Daerah dengan program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Kekurangan yang terjadi selama 2019 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 telah dilampirkan Rencana Kinerja Tahunan yang berupa Target Indikator Kinerja Utama tahun 2020 yang hendak dicapai. Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Lampiran

Realisasi Capaian Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019



TABEL 1.2 REALISASI CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian Kinerja	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi Sumber Daya				
			2019	2019	(%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar														
Tujuan 1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1. Persentase Cakupan Kecamatan yang mendapatkan infrastruktur layak	%	57.1	57.58	100.83									
					% Pencapaian Tujuan	100.83								
Sasaran 1.1 : Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	2. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	4300	4310.00	100.23	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	20,724,363,802	20,017,909,268	96.59				
					% Pencapaian sasaran	100.23	2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	119,301,000	108,611,250	91.04			
								Efisiensi Anggaran	20,843,664,802	20,126,520,518	96.56			
Sasaran 1.2 : Meningkatnya infrastruktur perkotaan	3. Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3.48	3.95	113.51	3	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8,395,082,840	8,156,623,790	97.16				
						4	Program Perencanaan Tata Ruang	799,247,500	744,773,161	93.18				
						5	Program Pemanfaatan Ruang	269,928,600	260,646,100	96.56				
						6	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	108,296,100	81,506,900	75.26				
					4. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	57.59	37.45	65.03	7	Program pembangunan jalan dan jembatan	73,796,687,937	73,396,339,134	99.46
					5. Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2.83	13.75	485.87	8	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	391,923,850	118,331,100	30.19
										9	Program lingkungan sehat perumahan	3,364,627,300	3,110,550,855	92.45
					6. Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	6	28.93	482.17	10	Program Pengembangan Perumahan	542,876,000	534,888,614	98.53
					7. Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	52	52.00	100.00	11	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	7,448,309,150	5,837,817,467	78.38
					8. Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	416	412.00	99.04	12	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3,147,217,200	3,096,432,400	98.39
										13	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	5,270,629,050	4,457,857,125	84.58
										14	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	392,684,200	264,754,000	67.42
										15	Program peningkatan pelayanan angkutan	1,408,028,410	1,189,427,500	84.47
										16	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1,670,643,000	1,556,147,000	93.15
										17	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	507,000,000	489,722,500	96.59
										18	Program pengelolaan areal pemakaman	540,050,200	485,052,980	89.82
					% Pencapaian sasaran				224.27	Efisiensi Anggaran	108,053,231,337	103,780,870,626	96.05	
Sasaran 1.3 : Meningkatnya kualitas lingkungan	9. Persentase Kualitas udara	%	75	75.00	100.00	19	Program peningkatan pengendalian polusi	85,000,000	84,720,000	99.67				
					10. Persentase kualitas air	%	75	75.00	100.00	20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	236,200,152	183,228,511	77.57
										21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8,064,655,100	7,762,610,859	96.25
					% Pencapaian sasaran				100.00	Efisiensi Anggaran	8,385,855,252	8,030,559,370	95.76	
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing														
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	11. Rata-rata lama sekolah	Tahun	9.69	10.04	103.61									
					12. Harapan lama sekolah	Tahun	13.25	12.40	93.58					
					% Pencapaian Tujuan				98.60					
Sasaran 2.1 : Meningkatnya partisipasi pendidikan	13. Angka melek huruf	%	99.46	95.70	96.22	22	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	528,780,250	468,725,945	88.64				
										23	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,668,255,400	1,466,868,191	87.93
					14. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99.75	98.93	99.18	24	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2,464,316,980	2,135,311,741	86.65
					15. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	95.76	84.19	87.92	25	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	36,037,000,000	36,037,000,000	100.00
					% Pencapaian sasaran				96.52	Efisiensi Anggaran	40,698,352,630	40,107,905,877	98.55	
Sasaran 2.2 : Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	16. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100.00	100.00	26	Program Pendidikan Non Formal	227,233,230	223,140,230	98.20				
					17. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100.00	100.00	27	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17,322,451,100	15,905,650,900	91.82
					% Pencapaian sasaran				100.00	Efisiensi Anggaran	17,549,684,330	16,128,791,130	91.90	

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian Kinerja	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi Sumber Daya	
			2019	2019	(%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sasaran 2.3 : Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	18. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0.277083333		127.54	28 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	63,253,448,839	61,410,349,989	97.09		
	19. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0.370138889	0.353380	96.84						
				0.358449							
	% Pencapaian sasaran				112.19		Efisiensi Anggaran	63,253,448,839	61,410,349,989	97.09	2.91
Tujuan 3 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	20. Angka Harapan Hidup	Tahun	71.02	71.20	100.25						
	% Pencapaian Tujuan				100.25						
Sasaran 3.1 : Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbiditas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	21. Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100	100.00	100.00	29 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	84,210,000	79,254,000	94.11		
						30 Program Pengawasan Obat dan Makanan	72,005,000	70,988,500	98.59		
						31 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,589,638,536	1,513,626,550	95.22		
						32 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	16,036,436,930.24	15,269,332,243	95.22		
						33 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	19,593,399,691	19,175,693,824	97.87		
						34 Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	453,173,700	446,683,950	98.57		
						35 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	952,184,750	827,275,616	86.88		
						36 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	386,380,000	360,991,500	93.43		
						37 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	131,912,250	128,606,000	97.49		
	% Pencapaian sasaran				100.10		Efisiensi Anggaran	39,299,340,857	37,872,452,183	96.37	3.63
Sasaran 3.2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	24. GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31	36.88	81.03	38 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	53,181,650,000	29,683,499,162	55.82		
						39 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	3,666,600,000	2,706,398,863	73.81		
	25. Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	146,887	147,659	100.53						
						40 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	33,871,283,014	31,894,442,737	94.16		
						41 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4,055,000,000	2,775,935,773	68.46		
						42 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	423,914,000	328,094,622	77.40		
						43 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	10,080,830,000	8,742,405,000	86.72		
						44 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	97,039,160,000	114,799,287,399	118.30		
	% Pencapaian sasaran				90.78		Efisiensi Anggaran	202,318,437,014	190,930,063,556	94.37	5.63
Tujuan 4 : Meningkatkan prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	26. Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	0.00	0.00	0.00						
	% Pencapaian Tujuan				0.00						
Sasaran 4.1 : Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	27. Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-	0.00	0.00	45 Program peningkatan peran serta kepemudaan	687,176,150	682,908,900	99.38		
						46 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	928,487,650	789,899,850	85.07		
	% Pencapaian sasaran				0.00		Efisiensi Anggaran	1,615,663,800	1,472,808,750	91.16	8.84
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan											
Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	28. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rp. 000	12,391	12,453	100.50						
	29. PDRB per kapita	Rp. 000	110,203.07	117,198.83	106.35						
	% Pencapaian Tujuan				103.42						
Sasaran 5.1 : Terwujudnya pemerataan pendapatan	30. Indeks Gini	Indeks	0.415	0.34	118.07	47 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	646,264,000	607,637,950	94.02		
	% Pencapaian sasaran				118.07		Efisiensi Anggaran	646,264,000	607,637,950	94.02	5.98
Sasaran 5.2 : Menurunnya persentase penduduk	31. Tingkat Kemiskinan	%	4.5	3.56	120.89	48 Program Pembinaan Anak Terlantar	-	-			
						49 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	199,276,205	196,895,800	98.81		
						50 Program pembinaan panli asuhan /panli jompo	140,658,054	138,183,598	98.24		
						51 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	181,375,500	175,320,166	96.66		
						52 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	297,457,100	293,818,856	98.78		

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian Kinerja	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi Sumber Daya	
				2019	2019	(%)						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							53	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	560,233,000	553,999,083	98.89	
							54	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,033,872,120	1,004,718,901	97.18	
							55	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	272,379,207	269,663,200	99.00	
	% Pencapaian sasaran					120.89		Efisiensi Anggaran				
									2,685,251,186	2,632,599,604	98.04	
Sasaran 5.3 : Menurunnya laju pertumbuhan per	32.	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2.072	1.19	142.57	58	Program Pengendalian Penduduk	2,070,260,000	2,042,619,024	98.66	
							56	Program Keluarga Berencana	2,093,553,750	1,965,692,430	93.89	
							57	Program pelayanan kontrasepsi	1,606,190,300	1,565,022,283	97.44	
	% Pencapaian sasaran					142.57		Efisiensi Anggaran				
									5,770,004,050	5,573,333,737	96.59	
Sasaran 5.4 : Meningkatnya lapangan kerja	33.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.9	6.47	118.10	59	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	101,045,000	96,234,000	95.24	
							60	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	179,846,000	164,580,000	91.51	
							61	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	791,561,000	768,204,400	97.05	
	% Pencapaian sasaran					118.10		Efisiensi Anggaran				
									1,072,452,000	1,029,018,400	95.95	
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan												
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	34.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78	83.82	107.46						
	% Pencapaian Tujuan					107.46						
Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	35.	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	6	5.00	116.67	62	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	314,879,500	306,474,068	97.33	
							63	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	162,939,000	162,567,500	99.77	
							64	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	458,584,700	398,612,546	86.92	
							65	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	219,980,000	219,522,520	99.79	
							66	Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	197,750,000	195,643,200	98.93	
							67	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,091,433,936	2,065,674,995	98.77	
							68	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	593,682,000	557,171,750	93.85	
							69	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	103,000,000	93,281,000	90.56	
							70	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	826,460,000	708,073,955	85.68	
							71	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	115,625,000	112,764,998	97.53	
							72	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,231,330,729	1,155,380,300	93.83	
							73	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,260,400,000	1,222,594,200	97.00	
							74	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	313,479,000	311,559,000	99.39	
							75	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	201,480,000	196,830,000	97.69	
							76	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	369,510,119	365,076,195	98.80	
							77	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	724,273,559	663,487,811	91.61	
							78	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	41,035,470	40,486,870	98.66	
							79	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1,314,744,225	1,280,615,087	97.40	
							80	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	496,358,500	493,178,439	99.36	
							81	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	521,146,330	496,512,562	95.27	
							82	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	393,840,000	393,840,000	100.00	
							83	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	711,724,750	711,724,750	100.00	
							84	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	73,130,000	57,480,000	78.60	
							85	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	653,290,000	446,890,000	68.41	
							86	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	895,500,000	895,500,000	100.00	
							87	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	190,884,109	190,884,109	100.00	
							88	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	436,925,000	433,525,000	99.22	
							89	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	885,900,000	885,900,000	100.00	
							90	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50,000,000	50,000,000	100.00	
							91	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	361,422,000	361,422,000	100.00	
							92	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	401,793,000	401,793,000	100.00	
							93	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50,413,000	50,143,000	99.46	
							94	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	443,280,000	443,280,000	100.00	
							95	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	870,300,000	870,300,000	100.00	
							96	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50,000,000	48,229,000	96.46	
							97	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	580,850,000	577,530,000	99.43	

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian Kinerja	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi Sumber Daya	
			2019	2019	(%)						7
1	2	3	4	5	6						
						98	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	953.982.000	953.767.000	99,98	
						99	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.000.000	49.815.000	99,63	
						100	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	529.830.000	529.347.350	99,91	
						101	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	969.870.000	969.765.000	99,99	
						102	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	99.070.548	81.318.500	82,08	
	% Pencapaian sasaran				116,67		Efisiensi Anggaran	21.210.096.475	20.447.960.705	96,41	3,59
Sasaran 6.2 : Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	36.	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	103	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	5.148.158.000	4.767.199.945	92,60	
	37.	Nilai Akuntabilitas	B	B	100,00	104	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3.865.366.034	3.521.303.860	91,10	
						105	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	390.000.000	374.668.500,00	96,07	
						106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	623.693.080	564.987.822	90,59	
						107	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	8.612.193.540	7.663.979.228	88,99	
						108	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	80.780.200	69.061.987	85,49	
						109	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	204.618.000	203.900.533	99,65	
						110	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	30.865.000	30.825.000	99,87	
						111	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.172.642.500	3.142.784.986	99,06	
						112	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	232.351.438	227.146.760	97,76	
						113	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	2.769.737.000	2.448.520.165	88,40	
						114	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	11.489.447.272	7.865.255.181	68,46	
						115	Program perencanaan pembangunan daerah	1.791.033.600	1.453.253.717	81,14	
						116	Program perencanaan pembangunan ekonomi	289.411.955	238.425.985	82,38	
						117	Program perencanaan sosial dan budaya	793.706.000	723.201.618	91,12	
						118	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.340.508.950	5.921.413.840	93,39	
						119	Program pengembangan wawasan kebangsaan	94.000.000	92.369.000,00	98,26	
	% Pencapaian sasaran				100,00		Efisiensi Anggaran	45.928.512.569	39.308.298.127	85,59	14,41
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan											
Tujuan 7 : Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan lokal	38.	Nilai PDRB sektor pertanian/kehutanan/perikanan	Rp. Milyar	2.018,91	1.929,04	95,55					
	% Pencapaian Tujuan				95,55						
Sasaran 7.1 : Meningkatnya pendapatan petani	39.	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	198,1	252,31	127,36	120	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	795.483.400	743.148.009	93,42
						121	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.217.932.650	948.675.650	77,89	
						122	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	325.000.000	324.920.500	99,98	
						123	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	237.470.000	234.270.000	98,65	
						124	Program peningkatan produksi hasil peternakan	799.190.600	732.100.000,00	91,61	
						125	Program pengembangan budidaya perikanan	739.800.737	706.049.313	95,44	
						126	Program pengembangan perikanan tangkap	700.272.280	662.980.400	94,67	
	% Pencapaian sasaran				127,36		Efisiensi Anggaran	4.815.149.667	4.352.143.872	90,38	9,62
Sasaran 7.2 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	40.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,09	82,00	99,89	127	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1.216.859.000	1.192.757.495	98,02
						128	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	92.700.000	91.431.901	98,63	
						129	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	518.300.000	508.275.000,00	98,07	
	% Pencapaian sasaran				99,89		Efisiensi Anggaran	1.827.859.000	1.792.464.396	98,06	1,94
Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah											
Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	41.	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,32	5,61	129,86					
	% Pencapaian Tujuan				129,86						

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian Kinerja	Program Prioritas	Pagu	Realisasi	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi Sumber Daya
			2019	2019	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 8.1 : Meningkatkan kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	42. Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.45	15.87	73.99	130 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	186,583,048	100,442,486	53.83	
	43. Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.46	57.74	106.02	131 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1,942,000,000	1,877,365,361	96.67	
						132 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	-	-		
						133 Program pengembangan industri kecil dan menengah	76,148,185	76,009,868	99.82	
						134 Program peningkatan kemampuan teknologi industri	306,062,314	304,960,814	99.64	
					90.00	Efisiensi Anggaran	2,510,793,547	2,358,778,529	93.95	6.05
Sasaran 8.2 : Meningkatkan investasi di Kota Dumai	44. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	5,904,033,104,282	5,937,390,800,000	100.56	135 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	314,879,500	306,474,068	97.33	
					100.56	Efisiensi Anggaran	314,879,500	306,474,068	97.33	2.67
Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu										
Tujuan 9 : Mewujudkan pembangunan manusia berbasis nilai-nilai agama dan budaya melayu sejak dini	45. Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib serta Penetapan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	90.5	100.00	110.50					
					110.50					
Sasaran 9.1 : Meningkatkan implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	46. Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	89	100.00	112.36	136 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	726,132,000	623,435,000	85.86	
						137 Program pengembangan Kemitraan	1,039,253,500	966,075,200	92.96	
					112.36	Efisiensi Anggaran	1,765,385,500	1,589,510,200	90.04	9.96
Sasaran 9.2 : Meningkatkan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	47. Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum walib	%	92	83.80	91.09	138 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2,050,000,000	2,012,000,000	98.15	
						140 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	4,361,217,540	3,830,103,868	87.82	
					91.09	Efisiensi Anggaran	6,411,217,540	5,842,103,868	91.12	8.88

Lampiran

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019





WALIKOTA DUMAI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. ZULKIFLI, A.S, M.Si
Jabatan : WALIKOTA DUMAI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Dumai, Oktober 2019

Walikota Dumai,



Drs. H. ZULKIFLI, A.S, M.Si

**Perubahan Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Dumai
Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2019
1	2	3	4	5
Misi 1 :Meningkatkan Pelayanan Air Bersih yang Terjangkau dan Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar				
1	Meningkatnya kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	1 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani dengan Jaringan Air Minum Perpipaan	Sambungan Rumah	4300
2	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	2 Persentase Infrastruktur Dasar dan Utilitas Umum di kecamatan	%	3,48
		3 Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	57,59
		4 Persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih dan sehat	%	2,83
		5 Persentase Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	%	6
		6 Persentase Sarana Pengendalian Banjir Bagi Masyarakat Kota Dumai	%	52
		7 Ruas jalan dengan sarana penerangan jalan	Ruas Jalan	416
3	Meningkatnya kualitas lingkungan	8 Persentase Kualitas udara	%	75
		9 Persentase kualitas air	%	75
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM yang Berdaya Saing				
4	Meningkatnya partisipasi pendidikan	10 Angka melek huruf	%	99,46
		11 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99,75
		12 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	95,76
5	Meningkatnya angka kelulusan Pendidikan dasar	13 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		14 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
6	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	15 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	per 1.000 siswa	0,277083333
		16 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	per 1.000 siswa	0,370138889
7	Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	17 Persentase Terkendalinya Kejadian Mortalitas (Kematian)	%	100
		18 Persentase Terkendalinya Kejadian Morbiditas (Kesakitan)	%	100
		19 Persentase Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
8	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	20 GDR (Gross Death Rate), Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dari rumah sakit	%	31
		21 Jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis	Orang	146.887
9	Meningkatnya prestasi daerah dalam kepemudaan dan olahraga	22 Peringkat olahraga di Tingkat Provinsi (Pekan Olah raga Pelajar Daerah/ POPDA)	Peringkat	-

Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan					
10	Terwujudnya pemerataan pend	23	Indeks Gini	Indeks	0,415
11	Menurunnya persentase penduduk	24	Tingkat Kemiskinan	%	4,5
12	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)	25	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,072
13	Meningkatnya lapangan kerja	26	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,9
Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan					
14	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	27	Peringkat LPPD Kota Dumai di Propinsi Riau	Peringkat	6
15	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	28	Opini BPK	Opini BPK	WTP
		29	Nilai Akuntabilitas	Nilai	B
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan serta Ketahanan Pangan					
16	Meningkatnya pendapatan petani	30	Pendapatan perkapita petani	Rp. Juta	198,1
17	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	31	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	82,09
Misi 6 : Meningkatkan Produktifitas Sektor Jasa dan Perdagangan, Industri dan Kemaritiman Dalam Mendukung Perekonomian Daerah					
18	Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	32	Persentase Kontribusi sektor jasa dan perdagangan pada PDRB	%	21.45
		33	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	54.46
19	Meningkatnya investasi di Kota Dumai	34	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	5.904.033.104.282
Misi 7 :Mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang Seimbang Secara Lahir Batin yang Agamis serta Berbasis Budaya Melayu					
20	Meningkatnya implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	35	Persentase sekolah Pendidikan Dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal budaya melayu	%	89
21	Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan dasar	36	Persentase sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kegiatan agama diluar kurikulum wajib	%	92

Sasaran 1: Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan sumber air bersih	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	20.724.363.802	Dinas PUPR
	2	Program Penyediaan dan Penaelolaan Air Baku	119.301.000	
Sasaran 2: Meningkatkan infrastruktur perkotaan	3	Program Pengembangan Perumahan	542.876.000	Dinas Perkim
	4	Program lingkungan sehat perumahan	3.364.627.300	
	5	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	8.395.082.840	
	6	Program pembangunan jalan dan jembatan	73.796.687.937	Dinas PU PR
	7	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	7.448.309.150	
	8	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	391.923.850	

	9	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	5.270.629.050	Dinas Perhubungan
	10	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	392.684.200	
	11	Program peningkatan pelayanan angkutan	1.408.028.410	
	12	Program pengendalian dan keamanan lalu lintas	1.670.643.000	
	13	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	507.000.000	
	14	Program pengelolaan areal pemakaman	540.050.200	Dinas Perkim
	15	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.147.217.200	Dinas Lingkungan Hidup
	16	Program Perencanaan Tata Ruang	799.247.500	Dinas PUPR
	17	Program Pemanfaatan Ruang	269.928.600	
	18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	108.296.100	
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas lingkungan	19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.064.655.100	Dinas Lingkungan hidup
	20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	236.200.152	
	21	Program peningkatan pengendalian polusi	85.000.000	
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Pendidikan	22	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.464.316.980	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	23	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.668.255.400	
	24	Program Bantuan Operasional Sekolah	36.037.000.000	
	25	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	528.780.250	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Sasaran 5: Meningkatnya Angka Kelulusan Pendidikan Dasar	26	Program Pendidikan Non Formal	227.233.230	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	27	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.322.451.100	
Sasaran 6: Meningkatnya Fasilitas Sarana c	28	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	63.253.448.839	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 7: Terkendalinya Kejadian Mortalitas, Morbilitas dan meningkatnya Status Gizi Masyarakat	29	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	386.380.000	Dinas Kesehatan
	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	131.912.250	
	31	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	84.210.000	
	32	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.647.898.979	
	33	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	19.593.399.691	

	34	Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	453.173.700	
	35	Program Pengawasan Obat dan Makanan	72.005.000	
	36	Program Pengembangan Linkungan Sehat	952.184.750	
	37	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.589.638.536	
Sasaran 8: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	38	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	33.871.283.014	Dinas Kesehatan
	39	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.055.000.000	RSUD
	40	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	423.914.000	
	41	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	53.181.650.000	
	42	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	3.666.600.000	
	43	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD	10.080.830.000	
	44	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		
Sasaran 9: Meningkatnya Prestasi Daerah Dalam Kepemudaan dan Olah Raga	45	Program peningkatan peran serta kepemudaan	687.176.150	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	46	Program Pembinaan dan Pemasvarakatan Olah Raga	477.993.200	
Sasaran 10: Terwujudnya Pemerataan Pendapatan masyarakat	47	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	646.264.000	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran 11: Menurunnya persentase penduduk miskin	48	Program Pembinaan Anak Terlantar	-	Dinas Sosial
	49	Program pembinaan para penvandana cacat dan trauma	199.276.205	
	50	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	140.658.054	
	51	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	181.375.500	
	52	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	297.457.100	
	53	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	560.233.000	
	54	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.033.872.120	

	55	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	272.379.207	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sasaran 12: Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	56	Program Keluarga Berencana	2.093.553.750	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	57	Program pelayanan kontrasepsi	1.606.190.300	
	58	Program Pengendalian Penduduk	2.070.260.000	
Sasaran 13: Meningkatnya Lapangan kerja	59	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenakeriaan	101.045.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	60	Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja	179.846.000	
	61	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	791.561.000	
Sasaran 14: Meningkatnya kualitas kelembagaan pelayanan publik	62	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	162.939.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	63	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu	1.000.298.010	
	64	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	458.584.700	Sekretariat Daerah
	65	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	219.980.000	
	66	Program Pendataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	197.750.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	67	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.091.433.936	
	68	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	593.682.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	69	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	103.000.000	
	70	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	826.460.000	
	71	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	115.625.000	
	72	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.231.330.729	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	73	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.260.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	74	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	313.479.000	
	75	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	201.480.000	
	76	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	369.510.119	Sekretariat Daerah
	77	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	724.273.559	
	78	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	41.035.470	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	79	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.314.744.225	
	80	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	496.358.500	
	81	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	521.146.330	

	82	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	393.840.000	Kec. Dumai Barat
	83	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	711.724.750	
	84	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	73.130.000	
	85	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	653.290.000	Kec. Dumai Timur
	86	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	895.500.000	
	87	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	190.884.109	
	88	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	436.925.000	Kec. Bukit Kapur
	89	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	885.900.000	
	90	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.000.000	
	91	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	361.422.000	Kec. Medang Kampai
	92	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	401.793.000	
	93	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.413.000	
	94	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	443.280.000	Kec. Sungai Sembilan
	95	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	870.300.000	
	96	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.000.000	
	97	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	580.850.000	Kec. Dumai Kota
	98	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	953.982.000	
	99	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	50.000.000	
	100	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	529.830.000	Kec. Dumai Selatan
	101	Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT	969.870.000	
	102	Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan	99.070.548	
Sasaran 15: Meningkatnya kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah	103	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	5.148.158.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	104	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3.865.366.034	Inspektorat
	105	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	390.000.000	

	106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	623.693.080	Sekretariat Daerah
	107	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	8.612.193.540	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	108	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	80.780.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	109	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	204.618.000	
	110	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	30.865.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	111	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.172.642.500	
	112	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	232.351.438	
	113	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	2.769.737.000	
	114	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	11.489.447.272	Sekretariat DPRD
	115	Program perencanaan pembangunan daerah	1.791.033.600	Bappeda
	116	Program perencanaan pembangunan ekonomi	289.411.955	
	117	Program perencanaan sosial dan bud.	793.706.000	
	118	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.340.508.950	Badan Pendapatan Daerah
	119	Program pengembangan wawasan kebangsaan	94.000.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran 16: Meningkatnya pendapatan petani	120	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	795.483.400	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	121	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1.217.932.650	Dinas Ketahanan Pangan dan
	122	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	325.000.000	
	123	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	237.470.000	
	124	Program peningkatan produksi hasil peternakan	799.190.600	
	125	Program pengembangan budidaya perikanan	739.800.737	Dinas Perikanan
	126	Program pengembangan perikanan tanakap	700.272.280	
Sasaran 17: Meningkatnya Ketahanan pangan masyarakat	127	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1.216.859.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	128	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	92.700.000	Dinas Perikanan
	129	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	518.300.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sasaran 18: Meningkatnya kontribusi sektor jasa, perdagangan dan Industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah	130	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	186.583.048	Dinas Perdagangan
	131	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.942.000.000	
	132	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	-	

	133	Program pengembangan industri kecil dan menengah	76.148.185	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	134	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	306.062.314	
Sasaran 19: Meningkatnya investasi di kota Dumai	135	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	314.879.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 20: Meningkatnya Implementasi budaya melayu dalam pendidikan dasar	136	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	726.132.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	137	Program pengembangan Kemitraan	1.039.253.500	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Sasaran 21: Meningkatnya Implementasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Pendidikan Dasar	138	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.050.000.000	Sekretariat Daerah
	140	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	4.361.217.540	
		JUMLAH	485.782.770.004	

Dumai, Oktober 2019

Walikota Dumai



DR. H. ZULKIFLI AS, M.Si

Lampiran

Pernyataan Telah di Review Atas LKJ-IP Tahun 2019
Oleh Inspektorat Kota Dumai





**PEMERINTAH KOTA DUMAI
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Tuanku Tambusai Kode Pos 28882
DUMAI – RIAU

e-mail : inspektoratkotadumai@yahoo.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Dumai, 24 Maret 2020

INSPEKTUR DAERAH,

SYAHRUL RIZAL, SH.
Jaksa Utama Pratama
NIP. 19641218 199303 1 003



PEMERINTAH KOTA DUMAI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai Kode Pos 28882

DUMAI – RIAU

e-mail : inspektoratkotadumai@yahoo.com

FORMULIR CHECKLIST REVIU

NO.	PERNYATAAN	CHECKLIST	KETERANGAN		
I	FORMAT	1.	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓	Hasil <i>desk evaluation</i> yang telah Tim Reviu lakukan terhadap LKj yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah berupa Kondisi dan potensi daerah, Visi, Misi, Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan, Indikator Kinerja Utama, Data Rencana dan Target Kinerja, Pengukuran dan Capaian Kinerja serta Data pembandingan Kinerja Tahun sebelumnya (2018) dengan Tahun 2019.
		2.	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓	Dari hasil Reviu diperoleh data bahwa LKj telah menyajikan informasi mengenai target kinerja sebanyak 21 sasaran strategis dengan 36 indikator kinerja sasaran yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019.
		3.	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓	Hasil reviu terhadap LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang tercermin dalam 21 sasaran yang terimplementasikan ke dalam 139 program dengan capaian total sebesar 91,12 %.
		4.	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓	Lampiran yang ada dalam LKj ada – lah hanya Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditadangi oleh Walikota Dumai beserta lampirannya. Dan pada badan laporan (Bab III) hanya membahas dan menjelaskan mengenai Perubahan Perjanjian Kinerja ini.
		5.	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	-	Belum terdapat penyajian secara khusus mengenai upaya perbaikan ke depan, khususnya terhadap target-target dalam Perjanjian Kinerja yang belum memenuhi harapan. Namun pernyataan mengenai upaya perbaikan hanya terdapat dalam Bab IV (Penutup) yaitu pada paragraf terakhir.
		6.	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓	LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan seperti anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama baik pagu, realisasi maupun persentase capaian keuangan, sebagaimana terdapat dalam Bab III khususnya pada Tabel 3.38.

II	MEKANISME PENYUSUNAN	1.	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓	LKj IP telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai sebagai unit yang memiliki tugas dan fungsi tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c Perwako Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
		2.	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓	Data dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai, yaitu berasal dari data LKj OPD, BPS Kota Dumai dan RPJMD serta Data lain dari sumber-sumber yang berkompeten. Namun demikian masih terdapat kekeliruan penulisan target seperti pada Indikator ruas jalan dengan sarana penerangan jalan yang tertulis dalam LKj sebanyak 416 ruas jalan, akan tetapi target dalam RPJMD sebanyak 395 ruas jalan.
		3.	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dari unit kerja ke unit unit penyusun LKj	✓	Walikota Dumai dengan unit pengolah Bappeda Kota Dumai telah menyampaikan permintaan penyampaian LKj OPD melalui surat Walikota Dumai (Cq. Sekretaris Daerah Kota Dumai) Nomor 050/19/Bappeda tanggal 6 Januari 2020 perihal Penyampaian Laporan Kinerja OPD Tahun 2019 dan Data LKPJ Walikota Dumai Akhir Tahun 2019. Walaupun pada akhirnya seluruh OPD telah menyampaikan Laporan LKj-nya, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan ternyata berdasarkan informasi dari pihak terkait berwenang bahwa masih terdapat OPD yang terlambat menyampaikan sebanyak ± 10 OPD (27,03 %).
		4.	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja	-	Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa di tingkat OPD lingkup Pemda Kota Dumai belum terdapat penetapan penanggung jawab pengumpul data / informasi dalam rangkapyusunan LKj. Bahkan untuk Tingkat Kota Dumai juga belum terdapat Tim yang ditetapkan untuk menyusun LKj IP Kota Dumai Tahun 2019.
		5.	Data / informasi yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓	Secara umum bahwa data/informasi yang disampaikan dalam LKj telah diyakini kebenarannya, Karena mayoritas data yang diperoleh guna penyusunan LKj merupakan data primer yakni berasal dari OPD-OPD lingkup Kota Dumai. Namun demikian masih terdapat kekeliruan penulisan target seperti pada Indikator ruas jalan dengan sarana penerangan jalan yang tertulis dalam LKj sebanyak 416 ruas jalan, akan tetapi target dalam RPJMD sebanyak 395 ruas jalan, sehingga perlu dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kemudian dalam Bab III huruf D

				(Penjabaran Realisasi Anggaran berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja 2019), sebagian belum terdapat mengenai indikator kinerja keluarannya.
		6.	Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓ Pada dasarnya bahwa LKj IP ini merupakan "gabungan" dari LKj OPD-OPD lingkup Pemda Kota Dumai, maka apa yang disajikan dalam LKj ini tidak bertentangan dengan materi/muatan LKj OPD-OPD.
		7.	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	✓ Berdasarkan data yang ada pada Pejabat Pengawas terkait di lingkup Bappeda Kota Dumai, bahwa terdapat dokumen Monitoring dan Evaluasi secara bulanan terhadap seluruh OPD yang dilakukan oleh Walikota Dumai dengan difasilitasi oleh Bappeda Kota Dumai. Hasil Monitoring dan Evaluasi ini merupakan materi utama dalam penyusunan LKj.
III	SUBSTANSI	1.	Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja	✓ Lampiran Perjanjian Kinerja (antara lain terdapat tujuan/sasaran) yang terdapat dalam Bab II dan formalnya (yang ditanda tangani) berada pada Lampiran LKj, adalah substansi yang dibahas dalam LKj yaitu terdapat pada Bab III mengenai Pengukuran Kinerja. Sehingga otomatis bahwa tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja.
		2.	Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓ Tujuan / sasaran yang ada di LKj, terdapat pada Bab II (Tabel 2.1. mengenai Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran) telah sesuai / selaras dengan Tujuan / sasaran yang ada di Bab VI (Tabel 6.9. mengenai Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Dumai) RPJMD Kota Dumai 2016 – 2021.
		3.	Jika butir 1 dan butir 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	- -
		4.	Tujuan / sasaran dalam LKj sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja	✓ Tujuan / Sasaran LKj yang tertuang dalam Bab I (Pendahuluan) selaras dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana terdapat dalam Bab II (Perencanaan Kinerja) dan Lampiran LKj yang memuat antara lain Indikator Kinerja. Sedangkan Bab III (Pengukuran Kinerja) merupakan penjelasan dan penjabaran dari Bab II. Disamping itu dalam Bab III LKj pada Tabel 3.2. (Capaian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2019) telah menampilkan Tujuan, sasaran indikator sasaran, target realisasi dan capaian kinerja. Keseluruhan hal tersebut di atas juga telah sesuai dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021,

			seperti terdapat pada Tabel 8.2. (Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 – 2021).
5.	Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓	Tujuan / Sasaran LKj yang tertuang dalam Bab I (Pendahuluan) selaras dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana terdapat dalam Bab II (Perencanaan Kinerja) dan Lampiran LKj yang memuat mengenai Indikator Kinerja Utama. Sedangkan Bab III (Pengukuran Kinerja) merupakan penjelasan dan penjabaran dari Bab II. Hal tersebut di atas juga telah sesuai dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016 – 2021, seperti yang terdapat pada Tabel 8.1. (Penetapan Indikator Kinerja Utama).
6.	Jika butir 4 dan butir 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	-
7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan lainnya yang bermanfaat	✓	Dalam Bab III (Pengukuran Kinerja) pada LKj pada setiap pembahasan telah membandingkan data kinerja dengan tahun lalu dan standar nasional. Khusus untuk standar nasional seperti Gambar 3.90.a (Indeks Gini), Gambar 3.93.a (Tingkat Kemiskinan) dan Gambar 3.99.a (Tingkat Pengangguran Terbuka).
8.	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran	✓	Dalam LKj IKU dan IK telah cukup untuk mengukur tujuan / sasaran. Hal ini terlihat dalam lampiran Perjanjian Kinerja, dimana setiap tujuan / sasaran telah terdapat indikator pengukurannya yang spesifik, terukur, logis / mungkin untuk dicapai, realistis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
9.	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-	-
10.	IKU dan IK telah SMART	✓	Perjanjian Kinerja dalam LKj muatannya adalah IKU dan IK, dimana hal tersebut telah Spesifik (S), Terukur/Measurable (M), Memungkinkan untuk dicapai / Achievable (A) dan Realistis (R) serta waktu tertentu (1 tahun) / Time bound (T). Dengan demikian IKU dan IK dalam LKj telah memenuhi SMART.

Dumai, 24 Maret 2020.

TIM REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2019
BERDASARKAN SPT INSPEKTUR DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 81/SPT-INSP/2020 TANGGAL 16 MARET 2020

INSPEKTUR PEMBANTU I SELAKU DALNIS,



H. NOFIZAR
Pembina Tk. I
NIP. 19641109 198702 1 001

P2 MADYA PADA ITBAN I SELAKU KETUA TIM,



Ir. H. DWI ORISYAWAN PP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620423 198903 1 003

P2 MUDA SELAKU ANGGOTA



AMRI, S.Sos.
Penata Tk. I
NIP. 19760524 200112 1 006

AUDITOR PERTAMA SELAKU ANGGOTA



WAN DIANA SARI, S.Sos.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19831022 200604 2 011

AUDITOR PERTAMA SELAKU ANGGOTA



ROMMY KURNIAWAN, ST.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19831007 201001 1 024

P2 PERTAMA SELAKU ANGGOTA



SUSMIHAYATI, S.Si.
Penata Muda
NIP. 19800216 201503 2 003

AUDITOR PELAKSANA SELAKU ANGGOTA



EDWIN ACHMAD, A.Md.
Pengatur Tk. I
NIP. 19860105 201001 1 010

PENANGGUNG JAWAB
INSPEKTUR DAERAH,



SYAHRUL RIZAL, SH
Jaksa Utama Pratama
NIP. 19641218 199303 1 003

